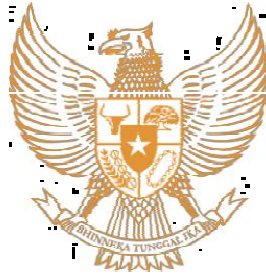




RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Pringsewu**



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2022 dan daerah otonom baru.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang perencanaan dan melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan serta mengharmoniskan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi dan program bupati yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. kesepakatan rapat koordinasi teknis Pembangunan Nasional Tahun 2025.
- (3) RKPD Tahun 2026, berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Tahun 2026.
- (4) Penyusunan RKPD Tahun 2026 diinput dan diproses ke dalam system informasi pemerintahan Daerah (SIPD).

Pasal 43

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2026 dan bahan evaluasi pembangunan Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

1. Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam RKPD.
2. Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah

yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD.

3. Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 5

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII : PENUTUP

2. RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

H.RIYANTO PAMUNGKAS

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
ANDI PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran I-10

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-11

BAB II GAMBARAN UMUM II-1

2.1 Kondisi Umum Daerah..... II-1

2.1.1 Aspek Geografi II-1

2.1.2 Aspek Demografi II-37

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-42

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum..... II-74

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan III Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Tahun 2017-2022 II-120

2.2.1 Urusan Wajib II-121

2.2.2 Urusan Pilihan II-135

2.3 Permasalahan Pembangunan II-209

2.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....II-218

BAB III KERANGKA EKONOMI III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-2

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-6

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-11

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-20
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan.....	IV-10
4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	IV-10
4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025	IV-12
4.2.3 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2025	IV-15
4.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	IV-16
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Kerangka Pendanaan	V-1
5.2 Program dan Kegiatan Prioritas	V-4
5.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Wajib Pelayanan	V-4
5.2.2 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V-6
5.2.3 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan	V-8
5.2.4 Program dan Kegiatan Urusan Penunjang	V-9
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025.....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.....	VI-4
BAB VII PENUTUP	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah untuk memastikan keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan adanya RKPD, diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

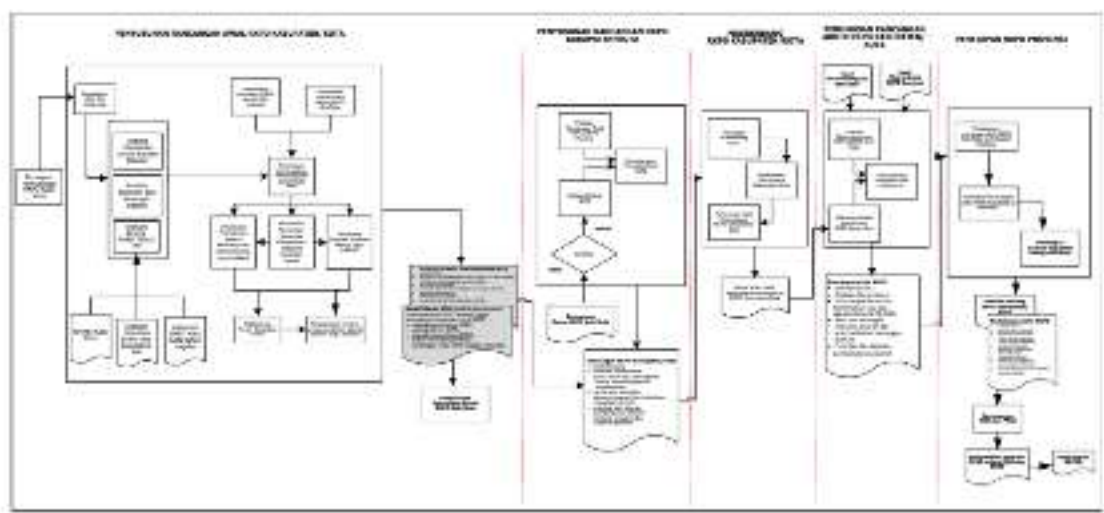
Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 disusun dengan merujuk pada berbagai dokumen perencanaan yang telah ada. Dokumen tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu. Selain itu, RKPD Tahun 2026 menjadi acuan utama dalam memastikan kesinambungan prioritas, kebijakan, serta arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 74, yang mengatur tahapan penyusunan RKPD mulai dari rancangan awal, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD, hingga tahap penetapan RKPD. Proses penyusunan ini mengadopsi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik yang menggunakan metode ilmiah dalam perencanaan, pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, pendekatan politis yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan pembangunan, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yang menyelaraskan perencanaan dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional melalui musyawarah pembangunan.

Selain itu, dalam orientasi substansi, penyusunan RKPD juga menggunakan beberapa pendekatan strategis. Pendekatan holistik-tematik mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling terkait, termasuk potensi, tantangan, dan hambatan yang ada. Pendekatan integratif bertujuan untuk menyatukan berbagai kewenangan dalam satu proses terpadu guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Sementara itu, pendekatan spasial memperhitungkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah agar lebih sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan wilayah.

Melalui berbagai pendekatan tersebut, RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, pembangunan di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1. 1. Skema Alur Penyusunan RKPD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu

Tahun 2026 adalah beberapa ketentuan yang mencakup sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 80) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
26. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 187);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
31. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD disusun sebagai hasil penerjemahan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Dalam RPJMD, termuat berbagai aspek perencanaan, termasuk kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program perangkat daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan yang didukung oleh regulasi dan pendanaan indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah selama satu tahun ke depan. Di dalamnya, disusun rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta perencanaan kerja dan pendanaan yang selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, penyusunan RKPD juga memperhatikan keterkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta program strategis nasional, sehingga memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan arah pembangunan nasional.

Dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 merupakan bagian dari sistem perencanaan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD dijabarkan dari RPJMD dan harus mengacu pada RKP, RPJMN, serta RPJPN. Selain itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah, Renstra perangkat daerah juga harus mengacu pada Renstra kementerian atau lembaga terkait di tingkat yang lebih tinggi.

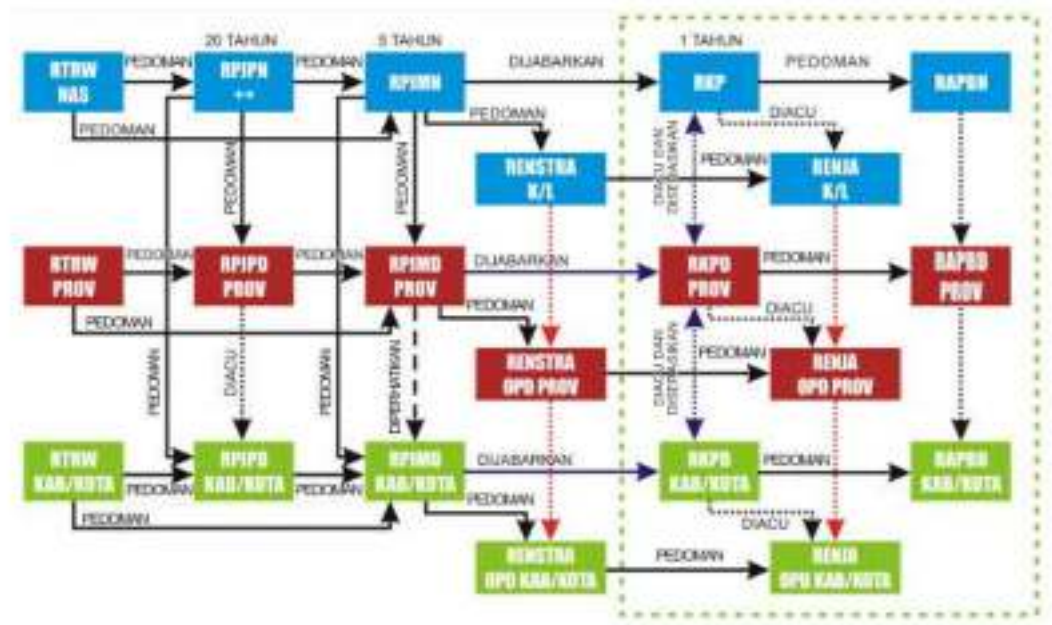
Dengan demikian, RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 merupakan bagian dari sistem perencanaan yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan. Dokumen perencanaan dengan cakupan waktu yang lebih panjang menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan dengan jangka waktu lebih pendek. Demikian pula, pada tingkat pemerintahan, dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat pemerintahan daerah.

Secara umum, hubungan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan dapat dijelaskan secara diagramatis sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana pembangunan Kabupaten Pringsewu ke dalam rencana prioritas, sasaran, dan program kegiatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang berada di tingkat yang lebih tinggi.
2. Sebagai instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Pringsewu dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
3. Menciptakan sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan yang melibatkan berbagai wilayah, kewenangan urusan pembangunan, serta antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan.
5. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yang memberikan arah strategis bagi pembangunan daerah, program pembangunan daerah, serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam satu tahun.

Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi panduan efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 2. Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan tahunan Kabupaten Pringsewu. Selain itu, RKPD berperan dalam menciptakan sinergi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, maupun Pemerintah Kabupaten Pringsewu, termasuk program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

B. Tujuan

Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2026.

C. Sasaran

Sasaran penyusunan dokumen RKPD ini yaitu :

1. Teridentifikasinya gambaran umum kondisi daerah;
2. Teridentifikasinya rancangan kerangka ekonomi daerah;
3. Teridentifikasinya kapasitas riil keuangan daerah;
4. Dirumuskannya rancangan awal renja perangkat daerah;
5. Dirumuskannya permasalahan pembangunan daerah;
6. Dirumuskannya sasaran dan arah kebijakan rencana pembangunan daerah;

7. Teridentifikasinya kebijakan pemerintah pada rkp dan program strategis nasional;
8. Dirumuskannya pokok-pokok pikiran dprd;
9. Dirumuskannya prioritas pembangunan daerah;
10. Dirumuskannya rencana kerja program dan pendanaan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen.
- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan.
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

- 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- 4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

- 1.1 Kerangka Pendanaan
- 1.2 Program dan Kegiatan Prioritas

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 6.1. Indikator Kinerja Utama
- 6.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII : Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas, dan Batas Administrasi

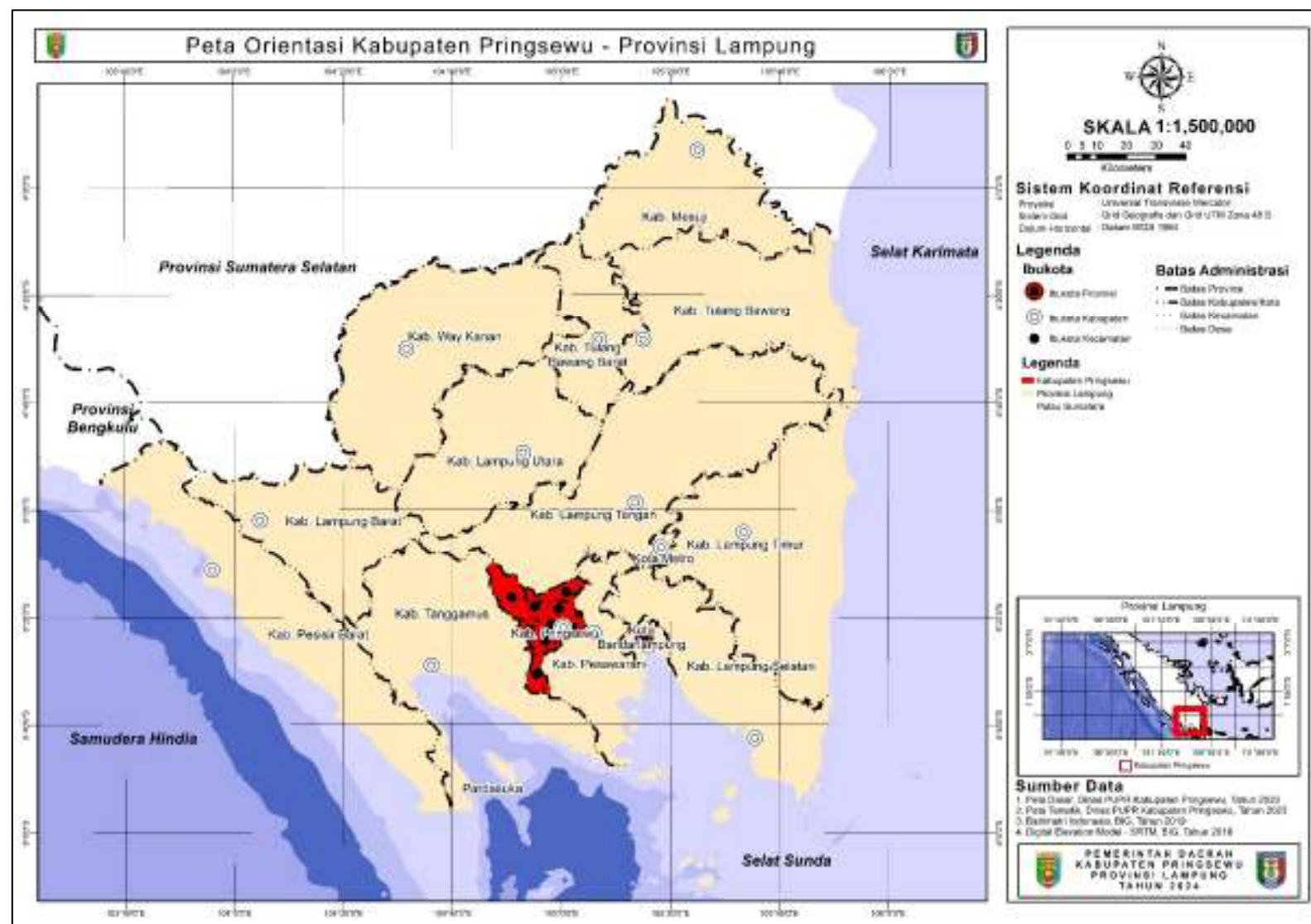
Secara geografis wilayah Kabupaten Pringsewu terbentang antara 104°46'16,91" - 105°5'52,33" Bujur Timur dan 5°9'24,92" - 5°34'35,10" Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Ketiga wilayah kabupaten tersebut, yaitu di sebelah utara wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Adapun peta orientasi wilayah Kabupaten Pringsewu dan peta wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Gambar 2.1** dan **Gambar 2.2**.

Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas sebesar 617,19 km². Secara administratif, Kabupaten Pringsewu terdiri atas 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang terbagi ke dalam 126 pekon (desa) dan 5 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pagelaran Utara dengan luas sekitar 158,19 km² atau 25,63% dari luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas sekitar 33,11 km² atau 5,36% dari luas keseluruhan Kabupaten Pringsewu. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Gadingrejo dengan jumlah 23 desa/kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Ambarawa dengan jumlah 8 (delapan) desa/kelurahan. Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Untuk mengetahui lebih jelas nama nama kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu berikut luas wilayah dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut ini.

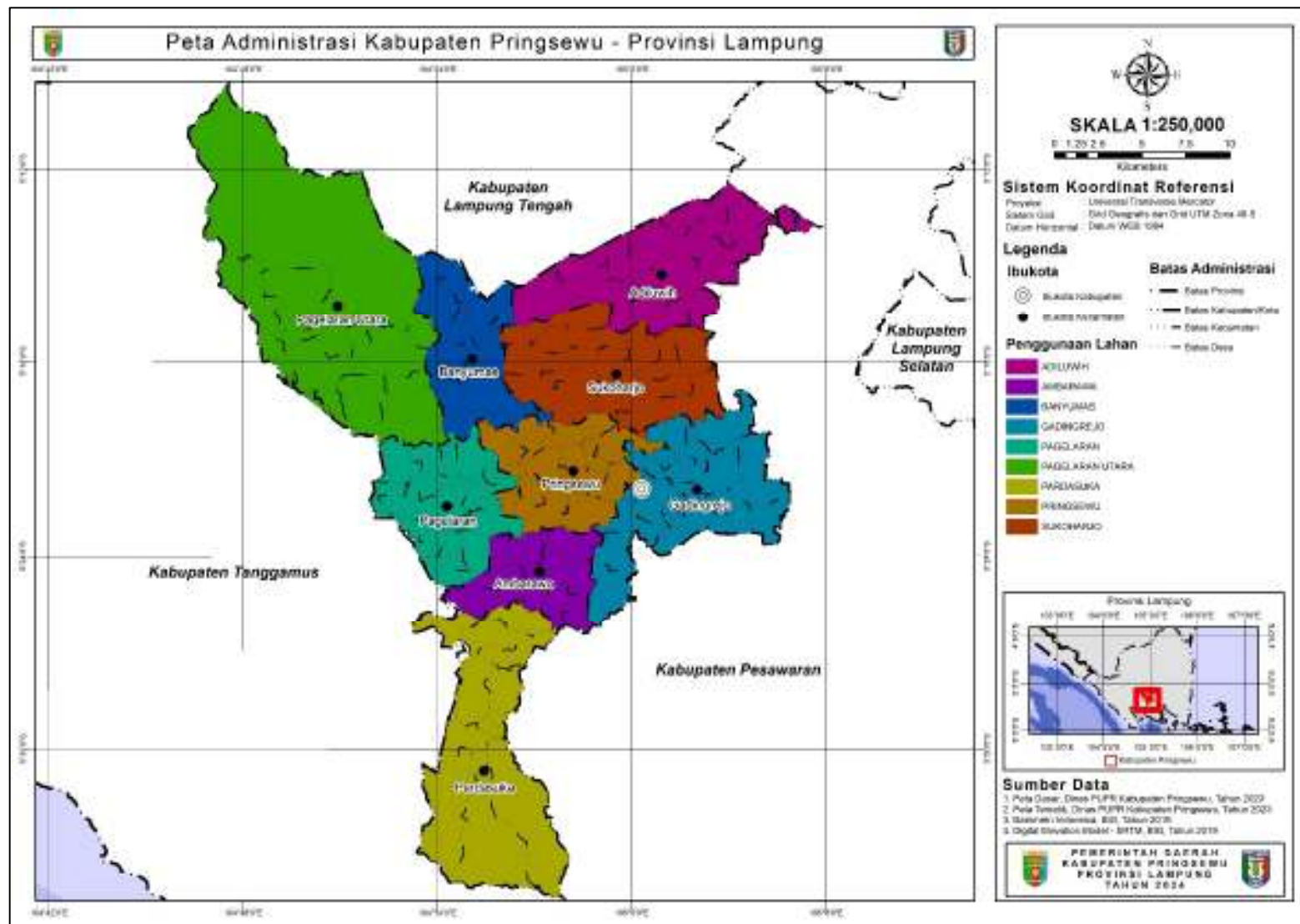
Tabel 2. 1. Luas Kecamatan dan Jumlah Pekon/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Jumlah Pekon/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Adiluwih	13	68,80	11,15%
2.	Ambarawa	8	33,11	5,36%
3.	Banyumas	11	42,71	6,92%
4.	Gadingrejo	23	67,79	10,98%
5.	Pagelaran	22	48,42	7,85%
6.	Pagelaran Utara	10	158,19	25,63%
7.	Pardasuka	13	87,31	14,15%
8.	Pringsewu	15	45,27	7,33%
9.	Sukoharjo	16	65,59	10,63%
Jumlah		131	617,19	100,00%

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042



Gambar 2. 1. Peta Orientasi Kabupaten Pringsewu



Gambar 2. 2. Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

B. Kondisi Geografis

Kondisi fisik geografis wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada wilayah yang dapat dikembangkan bagi pengembangan kawasan budidaya secara optimal. Wilayah ini berada pada ketinggian daerah yang masih dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman sebagaimana halnya yang dapat dikembangkan pada daerah tropis. Secara morfologi, wilayah ini juga memiliki topografi yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kawasan terbangun dan lahan pertanian serta perkebunan. Namun begitu perlu diperhatikan keberadaan kawasan hutan di bagian selatan dan barat laut, sebagai hulu aliran sungai, agar tidak menimbulkan bahaya bagi kawasan dibawahnya.

Kondisi ketinggian Kabupaten Pringsewu memiliki dominasi ketinggian 100-200 Mdpl tersebar di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Gadingrejo. Sementara itu kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu > 400 Mdpl berada pada Kecamatan Pardasuka dengan luas 2.604 hektar dan Kecamatan Pringsewu dengan luas 1.106,72 hektar.

C. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan tingkat kemiringan lahannya dapat dibedakan menjadi enam bagian yang bervariasi, mulai dari kelas lereng 0-8% sampai dengan diatas 40%. Dari hasil perhitungan penggunaan metode interpolasi dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan lahan datar, yang memiliki tingkat kelerengan 0-8% seluas kurang lebih 263,50 km² atau 42,69% dari luas Kabupaten Pringsewu. Lahan datar ini umumnya tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Sedangkan untuk lahan berbukit terjal, yang memiliki tingkat kelerengan diatas 25%, seluas kurang lebih 127,45 km² atau 20,65% dari luas Kabupaten Pringsewu. Lahan terjal ini terdapat di bagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di sebelah Barat Daya (Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas).

Sedangkan sisanya merupakan lereng berombak, yang memiliki tingkat kelerengan 8- 15% seluas kurang lebih 125,19 km² atau 20,28% dari luas Kabupaten Pringsewu dan didominasi pada wilayah Kecamatan Adiluwih.

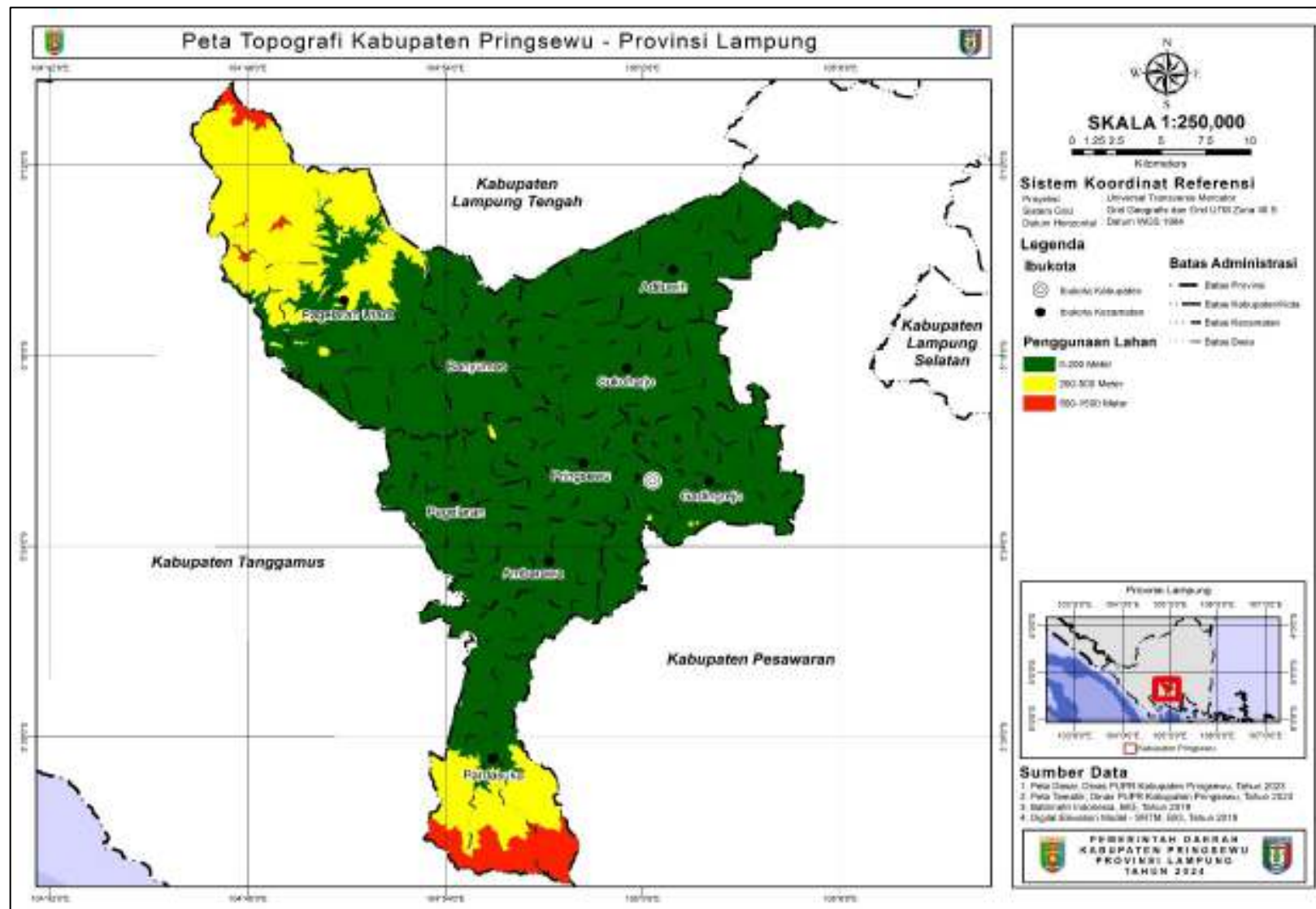
Kondisi topografi dan tingkat kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada **Tabel 2.2**, **Gambar 2.3**, dan **Gambar 2.4** berikut ini.

Tabel 2. 2. Luas Tingkat Kelerengan Lahan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kelas Lereng	Luas (km2)	Persentase
1.	0 - 3%	107,33	18,21
2.	3 - 8%	156,17	25,30
3.	8 - 15%	125,19	20,28
4.	15 - 25%	101,05	16,37
5.	25 - 40%	15,08	2,44
6.	> 40%	112,37	18,21
Jumlah		617.19	100.00

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

Ditinjau dari segi elevasi, berdasarkan hasil interpretasi data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), maka elevasi lahan di wilayah kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0 – 100 mdpl, 100 – 200 mdpl, 200 – 300 mdpl, 300 – 400 mdpl, dan diatas 400 mdpl. Elevasi lahan untuk kelas 0 – 100 meter hampir keseluruhan berada di setiap kecamatan kecuali Banyumas. Elevasi lahan untuk kelas 100 – 200 meter banyak ditemui di masing-masing kecamatan. Elevasi 200 – 300 meter hanya ditemui di kecamatan Pardasuka, Pagelaran dan banyumas. Sedangkan elevasi 300 – 400 meter hanya di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran. Untuk elevansi di I-8 atas 400 meter dpl merupakan daerah pegunungan yang banyak dijumpai di kecamatan Pardasuka dan Pagelaran Utara.



Gambar 2. 3. Peta Topografi Kabupaten Pringsewu

D. Geologi

Letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada muka bumi. Ditinjau dari geologi, di Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuartar. Formasi dalam hal ini adalah susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri yang nyata, baik dari satu macam jenis batuan maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di atas atau di bawah permukaan. Luasan masing-masing formasi geologis tersebut, tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan membentang membentuk satu kesatuan. Adapun formasi geologis secara lengkap di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Tabel 2.3.**

Tabel 2. 3. Luas Formasi Geologi Kabupaten Pringsewu

No.	Formasi	Luas (km²)	Persentase
1.	Granit Kapur (Kgr)	19,74	3,20
2.	Formasi Menanga (Km)	2,93	0,47
3.	Diorit Sekampung Terdaunkan (Kds)	4,66	0,76
4.	Formasi Gading (Tomg)	4,01	0,65
5.	Formasi Hulusimpang (Tomh)	43,00	6,97
6.	Aluvium (Qa)	50,01	8,10
7.	Kompleks Gunung Kasih (Pzg)	197,30	31,97
8.	Batuan Gunungapi Kuartar Muda (Qhv)	45,25	7,33
9.	Formasi Lempung (Qtl)	250,29	40,55
Jumlah		617,19	100,00

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2042

Potensi formasi geologis terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Lempung (Qtl) dengan luas kurang lebih sebesar 250,29 km² atau

sebesar 40,55% yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Potensi formasi geologis terbesar kedua adalah formasi Kompleks Gunung Kasih (Pzg) dengan luas sebesar kurang lebih 197,30 km² atau sekitar 31,97% yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Pardasuka. Sedangkan potensi formasi geologis terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah formasi Menanga (Km) dengan luas hanya sebesar 2,93 km² atau hanya sebesar 0,47% yang berada di Kecamatan Ambarawa. Kemudian ditinjau dari pembagian fisiografi maka wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dibagi kedalam empat jenis tanah terdiri dari aluvial, andosol, granit, dan kuarsit. Jenis tanah dan luasannya dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini.

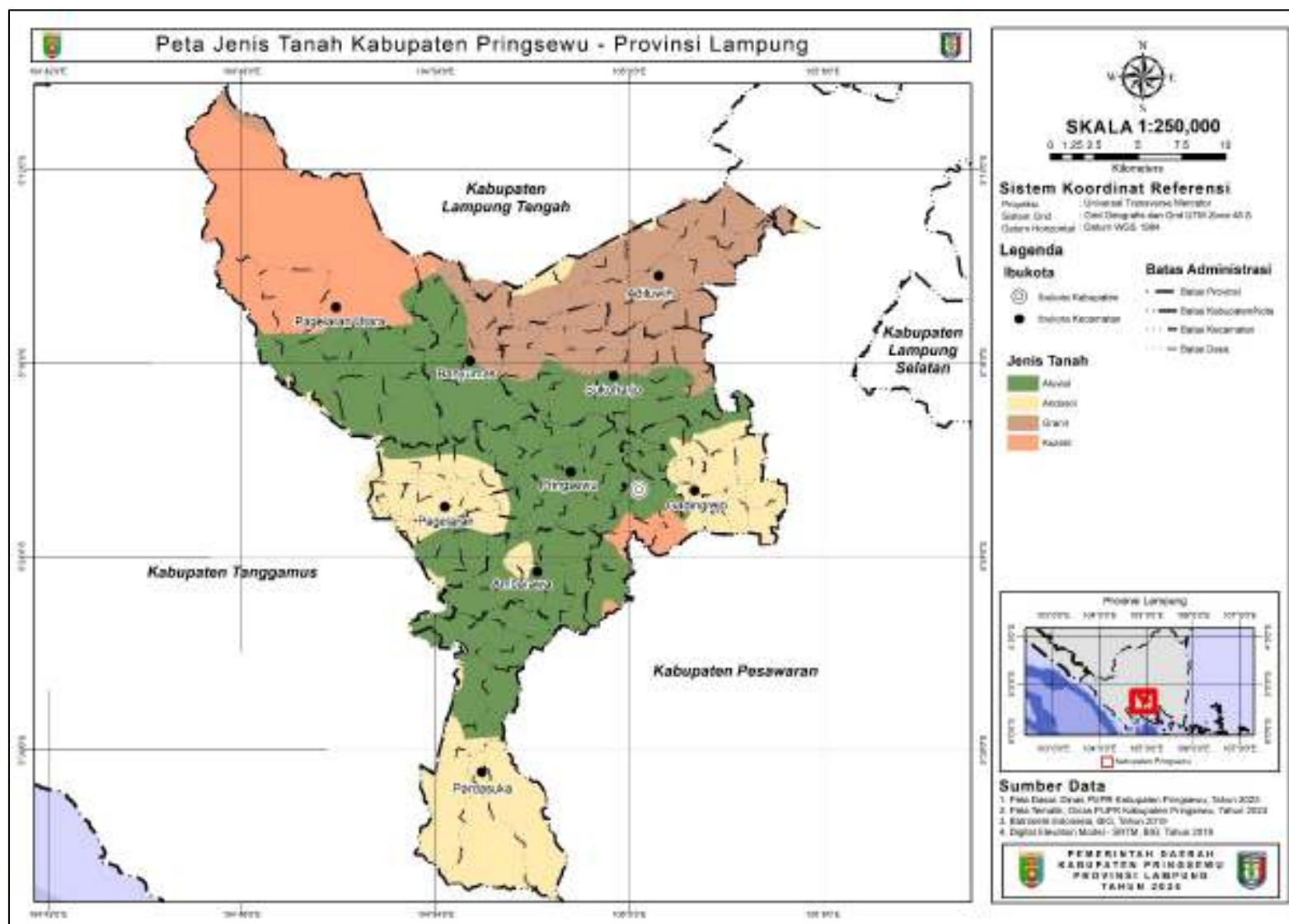
Tabel 2. 4. Luas Karakteristik Tanah Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Luas Grup Fisiografi (km ²)				Luas (km ²)	Persentase
		Aluvial	Andosol	Granit	Kuarsit		
1.	Pardasuka	31,170	56,142	0,000	0,000	87,312	14,15
2.	Ambarawa	30,506	25,965	0,000	0,001	33,104	5,36
3.	Pagelaran	18,867	29,557	0,000	0,000	48,424	7,85
4.	Pringsewu	44,338	9,325	0,000	0,000	45,271	7,33
5.	Gadingrejo	26,643	32,653	0,000	8,492	67,789	10,98
6.	Sukoharjo	31,105	0,000	34,487	0,000	65,593	10,63
7.	Banyumas	28,891	0,000	12,327	1,489	42,706	6,92
8.	Adiluwih	0,000	0,000	68,803	0,000	68,803	11,15
9.	Pagelaran Utara	53,368	0,000	2,386	102,437	158,192	25,63
Jumlah		264,890	121,882	118,004	112,41	617,195	100,00
Persentase		42,92	19,75	19,12	18,12	100,00	

Sumber: Peta Dasar RTRW Kabupaten Pringsewi 2022-2024

Dari **Tabel 2.4** dapat diketahui persebaran jenis tanah di Kabupaten Pringsewu yang terluas adalah aluvial dengan luas sebesar kurang lebih 264,890 km² atau sekitar 42,92% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Kelompok fisiografis dataran tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Jenis tanah aluvial pada umumnya terdapat di dataran rendah, hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Pringsewu

didominasi dataran rendah. Pada jenis tanah ini hamparan terluas berada di Kecamatan Pagelaran Utara seluas kurang lebih 52,268 km². Sementara jenis tanah dengan luasan terkecil di Kabupaten Pringsewu adalah kuarsit dengan luasan kurang lebih 112,419 km² atau sekitar 18,21% dari total luasan Kabupaten Pringsewu. Jenis tanah kuarsit pada umumnya memiliki lapisan tanah dan vegetasi yang tipis atau tidak ada sama sekali karena tingkat kekerasan dan sifat ketahanan kimianya. Pada Kabupaten Pringsewu jenis tanah kuarsa paling besar terdapat di Kecamatan Pagelaran Utara dengan luasan kurang lebih 102,437 km².



Gambar 2. 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pringsewu

E. Hidrologi

Seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu terletak dalam DAS Sekampung dan Sub DASnya terletak dalam beberapa Sub-DAS yaitu :

1. Sub DAS Way Sekampung Anak, dengan luas 12.575,90 Ha (20,12%)
2. Sub DAS Way Bulok, dengan luas 15.144,96 Ha (24,23%)
3. Sub DAS Way Semah, dengan luas 2.209,20 Ha (3,53%)
4. Sub DAS Mreabung Ilahan Suka, dengan luas 20.081,02 Ha (32,12%)
5. Sub DAS Way Tebu, dengan luas 12.498,92 Ha (20,00%)



Gambar 2. 6. Bendungan Way Sekampung

Sumber: Saibumi.com, 2024

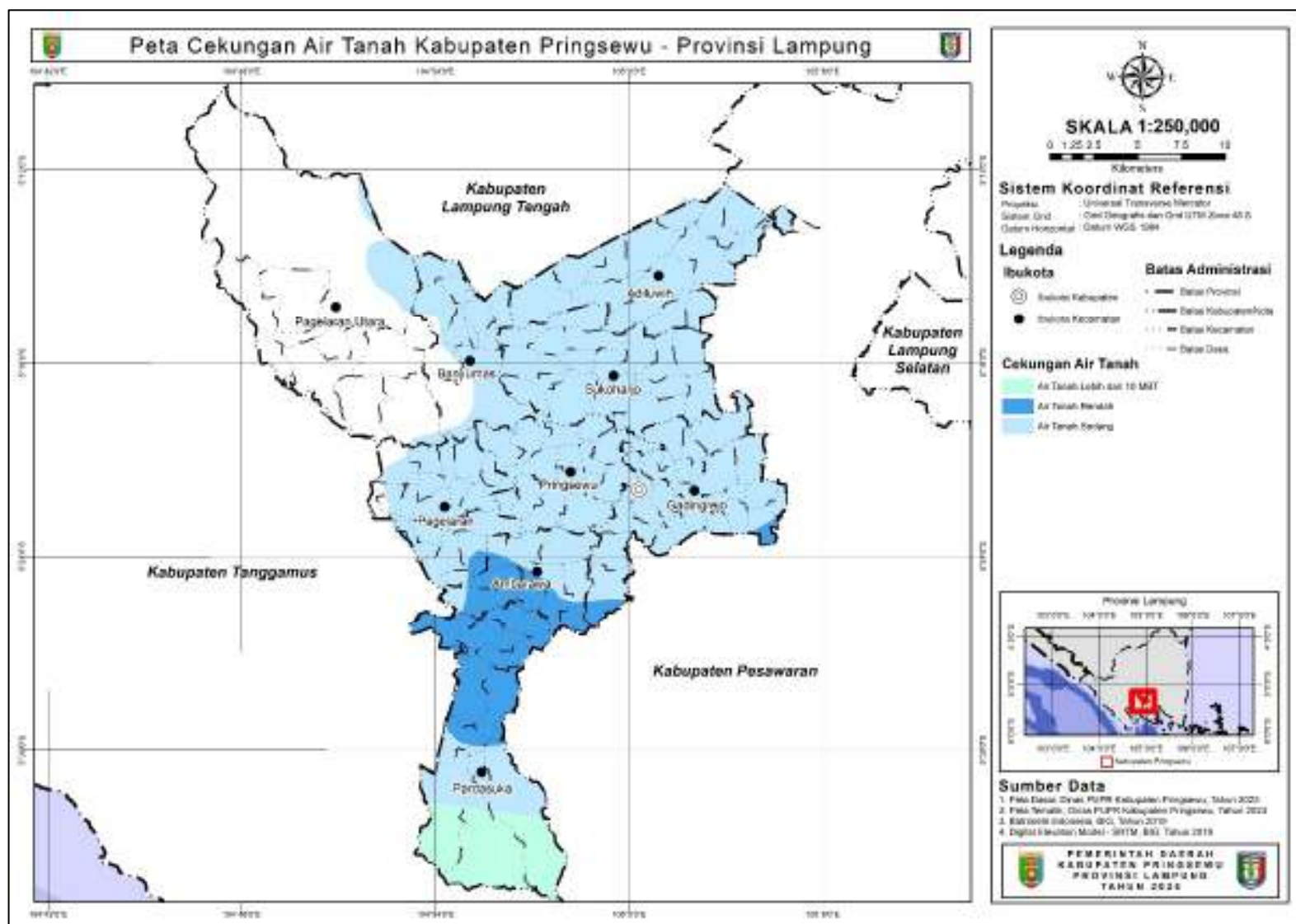
Menurut data BPS dalam Pringsewu Dalam Angka 2017 diketahui bahwa Kabupaten Pringsewu dilintasi aliran sungai dan anak sungai sebagai berikut :

1. Way Sekampung Bagian Tengah, dengan panjang 24 km dan daerah aliran 600 km² ;
2. Way Gading, dengan panjang 7 km dan daerah aliran 56 km²;
3. Way Apus, dengan panjang 6,8 km dan daerah aliran 5.440 km²;
4. Way Wonokoro, dengan panjang 8,8 km dan daerah aliran 7.040 km² ;
5. Way Wayah, dengan panjang 19 km dan daerah aliran 380 km² ;
6. Way Sangsep, dengan panjang 17 km dan daerah aliran 225 km² ;
7. Way Marga Harjo, dengan panjang 2,5 km dan daerah aliran 15 km².

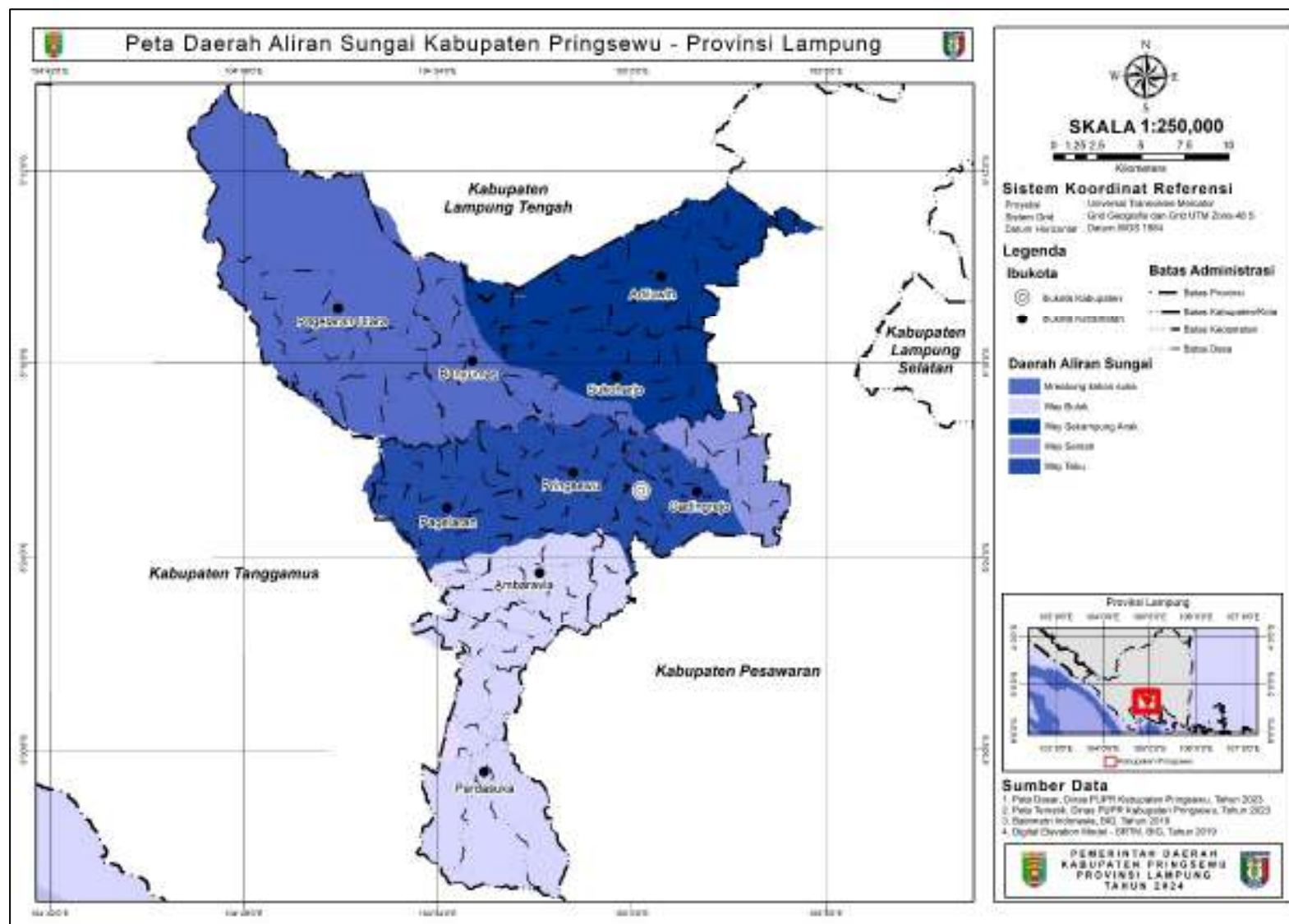
Potensi hidrologi lain yang berada di Kabupaten Pringsewu adalah Cekungan Air Tanah (CAT). CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah merupakan dasar pengelolaan air tanah yang dilakukan secara

RKPD Tahun 2026

terpadu dalam pengembangan sumber daya air sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah. Di Kabupaten Pringsewu cekungan air tanah berupa CAT Metro-Kota Bumi yang berada pada wilayah Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Pringsewu, Gadingrejo, Ambarawa, serta sebagian Kecamatan Pagelaran, dan Pardasuka seperti pada Gambar. Potensi sedang, dengan debit mata air kecil, $< 5 \text{ ltr/dtk}$, kapasitas jenis sumur yang menyadap akuifer dalam adalah $60 \text{ ltr/menit per m surutan}$ (*drawdown*).



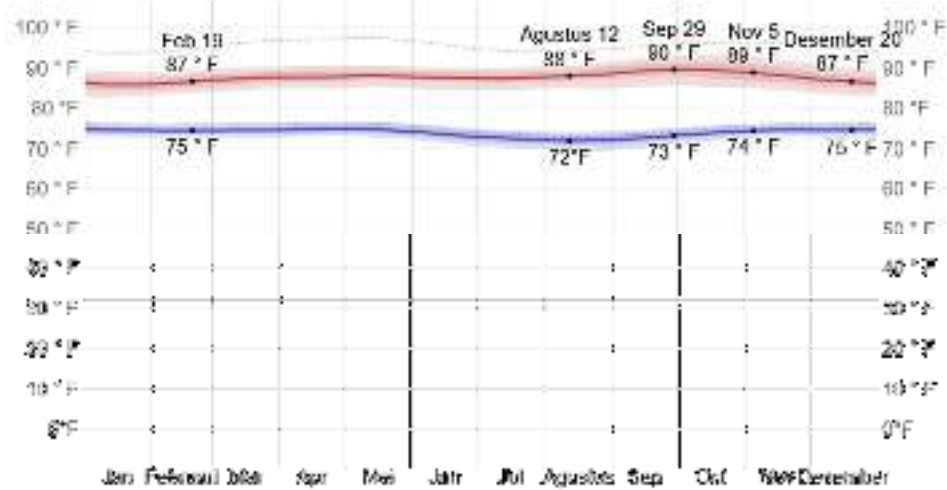
Gambar 2. 7. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Pringsewu



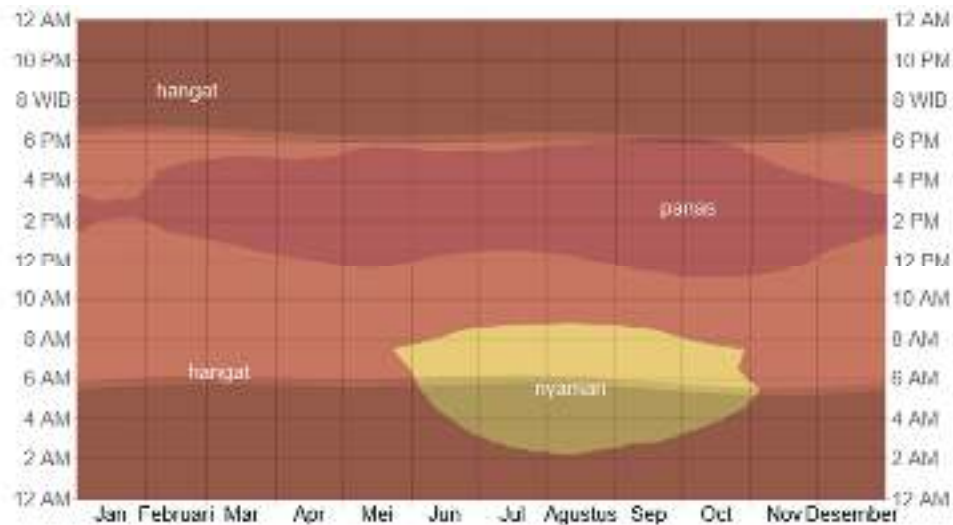
Gambar 2. 8. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pringsewu

F. Klimatologi

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Pringsewu termasuk tropis basah. Sepanjang tahun, suhu di Kabupaten Pringsewu bervariasi dari 22°C hingga 32°C dan jarang di bawah 21°C atau di atas 34°C. Kondisi agroclimatic ini menunjukkan bahwa iklim di wilayah Kabupaten Pringsewu pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. Adapun grafik fluktuasi suhu di Kabupaten Pringsewu sepanjang tahun dan suhu per jam pada setiap harinya dapat dilihat pada **Gambar 2.9** dan **Gambar 2.10** berikut ini.



Gambar 2. 9. Rata-Rata Suhu di Kabupaten Pringsewu
Sumber: weatherspark.com, 2025



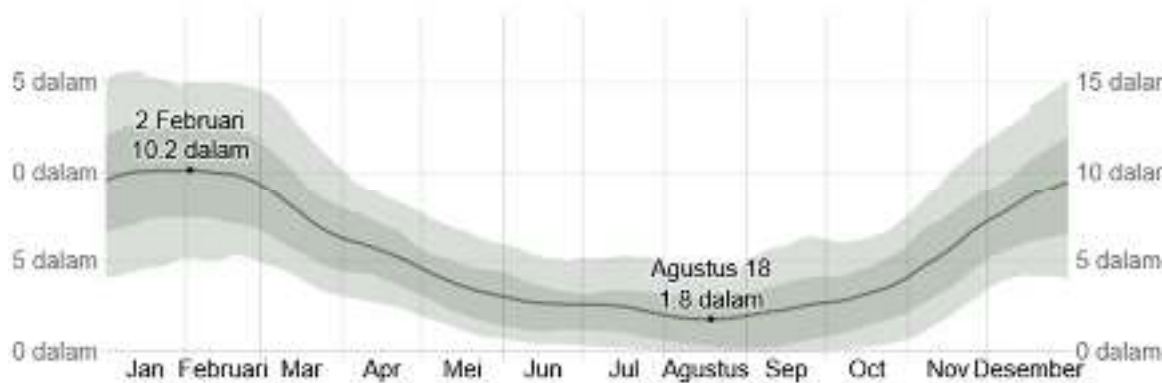
Gambar 2. 10. Suhu rata-rata per Jam di Kabupaten Pringsewu
Sumber: weatherspark.com, 2025

Hari hujan di Kabupaten Pringsewu juga bervariasi sepanjang tahun. Hari hujan terbanyak dalam 1 (satu) bulan di Kabupaten Pringsewu adalah 15 hari yaitu terjadi pada bulan Januari. Pada tahun ini, Kabupaten Pringsewu mengalami variasi musiman yang cukup ekstrim dalam curah hujan bulanan. Januari merupakan bulan dengan curah hujan paling

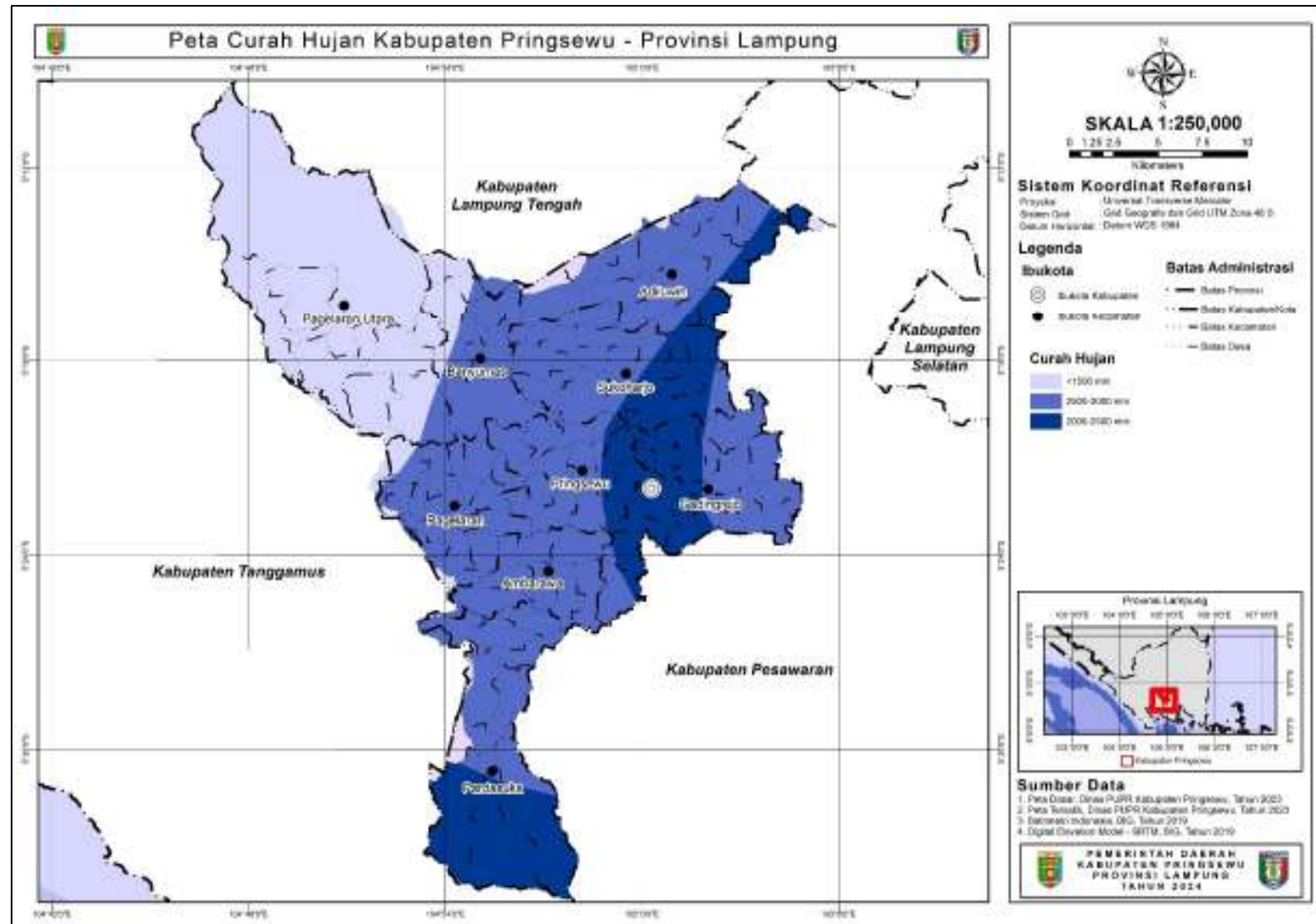
tinggi di Pringsewu, dengan curah hujan rata-rata 10.1 inch atau sekitar 256,54 mm/bulan. Sedangkan bulan dengan hujan paling sedikit di Pringsewu yaitu Agustus, dengan curah hujan rata-rata 1.8 inch atau sekitar 45,72 mm/bulan. Adapun peluang presipitasi dan curah hujan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada **Gambar 2.11** dan **Gambar 2.12** berikut ini.



Gambar 2. 11. Peluang Presipitasi Harian di Kabupaten Pringsewu
Sumber: weatherspark.com, 2025



Gambar 2. 12. Rata-rata Curah Hujan Bulanan di Kabupaten Pringsewu
Sumber: weatherspark.com, 2025

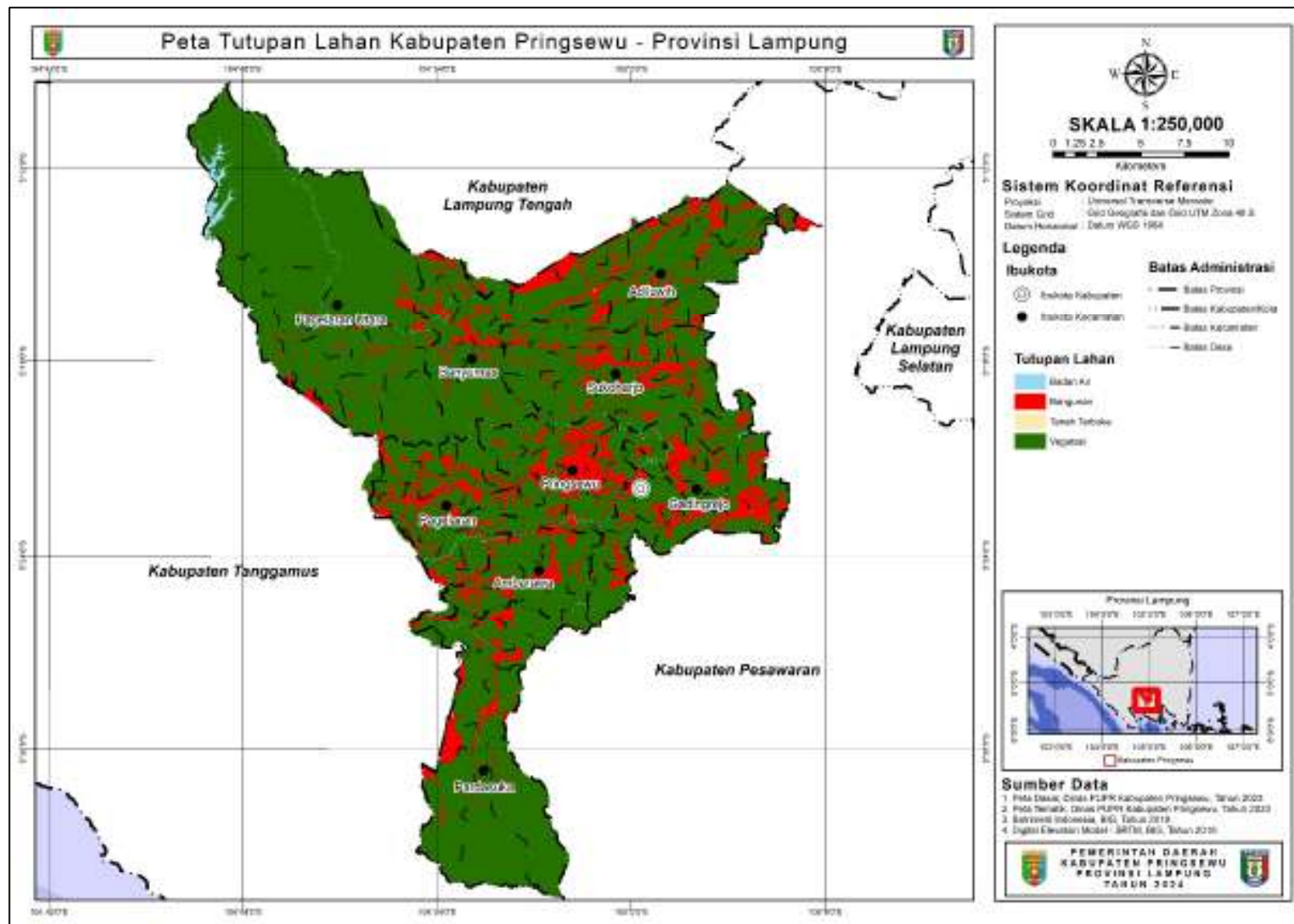


Gambar 2. 13. Peta Curah Hujan Kabupaten Pringsewu

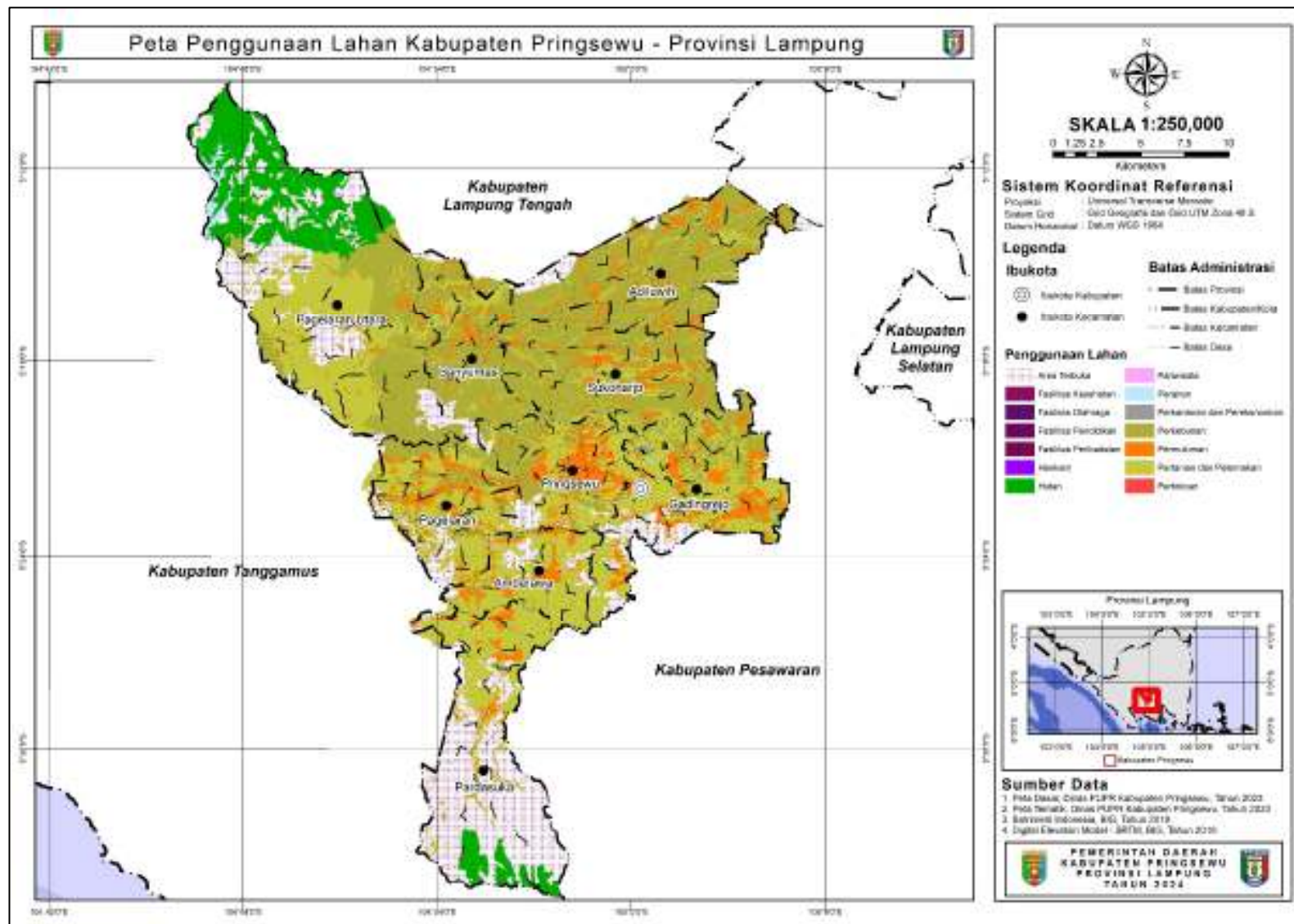
G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 Ha atau sebesar 27,56%. Dari luas lahan yang digunakan untuk tegalan, 31,95% berada di Kecamatan Adiluwih. Sedangkan sisanya tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Selain digunakan sebagai tegalan, sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu juga digunakan sebagai lahan sawah, tetapi luasan lahan yang digunakan sebagai sawah tersebut masih dibawah lahan tegalan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah adalah seluas 12.197 Ha atau sebesar 19,51%, sedangkan sisanya digunakan sebagai lahan perkebunan seluas 11.989 Ha atau 19,18%, hutan seluas 12.975 Ha atau 17,01%, permukiman seluas 9.547 Ha atau 15,27%, dan belukar seluas 917 Ha atau 1,47%. Hal ini seperti tercantum dalam **Gambar 2.15**.

Secara umum Kabupaten Pringsewu dilihat dari tutupan lahannya seperti pada **Gambar 2.14**. merupakan kawasan pertanian dan perkebunan dengan luasan sekitar 40.890 Ha atau sekitar 66,25%. Dimana luasan lahan sawah terbesar berada di Kecamatan Gadingrejo, luasan lahan Kebun terbesar berada di Kecamatan Pagelaran, dan luasan lahan Tegalan terbesar berada di Kecamatan Adiluwih. Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan, tutupan lahan di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh vegetasi yang secara eksisting berupa semak, pertanian, dan perkebunan. Pada tutupan lahan terbangun, didominasi oleh permukiman dan perdagangan/jasa. Pada badan air didominasi karena adanya danau, sungai, dan bendungan.



Gambar 2. 14. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Pringsewu



Gambar 2. 15. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pringsewu

2.1.1.2 Potensi Kawasan Sumber Daya

Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Pringsewu yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu Yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Sejahtera” dan selaras dengan visi penataan ruang Kabupaten Pringsewu yaitu “Mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan perekonomian Wilayah yang maju dan berwawasan lingkungan dengan sektor basis pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing”, tentunya Kabupaten Pringsewu memiliki kekhasan kondisi yang berbeda dengan daerah lainnya dan berpotensi menjadi salah satu kabupaten yang unggul di Provinsi Lampung.

Secara umum, wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan kondisi lahan budidaya non-terbangun masih sangat luas, dimana kawasan pertanian dan perkebunan serta ruang terbukanya memiliki luas sekitar 66,25% dari total luas wilayah secara keseluruhan. Hal ini menjadi potensi yang akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, karena sebagai kawasan baru berkembang yang ingin memacu tingkat pertumbuhan ekonominya, sangat membutuhkan lahan yang dapat dikembangkan.

Secara geografis alami, wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada wilayah yang dapat dikembangkan bagi pengembangan kawasan budidaya secara optimal. Wilayah ini berada pada ketinggian daerah yang masih dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman sebagaimana halnya yang dapat dikembangkan pada daerah tropis. Secara morfologi, wilayah ini juga memiliki topografi yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kawasan terbangun dan lahan pertanian serta perkebunan. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu keberadaan kawasan hutan di bagian selatan dan barat laut yang memiliki fungsi sebagai hulu aliran sungai. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Pringsewu tidak menimbulkan bahaya bagi kawasan dibawahnya.

Berdasarkan sistem pengembangan wilayah, Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Lampung. Kondisi ini tidak terlepas dari Kabupaten Pringsewu memiliki prasarana dan sarana perekonomian wilayah skala regional. Secara perekonomian wilayah, Kabupaten Pringsewu masih ditopang oleh kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memberikan sumbangan

terbesar terhadap perekonomian daerah sekitar 45,51%. Hal ini sejalan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (primer). Namun pada masa mendatang hal tersebut tentu saja dapat bertransformasi atau menjalar ke sektor lainnya mengingat bahwa angka pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersier menunjukkan tren positif dan cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan bergesernya pola mata pencaharian dan struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu dari yang semula berorientasi pada pertanian menjadi berorientasi pada non-pertanian seperti perdagangan, jasa, retail, atau industri. Kondisi tersebut tentunya akan merubah karakter wilayah dari pedesaan menjadi perkotaan. Hal ini perlu diakomodir dengan rencana fisik berupa rencana tata ruang wilayah.

Dalam upaya mencapai terwujudnya visi dan tujuan pembangunan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kebijakan dan langkah strategi yang dapat ditempuh sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan ruang wilayah kedepannya. Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan penataan ruang meliputi kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten, dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Strategis.

Pengembangan sistem pusat permukiman atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, pengaturan distribusi sistem kota kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk dan potensi dan kegiatan ekonominya (strategi mikro) juga diperlukan suatu pengelolaan individual kota atau daerah perkotaan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas (strategi makro). Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota ibukota kecamatan, dan kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang wilayah. Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Adapun pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Pringsewu

RKPD Tahun 2026

berikut fungsi pelayanannya selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada uraian dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. Ambarawa, Gadingrejo, Sukoharjo, dan Pagelaran akan dikembangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
3. Adiluwih Pagelaran Utara, Banyumas dan Pardasuka akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Sedangkan berdasarkan karakteristik dan lokasi wilayah Kabupaten Pringsewu, sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2042, pengembangan wilayah atau kawasan budidaya mencakup bidang budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Pengembangan kawasan budidaya tersebut, menjadi pedoman dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan dan pedoman bagi para investor yang akan menanamkan sahamnya. Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang terletak pada wilayah Kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah Kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. yang terdapat di Kabupaten Pringsewu meliputi kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana.

1. Badan Air

Badan air di Kabupaten Pringsewu terdiri dari sungai dan waduk dengan total luasan sebesar kurang lebih 728 Hektar dengan luasan terbesar berupa Sungai Way Sekampung dan Bendungan Way Sekampung. Sungai dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pringsewu ini berada di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terdapat di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 3). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 joSK.6618/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020, kawasan hutan lindung di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- a. Sebagian Hutan Lindung Register 21 Perentian Batu (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pardasuka) seluas kurang lebih 3.014 Hektar.
- b. Sebagian Hutan Lindung Register 22 Way Waya (yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas) seluas kurang lebih 10.025 Hektar.

Luasan total kawasan hutan lindung di Kabupaten Pringsewu kurang lebih seluas 13.039 Hektar atau sebesar 21,13% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Kriteria Penentuan Kawasan Lindung adalah:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah, dan curah hujan dengan nilai skor lebih dari 125; dan/atau
 - b. Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lapangan 40% atau lebih dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi dengan kemiringan lebih dari 25%; dan/atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih diatas permukaan laut.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu adalah berupa kawasan sempadan sungai yaitu adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan

budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai yang berada di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Pagelaran Utara.

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pringsewu memiliki luas lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan adalah sekitar kurang lebih 23.307 Hektar atau sekitar 37,76% dari total luas wilayah Kabupaten Pringsewu. Lahan yang berpotensi tersebut tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu. Hal tersebut dimungkinkan mengingat bahwa pada topografi wilayah di Kabupaten Pringsewu sebagian besar adalah relatif datar dan landai, sehingga sangat mendukung tersedianya ruang untuk pengembangan pertanian pangan.

Kawasan tanaman pangan sebagai bagian dari kawasan pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki luas kurang lebih 12.168 Hektar berada di seluruh Kecamatan. Sementara kawasan hortikultura yang juga merupakan bagian dari kawasan pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki luas kurang lebih 4.479 Hektar berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Sukoharjo. Kawasan pertanian lain di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 6.660 hektar berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo.

Pengembangan pertanian pangan pada masa mendatang diarahkan untuk tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kebijakan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu. Meskipun perkembangan kegiatan perkotaan diprediksi akan berlangsung pesat, namun pertimbangan bahwa daerah ini menjadi salah satu lumbung pangan baik untuk Kabupaten Pringsewu, akan membatasi pengembangan karakter perkotaan di wilayah ini kedepannya. Berbagai kegiatan karakter perkotaan akan dipertimbangkan pengembangannya apabila telah bersinggungan dengan pemanfaatan ruang lahan pertanian yang akan diarahkan untuk dipertahankan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat erat hubungannya dengan ketahanan pangan. Dimana pada zaman sekarang ini ketahanan pangan tidak lagi dapat dipenuhi hanya berdasarkan usaha perorangan atau per keluarga, melainkan dicapai melalui usaha-usaha kolektif. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Lokasi lahan sawah abadi ditetapkan pada setiap lahan sawah yang pada saat ini diairi oleh sistem irigasi teknis maka sampai dengan 20 tahun mendatang akan dipertahankan sebagai lahan sawah. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan serta perkembangan sarana dan prasarana perkotaan di Kabupaten Pringsewu berdampak pada meningkatnya dinamika penggunaan lahan. Konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan salah satu penyebab semakin berkurangnya luas sawah. Dengan demikian sebelum dilakukan konversi harus dilakukan pengkajian-pengkajian yang dapat menekan lebih tingginya alih fungsi lahan. Untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang pengembangan pertanian pangan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan peternakan dan perikanan. Dimana berdasarkan luasan lahan sawah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu direncanakan sampai dengan tahun 2031 luasan tersebut tidak berkurang terkecuali di Kecamatan Pringsewu.

Untuk meningkatkan produksi dimasa yang akan datang pengembangan pertanian pangan dilakukan secara terpadu dengan kegiatan peternakan dan perikanan. Dimana berdasarkan luasan lahan sawah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pringsewu direncanakan sampai dengan tahun 2031 luasan tersebut tidak berkurang terkecuali di Kecamatan Pringsewu.

2. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan perikanan budidaya yang difokuskan berada di Kecamatan Pagelaran seluas kurang lebih 651 Hektar. Dimana kawasan perikanan ini merupakan kawasan strategis minapolitan untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pagelaran. Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan perlu dikembangkan khususnya pada

RKPD Tahun 2026

kawasan minapolitan tersebut yang terdapat di Kecamatan Pagelaran. Hal tersebut diimbangi dengan pengembangan kawasan minapolitan dengan komoditas ikan lele, ikan mas, ikan gurame, ikan nila, ikan karper, ikan tawes, maupun ikan air tawar lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

3. Kawasan Pertambangan dan Energi

Berdasarkan data yang terdapat pada geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, di Kabupaten Pringsewu terdapat kawasan pertambangan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah keluar berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 236 Hektar yang berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, dan Kecamatan Sukoharjo. Kegiatan pertambangan yang dilakukan harus dilakukan melalui praktek pertambangan yang ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi terjadinya dampak kerusakan lingkungan dan harus melakukan perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang.

4. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pringsewu terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata di Kabupaten Pringsewu. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Pringsewu tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Pringsewu. Berikut jenis pariwisata yang direncanakan akan menjadi sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Pringsewu. Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Kawasan Pariwisata alam meliputi Bukit Pangonan Talang Indah Pajaresuk di Kecamatan Pringsewu, Bukit Tursina Bumiarum di Kecamatan Pringsewu, dan Talang Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran.
- b. Kawasan Pariwisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gadingrejo, Makam Kyai Haji Gholib di Kecamatan Pringsewu, Goa Maria Padang Bulan di Kecamatan Pringsewu, Rumah Adat Marga Kaya di Kecamatan Pringsewu dan Rumah Adat Saibatin di Kecamatan Pardasuka.

5. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pengembangan kawasan permukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk permukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

- a. Memiliki sumber air yang terjamin keberlanjutannya.
- b. Aksesibilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
- c. Dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi-sosial.
- d. Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/ telepon, air bersih dan sebagainya.
- e. Risiko bencana alam kecil.
- f. Sedapat mungkin menghindari alih fungsi lahan sawah irigasi teknis (lahan pertanian pangan berkelanjutan).

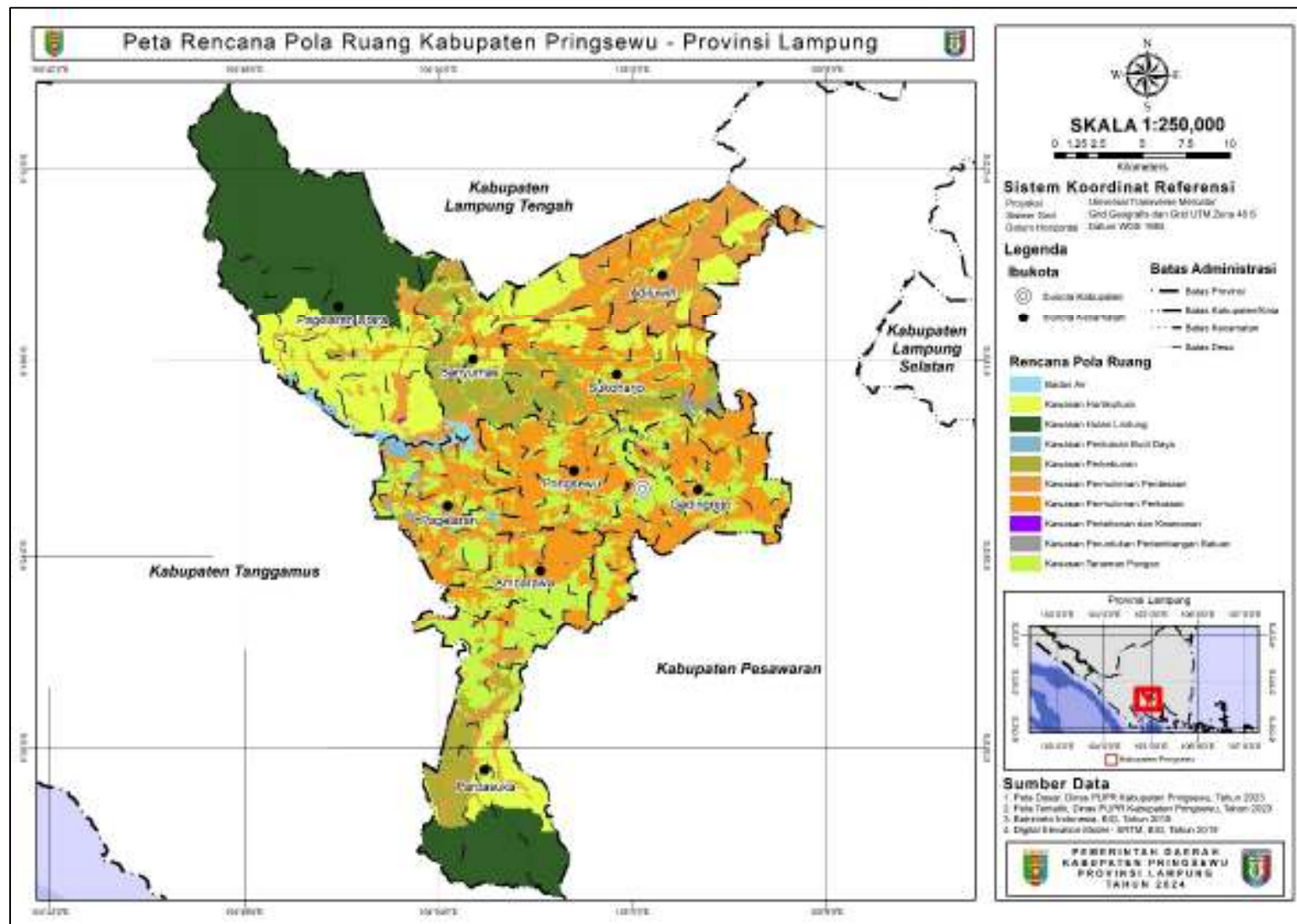
Pola pengembangan perumahan/permukiman diselaraskan dengan pola ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjadi alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan permukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin tingginya tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengembangan kawasan permukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk permukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan permukiman. Identifikasi kawasan dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan permukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan permukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Kawasan permukiman di Kabupaten Pringsewu terdiri dari kawasan permukiman perkotaan yang berada di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 17.616 Hektar dan kawasan permukiman pedesaan dengan luas kurang lebih 6.010 Hektar berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, dan Kecamatan Sukoharjo.

6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021, di Kabupaten Pringsewu terdapat kawasan pertahanan dan keamanan berupa:

- a. Kepolisian Resor Pringsewu dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar berada di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu.
- b. Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar berada di Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran Utara, dan Kecamatan Pringsewu.
- c. Kepolisian Sektor terdiri atas Kepolisian Sektor Gadingrejo di Kecamatan Gadingrejo, Kepolisian Sektor Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Kepolisian Sektor Pardasuka di Kecamatan Pardasuka, Kepolisian Sektor Pringsewu Kota di Kecamatan Pringsewu, dan Kepolisian Sektor Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo.
- d. Komando Rayon Militer terdiri atas Komando Rayon Militer 424 05/Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Komando Rayon Militer 424 06/Pringsewu di Kecamatan Pringsewu, Komando Rayon Militer 424 07/Gadingrejo di Kecamatan Gadingrejo, Komando Rayon Militer 424 09/Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo, dan Komando Rayon Militer 424-10/Pardasuka di Kecamatan Pardasuka.



Gambar 2. 17. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pringsewu

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

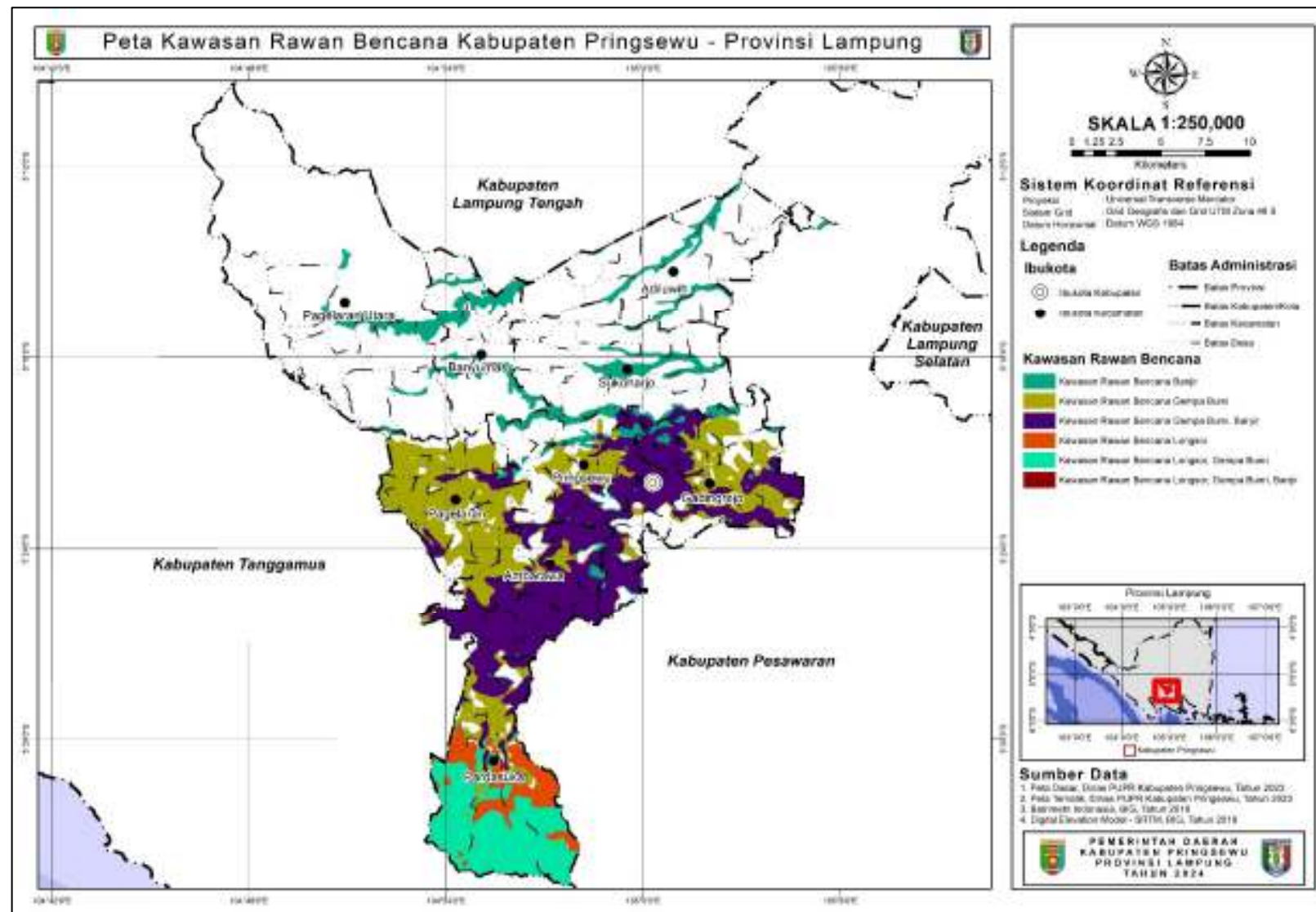
Wilayah yang rentan terhadap bencana merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Karakteristik ini berfungsi sebagai penghalang bagi upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta mengurangi efektivitas respons terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh bahaya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, implementasi mitigasi bencana menjadi sangat krusial; ini mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana—baik yang bersumber dari alam, ulah manusia, atau kombinasi keduanya—terhadap masyarakat di kawasan yang berisiko. Di Kabupaten Pringsewu, kawasan rawan bencana menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan lokasi pembangunan permukiman.

Ada empat aspek kunci dalam mitigasi bencana yang perlu diperhatikan: pertama, ketersediaan informasi dan peta yang mengidentifikasi kawasan rawan bencana untuk setiap kategori; kedua, sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi potensi bencana; ketiga, pengetahuan tentang tindakan yang harus diambil atau dihindari, serta cara-cara penyelamatan diri saat bencana terjadi; dan keempat, perencanaan dan pengaturan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman yang ada. Penanganan bencana dapat dibagi menjadi empat fase: mitigasi, kesiapan, respons, dan pemulihan.

Berdasarkan analisis kebencanaan, sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada tingkat kerawanan bencana yang relatif rendah. Untuk mengantisipasi potensi risiko, pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan, serta penggunaan teknologi bangunan yang tahan bencana dan material dengan dampak lingkungan yang minimal, sangat dianjurkan. Di Kabupaten Pringsewu, ancaman bencana mencakup risiko banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Pringsewu terdiri dari:

- a. Kawasan rawan banjir, terutama yang terletak di sekitar bantaran Sungai Way Sekampung, meliputi Kecamatan Pagelaran, Banyumas, Sukoharjo, dan Gadingrejo;
- b. Kawasan rawan tanah longsor, yang banyak terjadi di Kecamatan Pagelaran, Pardasuka, dan Banyumas;

- c. Kawasan rawan bencana puting beliung, yang hampir merata di seluruh kecamatan, khususnya di Sukoharjo, Pringsewu, dan Gadingrejo; serta
- d. Kawasan rawan gempa bumi, yang teridentifikasi di Kecamatan Pardasuka, Pagelaran, Ambarawa, Gadingrejo, dan Sukoharjo.



Gambar 2. 18. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Pringsewu

2.1.1.4 Jumlah dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu tahun 2024 adalah sebesar 444.834 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 227.681 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 217.153 jiwa. Wilayah yang sebaran penduduknya paling banyak adalah di Kecamatan Pringsewu, yang diikuti secara berturut turut Kecamatan Gading Rejo, Pagelaran, dan Sukoharjo. Sedangkan sebaran penduduk yang paling kecil di Kecamatan Pagelaran Utara. Namun sejalan dengan perkembangan Kabupaten Pringsewu yang tumbuh cepat, maka di Kecamatan Pagelaran Utara sangat berpotensi terjadi pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi, mengingat di kecamatan tersebut terdapat Bendungan Way Sekampung yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian baru di Kabupaten Pringsewu. Secara rinci, jumlah dan sebaran penduduk setiap kecamatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

No	Kecamatan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pardasuka	35.066	35.811	35.174	35.292	35.330	38.027	38.594
2	Ambarawa	34.852	35.914	36.387	36.509	36.750	39.612	40.517
3	Pagelaran	47.067	51.964	52.042	52.216	52.630	55.930	56.839
4	Pagelaran Utara	15.850	15.446	15.301	15.352	15.370	16.530	16.852
5	Pringsewu	84.088	81.745	81.776	82.050	82.100	87.331	88.758
6	Gadingrejo	74.482	76.705	77.727	77.987	78.420	83.907	85.447
7	Sukoharjo	49.315	50.019	49.704	49.870	50.080	53.827	54.760
8	Banyumas	20.959	21.352	21.292	21.363	21.490	23.300	23.610
9	Adiluwih	35.540	35.452	36.063	36.184	36.230	38.758	39.457
Jumlah		397.219	404.408	405.466	406.823	408.400	437.222	444.834

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Pola distribusi penduduk di Kabupaten Pringsewu menunjukkan ketidakmerataan yang mencolok di setiap kecamatan. Analisis deskriptif mengenai kepadatan penduduk di wilayah ini mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam nilai kepadatan di masing-masing kecamatan. Berdasarkan data tahun 2024, Kecamatan Pringsewu muncul sebagai

kecamatan dengan kepadatan tertinggi, mencapai 19,95 jiwa per hektar, menjadikannya sebagai pusat konsentrasi penduduk di Kabupaten Pringsewu. Di posisi kedua terdapat Kecamatan Gadingrejo dengan tingkat kepadatan sebesar 19,21 jiwa per hektar. Sebaliknya, Kecamatan Pagelaran Utara memiliki kepadatan terendah, dengan hanya 3,79 jiwa per hektar. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel yang menunjukkan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024.

Tabel 2. 6. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024 Di Kabupaten Pringsewu

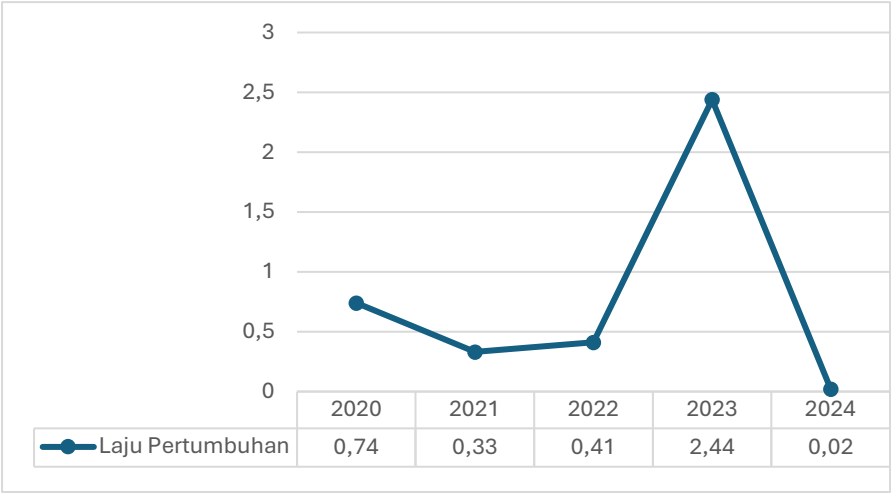
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk Per KM ²
1.	Pardasuka	8.731	8,68	442
2.	Ambarawa	3.311	9,11	1.224
3.	Pagelaran	4.842	12,78	1.174
4.	Pagelaran Utara	15.819	3,79	107
5.	Pringsewu	4.527	19,95	1.960
6.	Gading Rejo	6.779	19,21	1.260
7.	Sukoharjo	6.559	12,31	835
8.	Banyumas	4.271	5,31	553
9.	Adi Luwih	6.880	8,87	574
Jumlah				721

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2025

2.1.1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi demografis lain yang perlu diperhatikan untuk menentukan proses pembangunan yaitu pertumbuhan penduduk. Dengan diketahuinya data pertumbuhan penduduk maka dapat diantisipasi perkembangan penduduk pada suatu wilayah melalui program pembangunan. Terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan dasar yang tersedia di wilayah tertentu, semakin besar laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka semakin besar juga kebutuhan akan pemenuhan pelayanan dasar yang harus diperhatikan pemerintah. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga 2021, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari semula pada tahun 2019 sebesar 0,76 persen hingga 0,33 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2023, laju

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan yang cukup pesat dari 0,33 persen pada tahun 2021 menjadi 2,44 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,02 persen. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar 2. 19. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Tabel 2. 7. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pardasuka	0,79	0,78	0,34	0,26	2,43	0,02
2.	Ambarawa	0,66	0,64	0,34	0,58	3,02	0,03
3.	Pagelaran	0,40	0,37	0,33	0,65	2,12	0,02
4.	Pagelaran Utara	0,90	0,87	0,33	0,23	2,56	0,02
5.	Pringsewu	0,95	0,93	0,34	0,27	2,00	0,02
6.	Gading Rejo	0,60	0,59	0,33	0,51	2,61	0,02
7.	Sukoharjo	0,93	0,91	0,33	0,43	2,49	0,02
8.	Banyumas	0,93	0,92	0,33	0,52	2,68	0,02
9.	Adi Luwih	0,65	0,64	0,34	0,26	2,67	0,02
Jumlah		0,75	0,73	0,33	0,41	2,44	0,02

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2024

2.1.1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk. Semakin padat penduduknya, maka semakin berkembang cepat wilayah tersebut. Meskipun terdapat permasalahan juga yang akan timbul dari padatnya penduduk yang harus ditangani. Oleh karena itu, informasi yang cukup tentang keberadaan demografi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Salah satu informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pendukung dalam pembangunan adalah karakteristik dari penduduk berdasarkan kelompok umur. Dengan tersedianya informasi penduduk tersebut maka pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan suatu wilayah. Adapun karakteristik jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024

No.	Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	0 - 4	34.144	34.636	34.197	33.835	30.837	30.061
2.	5 - 9	37.609	35.396	35.294	35.066	36.828	36.928

3.	10 - 14	36.733	32.451	32.511	32.701	38.602	39.021
4.	15 - 19	33.846	34.214	33.746	33.375	31.128	32.235
5.	20 - 24	28.964	34.408	33.804	33.200	36.224	35.598
6.	25 - 29	28.219	31.469	31.187	30.934	33.555	34.623
7.	30 - 34	29.322	30.615	30.443	30.226	31.993	31.959
8.	35 - 39	30.490	29.944	29.981	30.052	32.960	32.999
9.	40 - 44	31.155	29.152	29.321	29.436	33.624	33.549
10.	45 - 49	27.808	27.428	27.861	28.296	30.684	31.903
11.	50 - 54	23.895	24.311	24.809	25.326	27.668	27.801
12.	55 - 59	20.185	20.303	20.852	21.387	22.587	24.405
13.	60 - 64	15.595	15.368	15.888	16.444	18.590	19.137
14.	≥ 65	26.443	25.771	26.929	28.137	31.942	34.615
Jumlah		404.408	405.466	406.823	408.415	437.222	444.834

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Dalam melihat kompleksitas wilayah, dapat melalui kapasitas penduduknya. Semakin padat penduduk pada suatu wilayah, juga ditandai dengan semakin kompleks juga permasalahan sosial yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang kompleks pula, sebagai langkah antisipasi munculnya konflik horizontal. Secara pola, persebaran penduduk di Kabupaten Pringsewu tidak merata di setiap kecamatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap nilai kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu menunjukkan cukup signifikan ketidakmerataan kepadatan di setiap kecamatan. Kecamatan paling padat berdasarkan data jumlah penduduk dan luas wilayah pada tahun 2024 yaitu Kecamatan Pringsewu menunjukkan kecamatan paling padat di Kabupaten Pringsewu dengan tingkat kepadatan 1.960 Jiwa/Km² dan terpadat kedua yaitu Kecamatan Gading Rejo dengan tingkat kepadatan 1.260 Jiwa/Km². Sementara itu kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan paling rendah yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dengan tingkat kepadatan 107 Jiwa/Km². Berikut tabel kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2020-2024 di Kabupaten Pringsewu.

Tabel 2. 9. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pardasuka	87,31	372	373	366	436	442

RKPD Tahun 2026

2.	Ambarawa	33,11	1.174	1.178	1.186	1.196	1.224
3.	Pagelaran	48,42	718	721	726	1.155	1.174
4.	Pagelaran Utara	158,19	1.535	1.540	1.541	104	107
5.	Pringsewu	45,28	907	910	915	1.929	1.960
6.	Gading Rejo	67,79	681	684	687	1.238	1.260
7.	Sukoharjo	65,59	534	536	539	821	835
8.	Banyumas	42,71	482	484	484	546	553
9.	Adi Luwih	68,80	153	153	153	563	574
Jumlah		617,20	649	651	653	708	721

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Kesejahteraan Ekonomi

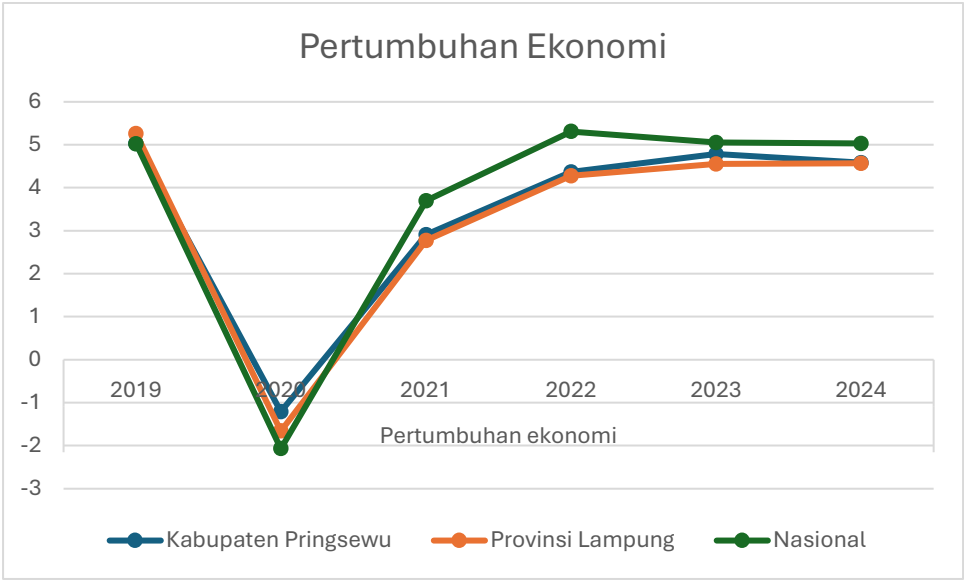
a. Pertumbuhan PDRB

Kinerja Pembangunan perekonomian tergambarkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi (rumah tangga, korporasi atau perusahaan, pemerintah dan unit lembaga swasta nirbala) dengan cara mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu, adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Selama periode 2019-2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dari 5,03% pada tahun 2019 turun hingga – 1,21%. Selama 4 tahun terakhir Kabupaten Pringsewu berada diatas rata rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mulai membaik dengan menunjukkan pertumbuhan positif ditahun 2021 sebesar 2,91% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebesar 4,78%. Namun, kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,20% menjadi 4,58% dari tahun sebelumnya

Secara spasial jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional, pertumbuhan ekkonomi Kabupaten Pringsewu berada di atas pertumbuhan Provinsi Lampung (4,57%) dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional (5,03%). Adapun secara nominal, perekonomian Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 berdasarkan ADHB

dan ADHK (2010) masing masing sebesar Rp. 12.842.103,86 Miliar dan Rp. 8.213.970,98 Miliar.



Gambar 2. 20. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu ditinjau dalam pertumbuhan ekonoi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pada tahun 2019 merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi terendah ke-4 yaitu sebesar 5,03%. Kemudian pada tahun setelahnya pada tahun setelahnya hingga tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu mengalami tren yang tumbuh positif walaupun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Pada tahun 2024, Kabupaten Pringsewu masuk dalam 8 (delapan) besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang pertumbuhan ekonominya tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 4,97%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Barat	5,18	-1,16	2,55	4,09	4,69	4,36
Tanggamus	5,02	-1,77	2,34	4,16	4,70	4,01
Lampung Selatan	5,13	-1,73	2,60	4,81	4,82	4,62
Lampung Timur	3,79	-2,26	0,24	2,02	3,51	4,62
Lampung Tengah	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70	4,62

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lampung Utara	5,33	-1,45	2,82	3,16	4,22	4,1
Way Kanan	5,17	-1,16	2,90	4,41	4,63	4,65
Tulang Bawang	5,41	-1,34	2,88	3,85	4,27	4,75
Pesawaran	5,00	-1,26	2,08	4,55	4,49	3,9
Pringsewu	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78	4,58
Mesuji	5,26	-1,35	2,84	3,49	4,06	4,58
Tulang Bawang Barat	5,36	-1,32	2,89	4,49	4,53	4,55
Pesisir Barat	5,47	-1,18	2,06	2,82	3,42	2,61
Bandar Lampung	6,17	-1,88	3,12	4,93	4,99	4,97
Metro	5,57	-1,79	2,91	4,51	4,86	4,88
Provinsi Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57
Nasional	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,05	4,03

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

b. Struktur Ekonomi

Kabupaten Pringsewu yang terletak tidak jauh dari Kota Bandar Lampung memiliki banyak potensi, seperti lahan pertanian yang masih cukup luas, banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Pringsewu, dan sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk mencapai 444.834 jiwa. Ditinjau dari struktur perekonomiannya, Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 15,10 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,09 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Naiknya PDRB Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 11. Angka PDRB Kabupaten Pringsewu atas Dasar Harga Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.805,34	2.806,84	3.066,58	3.236,55	3.422,99

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
B	Pertambangan dan Penggalian	12,35	11,77	12,37	13,32	14,32
C	Industri Pengolahan	1.667,98	1.786,11	1.861,33	1955,7	2.150,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,9	8,48	8,98	9,6	9,39
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,26	6,87	7,23	7,38	7,89
F	Konstruksi	1.313,39	1.444,45	1580,86	1730,21	1.790,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.534,85	1.645,12	2.018,83	2.320,06	2.552,19
H	Transportasi dan Pergudangan	503,48	522,09	669,94	878,22	978,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	293,35	292,11	332,38	384,53	415,08
J	Informasi dan Komunikasi	675,47	701,15	709,82	764,54	819,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	447,75	483,9	506,18	531,94	561,37
L	Real Estat	439,82	447,17	474,27	489,22	531,24
M, N	Jasa Perusahaan	27,4	27,9	33,6	36,23	40,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	491,93	510,54	516,84	525,05	574,43
P	Jasa Pendidikan	634,24	653,15	690,94	730,77	792,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	176,67	185,37	188,58	201,8	219,94
R, S, T, U	Jasa Lainnya	127,97	126,03	163,23	194,58	218,64
Produk Domestik Regional Bruto		11.166,15	11.659,05	12.841,96	14.009,71	15.098,16

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi Kabupaten Pringsewu. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Pringsewu terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Pringsewu didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha yang utama diantaranya, *RKPD Tahun 2026*

yaitu kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), kategori C (Industri Pengolahan), dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor). Hal ini dapat dilihat dari nilai dan peranan masing masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tabel di atas.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 22,67%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi pada tahun 2023. Lapangan usaha yang berkontribusi terbesar kedua yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor mencapai 16,90%. Pada kategori ini mengalami kenaikan 0,35% dibandingkan tahun 2023. Lapangan usaha terbesar ketiga yaitu Industri Pengolahan mencapai 14,24%. Sementara peranan lapangan usaha yang lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu kurang dari 7%, kecuali untuk kategori Konstruksi yang memberikan kontribusi 11,86%.

Tabel 2. 12. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,12	24,07	23,88	23,10	22,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09
C	Industri Pengolahan	14,94	15,32	14,49	13,96	14,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
F	Konstruksi	11,76	12,39	12,31	12,35	11,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,75	14,11	15,72	16,56	16,90
H	Transportasi dan Pergudangan	4,51	4,48	5,22	6,27	6,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,63	2,51	2,59	2,74	2,75
J	Informasi dan Komunikasi	6,05	6,01	5,53	5,46	5,42

Lapangan Usaha		Produk Domestik Regional Bruto (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,01	4,15	3,94	3,80	3,72
L	Real Estat	3,94	3,84	3,69	3,49	3,52
M, N	Jasa Perusahaan	0,25	0,24	0,26	0,26	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,41	4,38	4,02	3,75	3,80
P	Jasa Pendidikan	5,68	5,60	5,38	5,22	5,25
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58	1,59	1,47	1,44	1,46
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,15	1,08	1,27	1,39	1,45
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

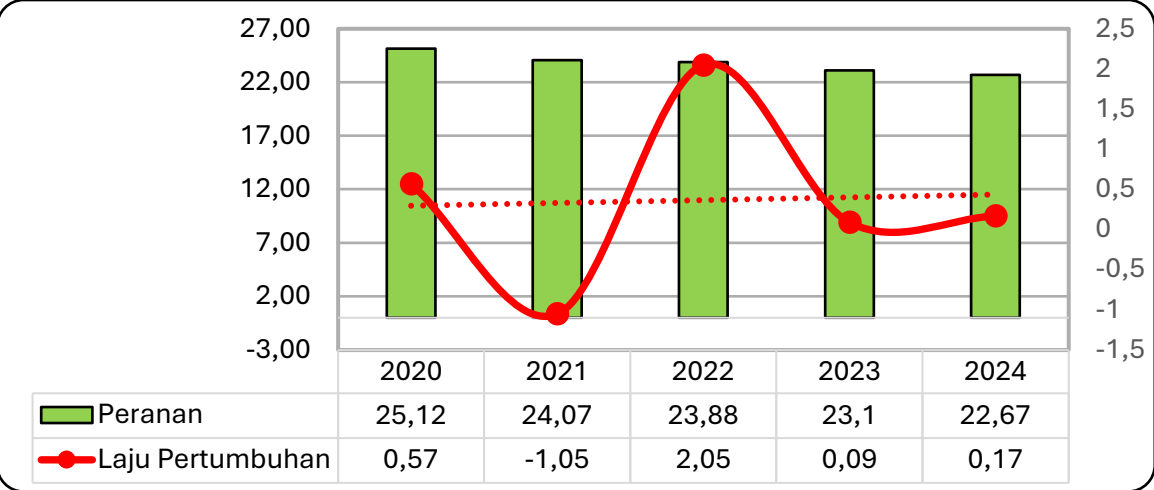
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

PDRB Kabupaten Pringsewu menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirincikan lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha di bawah ini.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup sub kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas golongan tanaman pangan, golongan tanaman hortikultura, golongan tanaman perkebunan, golongan peternakan, dan golongan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha kehutanan dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat Pringsewu. Pada Tahun 2024 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi kontribusi

terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu mencapai sebesar 3,42 triliun atau sebesar 22,67%.



Gambar 2. 21. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami tren negatif pada tahun 2020-2024, terjadi peningkatan pada tahun 2022, tetapi kembali menurun di tahun 2023-2024. Permasalahan paling krusial di Kabupaten Pringsewu khususnya bidang pertanian adalah sumber air yang terbatas. Debit air dari bendungan terdekat yang sangat kecil dan sehingga tidak mencukupi untuk mengairi seluruh areal persawahan di wilayah Kabupaten Pringsewu. Pun juga semakin sempitnya lahan pertanian di wilayah Kabupaten Pringsewu dan gencarnya isu alih fungsi lahan yang terjadi.

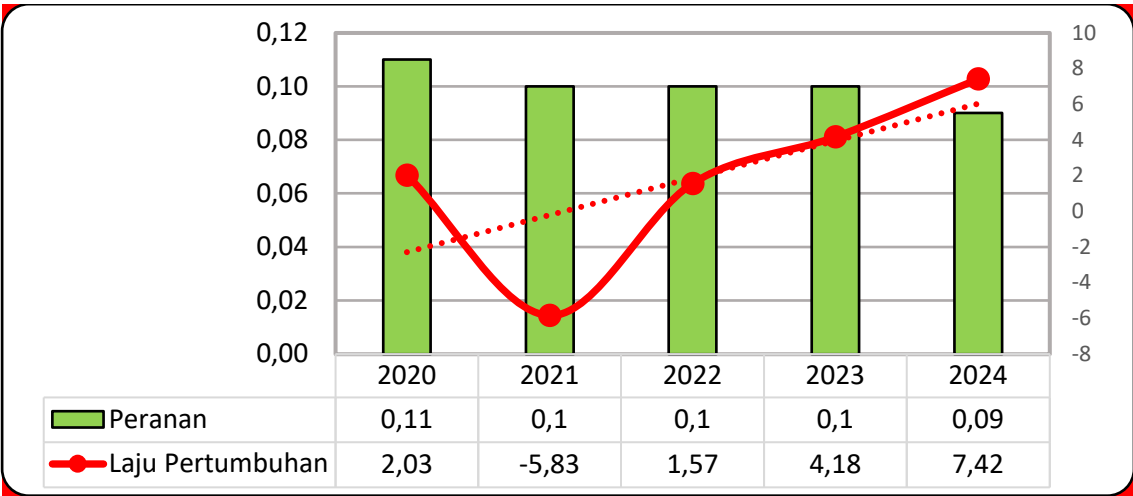
Selain permasalahan yang krusial, sekto pertanian di Kabupaten Pringsewu memiliki produk unggulan yaitu produksi benih padi hasil dari kelompok penangkar binaan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. Saat ini Kabupaten Pringsewu memiliki sekitar 12 (dua belas) kelompok penangkar benih padi, yang telah memproduksi benih padi dan telah dipasarkan di beberapa wilayah Sumatera. Produk unggulan lainnya yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah memproduksi bibit tanaman pertanian, khususnya bibit pisang, dihasilkan oleh Laboratorium Kultur Jaringan telah dipasarkan ke beberapa wilayah di luar Kabuppaten Pringsewu bahkan di luar Provinsi Lampung.

Secara umum artinya dengan adanya kekurangan yang dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu yaitu keterbatasan lahan, akan tetapi tetap unggul dalam komoditas pertanian karena bisa mengembangkan dan memanfaatkan peluang untuk terus meningkatkan hasil pertanian, dengan berperan aktif

sebagai kabupaten penghasil benih/bibit tanaman pertanian yang unggul dan memiliki daya saing dan bernilai ekonomi tinggi.

b) Pertambangan dan Pengalihan

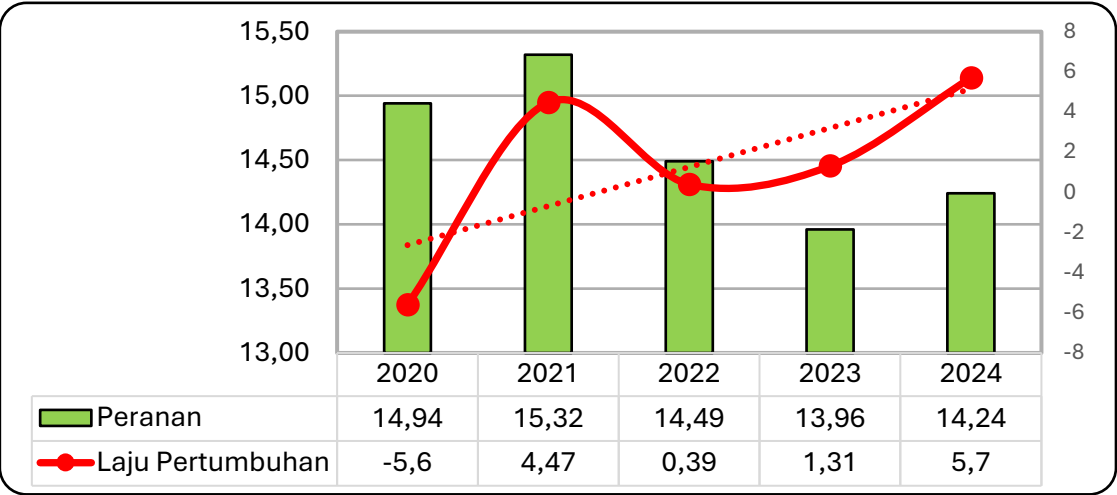
Pada kategori Pertambangan dan Pengalihan, nilai tambah hanya berasal dari sub kategori pertambangan dan pengalihan lainnya yaitu sebesar 14,32 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 0,09% terhadap PDRB Pringsewu. Kontribusi ini merupakan yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2024, kategori pertambangan dan pengalihan tumbuh sebesar 7,42% setelah mengalami kontraksi pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya pengguna komoditi barang galian seperti pasir dan batu split dalam menunjang sektor konstruksi.



Gambar 2. 22. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pertambangan dan Pengalihan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

c) **Industri Pengolahan**

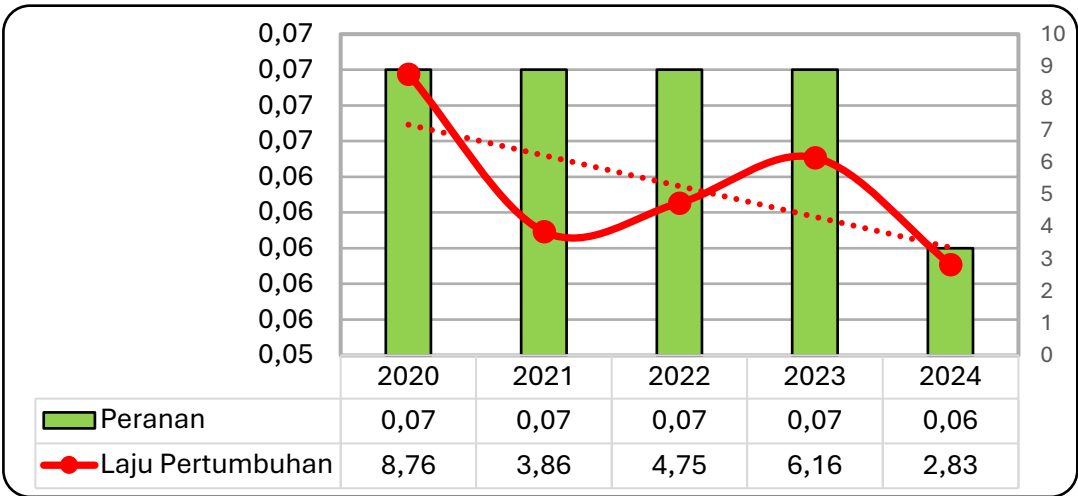
Industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar ketiga untuk PDRB Kabupaten Pringsewu tahun 2024 sebesar 2,15 triliun rupiah atau sebesar 14,24 %. Pada sub kategori yang menyumbang peranan terbesar adalah makanan dan minuman. Secara keseluruhan laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,7%.



Gambar 2. 23. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

d) **Pengadaan Listrik dan Gas**

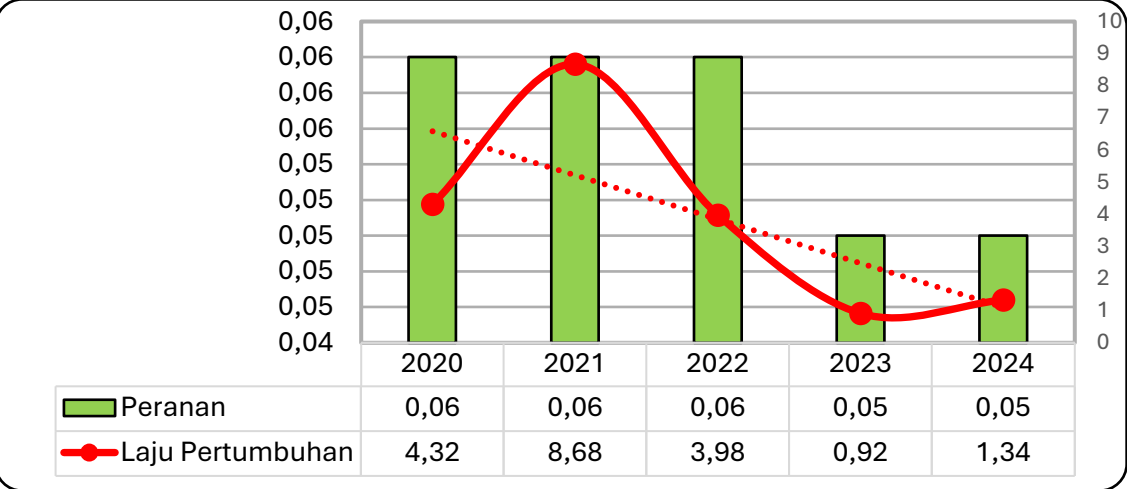
Peranan kategori pengadaan listrik dan gas berkontribusi konstan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,06% atau sebesar 9,39 miliar rupiah pada tahun 2024. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 adalah sebesar 2,83%, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir meningkat, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2024.



Gambar 2. 24. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Listrik dan Gas Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Pada tahun 2024 kontribusi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 7,89 miliar rupiah atau sebesar 0,05%. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui saluran pipa. Peranan kategori ini termasuk sangat kecil hanya berkisar 0,05%-0,06% selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Laju pertumbuhan selama empat tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,34%.

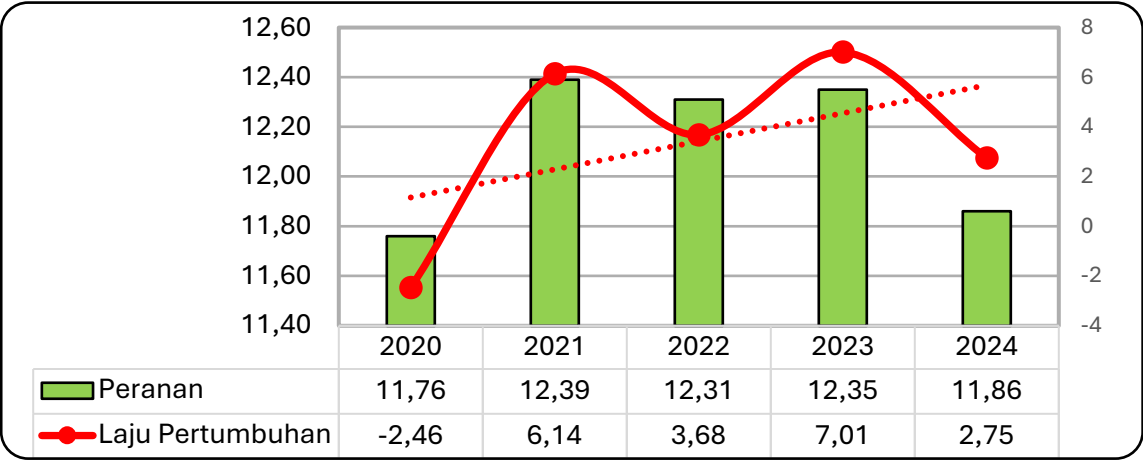


Gambar 2. 25. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

f) Konstruksi

Kontribusi dari kategori konstruksi mencapai 1,79 triliun rupiah atau sebesar 11,86% terhadap total perekonomian Kabupaten Pringsewu. Laju pertumbuhan kategori fluktuatif dengan tren pergerakan meningkat yang semula sebesar -2,46% tahun 2020 menjadi 2,75 % pada tahun 2024, dengan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,46%.

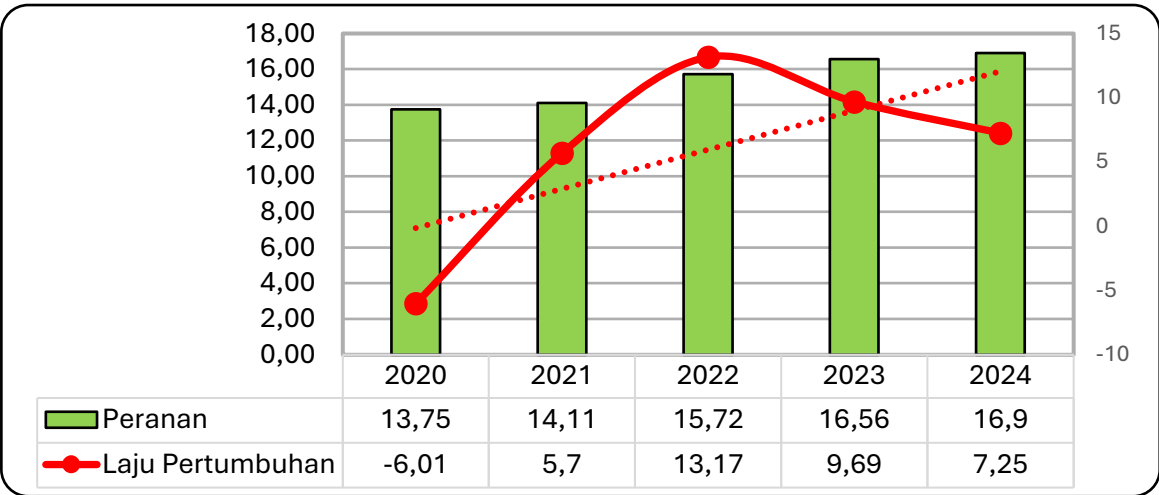


Gambar 2. 26. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Konstruksi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor menyumbang 2,55 triliun rupiah atau 16,9% pada tahun 2024. Jika



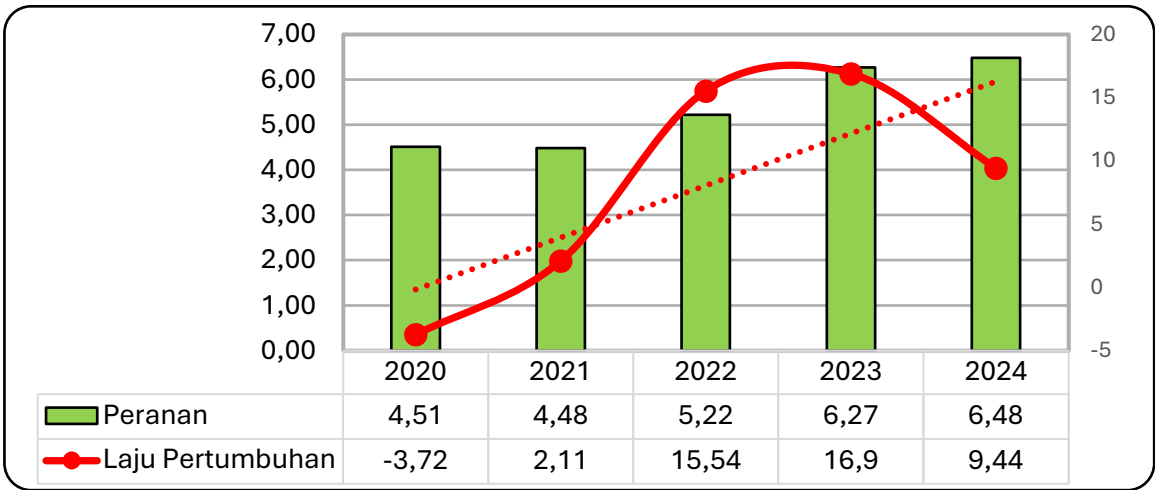
dilihat berdasarkan laju pertumbuhan terhadap perekonomian tren kategori ini yaitu meningkat dengan puncak peningkatan yaitu pada tahun 2022 sebesar 13,17%, tetapi terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 7,25%.

Gambar 2. 27. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

h) Transportasi dan Pergudangan

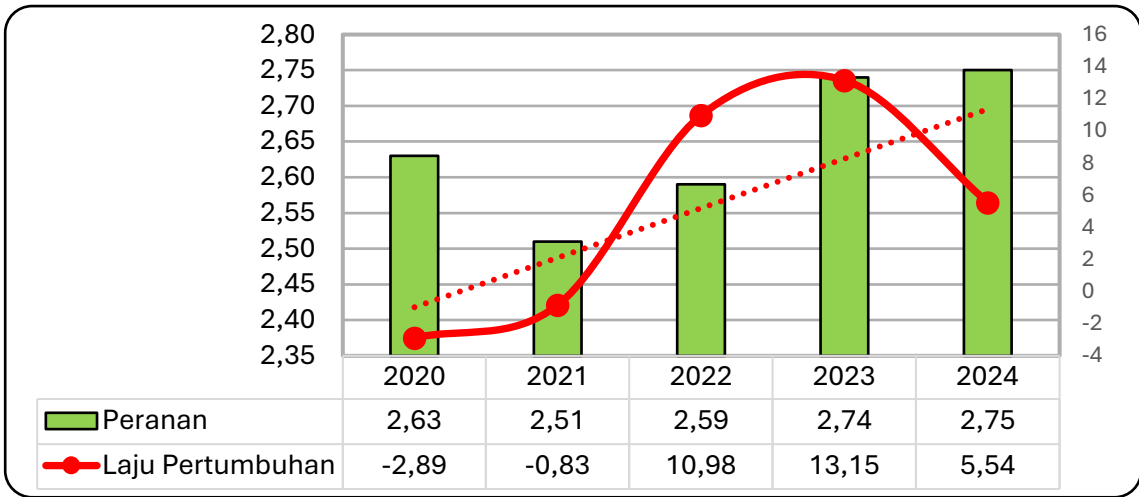
Pada tahun 2024 kategori transportasi dan pergudangan memberikan peranan terhadap PDRB sebesar 6,48% atau sebesar 978,06 miliar rupiah. Penyumbang utama pada kategori ini adalah angkutan darat. Berdasarkan laju pertumbuhan transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan sebesar 9,44% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh penggunaan berbagai alat transportasi yang sudah meningkat signifikan terlebih sudah tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.



Gambar 2. 28. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi sebesar 415,08 miliar rupiah atau sebesar 2,75%, sebagian besar kontribusinya berasal dari sub kategori penyediaan makan minum. Laju pertumbuhan sebesar 5,54% yang disebabkan oleh banyaknya tempat makan permanen maupun wisata kuliner yang aktif setiap minggunya dan aktivitas penginapan.

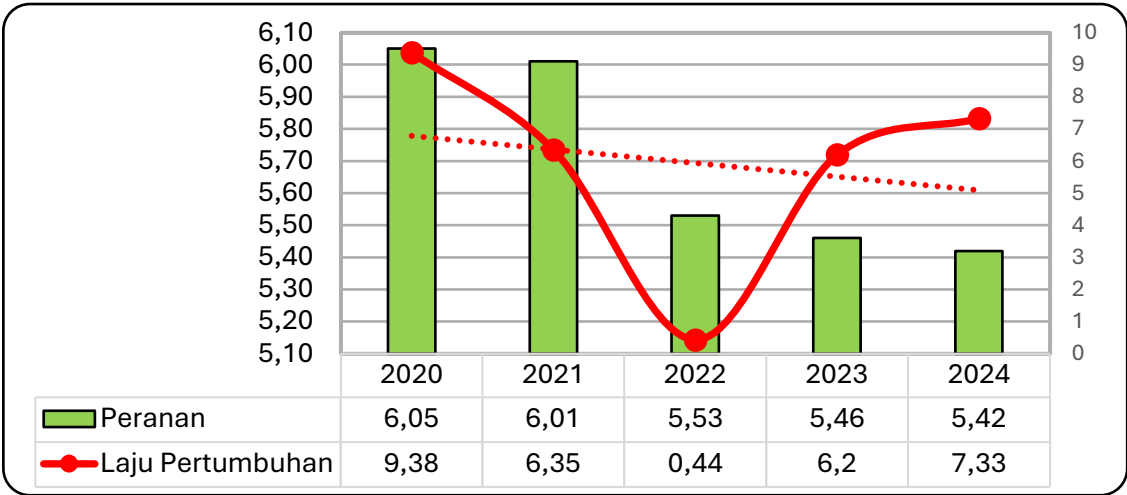


Gambar 2. 29. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

j) Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam perkembangan teknolgi, peranan kategori ini sangat penting dan menjadi indikator sebuah kemajuan wilayah. Pada tahun 2024, peranan kategori ini terhadap PDRB Kabupaten

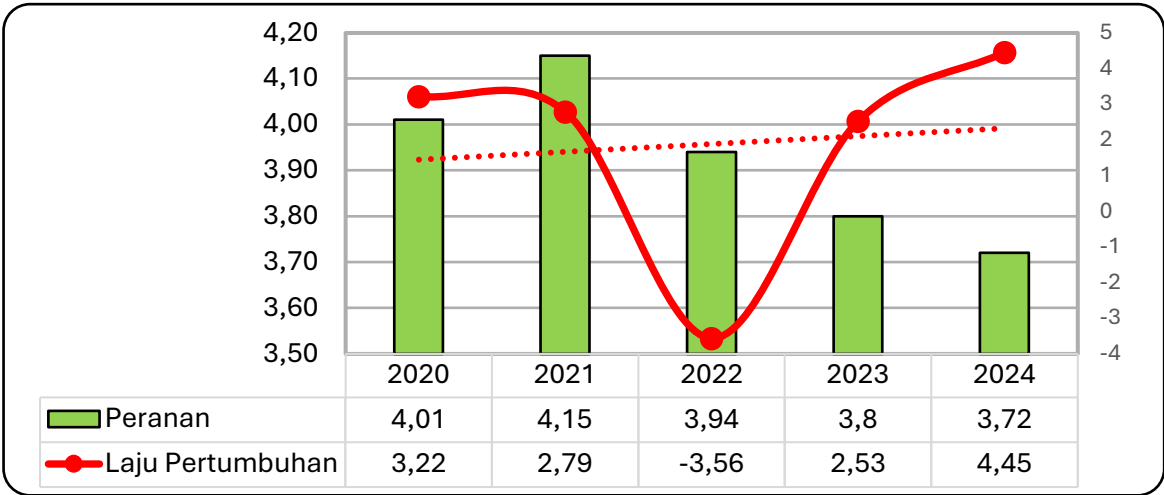
Pringsewu secesar 5,42% atau 819,05 miliar rupiah. Bila ditinjau dari laju pertumbuhannya terjadi penurunan dari tahun 2020-2022 yang semulanya 9,38% menjadi 0,44% dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,33%. Penurunan ini terjadi karena mulai menurunnya penggunaan akses internet dalam pembelajaran atau bekerja karena sudah mulai beralih ke pekerjaan offline.



Gambar 2. 30. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

k) Jasa Keuangan dan Asuransi

Jasa keuangan sangat penting dalam membangun ekonomi suatu negara, seperti jasa perbankan. Kontribusi jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2024 terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu sebesar 561,37 miliar rupiah atau sebesar 3,72%. Berdasarkan laju pertumbuhan, kategori ini terus mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir yakni -3,56% pada tahun 2022 menjadi 4,45% pada tahun 2024.

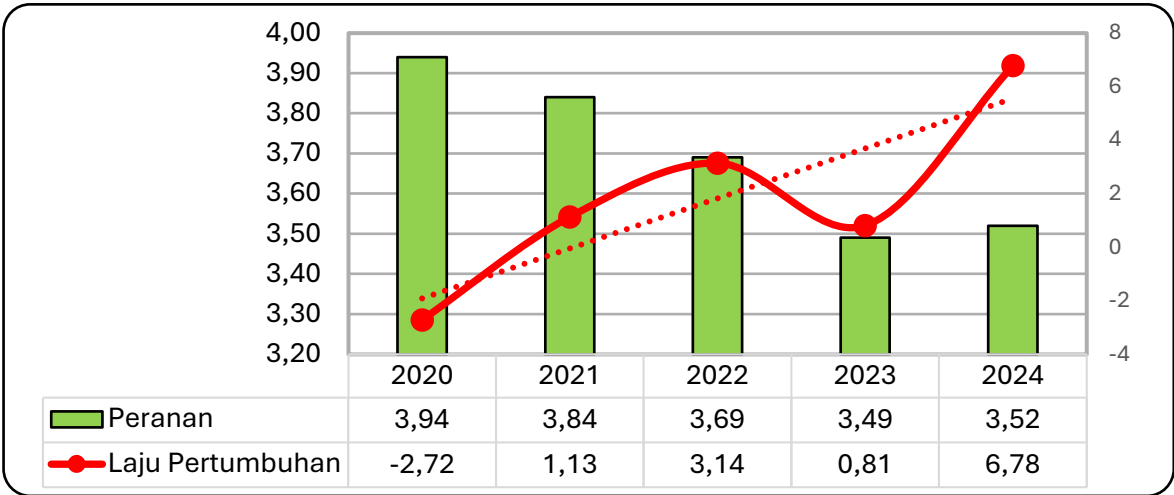


Gambar 2. 31. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

1) Real Estate

Industri properti pada umumnya mengalami peningkatan yang searah dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kegiatan di bidang properti ini dapat dijadikan indikator seberapa aktif kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung, Kegiatan ekonomi dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Seperti, pelaku perdagangan dan jasa yang membutuhkan tempat dan sarana untuk melakukan penjualan, begitu juga dengan sektor lainnya yang berkaitan dengan industri properti.

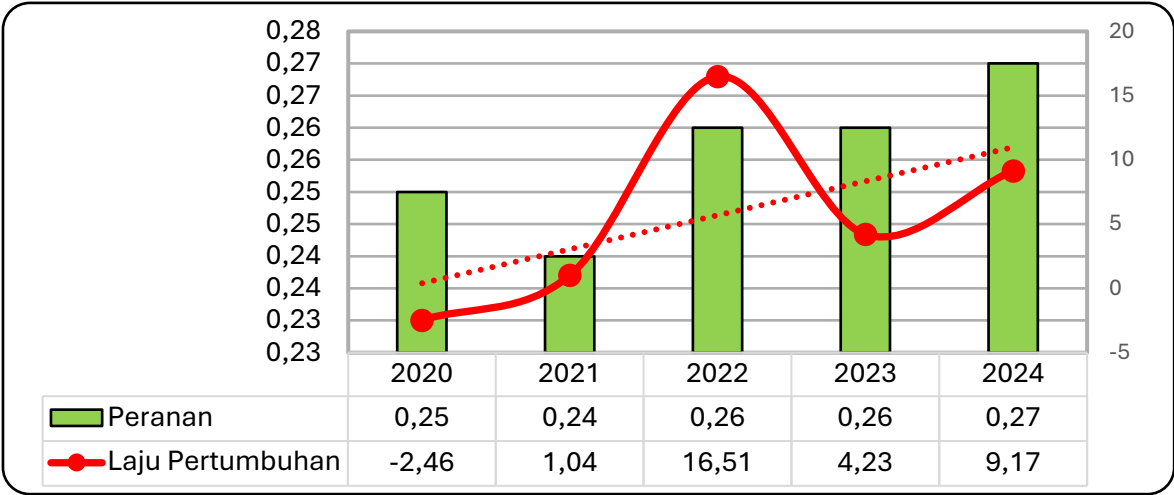
Kategori real estate memberikan kontribusi yang penurunannya tidak signifikan dengan peranan 3,52% atau sebesar 531,24 miliar rupiah pada tahun 2024. Laju pertumbuhan pada tahun 2024 meningkat 5,97% menjadi sebesar 6,78%.



Gambar 2. 32. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Real Estate Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

m) Jasa Perusahaan

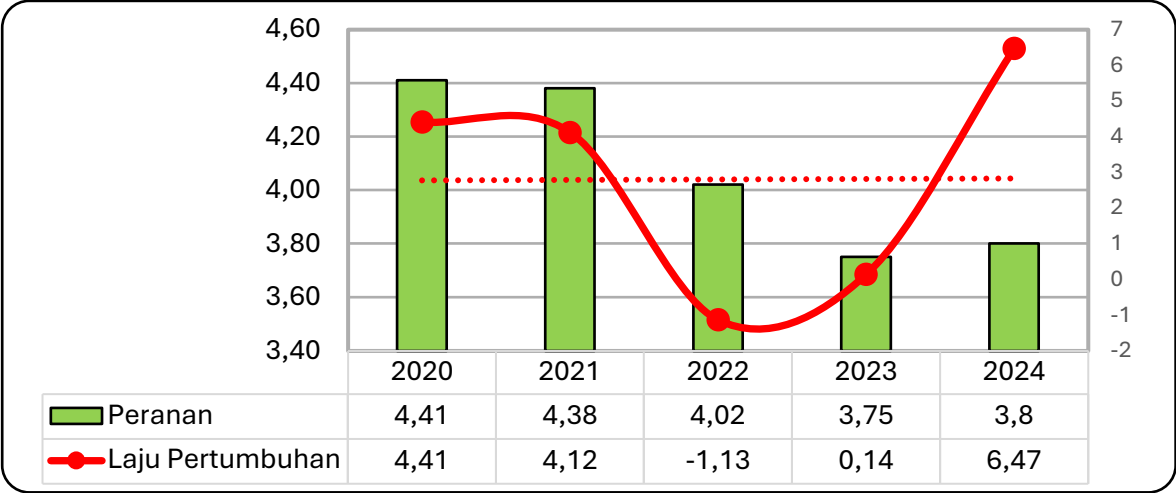
Kontribusi jasa perusahaan pada kegiatan ekonomi sebesar 40,69 miliar rupiah atau sebesar 0,27% pada tahun 2024, cenderung stabil dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peranan kategori jasa perusahaan relatif kecil dibandingkan peranan kategori lainnya pada perekonomian Kabupaten Pringsewu. Laju pertumbuhannya mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 9,17% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,23%.



Gambar 2. 33. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Perusahaan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Pada kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Peranan kategori ini pada tahun 2024 sebesar 574,43 miliar rupiah atau sebesar 3,8% terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu. Pada tahun 2023, kategori ini mengalami peningkatan menjadi 0,14% dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 6,47%.

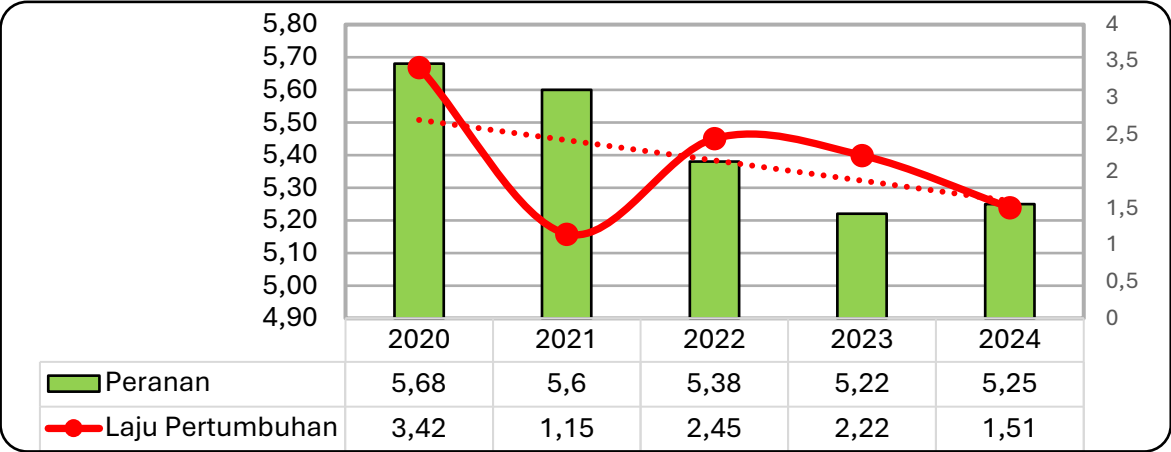


Gambar 2. 34. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

o) Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan berkontribusi sebesar 792,43 miliar rupiah atau sebesar 5,25% terhadap total perekonomian Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024. Laju pertumbuhan jasa pendidikan mengalami tren negatif dari 3,42% pada tahun 2020 menjadi 1,51% pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah dan terjadinya penurunan anggaran pendidikan untuk dialihkan ke hal yang memiliki urgensi.



Gambar 2. 35. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Pendidikan Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024

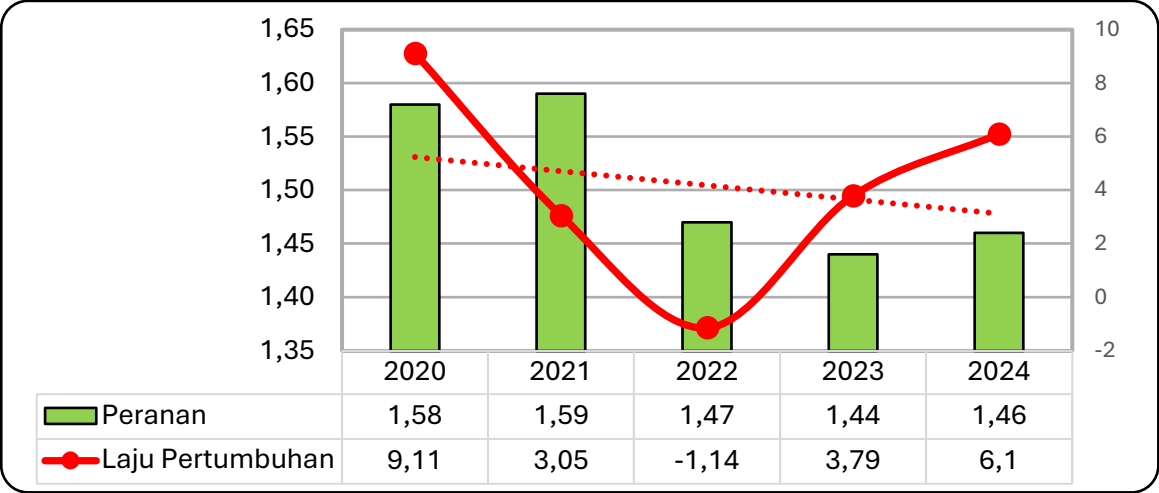
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencakup penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Kontribusi jasa kesehatan terhadap perekonomian sebesar 219,94 miliar rupiah atau sebesar 1,46% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peranan kategori ini

RKPD Tahun 2026

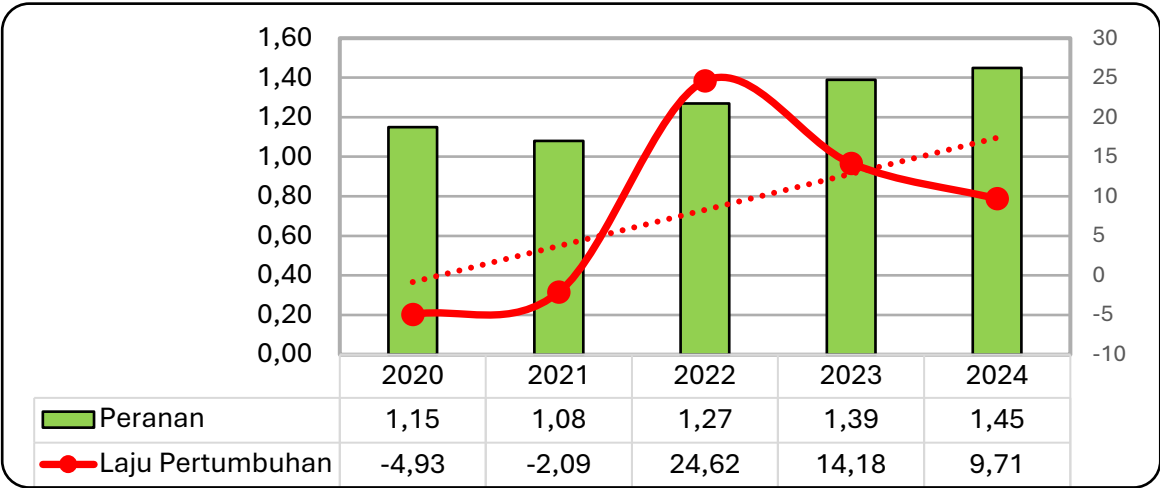
relatif kecil dibandingkan dengan kategori lainnya. Laju pertumbuhannya mengalami kontraksi yaitu sebesar -1,14% Tahun 2022, dan mengalami terus mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir menjadi sebesar 6,1% pada tahun 2024. Pada tahun 2022 pandemi mulai pulih dan peraturan terkait rapid test atau PCR mulai berkurang. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan pada lapangan usaha kesehatan dan mengalami kenaikan karena masyarakat mulai sadar pentingnya melakukan cek kesehatan untuk mencegah penyakit menular.



Gambar 2. 36. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

q) Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya terhadap perekonomian Pringsewu relatif kecil yaitu 218,64 miliar rupiah atau sebesar 1,45%, peranan tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, laju pertumbuhan tren mengalami pertumbuhan yang positif atau signifikan sebesar 24,62% pada tahun 2022, tetapi terjadi penurunan dalam dua tahun terakhir menjadi sebesar 9,71% pada tahun 2024. Pemulihan pasca Covid-19 menjadi peran penting. Fasilitas jasa perorangan seperti salon, klinik kecantikan juga mengalami peningkatan pelanggan kembali.



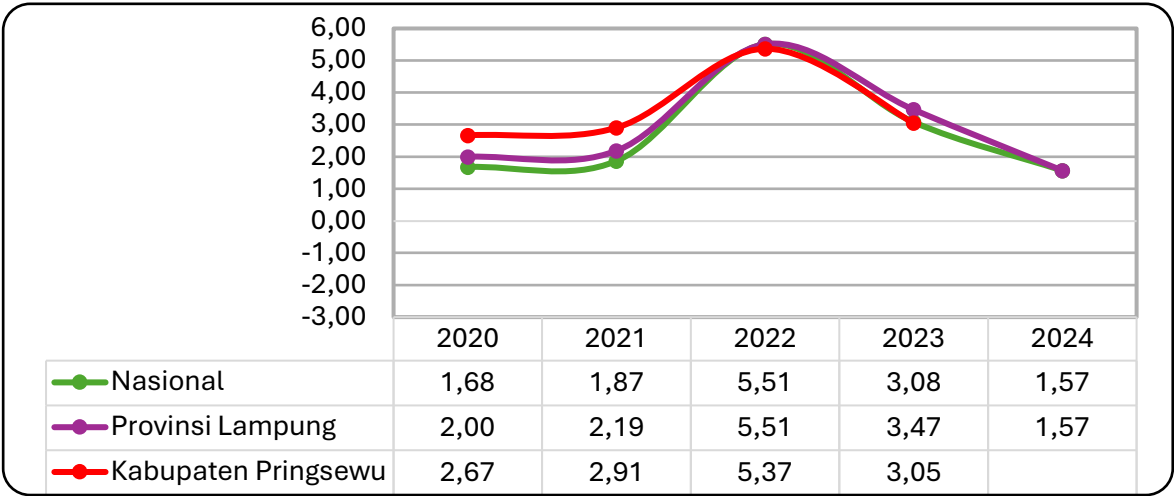
Gambar 2. 37. Grafik Peranan Laju Pertumbuhan Kategori Jasa Lainnya Kabupaten Pringsewu (Persen) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

c. Inflasi Daerah

Inflasi merupakan indikator angka (dalam satuan persen) yang digunakan untuk melihat tingkat kenaikan harga secara umum dan terus-

menerus. Pun juga inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi.

Sepanjang periode 2010-2024 inflasi umum tahunan Kabupaten Pringsewu berada kisaran 2,73–5,37. Sementara Provinsi Lampung pada kisaran 1,57–5,51. Hal ini mendefinisikan bahwa inflasi Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung masih tergolong rendah. Inflasi tertinggi Kabupaten Pringsewu terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 5,37% dan terendah pada tahun 2020 yang mencapai 2,67%. Sejak tahun 2022, data inflasi tahunan Kabupaten Pringsewu berada di bawah angka inflasi nasional. Laju inflasi di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 38. Laju Inflasi Daerah Kabupaten Pringsewu Terhadap Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan sering diukur dalam RKPD Tahun 2026

bentuk persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini bisa menjadi persentase populasi secara keseluruhan atau dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, lansia, atau kelompok penduduk lainnya. Kabupaten Pringsewu berdasarkan 2019-2023 diketahui angka kemiskinan mengalami fluktuasi. Penjabaran lebih detail terkait angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut.

Tabel 2. 13. Angka Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Indikator Kemiskinan	Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan (P0)	9,97	10,11	9,34	9,14	8,32
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,20	1,38	1,07	0,99	0,92
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,26	0,19	0,19	0,16
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	40,12	41,04	38,18	37,60	34,42
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	458.627	475.983	511.679	555.787	583.423

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2025

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir diketahui terjadi peningkatan dan penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan dibandingkan 5 tahun lalu, angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan yang cukup baik di angka 8,32 dibandingkan pada tahun 2021 yang berada pada angka 10,11. Jumlah penduduk miskin juga sudah berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021, yang mana kini berjumlah 34.420 jiwa. Kabupaten pringsewu telah memberikan bantuan kepada warga yang tergolong penduduk miskin. Pada tahun 2024, wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang mendapat bantuan terbanyak yaitu kecamatan pardasuka sebanyak 263 kepala keluarga. Secara umum telah diberikan bantuan Bantuan Non Tunai Pangan (BNPT), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Prakerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Benih bantuan bibit ikan.

B. Pemerataan Ekonomi

a. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB perkapita tercatat 27,88 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 35,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2. 14. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pringsewu 2019-2024

Indikator Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pringsewu (Juta Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	11.156.9 53,24	11.176.9 53,62	11.662.3 18,85	12.841.9 50,00	14.009.7 10,00	15.098.1 60,00
Pendapatan Perkapita (PDRB/Jumlah Penduduk) per orang per Tahun (Dalam Juta Rupiah)	27,88	27,57	28,67	30,98	33,39	35,56

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2025

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	11.166.162,52	11.659.049,83	12.842.103,86	14.010.045,57	15.098.160,00
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	7.647.661,68	7.870.041,61	8.213.970,98	8.606.934,81	9.001.150,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,77	4,85	4,77	4,66	4,39
Inflasi (%)	2,53	2,74	5,37	3,05	1,51
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,97	10,11	9,34	9,14	8,32

Data ekonomi Kabupaten Pringsewu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang positif di berbagai indikator. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan signifikan, dari Rp11,16 triliun (ADHB) dan Rp7,65 triliun (ADHK) pada 2020 menjadi Rp15,09 triliun (ADHB) dan Rp9,00 triliun (ADHK) pada 2024, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 5,77% menjadi 4,39%, menunjukkan perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Meskipun inflasi sempat melonjak pada 2022 menjadi 5,37%, namun berhasil ditekan hingga 1,51% pada 2024, yang merupakan kondisi ideal untuk menjaga daya beli masyarakat. Persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren menurun, dari 9,97% di 2020 menjadi 8,32% di 2024. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan kinerja ekonomi Kabupaten Pringsewu yang disertai dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

b. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Selama tahun 2020-2024 angka Indeks Gini di Kabupaten Pringsewu mengalami fluktuasi yang berarti bahwa pada kurun waktu tersebut pendapatan penduduk di Kabupaten Pringsewu pada kurun waktu tersebut belum merata antar kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 15. Indeks Gini Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Tahun	Nasional	Provinsi Lampung	Kabupaten Pringsewu
2020	0,385	0,32	0,31
2021	0,381	0,314	0,277
2022	0,381	0,313	0,272
2023	0,388	0,324	0,306
2024	0,379	0,302	0,266

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2025

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kabupaten Pringsewu masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2020 lebih tinggi, menunjukkan indeks gini yang meningkat. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan potensial di Kabupaten Pringsewu.

C. Pembangunan Manusia
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan konsep yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia mengandung beberapa komponen seperti produktivitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara

RKPD Tahun 2026

fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kemudian, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Terdapat 3 manfaat dalam hal pengukuran IPM diantaranya adalah:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan
3. IPM juga dapat digunakan sebagai penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Pringsewu tahun 2020 sebesar 72,90, tahun 2021 sebesar 73,98, tahun 2022 sebesar 74,33, tahun 2023 sebesar 74,33, dan tahun 2024 sebesar 74,56. Angka harapan hidup saat lahir tersebut, berada di bawah provinsi dan nasional. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Pringsewu dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39
Provinsi Lampung	73,66	73,73	73,95	74,17	74,39
Kabupaten Pringsewu	73,90	73,98	74,15	74,33	74,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2025

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Data angka harapan lama sekolah dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang sehingga program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Posisi angka harapan lama sekolah Kabupaten Pringsewu berada diatas Provinsi Lampung, namun dibawah Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan, telah mampu menunjukkan hasilnya dan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang saat ini telah mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan di atas 20%. Adapun perbandingan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Pringsewu dengan tingkat Provinsi Lampung dan nasional, dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018-2024

Tingkat	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pringsewu	12,78	12,82	12,83	12,84	12,91	12,92	12,93

Provinsi Lampung	12,61	12,63	12,65	12,73	12,74	12,77	12,78
Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2025

Sedangkan untuk indikator kedua dimensi pengetahuan pada IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Data rata-rata lama sekolah berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif atau tahun standar yang harus dijalani untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program wajib belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut dan sesuai data perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu, disatu sisi cenderung naik pada setiap tahunnya. Namun disisi lain seluruh daerah juga akan senantiasa untuk memperbaiki kondisinya masing-masing. Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu selalu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dari tingkat Nasional. Adapun perbandingan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2018-2024

Tingkat	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pringsewu	8,01	8,19	8,38	8,39	8,40	8,42	8,53
Provinsi Lampung	7,82	7,92	8,05	8,08	8,18	8,29	8,36
Nasional	8,17	8,39	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2025

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Untuk pengeluaran per kapita penduduk kabupaten pringsewu selama lima tahun terakhir juga cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat untuk membiayai kehidupannya cenderung terjaga. Posisi angka pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Pringsewu berada di atas Provinsi Lampung, namun masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Adapun perbandingan pengeluaran per kapita masyarakat Pringsewu dengan Provinsi Lampung dan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 19. Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	11,013	11,156	11,479	11,899	12,340
Provinsi Lampung	9,982	10,038	10,336	10,769	11,258
Kabupaten Pringsewu	10,262	10,302	10,577	11,016	11,543

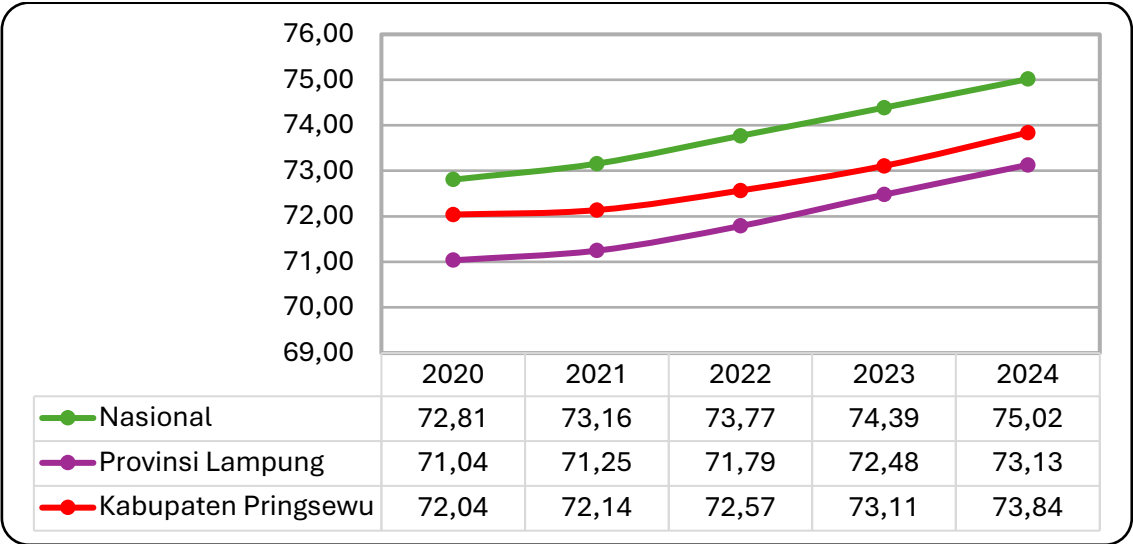
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2025

Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung, namun relatif rendah jika dibandingkan IPM Nasional. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun dapat menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Pada tahun 2023 angka IPM Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 71,61 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 70,98. Angka IPM Kabupaten Pringsewu berada di urutan ketiga setelah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Tabel 2. 20. Angka IPM Kabupaten Pringsewu Menurut Komponen Tahun 2017-2024

Tahun	Angka Harapan Hidup (dalam setahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Perkapita (Ribuan Rupiah)	Indeks Pembangunan Manusia
2017	69,14	12,77	7,85	9.775	68,61
2018	69,80	12,78	7,85	9.731	69,42
2019	69,80	12,82	8,19	10.289	69,97
2020	70,08	12,83	8,38	10.262	70,30
2021	70,45	12,84	8,39	10.302	70,45
2022	74,15	12,91	8,40	11.609	72,57
2023	74,33	12,92	8,77	11.650	73,11
2024	74,56	12,93	8,85	11.750	73,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2025



Gambar 2. 39. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu Terhadap Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

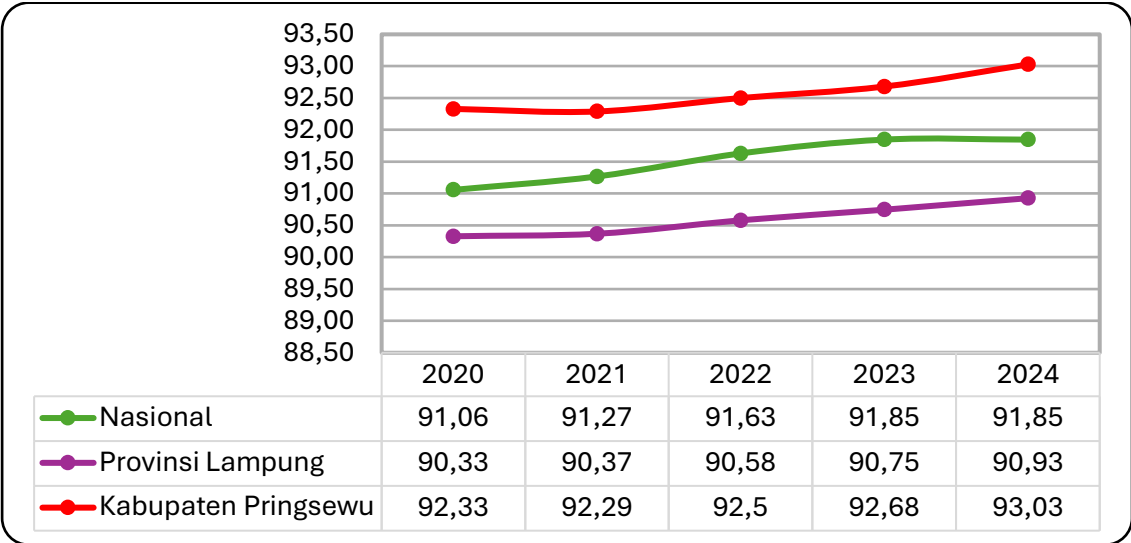
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023

Peningkatan angka IPM Kabupaten Pringsewu ternyata juga diikuti dengan kenaikan dari masing-masing komponennya. Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Riil Per Kapita setiap tahun selalu mengalami peningkatan takterkecuali Angka Harapan Hidup

(AHH) yang tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini sebagai hasil dari program pembangunan manusia yang telah dilaksanakan, seperti pendidikan dan perekonomian. Terkait Angka Harapan Hidup di sektor kesehatan yang mengalami kenaikan, sebagian besar adalah dampak dari berakhirnya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia pada tahun 2021 yang lalu.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun perbandingan IPG Kabupaten Pringsewu dengan kabupaten/kota di lingkup Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 2. 40. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pringsewu, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan Badan Pusat Statistik, 2025

D. Pelayanan Publik

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara RKPD Tahun 2026

bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Untuk tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan status ini, maka akan menghasilkan kinerja sasaran dengan predikat sangat berhasil. Sedangkan untuk Pencapaian WTP Tahun 2022, merupakan capaian ketujuh secara beruntun.

Pencapaian ini apabila dapat dipertahankan, akan memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2022 yaitu opini WTP. Realisasi ini pun merupakan capaian bagus yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2022. Dengan adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran pimpinan di seluruh Kabupaten Pringsewu, diperkuat pula dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk mempertahankan opini tersebut di depan Bupati beserta anggota Forkopimda Kabupaten Pringsewu.

Faktor lain yang tak kalah penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 360 objek pemeriksaan, jumlah temuan 999 dan jumlah tindak lanjut 999.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2022, berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

b. Predikat SAKIP

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung-jawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan pentingnya akuntabilitas terlihat dalam rumusan Misi 5, yaitu “Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bersih”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan pengakuan akan kontribusi pemerintah bukan hanya dalam penyelesaian urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kabupaten Pringsewu terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 66,77 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2023 Kabupaten Pringsewu juga menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki Nilai Akuntabilitas tertinggi. Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2020 sedang berada pada jalur *uptrend*-nya yang ditunjukkan oleh meningkatnya Nilai SAKIP secara gradual berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian nilai secara berurutan sebesar 63,27, 65,23, 66,35, dan 66,41. Hal positif ini akan terus didorong untuk lebih baik lagi pada tahun-tahun mendatang. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 21. Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP				Predikat
		2020	2021	2022	2023	
1.	Lampung Barat	67,15	67,97	68,65	66,41	B
2.	Metro	66,97	67,90	68,04	68,48	B
3.	Pringsewu	63,27	65,23	66,35	66,77	B
4.	Lampung Selatan	63,03	63,98	65,80	66,43	B
5.	Lampung Tengah	63,52	64,35	65,28	65,98	B
6.	Tanggamus	63,61	64,25	64,69	64,99	B
7.	Pesawaran	60,04	61,25	62,08	63,38	B
8.	Tulang Bawang	60,47	61,71	61,88	62,46	B
9.	Tulang Bawang Barat	58,64	59,01	60,08	60,67	B
10.	Way Kanan	57,64	58,62	60,06	60,52	B
11.	Lampung Timur	57,00	58,02	58,33	57,80	C
12.	Bandar Lampung	57,09	58,71	57,59	57,49	C
13.	Mesuji	56,96	57,22	57,60	60,51	B
14.	Pesisir Barat	51,10	52,04	52,83	53,35	C
15	Lampung Utara	45,73	50,04	52,00	53,53	C

Sumber: LAKIP Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

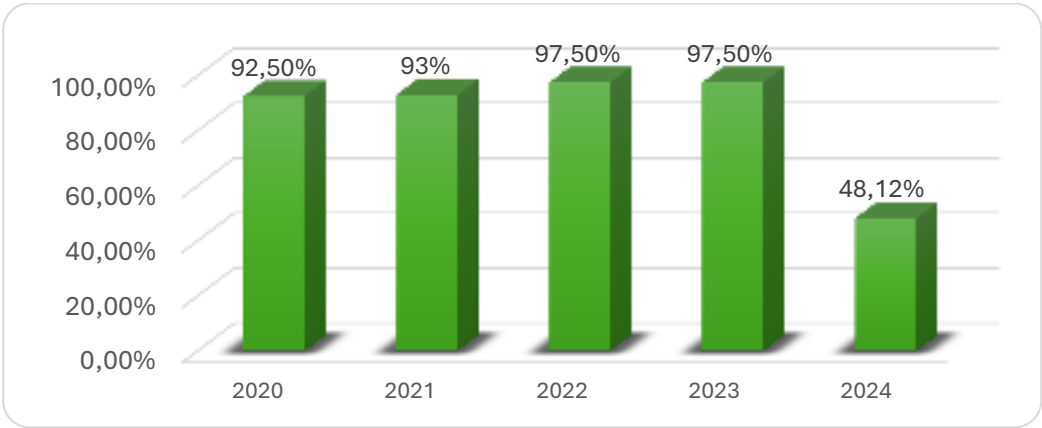
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A.Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Rasio murid PAUD merupakan perbandingan antara jumlah murid PAUD dengan jumlah anak usia 4-6 tahun.



Gambar 2. 41. Grafik Rasio Murid PAUD dengan Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, “Pendidikan di Taman Kanak kanak adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan melalui jalur

formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

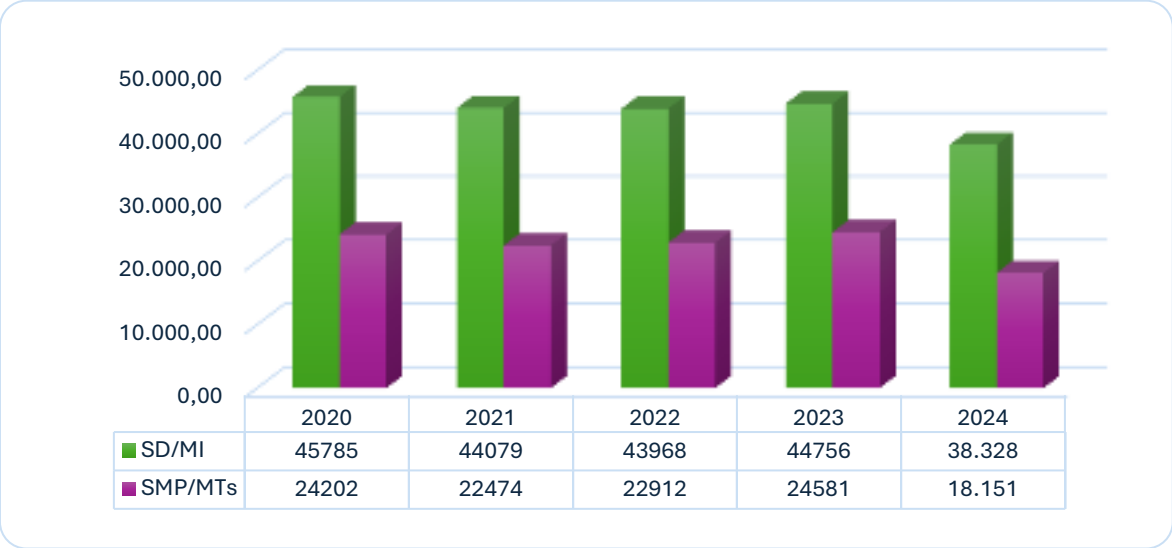
Tabel 2. 22. Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Siswa TK/RA				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kec. Pringsewu	1.652	1.241	1.480	54	N/A
Kec. Gadingrejo	1.262	856	1.050	48	N/A
Kec. Pagelaran	1.049	842	660	27	N/A
Kec. Ambarawa	574	725	1.021	20	N/A
Kec. Sukoharjo	771	947	1.036	29	N/A
Kec. Pardasuka	560	349	431	24	N/A
Kec. Adiluwih	1.044	483	529	22	N/A
Kec. Banyumas	271	363	458	18	N/A
Kec. Pagelaran Utara	303	173	166	15	N/A
Kabupaten Pringsewu	7.486	5.979	6.831	257	5.152

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2025

b) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan pada jenjang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada penduduk dalam rentang usia tersebut



memasuki jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Untuk jumlah siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuasi. Adapun jumlah siswa pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 42. Grafik Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

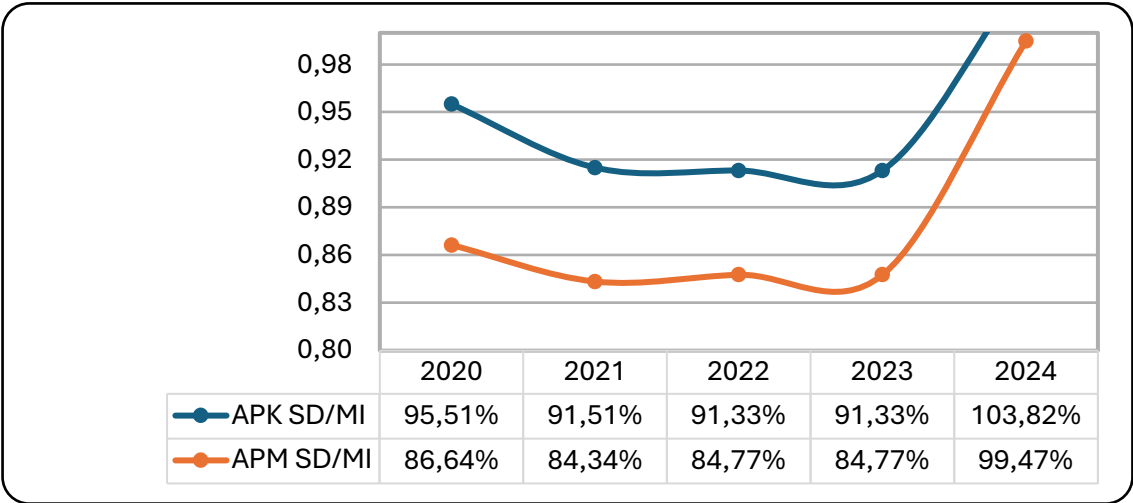
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

c) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

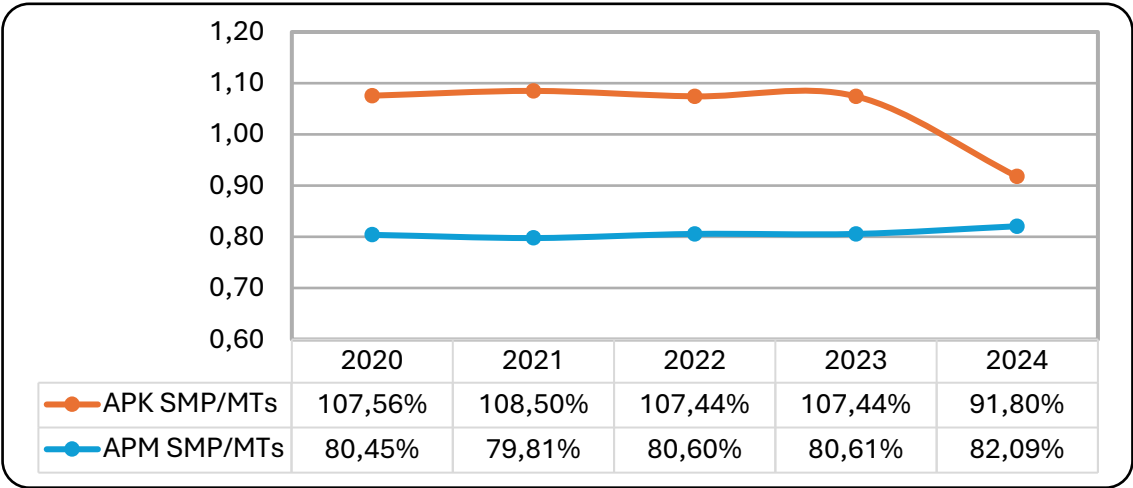
Pencapaian nilai APK diatas 100% disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Sedangkan untuk APM SD yaitu jumlah murid SD usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan SMP adalah jumlah murid SMP usia 13-



15 tahun. Apabila semua anak sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan usianya, maka nilai APM nya akan mencapai 100 persen. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Adapun APK dan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 43. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2025



Gambar 2. 44. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Data Pokok Pendidikan Kemdikbud dan Kemenag, 2025

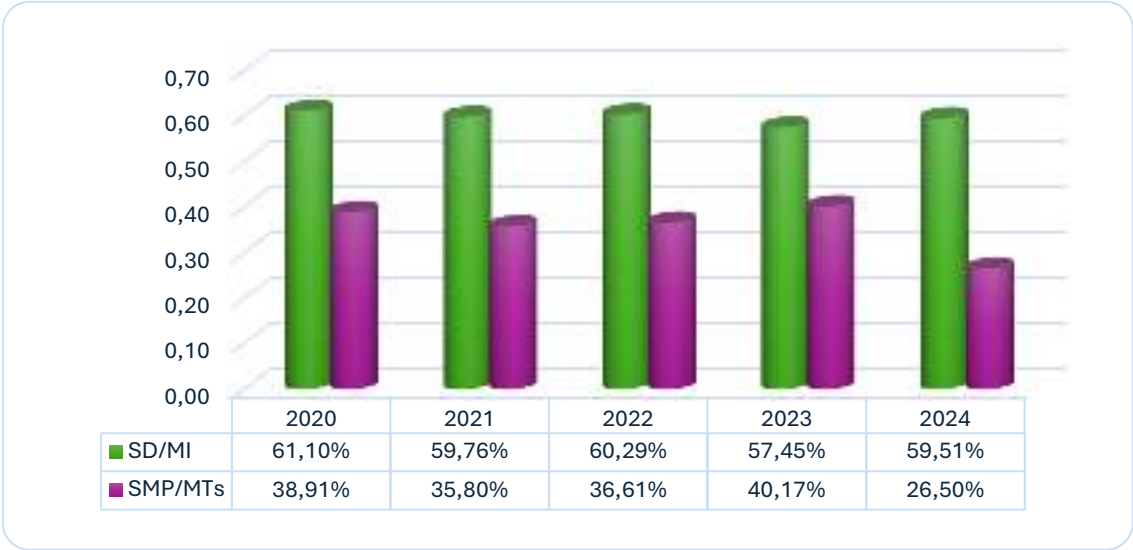
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2017-2021, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung naik namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 146 sekolah dan di tahun 2021 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 23. Jumlah SD/MI, SMP/MTs, Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Penduduk Usia 13-15 Tahun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SD/MI	300	297	297	302	268
Jumlah SMP/MTs	91	83	87	95	63
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	49.098	49.697	49.262	49.007	45.038
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	23.385	23.184	23.764	22.879	23.392

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2024

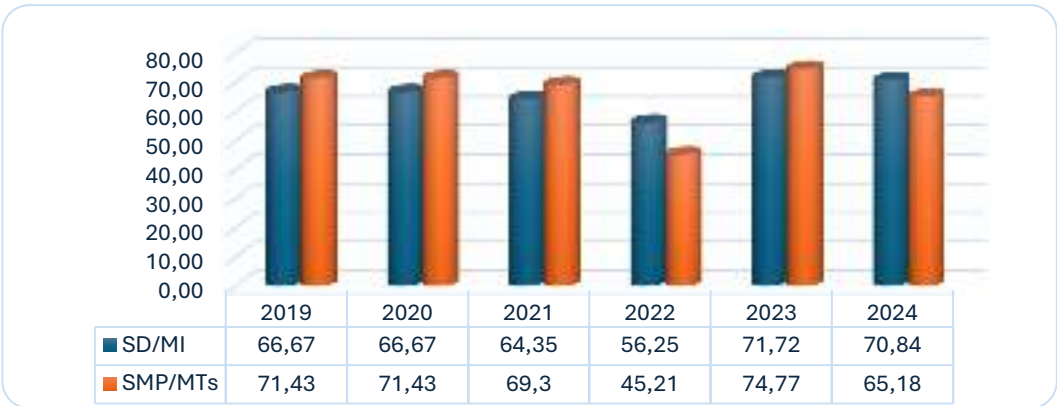


Gambar 2. 45. Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang optimal. Rasio guru dan murid juga perlu di dukung oleh pemerataan.

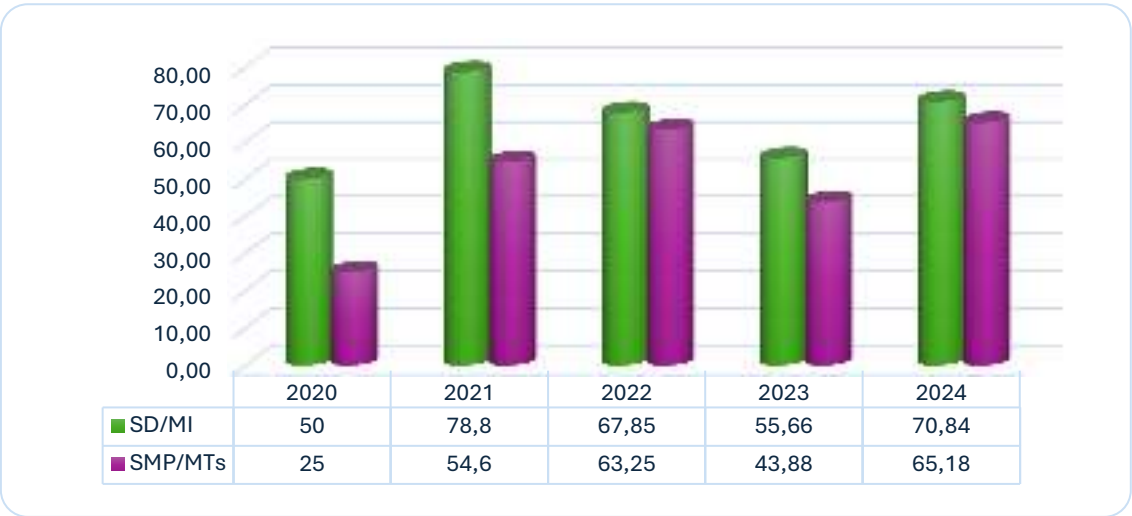


Gambar 2. 46. Grafik Rasio Guru Terhadap Murid per 10.000 Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

d. **Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata Rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru yang tersedia per kelas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

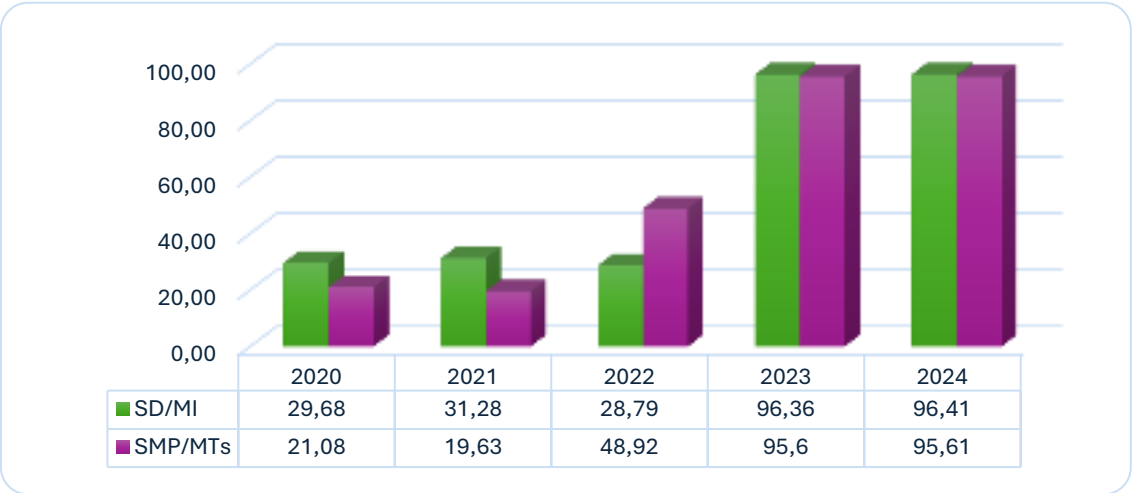


Gambar 2. 47. Grafik Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

e. **Fasilitas Pendidikan**

Kondisi ruang kelas yang rusak atau kurang memadai dapat berdampak pada kurang konsentrasinya murid dalam menerima bahan pelajaran. Kondisi



ruang kelas dalam keadaan baik merupakan proporsi kondisi kelas yang baik, dalam jenjang pendidikan tertentu, terhadap jumlah ruang kelas seluruh sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

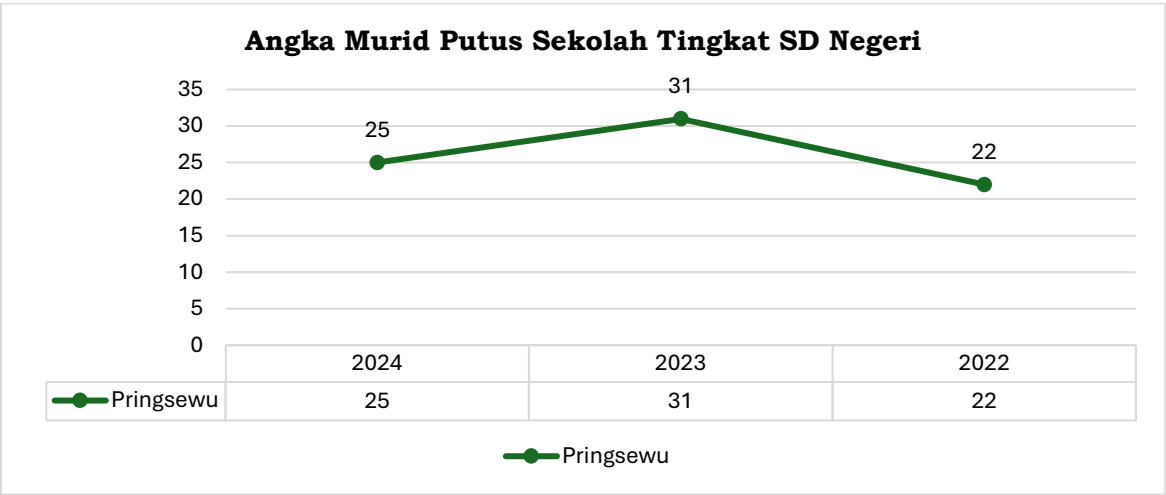
Gambar 2. 48. Grafik Kondisi Ruang Kelas dalam Keadaan Baik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

f. **Angka Putus Sekolah**

RKPD Tahun 2026

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan dan faktor anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya pendidikan melalui Jaminan Pendidikan Daerah dan menyalurkan anak tersebut ke sekolah formal maupun non formal sesuai minat dan kesesuaian anak. Kemudian Dinas Pendidikan melaksanakan Program Pendidikan Inklusi untuk menanggulangi anak putus sekolah karena faktor anak berkebutuhan khusus. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor sosial di lingkungan keluarga dan/atau masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu pada perencanaan kedepan Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan bersinergi dengan perangkat RT/RW dan PKK di wilayah untuk mendampingi anak putus sekolah agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang terakhir.

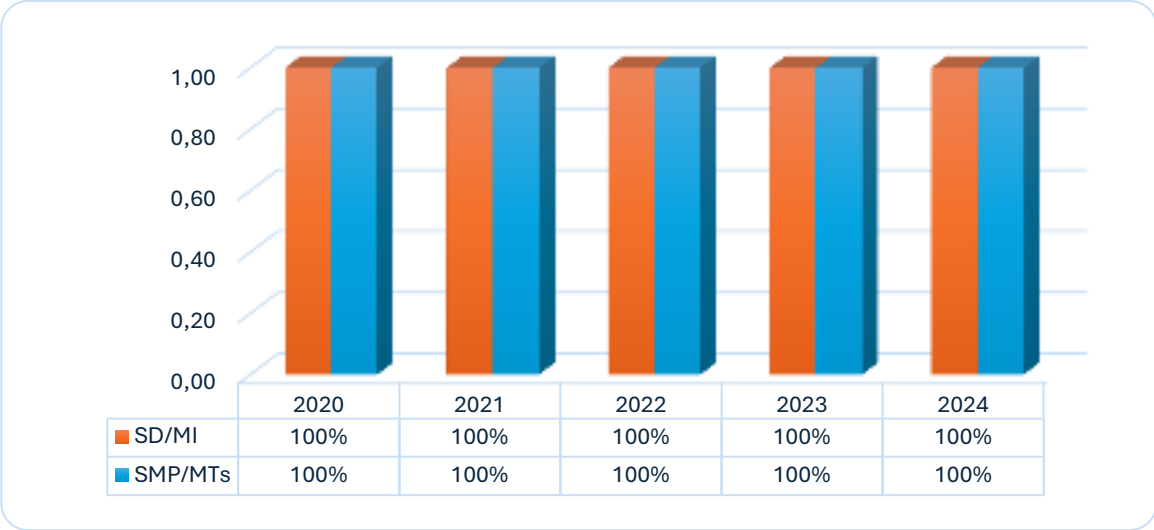


Gambar 2. 49. Grafik Angka Murid Putus Sekolah Tingkat SD Negeri di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

Tabel di atas menunjukkan jumlah murid putus sekolah tingkat SD Negeri di Kabupaten Pringsewu selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah murid yang putus sekolah tercatat sebanyak 22 orang. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 31 orang, menunjukkan adanya peningkatan masalah terkait keberlanjutan pendidikan di tingkat SD Negeri. Namun, pada tahun 2024, jumlah murid putus sekolah mengalami penurunan menjadi 25 orang, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan,

g. **Angka Kelulusan Sekolah**

Angka kelulusan sekolah merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Angka kelulusan yang semakin tinggi, mencerminkan semakin berhasilnya sistem pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan. Perhitungan angka kelulusan adalah merupakan persentase jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tersebut.

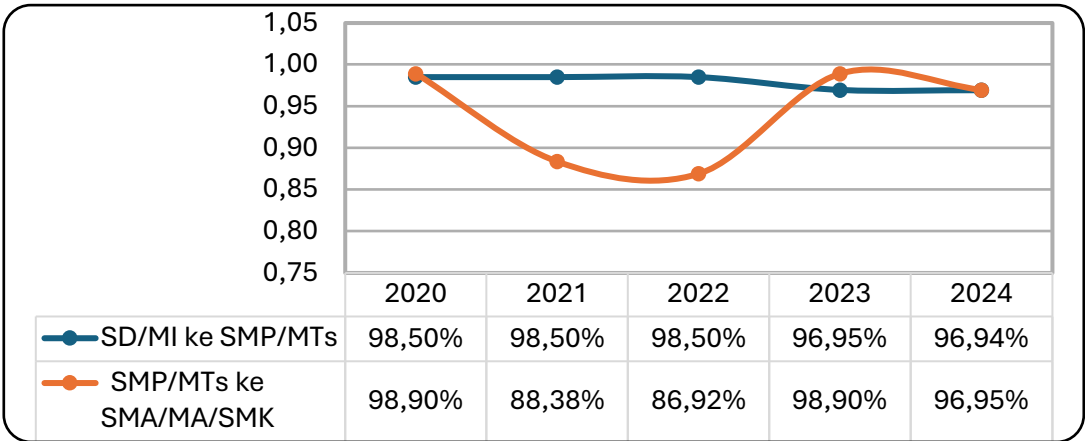


Gambar 2. 50. Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

h. **Angka Melanjutkan Sekolah**

Angka melanjutkan sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi angka melanjutkan sekolah, maka semakin baik kinerja dalam bidang pendidikan.

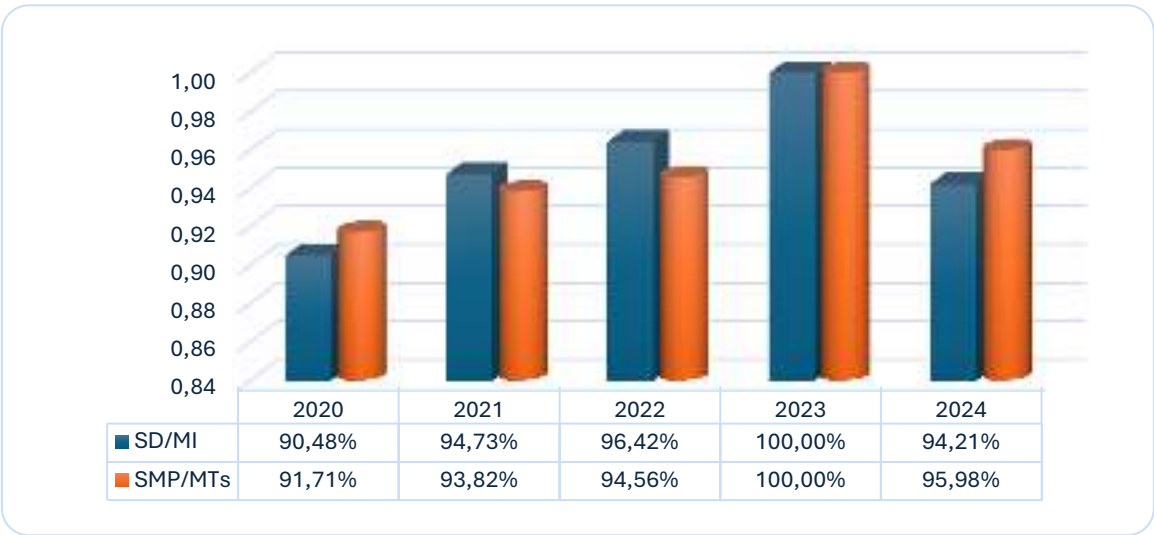


Gambar 2. 51. Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

i. **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4**

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV merupakan indikator yang mencerminkan kelayakan guru dalam mengajar. Hal ini karena kualitas pendidikan, ditentukan oleh guru yang berkualitas. Kondisi guru di Kabupaten Pringsewu yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

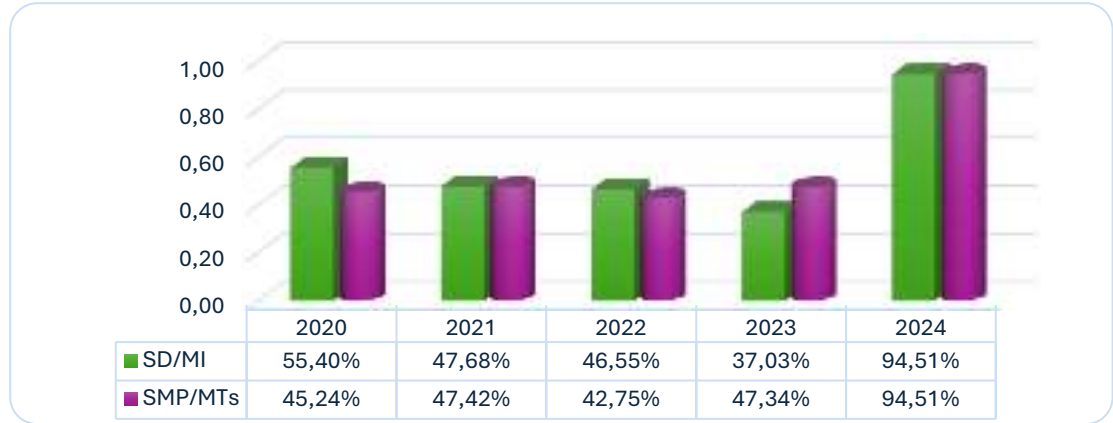


Gambar 2. 52. Grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

j. **Kualifikasi Guru Bersertifikat Mengajar**

Sertifikasi mendidik merupakan bukti formal atau pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional. Semakin banyak guru yang telah



memiliki sertifikasi mengajar, menjadi indikator terhadap kualitas pendidikan suatu daerah, karena sebelumnya telah ditempa keilmuannya.

Gambar 2. 53. Grafik Kualitas Guru Bersertifikat Mengajar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, 2025

B. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan tersebut perlu ditunjang dengan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Fasilitas kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik atau balai kesehatan serta fasilitas apotik. Ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 24. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	7	7	7	7	6
Jumlah Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	13	13	13	13	13
Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu	34	34	34	33	33
Jumlah Fasilitas Poliklinik/Rumah Bersalin	23	22	24	27	27
Jumlah Fasilitas Apotek/Toko Obat	47	67	85	95	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang sangat penting dalam mendukung perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas juga berperan membina masyarakat di wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Dalam hal jangkauan Puskesmas yang luas, maka perlu ditunjang Puskesmas Pembantu dan klinik.

Tabel 2. 25. Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Puskesmas per 20.000 Penduduk	0,65	0,65	0,61	0,63	0,61
Rasio Puskesmas Pembantu per 6.000 Penduduk	0,57	0,57	0,47	0,189	0,46

RKPD Tahun 2026

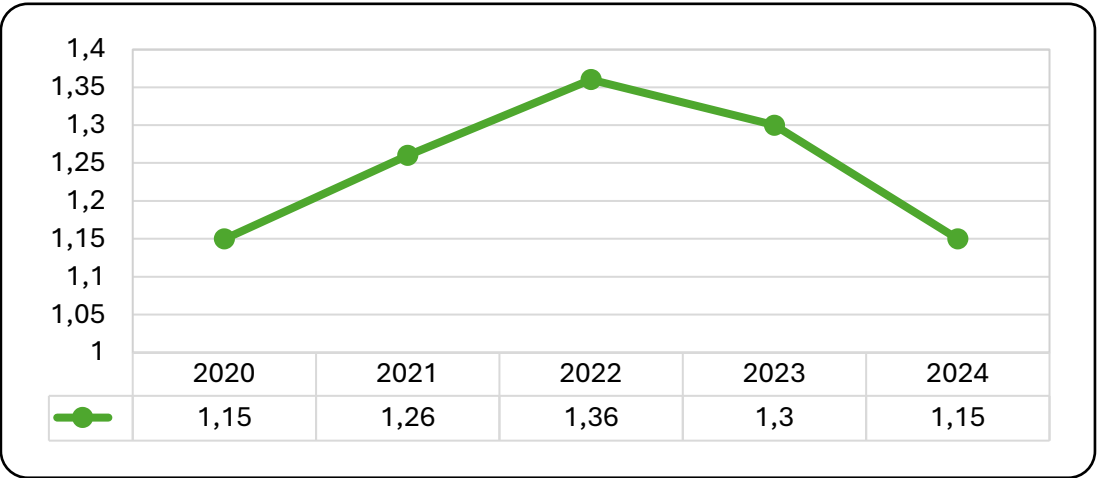
Jumlah Fasilitas Poliklinik/Rumah Bersalin per 6.000 Penduduk	0,34	0,33	0,34	0,39	0,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

b. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan, dan keluarga berencana yang memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Gambar 2. 54. Grafik Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Pringsewu

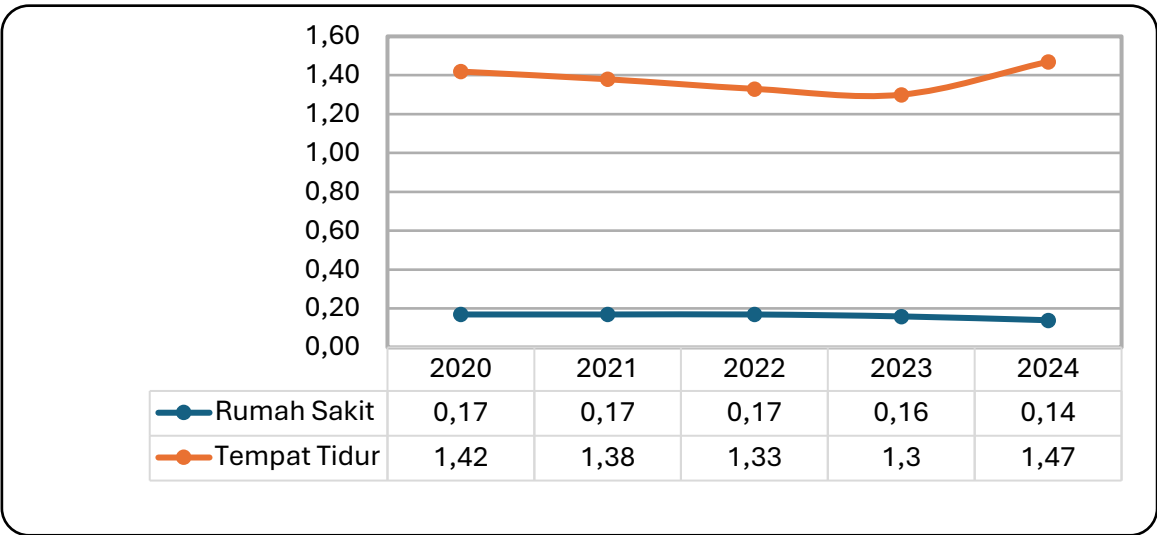


Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

c. **Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien**

Keberadaan rumah sakit menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja pelayanan kesehatan. Rasio rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Lalu untuk Rasio tempat tidur rumah sakit merupakan perbandingan antara jumlah tempat tidur per 1.000 penduduk.



Gambar 2. 55. Grafik Rasio Rumah Sakit dan Tempat Tidur Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

d. **Ketersediaan Tenaga Kesehatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan mencakup tenaga dokter, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang dimaksud dengan tenaga medis terdiri dari perawat dan bidan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Tenaga Kesehatan	Rasio Tanaga Kesehatan Terhadap 100000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu				
	2024	2023	2022	2021	2020
Dokter Spesialis	25,7	22,6	17,9	28,3	14,1
Dokter Umum	45,7	37,7	29,3	36,4	52,8

Dokter Gigi	7,1	5,2	5,4	5,2	2
Dokter Gigi Spesialis	0,5	0,2	-	-	-
Perawat	176,6	195,7	202,4	207,2	190,6
Bidan	159,2	140,6	136,8	137,4	122,6
Kesehatan Masyarakat	6,4	6,7	9,4	10,6	10,6
Kesehatan Lingkungan	12,0	10,2	8,3	6,6	6,9
Gizi	13,7	12,6	11,1	38	11,1
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	27,6	23,6	21,2	19,4	25,6
Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	4,9	7,9	6,6	21,1	-
Keterapian Fisik	3,3	2,1	2,1	2	1,7
Keteknisan Medis	15,1	9,8	17,5	11,1	10,1
Tenaga Teknis Kefarmasian	24,0	17,9	15,1	13	24,4
Apoteker	15,3	13,8	10,4	5,9	11,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan. kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat dan bidan perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga paramedis. Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat dan bidan) di Kabupaten Pringsewu dari Tahun 2020-2024 semakin membaik. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Berdasarkan data rasio tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren yang bervariasi pada berbagai jenis tenaga kesehatan, mencerminkan perkembangan dan tantangan dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayah ini. Beberapa profesi menunjukkan peningkatan signifikan, sementara yang lain justru mengalami penurunan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus untuk perencanaan tenaga kesehatan yang lebih baik.

Salah satu peningkatan yang menonjol terlihat pada rasio dokter spesialis, yang bertambah dari 14,1 pada tahun 2020 menjadi 25,7 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat layanan kesehatan yang membutuhkan keahlian khusus. Hal ini menjadi indikator positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan spesialisasi medis. Sementara itu, rasio dokter umum mengalami penurunan,

dari 52,8 pada tahun 2020 menjadi 45,7 pada tahun 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian, mengingat dokter umum merupakan tulang punggung layanan kesehatan dasar yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan primer.

Tenaga kesehatan di bidang kedokteran gigi menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 yakni 7,1 dibanding 3 tahun sebelumnya yang menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan rasio dokter gigi berkisar 5,2 hingga 5,4 selama tiga tahun terakhir. Selain itu, dokter gigi spesialis mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan rasio 0,5. Meski hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan spesialisasi di bidang kedokteran gigi, jumlah yang sangat rendah ini mengindikasikan kebutuhan penguatan tenaga spesialis di sektor ini.

Perawat tetap menjadi profesi tenaga kesehatan dengan rasio tertinggi, meskipun terjadi penurunan dari 190,6 pada tahun 2020 menjadi 176,6 pada tahun 2024. Tingginya rasio perawat mencerminkan fokus pada layanan kesehatan dasar yang terus dipertahankan. Selain itu, bidan juga menunjukkan peningkatan rasio dari 122,6 pada tahun 2020 menjadi 159,2 pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan adanya prioritas dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, yang merupakan bagian penting dari program kesehatan masyarakat.

Tenaga kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Rasio tenaga kesehatan lingkungan, misalnya, meningkat dari 6,9 pada tahun 2020 menjadi 12,0 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap sanitasi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan, yang menjadi elemen penting dalam mencegah penyakit berbasis lingkungan. Tenaga gizi juga menunjukkan peningkatan dari 11,1 pada tahun 2020 menjadi 13,7 pada tahun 2024, yang menandakan adanya upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

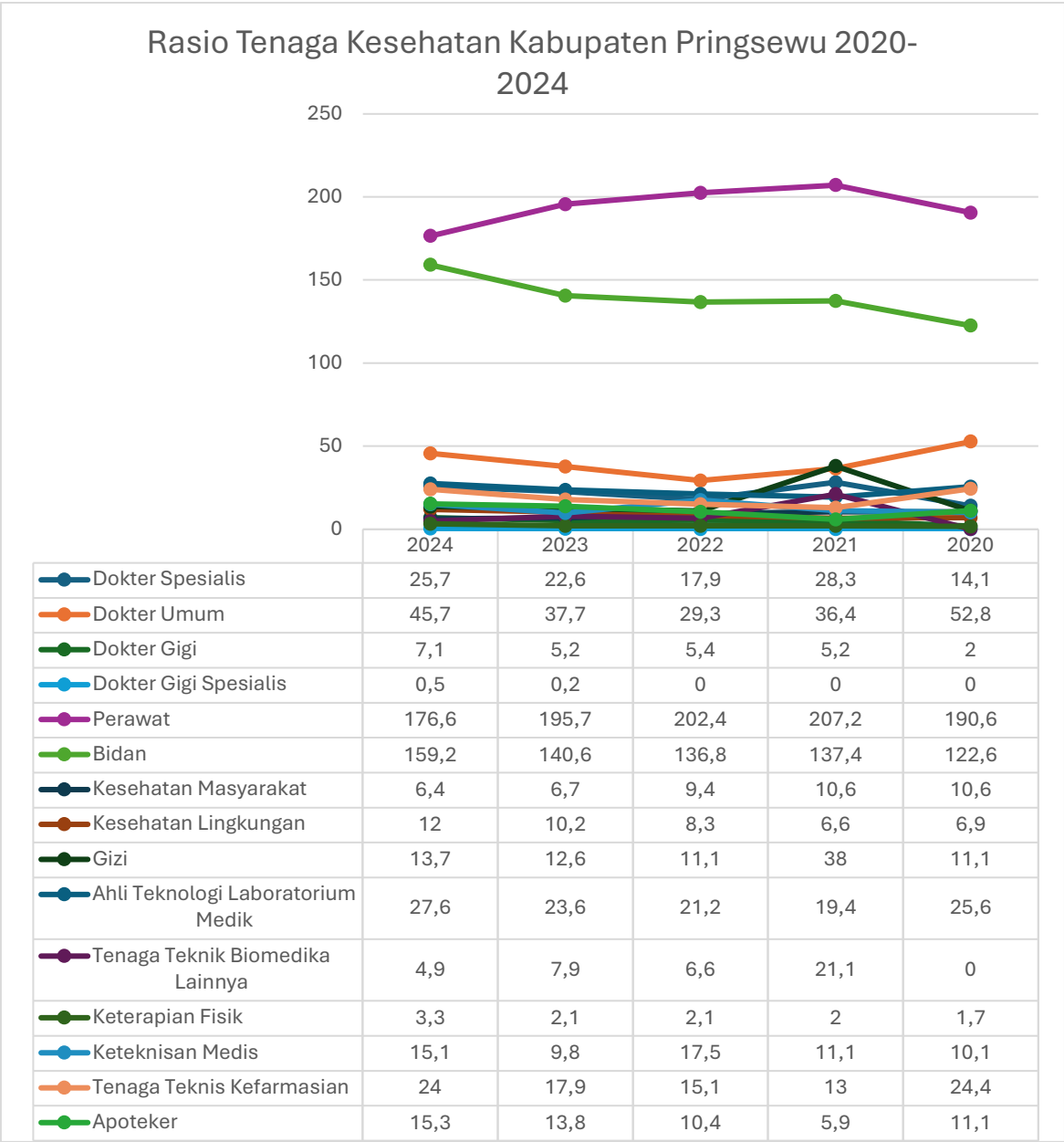
Tenaga ahli teknologi laboratorium medik dan tenaga teknis kefarmasian juga mencatatkan tren positif. Ahli teknologi laboratorium medik meningkat dari 25,6 pada tahun 2020 menjadi 27,6 pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan kapasitas diagnostik dan layanan laboratorium. Begitu pula dengan tenaga teknis kefarmasian, yang terus meningkat sejak tahun 2021 menjadi 24,0 pada tahun 2024, menandakan penguatan dalam

RKPD Tahun 2026

pelayanan farmasi untuk mendukung kebutuhan obat-obatan masyarakat. Apoteker juga mengalami peningkatan rasio dari 11,1 pada tahun 2020 menjadi 15,3 pada tahun 2024, yang berkontribusi dalam pengelolaan dan pemberian layanan farmasi yang lebih baik.

Namun, beberapa profesi masih menunjukkan rasio yang rendah. Misalnya, keterampilan fisik hanya memiliki rasio 3,3 pada tahun 2024, meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 1,7 pada tahun 2020. Dokter gigi spesialis juga mencatat rasio yang sangat rendah, yaitu 0,5 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam memperkuat dan menambah jumlah tenaga kesehatan di bidang-bidang tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan di beberapa jenis tenaga kesehatan, tantangan dalam menjaga keseimbangan distribusi tenaga kesehatan masih perlu menjadi prioritas. Fokus utama ke depan adalah meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada profesi dengan rasio rendah, seperti dokter gigi spesialis dan keterampilan fisik, sambil mempertahankan tren positif pada profesi lain. Dengan langkah ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pringsewu dapat terus berkembang secara merata, sehingga kebutuhan masyarakat akan akses kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi secara optimal.



Gambar 2. 56. Grafik Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2024

e. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan adalah fasilitas fisik yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sarana ini mencakup berbagai jenis tempat atau bangunan yang digunakan untuk mendukung upaya menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan, baik melalui tindakan pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasi. Sarana kesehatan menjadi elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai wadah bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Tabel 2. 27. Sarana Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Kepemilikan		
		Pemerintah	Swasta	Jumlah
		Kabupaten/Kota		
Rumah Sakit				
1	Rumah Sakit Umum	1	3	4
2	Rumah Sakit Khusus		2	2
Puskesmas dan Jaringannya				
1	Puskesmas Rawat Inap	10		10
	- Jumlah Tempat Tidur	97		97
2	Puskesmas Non Rawat Inap	3		3
3	Puskesmas Keliling	7		7
4	Puskesmas Pembantu	33		33
Sarana Pelayanan Lain				
1	Klinik Pratama		24	24
2	Klinik Utama		4	4
3	Tempat Praktik Mandiri Dokter		43	43
4	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi		9	9
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis		6	6
6	Tempat Praktik Mandiri Bidan		149	149
7	Tempat Praktik Mandiri Perawat		19	19
8	Unit Transfusi Darah		1	1
Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
1	Apotek		91	91
2	Toko Obat		8	8
3	Toko Alat Kesehatan		5	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

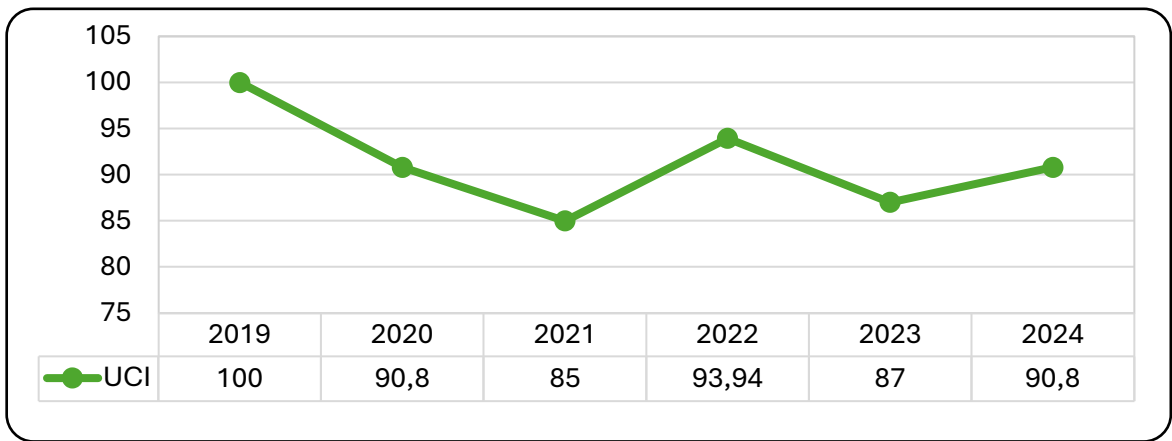
Fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Pada kategori rumah sakit, terdapat 4 rumah sakit umum, dengan 1 rumah sakit dikelola oleh pemerintah kabupaten dan 3 lainnya dimiliki oleh swasta. Sementara itu, terdapat 2 rumah sakit khusus yang seluruhnya dimiliki oleh sektor swasta, menandakan dominasi swasta dalam penyediaan layanan kesehatan dengan spesialisasi tertentu. Dalam jaringan Puskesmas, seluruh fasilitas sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, termasuk 10 Puskesmas rawat inap dengan kapasitas 97 tempat tidur, 3 Puskesmas non-rawat inap, 7 Puskesmas keliling, dan 33 Puskesmas pembantu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang merata hingga ke tingkat lokal.

Pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, sektor swasta mendominasi dengan keberadaan 24 klinik pratama, 4 klinik utama, serta berbagai tempat praktik mandiri yang mencakup 43 dokter, 9 dokter gigi, 6 dokter spesialis, 149 bidan, dan 19 perawat. Jumlah tempat praktik mandiri bidan yang jauh lebih banyak dibandingkan profesi lainnya menyoroti peran penting bidan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pringsewu. Di sisi lain, terdapat 1 unit transfusi darah yang dikelola oleh pemerintah, yang berperan penting dalam pelayanan medis, meskipun jumlahnya masih terbatas dan berpotensi untuk ditingkatkan.

Pada sarana kefarmasian, seluruh fasilitas seperti 91 apotek, 8 toko obat, dan 5 toko alat kesehatan dikelola oleh sektor swasta. Hal ini menunjukkan peran besar swasta dalam distribusi obat-obatan dan alat kesehatan di Kabupaten Pringsewu. Secara keseluruhan, fasilitas kesehatan di Kabupaten Pringsewu cukup beragam dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah unit transfusi darah dan rumah sakit pemerintah, untuk memastikan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang.

f. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan atau kematian ibu dan anak serta upaya pengendalian penyakit infeksi adalah melalui imunisasi. Oleh karena itu maka cakupan imunisasi menjadi indikator capaian UCI pada desa-desa yang terdapat pada daerah.



Gambar 2. 57. Grafik Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Pasien di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, 2025

g. Universal Health Coverage (UHC)

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) sejak 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program JKN/KIS bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Cakupan Universal Health Covarage Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 yaitu sebesar 98% dengan Tingkat keaktifan peserta JKN sebesar 77%.

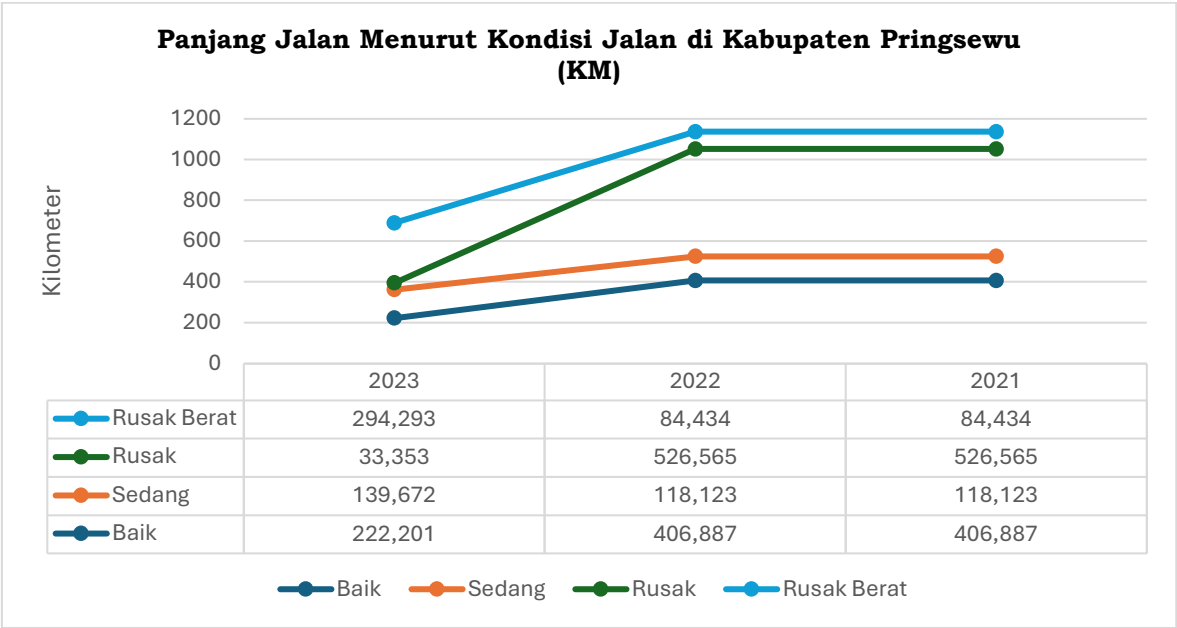
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan dan

jembatan, pengelolaan sumber daya air, lingkungan perumahan dan penataan ruang. Capaian indikator kinerja urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut.

a. Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya.



Gambar 2. 578. Grafik Proporsi Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021-2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Berdasarkan tabel yang menampilkan panjang jalan berdasarkan kondisi jalan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 hingga 2023, terdapat perubahan signifikan pada kondisi jalan.

Pada tahun 2023, total panjang jalan tercatat 689,519 km, mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1 136,009 km pada tahun 2022 dan 2021. Kondisi jalan yang tergolong "baik" pada tahun 2023 hanya mencapai 222,201 km, jauh lebih sedikit dibandingkan

tahun 2022 dan 2021 yang masing-masing sebesar 406,887 km. Demikian pula, panjang jalan dengan kondisi "sedang" pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 139,672 km, dibandingkan tahun sebelumnya yang tetap sebesar 118,123 km.

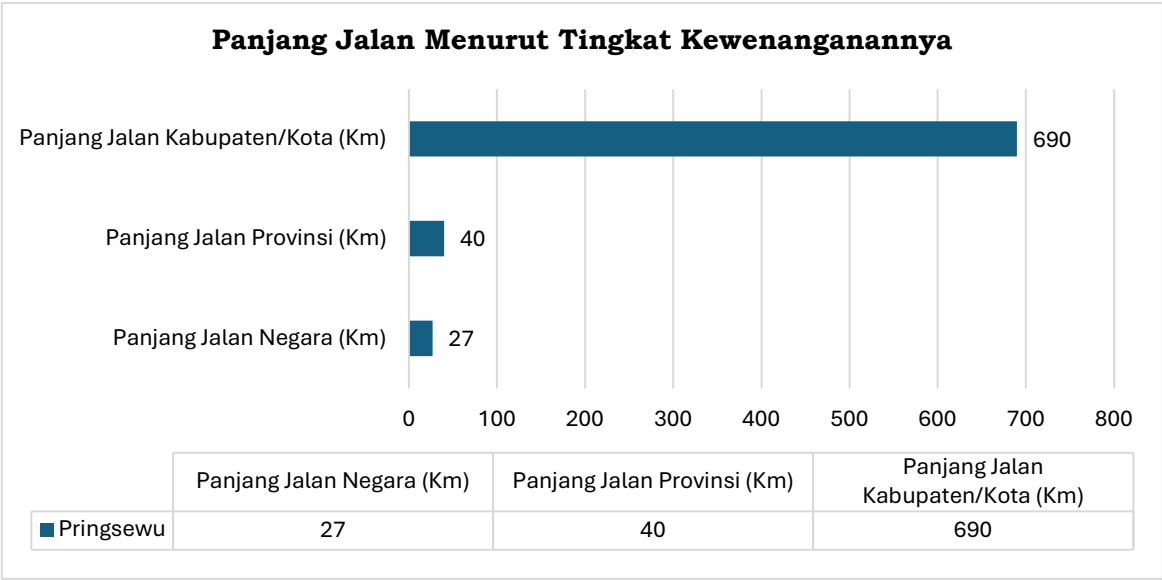
Namun, kondisi jalan "rusak" menunjukkan perbaikan besar, dengan panjangnya menurun drastis dari 526,565 km pada tahun 2022 dan 2021 menjadi hanya 33,353 km pada tahun 2023. Sebaliknya, kategori "rusak berat" justru menunjukkan lonjakan tajam pada tahun 2023, meningkat menjadi 294,293 km dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 84,434 km.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perubahan prioritas atau penurunan dalam kualitas keseluruhan jaringan jalan di Kabupaten Pringsewu, dengan pergeseran panjang jalan dari kondisi "baik" dan "sedang" menjadi "rusak berat". Hal ini dapat menjadi indikasi perlunya peningkatan perawatan jalan atau adanya faktor lain yang memengaruhi kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.

b. Panjang Jalan Menurut Kewenangannya

Jalan merupakan infrastruktur transportasi yang memegang peranan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Provinsi Lampung, jaringan jalan tersebar di berbagai kabupaten/kota dengan pengelolaan yang dibagi berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi dan skala prioritasnya.

Berikut disajikan panjang jalan di Kabupaten Pringsewu Lampung tahun 2023 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota dan tingkat kewenangan pemerintahan. Analisis data ini memberikan gambaran mengenai distribusi panjang jalan di setiap kabupaten/kota, termasuk proporsi jalan yang dikelola oleh masing-masing tingkat pemerintahan.

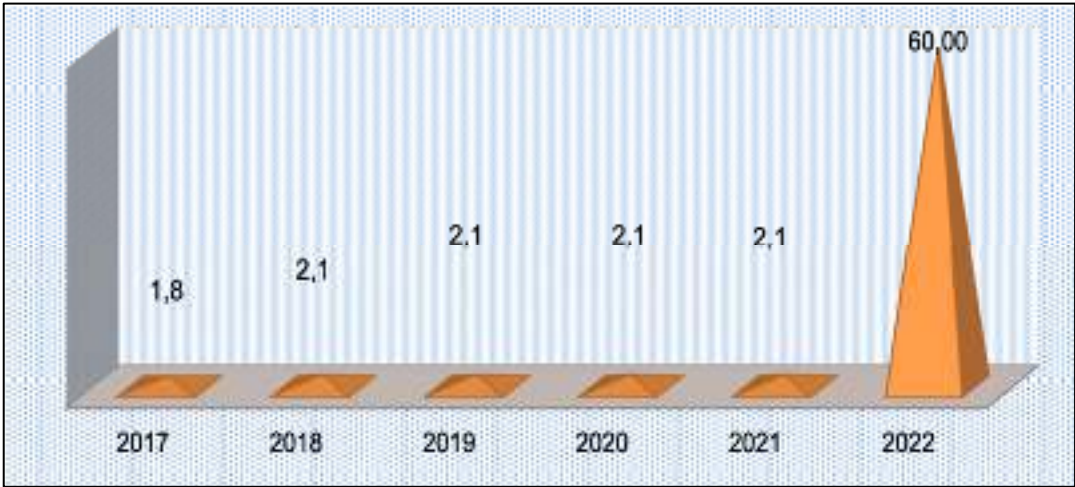


Gambar 2. 589. Grafik Panjang Jalan di Kabupaten Pringsewu Menurut Tingkat kewenangannya Tahun 2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Panjang jalan yang memiliki Drainase

Sistem drainase adalah rangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air (sungai dan danau) atau ke tempat resapan buangan, sehingga kawasan itu dapat difungsikan maksimal.

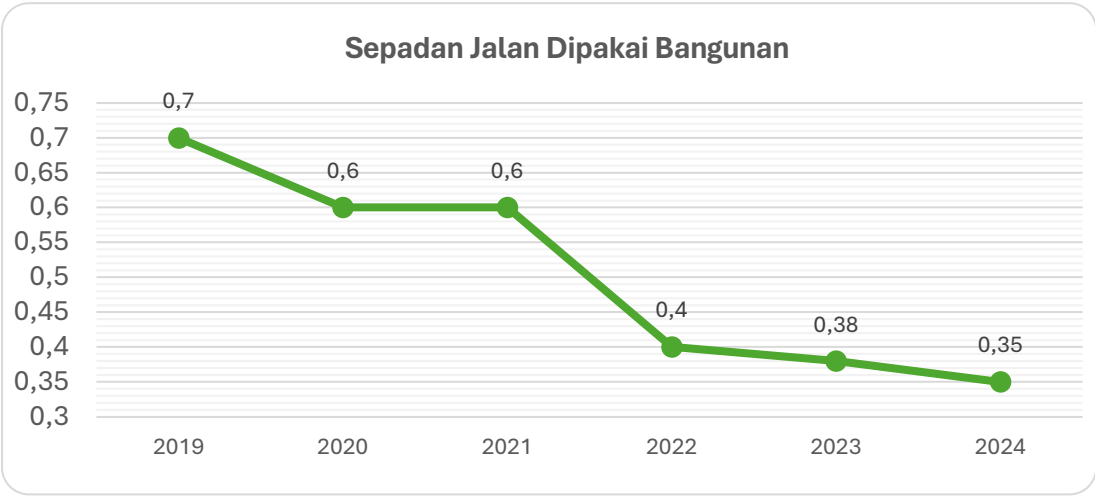


Gambar 2. 60. Grafik Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

d. Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau bangunan Rumah Liar

Garis sempadan jalan diperlukan untuk mengatur jarak pandang lalu lintas dan estetika tata ruang, sehingga bila dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar, maka dapat menghilangkan fungsi tersebut, dan indikator ini merujuk pada ketaatan terhadap keamanan warga.



Gambar 2. 61. Grafik Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

e. **Rasio Jaringan irigasi**

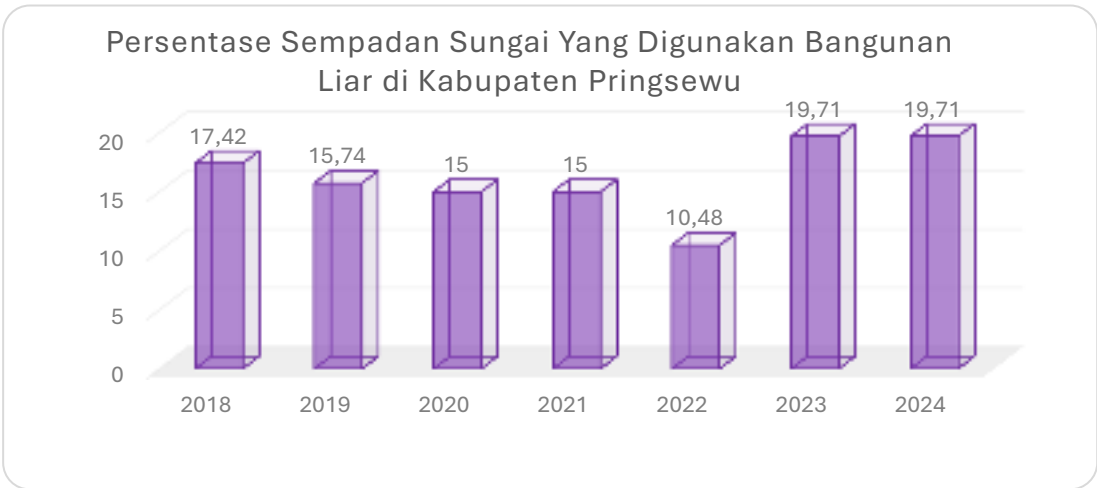
Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan beserta bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam rangka untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.



Gambar 2. 59. Grafik Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

f. **Sempadan Sungai yang Dipakai bangunan Liar**

Sempadan sungai merupakan batas luar pengamanan sungai yang ada di sisi kiri dan kanan, Oleh karena itu maka diperlukan penertiban terhadap



bangunan liar, karena keberadaan bangunan tersebut, selain dapat membahayakan dirinya sendiri, juga dapat memunculkan penggundulan terhadap sempadan sungai.

Gambar 2. 60. Grafik Persentase Sempadan Sungai Yang Digunakan Bangunan Liar di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

g. **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

RKPD Tahun 2026

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya punya akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, tempat pembuangan tinja, tempat pembuangan air limbah (air bekas) dan pembuangan sampah. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.



Gambar 2. 61. Grafik Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Gambar di atas menunjukkan persentase rumah tangga di Kabupaten Pringsewu yang memiliki akses terhadap sanitasi layak selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, angka tersebut berada di 84,64%. Tahun berikutnya, yaitu 2021, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 88,91%. Namun, pada tahun 2022, persentasenya mengalami penurunan kembali ke 84,22%, yang hampir setara dengan angka pada tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 88,72%, mendekati capaian tertinggi pada tahun 2021. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan fluktuasi dalam akses sanitasi layak, dengan tren peningkatan dari awal hingga akhir periode yang diamati.

h. Akses Air Minum yang Layak

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi

masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.



Gambar 2. 62. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Berdasarkan tabel mengenai persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam akses terhadap air minum yang layak. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak mencapai 95,45%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 96,68%, yang merupakan pencapaian tertinggi selama periode tersebut.

Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 93,38%, menunjukkan adanya penurunan akses terhadap air minum layak di masyarakat. Kondisi ini membaik kembali pada tahun 2023, di mana persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak naik menjadi 95,64%, mendekati tingkat pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan dan penurunan selama periode tersebut, angka persentase menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pringsewu tetap memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak, dengan fluktuasi yang mungkin mencerminkan dinamika dalam pengelolaan infrastruktur air minum atau dampak faktor lingkungan tertentu.

i. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam penataan ruang terkandung proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdaya guna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun dalam penataan ruang di Kabupaten Pringsewu antara lain terdapat 4 (empat) indikator dalam rencana pembangunan seperti yang termaktub dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 28. Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2023

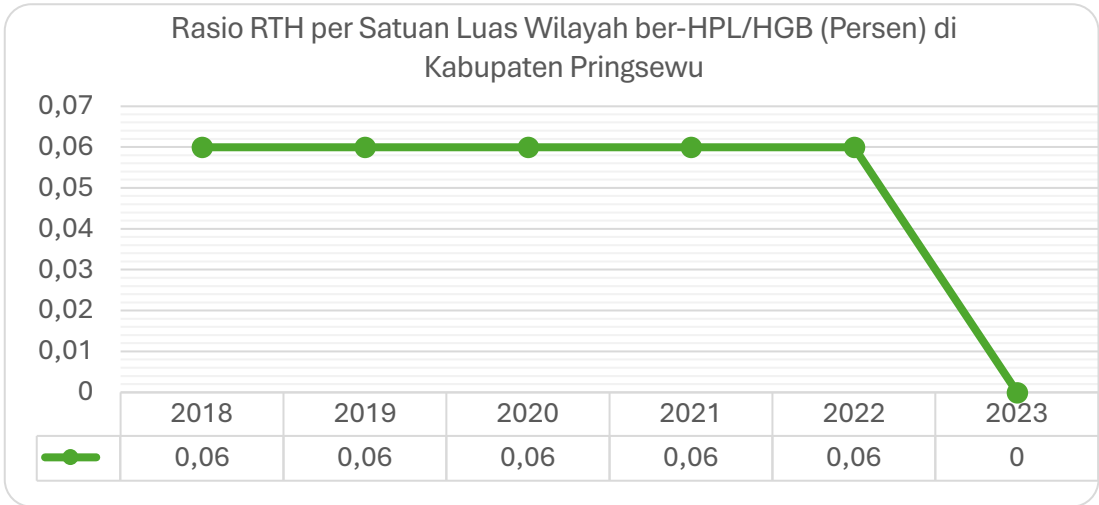
Indikator	Capaian Indikator (dalam Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Rasio Bangunan ber- IMB per	44,65	44,75	44,87	44,87	40,00	34,00	34,00

Indikator	Capaian Indikator (dalam Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Satuan Bangunan							
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	60,91	60,99	61,75	74,00	80,79	80,79	80,79

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana yang termaktub pada tabel di atas. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alami maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria lahan dengan luasan paling sedikit 2,500 (dua ribu lima

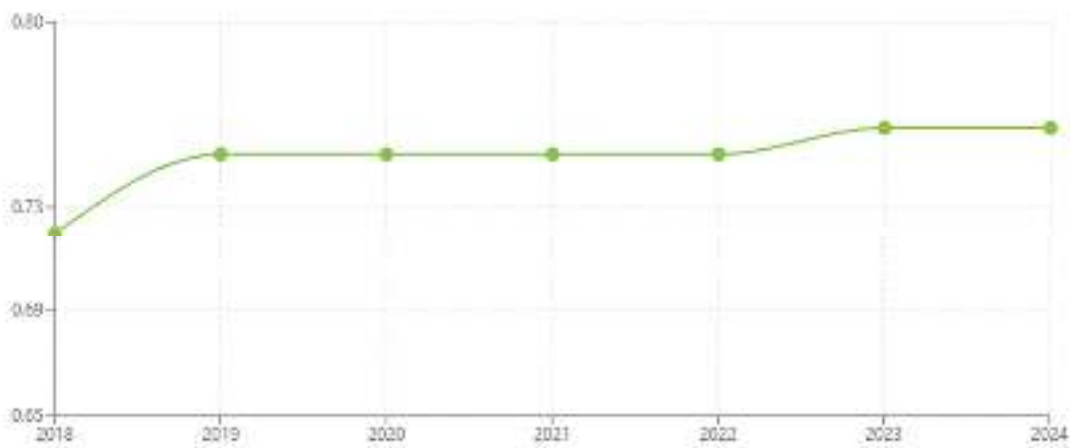


ratus) meter persegi, berbentuk suatu hamparan atau berbentuk jalur, atau kombinasi dari keduanya, serta didominasi oleh komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30%. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB stagnan dan cenderung konstan yaitu berada di 0,06 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini tentu saja menandakan bahwa perlu adanya peningkatan Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Pringsewu untuk meningkatkan jumlah RTH di masa mendatang. Adapun grafik Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 63. Grafik Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Penyediaan RTH memiliki tujuan untuk (a) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, (b) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan (c) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu sempat mengalami peningkatan pada 2019, dari yang semula 0,72 persen pada tahun sebelumnya menjadi 0,75 persen. Setelah mengalami kenaikan tersebut, luasan RTH publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu stagnan hingga tahun 2022. Hal ini tentu saja perlu ditingkatkan untuk memenuhi ketercapaian luasan RTH publik sebanyak 20 persen dari kawasan perkotaan di Kabupaten Pringsewu. Adapun grafik luasan RTH publik sebanyak 20 persen di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 64. Grafik Luasan RTH Publik 20 Persen dari Kawasan Perkotaan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

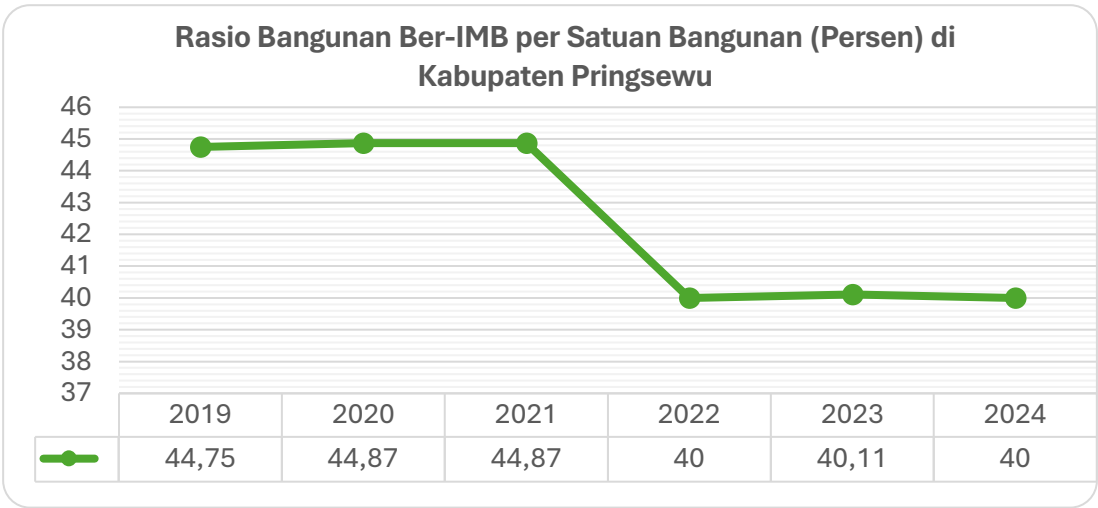
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

Capaian indikator urusan Penataan Ruang berikutnya adalah rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 RKPD Tahun 2026

(lima) tahun terakhir. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian/ seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk memberikan pelayanan terhadap penduduk berupa jaminan terciptanya lingkungan hidup yang teratur, aman dan nyaman sesuai dengan peruntukan ruang.

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2019 hingga 2020, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mengalami tren positif, dari 44,75 persen pada tahun 2019 hingga mencapai 44,87 persen pada tahun 2020. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan sempat stagnan pada tahun 2021, kemudian menurun pada tahun 2022 dari 44,87 persen menjadi 40,00 persen namun kembali naik pada tahun 2023 hingga mencapai 40,11 persen. Hal ini menandakan bahwa menurunnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangunan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalam izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Adapun grafik rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini

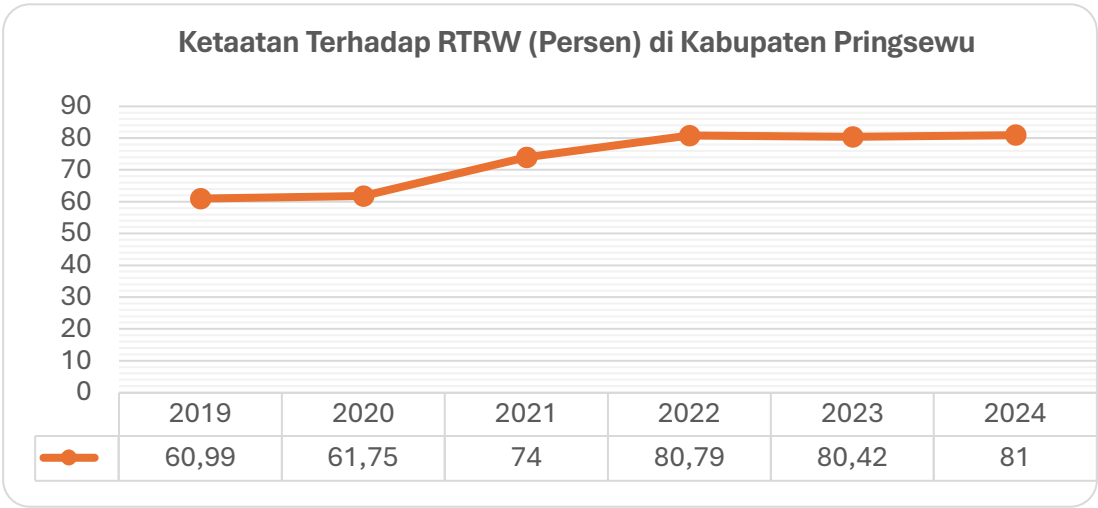
Gambar 2. 65. Grafik Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan (Persen) di



Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

Capaian indikator urusan Penataan Ruang terakhir adalah ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu. Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Karena itu sedang dilakukan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pringsewu, yang disesuaikan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2019-2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun grafik ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pringsewu dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 669. Grafik Ketaatan Terhadap RTRW (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

D. Perumahan dan Permukiman

a. Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni

Rumah merupakan bangunan berfungsi tempat tinggal yang layak, sarana pembinaan keluarga, cerminan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Oleh karena itu, rumah tinggal membutuhkan syarat tertentu supaya nyaman. Diantaranya ketersediaan air bersih, pembuangan air limbah, ventilasi, akses yang mudah dijangkau, sarana transportasi dan komunikasi, sarana rekreasi, pendidikan, kesehatan, drainase dan lain-lain. Indikator ini

menunjuk pada kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan rumah layak huni.



Gambar 2. 70. Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak (persen) 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

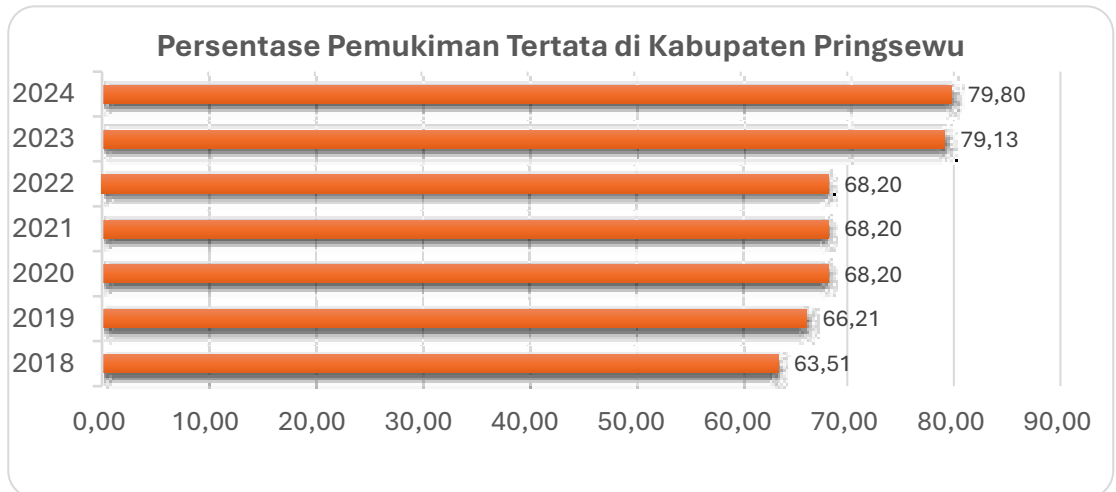
Berdasarkan tabel mengenai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Pringsewu dari tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat akses tersebut. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan hunian layak tercatat sebesar 76,84%. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, mencapai 81,38%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam, dengan persentase hanya sebesar 73,18%. Kondisi ini kembali membaik pada tahun 2023, di mana persentase naik menjadi 78,93%.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi selama empat tahun terakhir, data menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pringsewu tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak. Fluktuasi ini dapat mencerminkan tantangan dalam pembangunan perumahan, pengelolaan hunian, atau faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang memadai.

b. Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan permukiman yang tertata merupakan kawasan lingkungan penghunian yang telah tertata, dan memenuhi standar kesehatan lingkungan, sehingga membuat nyaman bagi penghuninya.

Gambar 2. 71. Grafik Persentase Permukiman Tertata di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

c. Cakupan perumahan yang Didukung PSU

Perumahan merupakan kumpulan dari beberapa rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). PSU didefinisikan sebagai infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat di suatu kawasan perumahan. Dapat dilihat dari grafik bahwa ada penurunan grafik yang awalnya ditahun 2022 yaitu 83,07 menjadi 79,13 di tahun 2023. Pada tahun 2024 menjadi 79.



Gambar 2. 72. Grafik Cakupan Perumahan Didukung PSU di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2023

d. Kawasan Permukiman Kumuh

Pemukiman kumuh ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, jalan sempit, cenderung berupa jalan tanah, belum berupa perkerasan, drainase kurang memadai, fasilitas pembuangan limbah tidak memadai, fasilitas air bersih sangat minim, tata bangunan tidak teratur dan rawan terhadap penularan penyakit. Semakin kecil lingkungan pemukiman kumuh, maka semakin baik kinerja dalam pengelolaan lingkungan pemukiman kumuh.



Gambar 2. 67. Grafik Persentase Rumah Tangga yang Tinggal di Hunian Kumuh 2020-2024
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2024

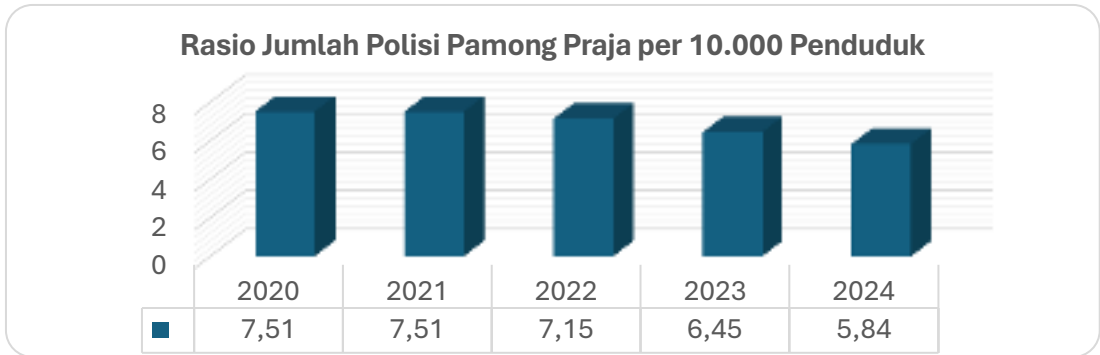
Tabel di atas menunjukkan persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh di Kabupaten Pringsewu selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh tercatat sebesar 1,81%. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 2,56% dan kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 3,36%, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, persentasenya turun drastis menjadi 1,01%, yang merupakan angka terendah dalam periode yang diamati. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan masalah hunian kumuh pada awal periode, diikuti oleh penurunan tajam pada tahun 2023. Penurunan ini dapat menunjukkan keberhasilan program penanganan hunian kumuh yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik merupakan prasyarat terhadap tumbuh kembangnya investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik kita adalah memelihara kebhinekaan agar tetap menjadi faktor yang mampu menginspirasi, memperkaya dan menguatkan ikatan persatuan dan kesatuan. Sistem penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara rasa aman bagi masyarakat.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong praja per 1000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja adalah proporsi jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.



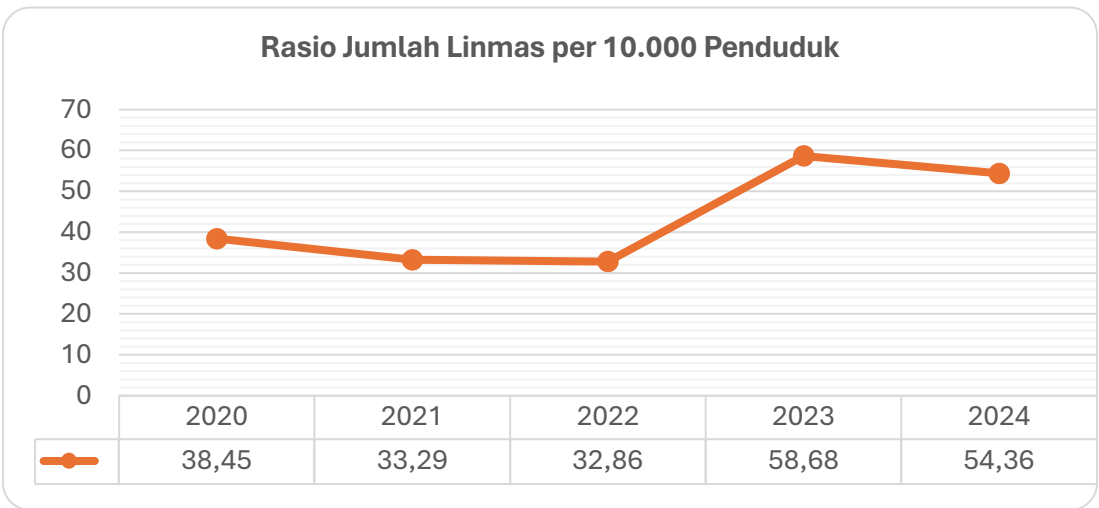
Indikator ini mencerminkan tingkat kemampuan daerah untuk menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah

Gambar 2. 68. Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2025

b. Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Jumlah LINMAS adalah proporsi jumlah perlindungan masyarakat per jumlah 10.000 penduduk. Rasio jumlah linmas ini menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.



Gambar 2. 69. Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2025

c. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

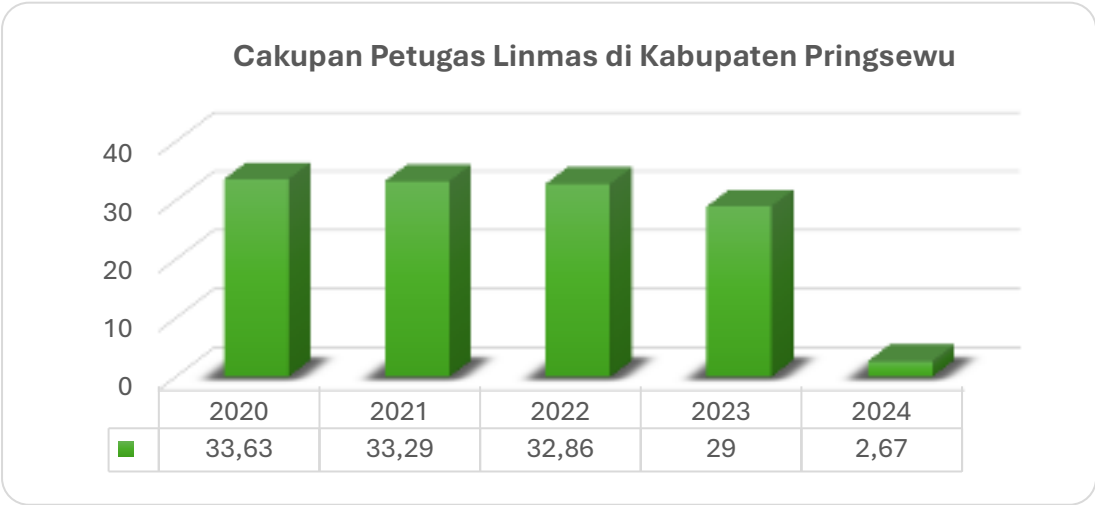
Rasio pos siskamling adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama satu tahun dengan jumlah desa/kelurahan yang ada. Semakin besar rasio pos siskamling, semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut memelihara ketentraman, ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.



Gambar 2. 70. Grafik Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2025

d. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara bagi keselamatan masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.



Gambar 2. 71. Grafik Rasio Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2025

e. Persentase Penegakan peraturan Daerah

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu maka perlu untuk dipastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhi. Dalam rangka memastikannya maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menegakannya melalui operasi yustisi atau kegiatan kegiatan lainnya. Jika dilihat dari grafik disetiap tahunnya selalu mengalami

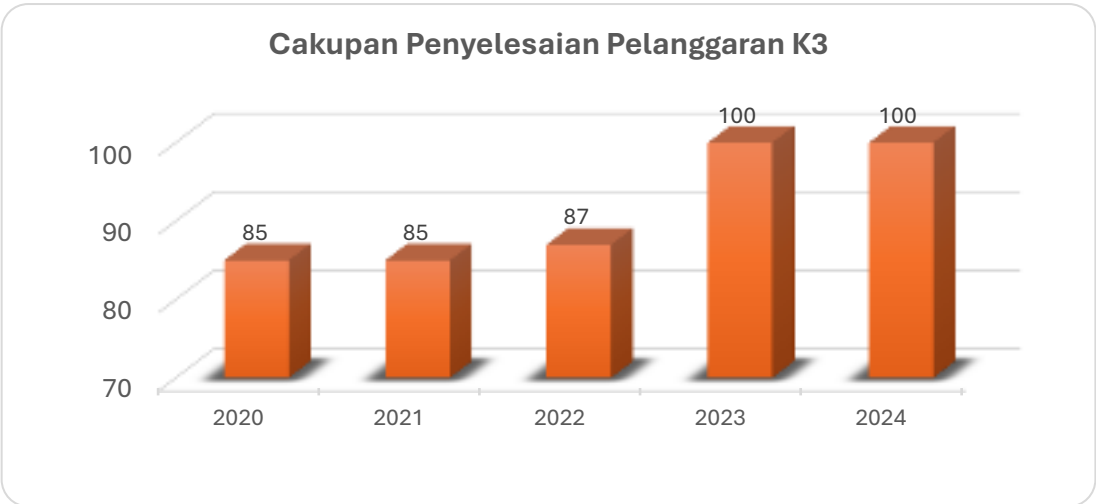
kenaikan, dan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 menyentuh angka 100,00.



Gambar 2. 72. Grafik Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2024

f. Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3

Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) merupakan hak bagi semua masyarakat. Dengan terjaganya K3 maka aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan nyaman dan tercipta kehidupan yang harmonis. Karena itu maka setiap aktivitas yang dapat mengganggu K3, harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



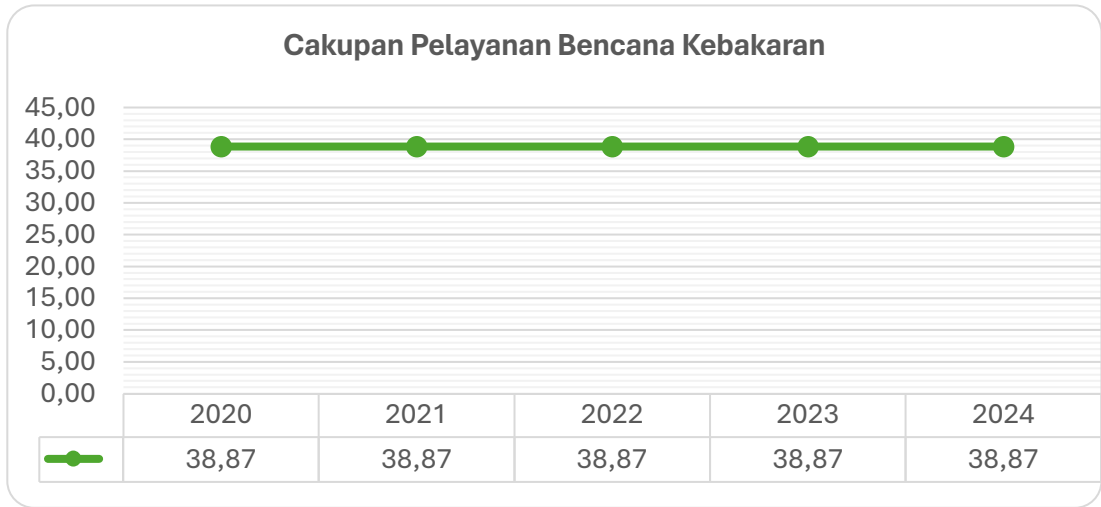
Gambar 2. 73. Grafik Cakupan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu, 2025

Grafik diatas menggambarkan keberhasilan yang progresif dalam menangani pelanggaran K3, dengan pencapaian sempurna pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pernyataan di atas grafik yang menekankan pentingnya K3 bagi kehidupan masyarakat yang harmonis dan nyaman.

g. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

RKPD Tahun 2026

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dapat dinyatakan dengan perbandingan jumlah luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap jumlah luas potensi kebakaran. Cakupan pelayanan kebakaran sangat tergantung dengan jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki dengan mengoptimalkan sarana yang ada. Meski ada peningkatan di awal periode, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pringsewu cenderung stabil namun masih terbatas, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan pelayanan di masa mendatang.

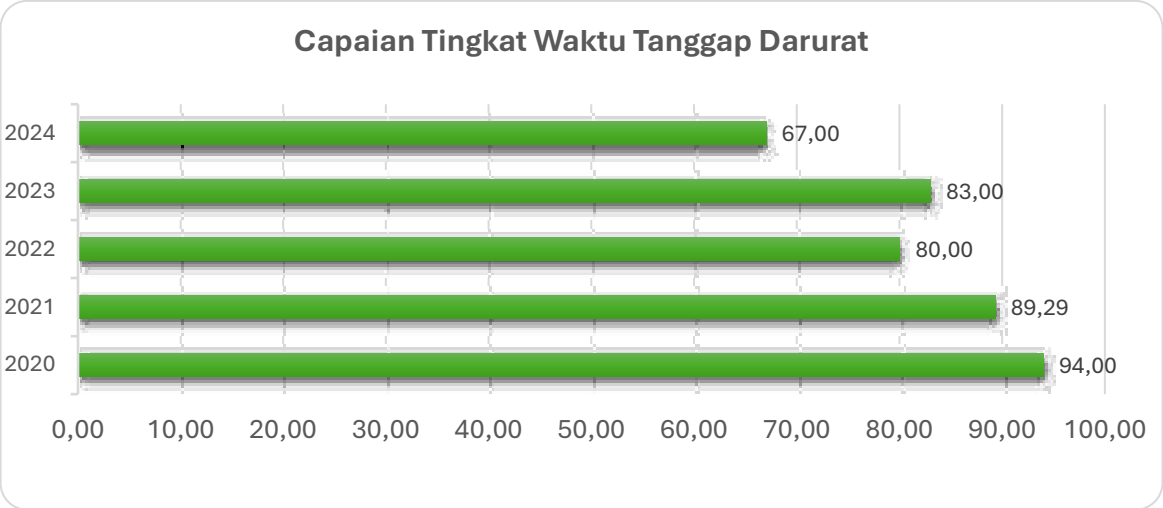


Gambar 2. 80. Grafik Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu, 2025

h. Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat

Tingkat waktu tanggap (response time rate) merupakan perbandingan antara jumlah kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap terhadap jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK. Response Time Rite ini telah ditentukan dalam waktu 15 menit, dihitung sejak diterimanya laporan bencana kebakaran.



Gambar 2. 74. Grafik Capaian Tingkat Waktu Tanggap Darurat di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

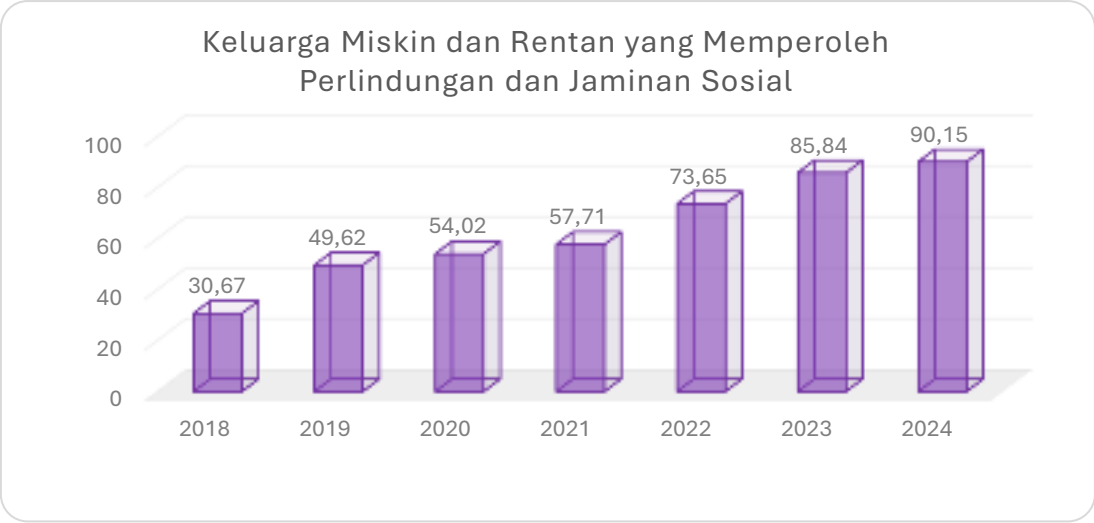
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu, 2025

F. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

a. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh karena itu maka PMKS merupakan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga membutuhkan bantuan. Salah satu bentuk penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, dilakukan dengan memberikan bantuan kepada PMKS.



Gambar 2. 75. Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

b. Cakupan PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Persentase PMKS yang dapat tertangani, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 76. Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

Grafik menunjukkan peningkatan substansial dalam cakupan bantuan sosial untuk PMKS di Kabupaten Pringsewu selama periode 6 tahun, dengan pencapaian tertinggi pada 2021 dan mempertahankan tingkat yang tinggi hingga 2023. Ini menggambarkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun ada sedikit penurunan di tahun-tahun terakhir.

c. Cakupan PMKS Memperoleh Bantuan Sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.



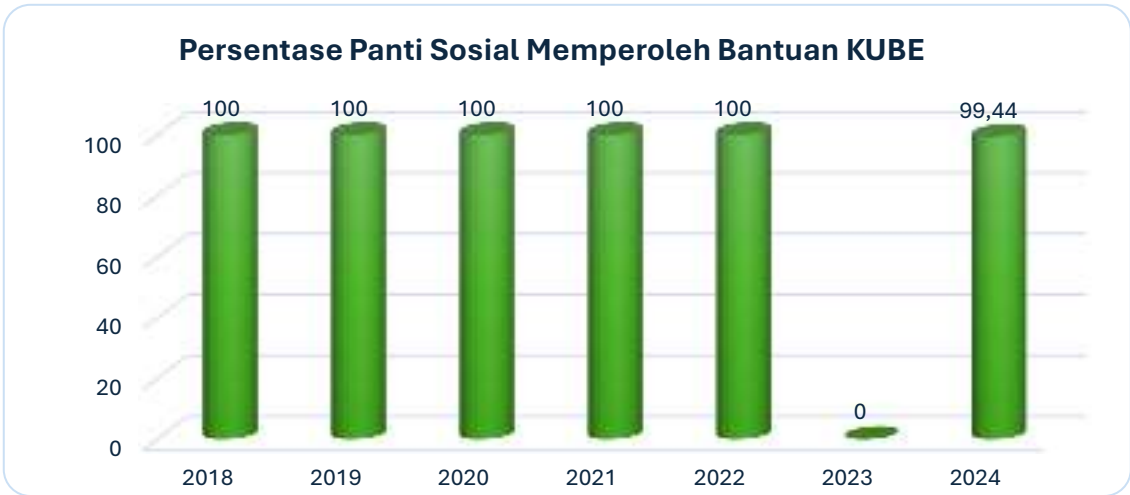
Gambar 2. 77. Grafik Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

Meskipun ada fluktuasi, khususnya penurunan di tahun 2022, cakupan bantuan sosial untuk PMKS di Kabupaten Pringsewu tetap tinggi selama periode 2018-2023. Pemulihan cepat di tahun 2023 menunjukkan upaya yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar PMKS, sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dijelaskan dalam paragraf pengantar.

d. Cakupan Panti Sosial Memperoleh Bantuan KUBE

Panti sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Persentase panti sosial di Pringsewu yang memperoleh bantuan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat dari presentase dibawah dari tahun 2018-2022 menyentuh angka 100 dan pada tahun 2023 terdapat penurunan yang sangat signifikan. Namun, pada 2024 kembali meningkat menjadi 99,44%.



Gambar 2. 78. Grafik Persentase Panti Sosial Yang Memperoleh Bantuan KUBE di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

e. Cakupan Panti Sosial menyediakan Sarana Kesehatan

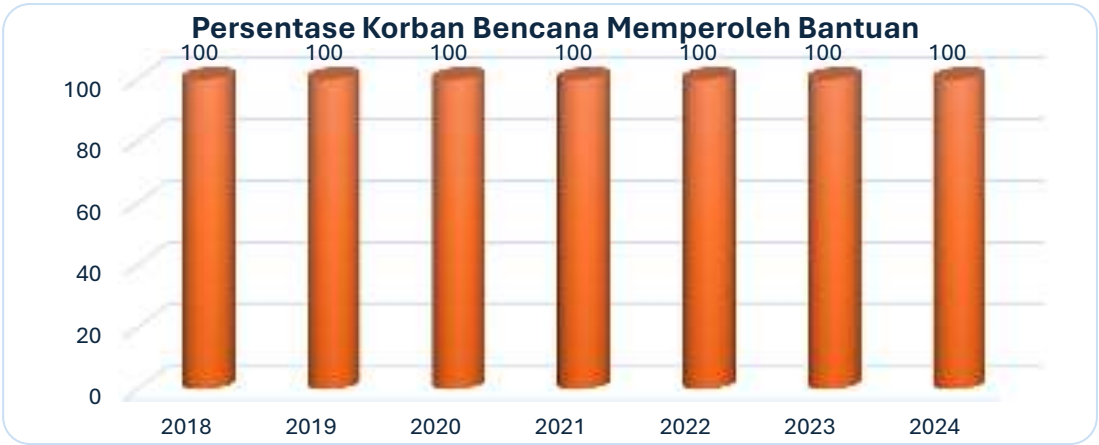
Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan pada panti sosial sangat penting, untuk memberikan pelayanan kepada para penghuninya. Terutama bagi para Lansia yang rentan terhadap penyakit, maupun kepada penghuni panti sosial lainnya.



Gambar 2. 796. Cakupan Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Kesehatan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

f. Cakupan Korban Bencana Memperoleh Bantuan

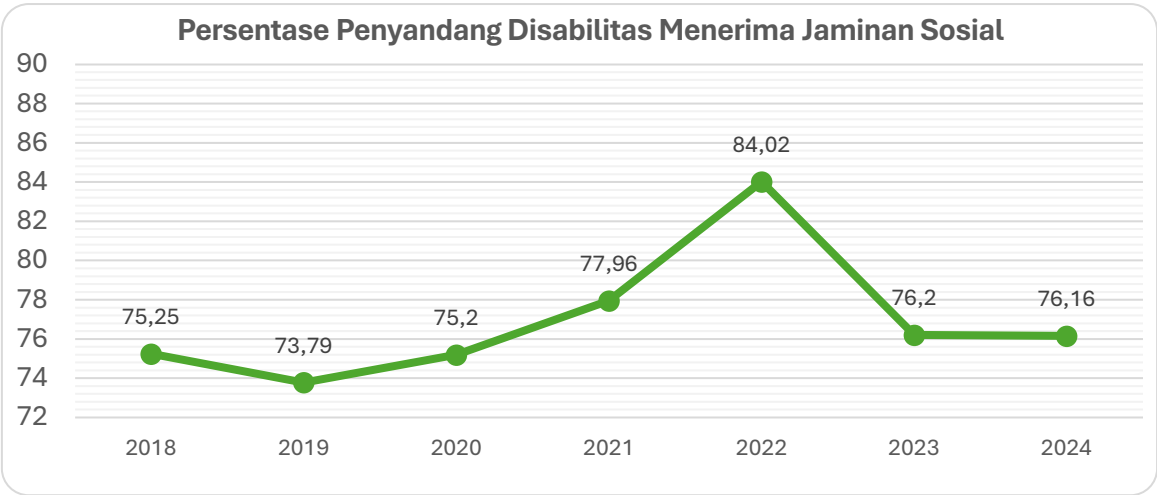
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Dapat dilihat dari presentase dibawah untuk bantuan bencana tersalurkan sampai dengan 100.



Gambar 2. 80. Grafik Cakupan Korban Bencana Yang Memperoleh Bantuan (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

g. Cakupan Penyandang Cacat Menerima Jaminan Sosial

Penyandang cacat fisik ataupun mental, selalu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Meskipun hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Karena ini maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Adapun realisasi pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan penyediaan air minum bersih, sanitasi yang layak, perumahan yang terjangkau, dan penataan lingkungan. Upaya tersebut telah membuahkan hasil, dengan peningkatan persentase pemukiman tertata, rasio pemukiman layak huni, cakupan perumahan yang didukung PSU, dan persentase cakupan KBKS yang stabil.



Gambar 2. 81. Grafik Cakupan Penyandang Cacat Yang Menerima Jaminan Sosial (Persen) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, 2025

2.1.3.1.2 Sakip dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, nilai SAKIP Kabupaten Pringsewu tahun 2024 sebesar **67,19 (kategori B)** dan nilai Reformasi Birokrasi sebesar **73,99 (kategori B)**. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan telah mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam hal efektivitas program, integrasi perencanaan-penganggaran, serta inovasi pelayanan publik.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan pembangunan tahun 2026 perlu difokuskan pada:

- Prioritisasi kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak pada masyarakat.

- Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara sistematis.
- Pendanaan program yang mendorong peningkatan nilai SAKIP dan RB, seperti digitalisasi layanan, inovasi sektor publik, dan penguatan monitoring evaluasi.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan akan lebih sejalan dengan prinsip evidence-based planning serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Tahun

Evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program. Evaluasi dianggap sebagai metode terbaik untuk menilai efektivitas dan produktivitas. Jenis evaluasi **ex-post** atau pasca pelaksanaan bertujuan untuk meninjau pencapaian kegiatan atau program (*output*, *outcome*, atau dampak) dalam mengatasi masalah pembangunan, sekaligus menilai efisiensi, efektivitas, dan manfaatnya. Melalui evaluasi, perkembangan setiap indikator kinerja dapat ditinjau ulang. Data yang diperoleh juga memungkinkan identifikasi masalah baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan, serta membantu dalam merumuskan berbagai solusi yang potensial.

Begitu pun pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Untuk dapat menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD, maka dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Evaluasi dilakukan pada program-program kegiatan yang menjadi bagian dari urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk program kegiatan non urusan (administrasi umum), tidak masuk dalam evaluasi. Adapun hasil evaluasi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.2.1 Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pelaksanaan urusan wajib pendidikan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan, yang mencakup pendidikan non formal (PAUD), SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan munculnya prestasi-prestasi dari peserta didik, mewujudkan rasio ketersediaan sekolah yang ideal dengan jumlah penduduk, dan mewujudkan rasio guru dan murid yang ideal sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2. 29. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	6	7
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI	68,97	63,1	57,45	59,51
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs	33,44	37,81	40,17	26,5
3	Rasio guru terhadap murid SD/MI	66,67	64,35	71,72	70,84
4	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs.	71,43	69.30	74,77	65,18
5	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	50	78,88	55,66	70,09
6	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	25	54,6	43,88	52,92
7	Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	29,68	31,28	96,36	96,41
8	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	21,08	19,63	95,60	95,61
9	Rasio murid Pendidikan Anak Usia Dini terhadap anak usia 4-6 tahun.	92,5	93	97,5	48,12
10	Rasio guru Pendidikan Anak Usia Dini	5,56	5,47	10,62	7,53
11	Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,05	0,01
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,03	0,03	0,01	0,01
13	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100,00	100,00
14	Angka kelulusan SMP/MTs	100	100	100,00	100,00
15	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs	98,9	88,38	96,95	96,95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pelaksanaan urusan wajib kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka umur harapan hidup, menekan angka kematian bayi, menekan angka kematian ibu melahirkan, menanggulangi gizi buruk dan mengelola angka kesakitan agar dapat terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan program antara lain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat, program pencegahan penyakit menular, program standarisasi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Data lokasi Dapur Umum atau SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pringsewu

1. SPPG PRINGSEWU : KEL. PRINGSEWU SELATAN, KEC. PRINGSEWU
2. SPPG GADINGREJO : DESA WONODADI, KEC. GADINGREJO
3. SPPG MARGODADI : DESA MARGODADI, KEC. GADINGREJO
4. SPPG TULUNG AGUNG : DESA TULUNGAGUNG, KEC. GADINGREJO
5. SPPG PARDASUKA : DESA PARDASUKA, KEC. PARDASUKA
6. SPPG PRINGSEWU BARAT : KEL. PRINGSEWU BARAT, KEC. PRINGSEWU

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Pengelolaan urusan wajib di bidang pekerjaan umum dilakukan untuk meningkatkan kondisi jalan agar berada dalam keadaan baik, menyediakan sarana irigasi yang memadai bagi lahan persawahan, serta menciptakan lingkungan permukiman yang memiliki sanitasi layak. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan berbagai program, seperti peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan jalan lingkungan, pengembangan serta pengelolaan jaringan irigasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Tugas ini dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pekerjaan umum, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu.

4. Urusan Wajib Perumahan

Pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kondisi jalan yang dalam kondisi baik, menyediakan sarana irigasi yang ideal dengan lahan persawahan, dan mewujudkan permukiman warga masyarakat yang bersanitasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan program peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan,

program pembangunan jalan lingkungan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program pemeliharaan jalan dan jembatan serta yang lainnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Pengelolaan urusan penataan ruang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya, termasuk melalui pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) secara selektif dan pengembangan ruang terbuka hijau yang ideal sebanding dengan jumlah penduduk. Ruang terbuka hijau ini juga berfungsi sebagai sarana interaksi sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan berbagai program, seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan ini dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perencanaan partisipatif terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7. Urusan Wajib Perhubungan

Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana lalu lintas, manajemen transportasi dan terminal merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang aktivitas perekonomian di

Kabupaten Pringsewu. Penataan jalur transportasi yang dilalui oleh kendaraan umum merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan pusat-pusat perekonomian masyarakat. Selain itu, pengujian kendaraan umum secara rutin, juga perlu dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada para penumpang. Begitu juga dalam hal penerangan jalan, hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut memberikan dampak positif yang signifikan dalam capaian perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan. Untuk menjaga agar penerangan jalan umum tetap berfungsi dengan baik diperlukan pemeliharaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan.

8. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari bahwa kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk maksud itu dilaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program pengelolaan ruang terbuka hijau. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Urusan Wajib Pertanahan

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Oleh karena itu maka pemerintah daerah selalu berupaya untuk memenuhi hak-haknya masyarakat melalui program-program legalisasi di bidang pertanahan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Sehubungan masih terdapatnya status kependudukan ganda antar kabupaten di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih banyak data penduduk yang tidak akurat maka pemerintah mencanangkan pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Adapun

maksud dari program nasional tersebut adalah untuk pembentukan akurasi data kependudukan skala nasional serta mewujudkan Nomor Induk Kependudukan tunggal bagi penduduk Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan kuantitas perempuan yang dipercaya untuk memegang jabatan di Kabupaten Pringsewu. SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengelolaan urusan KB dan Keluarga Sejahtera dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan rata-rata anak dalam keluarga yang ideal, rasio akseptor KB yang ideal, cakupan peserta KB aktif, dan penurunan angka keluarga prasejahtera dan Sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dilaksanakan program pengembangan BKP-Posyandu-PADU, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan, program komunikasi informasi dan edukasi, program peningkatan sarana dan prasarana pendukung KB. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

13. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial diarahkan untuk merealisasikan prioritas pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan rumah tangga, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Untuk itu maka dilaksanakan program pemberdayaan fakir miskin, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. SKPD yang menyelenggarakan urusan sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

14. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Manajemen ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi perselisihan perburuhan, membantu pencari kerja, dan meningkatkan keamanan tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, program perluasan kesempatan kerja, dan program perlindungan tenaga kerja. Satuan kerja daerah yang menangani masalah ketenagakerjaan adalah Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Migrasi. Namun pada proses pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yaitu :

- a. Kesempatan kerja yang terbatas yang kemudian berimplikasi terhadap rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi ekonomi yang belum menguntungkan
- b. Kurang memadainya kualitas pelamar kerja sehingga tidak mampu memenuhi permintaan lowongan pekerjaan yang telah tersedia.
- c. Kurang terpantaunya tenaga kerja yang telah mendapat pekerjaan sehingga mempengaruhi data angka pengangguran yang mengalami peningkatan.
- d. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah sebagai lembaga yang diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja terdidik.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,77	4,85	4,77	4,66	4,39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,69	67,03	73,17	73,29	73,55

Berdasarkan data ketenagakerjaan di atas, Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren yang membaik dari tahun 2020 hingga 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan konsisten dari 5,77% pada 2020 menjadi 4,39% pada 2024, yang menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sempat menurun pada 2021 menjadi 67,03%, namun kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 73,55% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Pringsewu, baik dari sisi keterlibatan masyarakat dalam dunia kerja maupun penurunan angka pengangguran.

15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sektor koperasi dan usaha, kecil, dan menengah (UKM) sering kali menjadi fokus dalam konteks pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sering menetapkan urusan wajib terkait dengan koperasi dan UMKM untuk memberikan dukungan dan meningkatkan peran sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi.

Program yang dilaksanakan untuk mengembangkan koperasi dan UKM antara lain program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha, dan program peningkatan kualitas koperasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan :

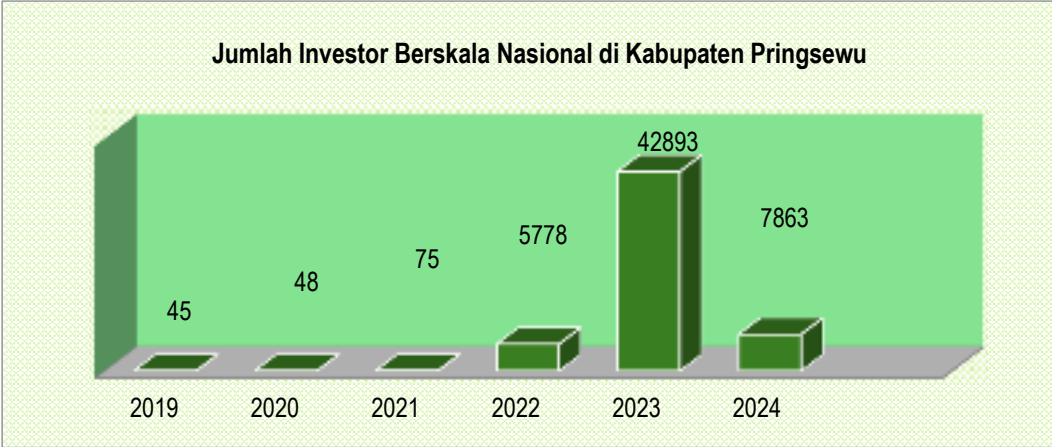
- a. Daya saing koperasi lokal yang kurang kompetitif, sehingga ketika muncul kantor cabang kegiatan simpan pinjam koperasi yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu dikhawatirkan akan menjadi pesaing bagi koperasi-koperasi lokal.
- b. Masih dijumpai adanya pendirian koperasi yang hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan pihak lain, sehingga ketika bantuan dihentikan, maka dengan sendirinya kegiatan koperasi menjadi tidak aktif.
- c. Adanya pengelolaan koperasi yang tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai, baik dalam pengelolaan manajemen maupun yang lainnya.
- d. Pengembangan usaha kecil masih bersifat gradual, atau sebatas mengelola tempat usaha yang telah dirintis oleh masyarakat dan belum sampai pada upaya untuk menciptakan lokasi-lokasi UMKM yang baru.

16. Urusan Wajib Penanaman Modal

Pengelolaan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP). Kinerja Pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN, dan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Selain itu juga ditunjukan melalui indikator dalam penyelenggaraan proses perizinan berusaha.

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).

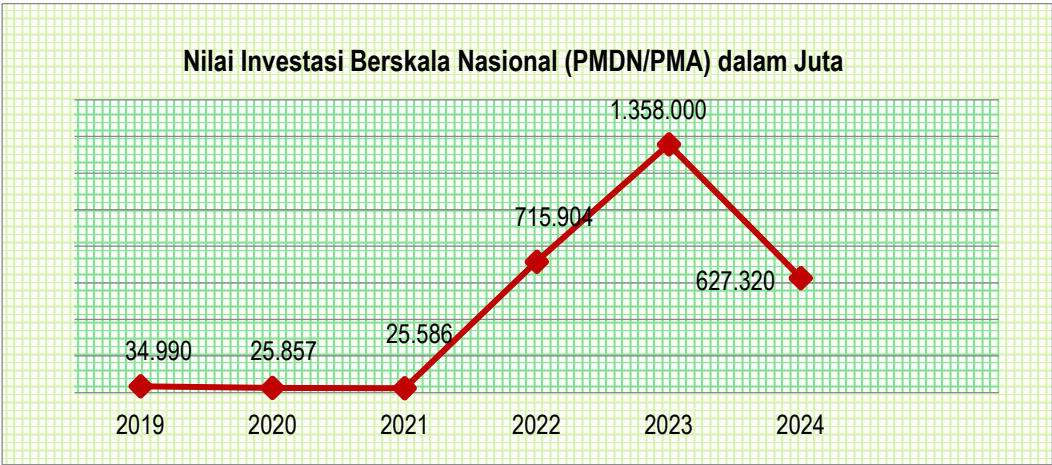
Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

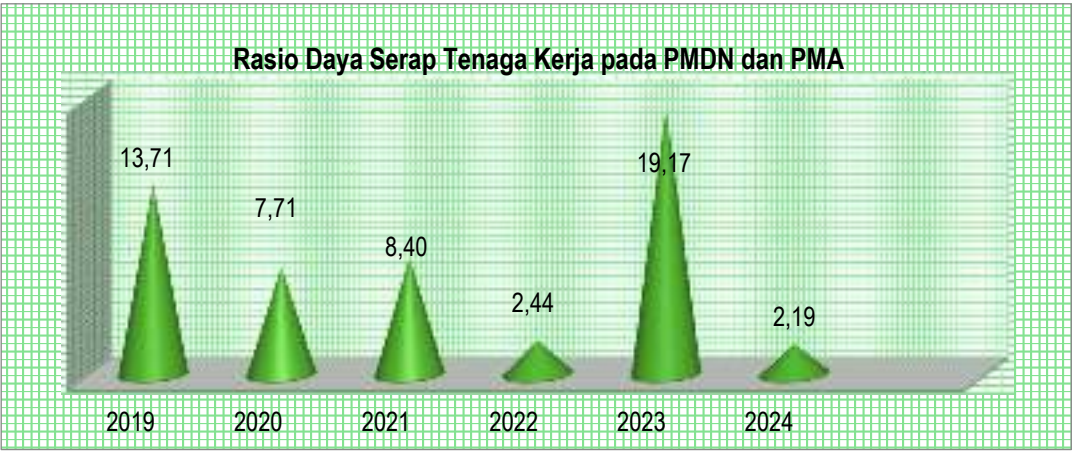
Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Indikator ini mencerminkan daya Tarik suatu daerah bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah untuk menarik investor.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja pada PMDN/PMA.

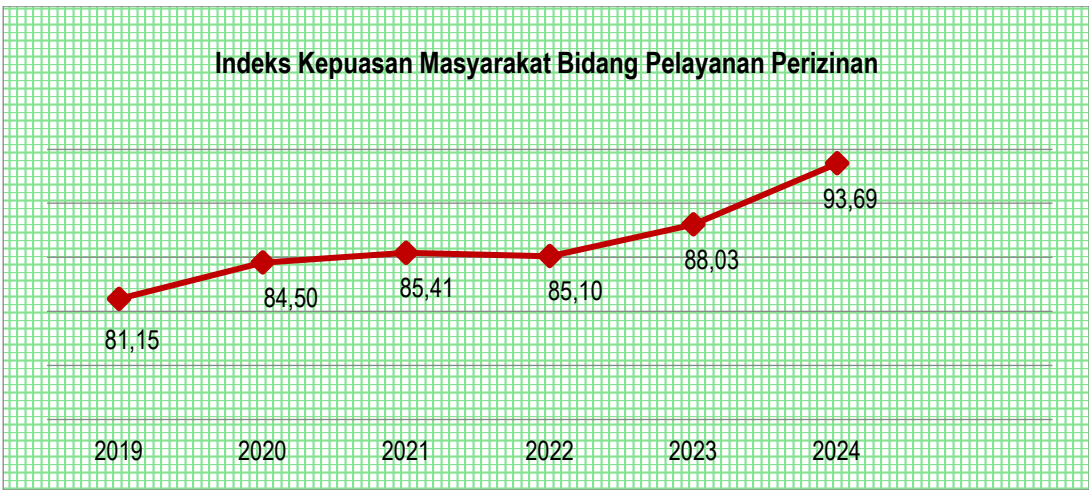
Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMDN/PMA dengan jumlah seluruh tenaga kerja yang ada, Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi yang terealisasi pada suatu tahun.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ruang lingkup subyek yang di survey adalah masyarakat yang telah menerima pelayanan dalam mengurus perizinan dan non perizinan berusaha dari Dinas PM PTSP, berdasarkan sampel yang telah ditentukan.



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu.

17. Urusan Wajib Kebudayaan

Urusan wajib kebudayaan mencakup berbagai kegiatan dan kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan keberagaman budaya suatu masyarakat. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, urusan wajib kebudayaan termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam bidang kesenian, Kabupaten Pringsewu mengupayakan pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompok kesenian dan memberikan dorongan kepada masyarakat supaya terus melestarikan budaya yang sedang berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan sejumlah kegiatan antara lain pembinaan kesenian daerah, workshop tari penata daerah, gelar seni daerah dan peningkatan sanggar budaya. Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata. Dari hasil pelaksanaan urusan kebudayaan, masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tingkat kecamatan.
- b. Materi budaya dalam pendidikan sekolah masih kurang mendapat porsi yang cukup.
- c. Kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap para pelaku budaya.

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Urusan wajib kepemudaan dan olahraga merujuk pada kewenangan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemuda (muda-mudi) serta sektor olahraga. Di Indonesia, kewenangan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Untuk maksud tersebut maka dilakukan sejumlah program, antara lain program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, program pemuda dan olahraga dan program keimanan dan ketaqwaan pemuda.

Salah satu hasil peran para pelaku olahraga adalah diperolehnya beberapa prestasi baik di tingkat regional maupun internasional. Bahkan khusus untuk cabang olahraga Angkat Berat, keberadaan atlet dari Kabupaten Pringsewu, telah mampu membawa nama harum bangsa Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar nasional dan internasional.
- b. Masih kurangnya reward yang diterima oleh para atlet yang berprestasi, sehingga menurunkan minat untuk selalu menempa diri.
- c. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peran serta nyata dalam proses pembangunan daerah.
- d. Masih terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda.

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kewenangan pemerintah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, hal ini merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Pringsewu yang kondusif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik maka telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah. Upaya lain yang ditempuh untuk deteksi dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan melalui pengamanan kegiatan penting seperti pemilihan kepala pekon, hari-hari besar dan siskamling.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam pengelolaan urusan ini antara lain program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan kebangsaan, program pendidikan politik masyarakat, program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat. Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Namun dalam pengelolaannya masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Semakin beragamnya modus yang dilakukan para pelaku kejahatan yang menuntut adanya penyesuaian kembali terhadap pola deteksi dini.
- b. Adanya indikasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan teknologi berbasis IT (*cyber crime*).
- c. Derasnya informasi budaya luar yang kurang diimbangi peningkatan pada ideologi bangsa bisa berpengaruh terhadap munculnya kelompok radikal.
- d. Masih adanya kelompok-kelompok tertentu yang disinyalir menjalankan syariat agama yang kurang sesuai dengan tuntunan sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih intensif.

20. Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu mencakup kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola administrasi pemerintahan, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Urusan wajib tersebut mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif di tingkat lokal. Keberhasilan dalam mengelola urusan ini akan berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di tingkat daerah.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk. Ketahanan pangan menjadi aspek penting untuk mencapai keamanan dan kedaulatan pangan di suatu daerah. Urusan ketahanan pangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu daerah serta

kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan ketahanan pangan dapat membantu mengurangi ketidakpastian pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	84,30	81,33	83,14	87,38	87,35
Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/Kota	15,23	11,64	16,3	10,82	10,51
Ketersediaan Pangan Pemerintah (%)	20	10	15,25	14,37	69,66

Berdasarkan data di atas, Ketahanan pangan Kabupaten Pringsewu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif. Indeks Ketahanan Pangan sempat menurun dari 84,30 pada 2020 menjadi 81,33 di 2021, namun kemudian terus meningkat hingga mencapai 87,35 pada 2024, mencerminkan peningkatan stabil dalam kemampuan daerah menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan juga menunjukkan perbaikan signifikan, dari 15,23% pada 2020 menjadi hanya 10,51% di 2024, menandakan semakin sedikit penduduk Pringsewu yang mengalami kekurangan konsumsi pangan. Selain itu, peran pemerintah dalam penyediaan pangan meningkat tajam, dari hanya 14,37% di tahun 2023 melonjak menjadi 69,66% di tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen dan intervensi pemerintah daerah yang kuat dalam menjamin ketersediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat Pringsewu.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya lokal, mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Beberapa aspek utama dalam pemberdayaan masyarakat desa antara lain, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dan lainnya. Urusan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

pertumbuhan dan pembangunan desa secara holistik, dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Program pemberdayaan masyarakat desa juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

23. Urusan Statistik

Urusan statistik adalah kewenangan pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan statistik untuk memperoleh data yang akurat, kredibel, dan terkini mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian. Data statistik ini penting untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Urusan statistik memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah, pengembangan kebijakan, serta evaluasi program dan proyek di berbagai sektor. Data statistik yang akurat dan andal sangat penting untuk mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.

24. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan mencakup kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan arsip atau dokumen dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Kearsipan sangat penting untuk memastikan informasi dan dokumen-dokumen yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah, aman, dan teratur. Urusan kearsipan bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, organisasi dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan memenuhi kewajibannya terkait dengan keberlanjutan dan transparansi administrasi.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, Kabupaten Pringsewu mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur telekomunikasi hingga penyebaran layanan digital. Urusan komunikasi dan informatika menjadi kunci dalam mendorong transformasi digital suatu negara atau wilayah. Dengan memadukan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan pelayanan

publik, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

26. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi dan pengetahuan. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, riset, dan akses masyarakat terhadap bahan pustaka. Urusan perpustakaan sangat penting untuk mendukung pendidikan, pengembangan masyarakat, dan penelitian. Dengan menyediakan akses terhadap informasi, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan kualitas hidup masyarakat secara umum.

2.2.2 Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Pertanian

Melalui pengelolaan urusan pertanian, diharapkan terjadi peningkatan dalam hal produktivitas padi. Sebagai tantangan yang tidak bisa dielakan dalam mengelola urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan. Namun disisi lain, harus di embangu dengan program intensifikasi pertanian. Selain bahan pokok padi, melalui pengelolaan urusan pertanian juga diarahkan pada peningkatan produktivitas non beras, seperti sayuran, palawija, jagung, kedelai dan lain-lain. Penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

2. Urusan Pilihan Kehutanan

Pengelolaan urusan kehutanan dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan kelestarian hutan yang ada. Memang di Kabupaten Pringsewu hanya memiliki luas hutan lindung yang tidak begitu luas. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak pada pengurangan debit air yang ada di bawahnya dan bahkan bisa menimbulkan bencana. Melalui program ini, pengelolaan hutan dilaksanakan dengan menanam kembali kondisi hutan yang gundul dan mengambil manfaat keberadaan hutan dengan mengembangkan usaha lebah madu. Penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan.

3. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Pengelolaan urusan energi dan sumberdaya mineral telah dilaksanakan beberapa program, antara lain program pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, pembinaan dan pengembangan energi dan ketenagalistrikan dan program pengembangan sumber potensi energi baru terbarukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum.

4. Urusan Pilihan Pariwisata

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka menggairahkan sektor pariwisata diantaranya adalah dengan melaksanakan program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan ini adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Urusan Pilihan Perikanan dan Peternakan

Urusan pilihan perikanan dan peternakan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan untuk memastikan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat peternak, dan keberlanjutan lingkungan. Keduanya, perikanan dan peternakan, memiliki peran kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang bijak, inklusif, dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor-sektor ini dalam jangka panjang.

Indikator	2021	2022	2023	2024
TOTAL PRODUKSI IKAN (Ton) Kabupaten Pringsewu	12.216,15	12.581,62	12.350,00	13.870,00

Berdasarkan data diatas, Total produksi ikan di Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren yang relatif meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, produksi ikan tercatat sebesar 12.216,15 ton dan mengalami kenaikan menjadi 12.581,62 ton pada 2022. Meskipun sempat menurun sedikit menjadi 12.350,00 ton pada 2023, produksi kembali melonjak secara signifikan pada 2024 menjadi 13.870,00 ton. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan sektor perikanan di Pringsewu dalam meningkatkan kapasitas produksi, yang kemungkinan didukung oleh perbaikan sarana produksi,

peningkatan kualitas pembudidayaan, atau program pemerintah daerah yang mendukung sektor perikanan sebagai salah satu potensi unggulan daerah.

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang berhubungan dengan peredaran barang dan jasa antarnegara, baik dalam konteks regional maupun global. Dalam tingkat regional tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Urusan perdagangan menjadi kunci dalam membentuk posisi ekonomi suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dan program perdagangan yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan membawa manfaat ekonomi kepada masyarakat.

7. Urusan Perindustrian

Dalam penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Pringsewu memiliki cakupan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan sektor industri suatu daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri suatu daerah. Urusan perindustrian sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pengembangan dan peningkatan sektor industri dapat menjadi pendorong utama bagi perkembangan ekonomi suatu daerah, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perubahan teknologi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RPJMD dilaksanakan terhadap tiga hal utama, yaitu:

- 1) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu. Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- 2) Review Capaian Kinerja RPJMD. Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.
- 3) Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan. Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2024 dan realisasi RPD, dapat dilihat pada tabel 2.29

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024

Tabel 2.30. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Sampai Dengan 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2024		Perangkat Daerah Penanggg jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100 %		12
	DINAS PENDIDIKAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	1.228.777.788.300	BB	284.491.031.863	BB	328.391.330.893	BB	312.192.224.836	95,07		BB	596.683.256.699		48,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Pendidikan	60,00	1.879.258.400	15	598.217.951	19,00	548.394.300	2,00	524.493.070	10,53	95,64	17,00	1.122.711.021	28,33	59,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36,00	209.788.000	9	50.906.400	9,00	59.673.000	1,00	58.283.400	11,11	97,67	10,00	109.189.800	27,78	52,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,00	463.254.400	6	131.639.301	6,00	115.813.600	1,00	113.815.215	16,67	98,27	7,00	245.454.516	29,17	52,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	1.206.216.000	4	415.672.250	4,00	372.907.700	1,00	352.394.455	25,00	94,50	5,00	768.066.705	62,50	63,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56,00	1.221.369.321.500	14	281.980.516.852	14,00	327.214.303.243	3,00	311.060.329.966	21,43	95,06	17,00	593.040.846.818	30,36	48,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	11280,00	1.219.402.196.900	2820	281.512.457.202	6015,00	326.736.441.793	6015,00	310.599.728.816	100,00	95,06	8835,00	592.112.186.018	78,32	48,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.898.400.000	1	451.210.000	12,00	460.680.000	3,00	443.760.000	25,00	96,33	4,00	894.970.000	100,00	47,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	68.724.600	1	16.849.650	1,00	17.181.450	0,00	16.841.150	0,00	98,02	1,00	33.690.800	25,00	49,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1128,00	885.000.000	574	224.602.475	282,00	124.108.000	0,00	120.019.500	0,00	96,71	574,00	344.621.975	50,89	38,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1128,00	885.000.000	574	224.602.475	282,00	124.108.000	0,00	120.019.500	0,00	96,71	574,00	344.621.975	50,89	38,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Pendidikan	400,00	1.311.628.000	100	454.634.933	100,00	262.424.500	100,00 %	256.015.665	1,00	97,56	101,00	710.650.598	25,25	54,18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	48.980.000	1	11.876.600	1,00	12.245.000	1,00	11.898.000	100,00	97,17	2,00	23.774.600	50,00	48,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24,00	331.940.000	6	70.830.700	5,00	66.754.500	5,00	63.920.900	100,00	95,76	11,00	134.751.600	45,83	40,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	110.600.000	1	25.855.000	6,00	27.650.000	6,00	27.395.000	100,00	99,08	7,00	53.250.000	100,00	48,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108,00	99.600.000	27	22.020.000	12,00	24.900.000	12,00	23.206.000	100,00	93,20	39,00	45.226.000	36,11	45,41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,00	720.508.000	25	324.052.633	20,00	130.875.000	20,00	129.595.765	100,00	99,02	45,00	453.648.398	56,25	62,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	400,00	2.618.460.400	100	1.057.050.231	100,00	-	100,00	-	100,00		200,00	1.057.050.231	50,00	40,37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	0,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	224,00	1.030.820.000	56	593.900.000	0,00	-	0,00	-			56,00	593.900.000	25,00	57,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28,00	1.587.640.400	7	463.150.231	0,00	-	0,00	-			7,00	463.150.231	25,00	29,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	48,00	231.200.000	12	57.661.661	12,00	123.370.850	3,00	114.638.250	25,00	92,92	15,00	172.299.911	31,25	74,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	231.200.000	12	57.661.661	12,00	123.370.850	3,00	114.638.250	25,00	92,92	15,00	172.299.911	31,25	74,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	48,00	482.920.000	12	118.347.760	30,00	118.730.000	5,00	116.728.385	16,67	98,31	17,00	235.076.145	35,42	48,68	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	417.960.000	6	102.107.760	6,00	102.490.000	6,00	100.488.385	100,00	98,05	12,00	202.596.145	50,00	48,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	136,00	64.960.000	34	16.240.000	24,00	16.240.000	13,00	16.240.000	54,17	100,00	47,00	32.480.000	34,56	50,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	0,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi PAUD	72,20	293.121.441.400	71,95	75.942.309.395	71,67	101.788.267.967	71,67	99.421.023.526	100,00	98	143,62	175.363.332.921	198,92	59,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah SD	96,70		96,55		91,33		91,33		100,00		187,88		100,00		
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	80,80		80,65		107,44		107,44		100,00		188,09		100,00		
		Angka Putus Sekolah	0,60		0,75		0,05		0,05		100,00		0,80		100,00		
		Angka Rata-Rata Kelulusan SD	100,00		100		100,00		100,00		100,00		200,00		100,00		
		Angka Rata-Rata Kelulusan SMP	100,00		100		100,00		100,00		100,00		200,00		100,00		
		APK PAUD	74,00		73,75		71,67		71,67		100,00		145,42		100,00		
		APK SD	99,25		99		91,33		91,33		100,00		100		100,00		
		APK SMP	83,35		82,75		107,44		107,44		100,00		190,19		100,00		
		APM PAUD	72,20		71,95		69,88		69,88		100,00		141,83		100,00		
		APM SD	96,70		96,55		84,77		84,77		100,00		181,32		100,00		
		APM SMP	80,80		80,65		80,60		80,60		100,00		161,25		100,00		
		Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95		94,8		94,21		94,21		100,00		189,01		100,00		
		Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94,00		93,85		95,98		95,98		100,00		189,83		100,00		

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100,00	160.223.136.000	100	41.678.125.846	100,00	55.766.041.287	100,00 %	54.502.608.399	1,00	97,73	101,00	96.180.734.245	100,00	60,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8,00	1.560.000.000	2	390.000.000	1,00	438.400.000	1,00	438.400.000	100,00	100,00	3,00	828.400.000	37,50	53,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12,00	1.020.000.000	3	255.000.000	1,00	-	1,00	-	100,00		4,00	255.000.000	33,33	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4,00	780.000.000	1	195.000.000	1,00	215.500.000	1,00	215.500.000	100,00	100,00	2,00	410.500.000	50,00	52,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48,00	4.629.444.000	12	841.997.840	1,00	578.400.000	1,00	546.995.607	100,00	94,57	13,00	1.388.993.447	27,08	30,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12,00	2.553.420.000	3	638.355.000		-	0,00	-			3,00	638.355.000	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	48,00	1.240.000.000	12	310.000.000	10,00	2.526.850.000	10,00	2.463.209.000	100,00	97,48	22,00	2.773.209.000	45,83	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4,00	80.000.000	1	873.646.000	1057,00	1.050.000.000	1057,00	1.041.700.000	100,00	99,21	1058,00	1.915.346.000	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8,00	1.000.000.000	2,00	248.352.500	30,00	1.228.500.000	30,00	1.200.590.000	100,00	97,73	32,00	1.448.942.500	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0,00	-		-			0,00		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16,00	317.500.000	4	59.725.800	4,00	250.000.000	1,00	229.157.850	25,00	91,66	5,00	288.883.650	31,25	90,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4440,00	7.992.000.000	0	-	1480,00	2.664.000.000	1480,00	2.664.000.000	0,00	0,00	1480,00	2.664.000.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	786,00	179.502.000	0	-	262,00	59.834.000	0,00	57.451.000	0,00	0,00	0,00	57.451.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	16,00	143.475.368.000	4	36.262.614.750	262,00	35.777.103.287	262,00	35.541.217.196	100,00	99,34	266,00	71.803.831.946	100,00	50,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	786,00	450.000.000	0	-	262,00	150.000.000	262,00	144.109.000	100,00	96,07	262,00	144.109.000			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	12,00	2.520.000.000	3	630.000.000	1,00	926.000.000	0,00	926.000.000	0,00	100,00	3,00	1.556.000.000	25,00	61,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	16,00	192.780.000	4	42.393.000	262,00	55.000.000	0,00	49.427.500	0,00	89,87	4,00	91.820.500	25,00	47,63	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	20,00	615.288.000	9	357.078.400	2,00	350.000.000	2,00	343.157.000	100,00	98,04	11,00	700.235.400	55,00	113,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,00	1.050.000.000	0	-	2,00	3.517.854.000	2,00	2.884.366.324	100,00	81,99	2,00	2.884.366.324	33,33	274,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,00	529.800.000	0	-	1,00	176.600.000	1,00	176.600.000	100,00	100,00	1,00	176.600.000	33,33	33,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8,00	239.336.000	4	573.962.556	2,00	375.000.000	2,00	365.619.200	100,00	97,50	6,00	939.581.756	75,00	392,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	6,00	330.000.000	0	-	2,00	110.000.000	2	99.745.500	100,00	90,68	2,00	99.745.500	33,33	30,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	84,00	15.951.000.000	0	-	28,00	5.317.000.000	28	5.115.363.222	100,00	96,21	28,00	5.115.363.222	33,33	32,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00	100.958.208.000	100	24.888.539.400	100,00	26.987.611.620	57	26.469.875.305	57,00	98,08	157,00	51.358.414.705	100,00	50,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	0,00	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	6,00	1.602.000.000	0	-	2,00	534.000.000	2,00	534.000.000	0,00	0,00	2,00	534.000.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20,00	4.940.000.000	5	1.206.390.950	2,00	763.420.620	2,00	752.731.908	100,00	98,60	7,00	1.959.122.858	35,00	39,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	72,00	10.471.276.960	18	2.617.819.240	31,00	2.617.000.000	31,00	2.617.000.000	100,00	100,00	49,00	5.234.819.240	68,06	49,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8,00	1.940.000.000	2	485.000.000	2,00	-	0,00	-	0,00		2,00	485.000.000	25,00	25,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0,00	-		-			0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00	1.002.800.000	1	250.700.000	3,00	789.000.000	3,00	789.000.000	100,00	100,00	4,00	1.039.700.000	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00	102.699.040	1	25.674.760	2,00	169.256.000	2,00	169.256.000	100,00	100,00	3,00	194.930.760	75,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	96,00	2.920.000.000	24,00	710.000.000	32,00	964.625.000	32,00	963.510.000	100,00	99,88	56,00	1.673.510.000	58,33	57,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0,00	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20,00	354.000.000	5,00	79.772.100	5,00	250.000.000	5,00	224.587.500	100,00	89,84	10,00	304.359.600	50,00	85,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	280,00	120.240.000	70,00	29.880.000	140,00	30.060.000	140,00	29.215.000	100,00	97,19	210,00	59.095.000	75,00	49,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan dana bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,00	-	-	-	55,00	19.733.600.000	55,00	19.298.888.397	0,00	0,00	55,00	19.298.888.397	5500,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55,00	78.384.632.000	4,00	19.206.905.750	140,00	150.000.000	140,00	144.256.500	100,00	96,17	144,00	19.351.162.250	261,82	24,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	8,00	207.600.000	2,00	44.409.000	2,00	58.750.000	2,00	44.563.000	100,00	75,85	4,00	88.972.000	50,00	42,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					1,00	225.650.000	1,00	219.920.000							
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	16,00	514.960.000	4,00	231.987.600	4,00	200.000.000	4,00	193.709.000	100,00	96,85	8,00	425.696.600	50,00	82,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidik yang menyelenggarakan Proses Belajar	3,00	336.750.000	0,00	-	1,00	112.250.000	1,00	100.850.000	100,00	89,84	1,00	100.850.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan (orang)	3,00	300.000.000	0,00	-	1,00	100.000.000	1,00	98.388.000	100,00	98,39	1,00	98.388.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang di rehabilitasi (unit)	6,00	870.000.000	0,00	-	2,00	290.000.000	2,00	290.000.000	100,00	100,00	2,00	290.000.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1036,00	24.970.077.400	100,00	7.663.034.649	100,00	13.987.490.910	100	13.569.703.250	100,00	97,01	200,00	21.232.737.899	19,31	85,03	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15,00	1.457.340.000	0,00	-	5,00	632.780.000	5,00	487.039.069	0,00	0,00	5,00	487.039.069	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3,00	150.000.000	0,00	-	1,00	50.000.000	1,00	49.170.000	100,00	98,34	1,00	49.170.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	270,00	5.872.500.000	0,00	-	90,00	1.957.500.000	90,00	1.857.637.500	100,00	94,90	90,00	1.857.637.500	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	135,00	5.100.000.000	0,00	-	45,00	1.700.000.000	45,00	1.698.075.800	100,00	99,89	45,00	1.698.075.800	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	259,00	172.093.000	10709,00	38.663.925	245,00	43.023.250	245,00	41.629.625	100,00	96,76	10954,00	80.293.550	100,00	46,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	259,00	90.674.000	259,00	21.298.500	0,00	-	0,00	-			259,00	21.298.500	100,00	23,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	259,00	309.734.400	259,00	76.922.465	245,00	57.658.600	245,00	52.346.215	100,00	90,79	504,00	129.268.680	100,00	41,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	8,00	24.060.000.000	8,00	7.459.546.259	8,00	5.888.400.000	8,00	5.836.498.000	100,00	99,12	16,00	13.296.044.259	100,00	55,26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	735,00	68.005.500	0,00	-	245,00	22.668.500	245,00	20.737.000	100,00	91,48	245,00	20.737.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	735,00	575.165.550	0,00	-	245,00	437.889.760	245,00	432.427.340	100,00	98,75	245,00	432.427.340	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	10,00	337.576.000	5,00	66.603.500	3,00	136.346.000	3,00	107.115.000	100,00	78,56	8,00	173.718.500	80,00	51,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	12	1.296.288.000	0,00	-	4	432.096.000	4	426.709.651	100,00	98,75	4,00	426.709.651	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7500	4.692.386.400	0,00	-	2500	2.629.128.800	2500	2.560.318.050	100,00	97,38	2500,00	2.560.318.050	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	92	6.970.020.000	11,00	1.712.609.500	11	5.047.124.150	11	4.878.836.572	100,00	96,67	22,00	6.591.446.072	23,91	94,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2452	6.779.200.000	613,00	1.694.800.000	1	1.708.600.000	1	1.641.700.000	100,00	96,08	614,00	3.336.500.000	25,04	49,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	15	1.875.000.000	0,00	-	5	625.000.000	0	619.760.000	0,00	99,16	0,00	619.760.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2452	190.820.000	613,00	17.809.500	0	-	0	-	0,00	0,00	613,00	17.809.500	25,00	9,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12	4.138.257.000	0,00	-	4	1.497.119.150	1	1.488.619.770	25,00	99,43	1,00	1.488.619.770	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan Proses bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses bagi Peserta Didik	735	142.215.000	0,00	-	145	47.405.000	0	17.742.000	0,00	37,43	0,00	17.742.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium	21	3.057.000.000	0,00	-	7	1.019.000.000	0	962.564.802	0,00	94,46	0,00	962.564.802	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	15	450.000.000	0,00	-	5	150.000.000	0	148.450.000	0,00	98,97	0,00	148.450.000	0,00	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95	5.701.104.000	94,80	1.218.824.000	94,21	1.605.816.000	94,21	1.490.584.000	100,00	92,82	189,01	2.709.408.000	100,00	47,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94		93,85	-	95,98		95,98		100,00		189,83		100,00		

	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24	5.701.104.000	6,00	1.218.824.000	6	1.605.816.000	6	1.490.584.000	100,00	92,82	12,00	2.709.408.000	50,00	47,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	2.787.840.000	3,00	553.983.000	3	953.517.000	3	909.380.500	100,00	95,37	6,00	1.463.363.500	50,00	52,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan tenaga Pendidik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12	2.913.264.000	3,00	664.841.000	3	652.299.000	3	581.203.500	100,00	89,10	6,00	1.246.044.500	50,00	42,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rasio murid PAUD terhadap anak usia 4 s.d 6 tahun	95,00	91.248.000	95,00	17.844.400	71,67	22.412.000	71,67	19.008.500	100,00	84,81	166,67	36.852.900	100,00	40,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD	400,00	91.248.000	100,00	17.844.400	100,00	22.412.000	44,00	19.008.500	44,00	84,81	144,00	36.852.900	36,00	40,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400,00	91.248.000	100,00	17.844.400	100,00	22.412.000	44,00	19.008.500	44,00	84,81	144,00	36.852.900	36,00	40,39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Lestari	87,50	2.992.972.000	55,00	783.801.191	55,00	1.874.111.000	55,00	1.646.089.106	100,00	87,83	110,00	2.429.890.297	100,00	81,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan objek pemajuan Kebudayaan Daerah	8,00	354.552.000	2,00	87.035.000	2,00	483.329.000	2,00	391.089.756	100,00	80,92	4,00	478.124.756	50,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	8,00	354.552.000	2,00	87.035.000	2,00	483.329.000	2,00	391.089.756	100,00	80,92	4,00	478.124.756	50,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Daerah Berupa Event dan Pembinaan Sumber daya manusia pelaku seni	16,00	886.620.000	4,00	275.929.000	4,00	551.014.000	4,00	502.387.200	100,00	91,18	8,00	778.316.200	50,00	87,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8,00	650.700.000	2,00	219.086.000	2,00	300.959.000	2,00	287.869.000	100,00	95,65	4,00	506.955.000	50,00	77,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	8,00	235.920.000	2,00	56.843.000	2,00	250.055.000	2,00	214.518.200	100,00	85,79	4,00	271.361.200	50,00	115,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana melalui pembinaan kelompok sanggar/komunitas seni lembaga adat	200,00	1.751.800.000	50,00	420.837.191	50,00	839.768.000	50,00	752.612.150	100,00	89,62	100,00	1.173.449.341	50,00	66,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/fasilitasi	200,00	1.751.800.000	50,00	420.837.191	50,00	839.768.000	50,00	752.612.150	100,00	89,62	100,00	1.173.449.341	50,00	66,99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang terpelihara	12,00	35.600.000	26,00	4.900.000	50,00	79.882.000	50,00	51.085.000	100,00	63,95	76,00	55.985.000	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya	20,00	35.600.000	5,00	4.900.000	5,00	79.882.000	5,00	51.085.000	100,00	63,95	10,00	55.985.000	50,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20,00	35.600.000	5,00	4.900.000	5,00	79.882.000	5,00	51.085.000	100,00	63,95	10,00	55.985.000	50,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	DINAS KESEHATAN																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NILAI SAKIP	78,53	298.589.351.000	B	62.652.492.845	B	73.442.385.383	B	70.234.867.128		95,63		132.887.359.973		44,51	Dinas Kesehatan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	537.816.000	96,21	77.346.050	100	148.692.000	100,00	138.046.131	100,00	92,84	196,21	215.392.181	100,00	40,05	Dinas Kesehatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	115.967.000	2,00	13.888.050	2	13.920.000	2,00	13.460.850	100,00	96,70	4,00	27.348.900	50,00	23,58	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56,00	279.616.000	14,00	33.102.000	14	78.536.000	14,00	75.934.888	100,00	96,69	28,00	109.036.888	50,00	39,00	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	71.116.000	1,00	15.108.000	1	39.816.000	1,00	36.757.393	100,00	92,32	2,00	51.865.393	50,00	72,93	Dinas Kesehatan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	71.117.000	1,00	15.248.000	1	16.420.000	1,00	11.893.000	100,00	72,43	2,00	27.141.000	50,00	38,16	Dinas Kesehatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,00	293.706.621.000	78,39	60.568.651.589	100	72.207.033.383	100,00	69.101.174.095	100,00	95,70	178,39	129.669.825.684	100,00	44,15	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3246,00	290.167.610.000	964,00	59.988.838.944	1113	71.861.385.383	1110	68.766.106.095	99,73	95,69	2074,00	128.754.945.039	63,89	44,37	Dinas Kesehatan

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	3.483.120.000	12,00	556.937.545	12	321.360.000	12	311.280.000	100,00	96,86	24,00	868.217.545	50,00	24,93	Dinas Kesehatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60,00	55.891.000	15,00	22.875.100	15	24.288.000	15	23.788.000	100,00	97,94	30,00	46.663.100	50,00	83,49	Dinas Kesehatan
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	30.817.000	100,00	6.490.000	100	6.500.000	100	6.389.600	100,00	98,30	200,00	12.879.600	100,00	41,79	Dinas Kesehatan
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	30.817.000	1,00	6.490.000	1	6.500.000	1	6.389.600	100,00	98,30	2,00	12.879.600	50,00	41,79	Dinas Kesehatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	351.730.000	97,65	1.077.203.603	100	61.115.000	100	60.151.900	100,00	98,42	197,65	1.137.355.503	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	10.146.000	1,00	1.955.000	1	2.340.000	1	1.806.000	100,00	77,18	2,00	3.761.000	50,00	37,07	Dinas Kesehatan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	313.137.000	15,00	1.069.981.103	25	53.495.000	25	53.218.400	100,00	99,48	40,00	1.123.199.503	66,67	100,00	Dinas Kesehatan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320,00	28.447.000	80,00	5.267.500	80	5.280.000	80	5.127.500	100,00	97,11	160,00	10.395.000	50,00	36,54	Dinas Kesehatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	2.078.795.000	100,00	535.574.347	100	522.815.000	100,00	503.447.663	100,00	96,30	200,00	1.039.022.010	100,00	49,98	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	53.355.000	1,00	21.808.485	1	12.379.000	1	12.179.000	100,00	98,38	2,00	33.987.485	50,00	63,70	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4,00	464.995.000	1,00	91.598.000	1	15.200.000	1	14.400.000	100,00	94,74	2,00	105.998.000	50,00	22,80	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4,00	276.407.000	1,00	59.863.000	1	61.870.000	1	58.689.500	100,00	94,86	2,00	118.552.500	50,00	42,89	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	71.117.000	1,00	19.088.180	1	20.071.000	1	19.658.440	100,00	97,94	2,00	38.746.620	50,00	54,48	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00	94.443.000	1,00	24.962.250	1	29.820.000	1	25.920.000	100,00	86,92	2,00	50.882.250	50,00	53,88	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320,00	1.118.478.000	80,00	318.254.432	60	383.475.000	60	372.600.723	100,00	97,16	140,00	690.855.155	43,75	61,77	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	777.949.000	99,97	5.800.000	100	245.040.000	100,00	182.375.510	100,00	74,43	199,97	188.175.510	100,00	24,19	Dinas Kesehatan

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	777.949.000	12,00	5.800.000	12	245.040.000	12	182.375.510	100,00	74,43	24,00	188.175.510	50,00	24,19	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	1.105.623.000	99,14	240.682.256	100	251.190.000	100	243.282.229	100,00	96,85	199,14	483.964.485	100,00	43,77	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32,00	46.411.000	8,00	8.720.256	8	10.000.000	8	6.908.229	100,00	69,08	16,00	15.628.485	50,00	33,67	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32,00	919.978.000	8,00	208.872.000	6	230.180.000	6	225.364.000	100,00	97,91	14,00	434.236.000	43,75	47,20	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112,00	139.234.000	28,00	23.090.000	28	11.010.000	28	11.010.000	100,00	100,00	56,00	34.100.000	50,00	24,49	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM terhadap layanan puskesmas dan RS	295,00	570.667.520.000	57,00	125.262.845.518	73.40	154.570.510.129	44.5203	145.761.654.700		94,30	101,52	271.024.500.218	34,41	47,49	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana	79,00	65.584.232.000	100,00	9.809.921.311	80	11.643.575.699	100	10.641.536.237	125,00	91,39	200,00	20.451.457.548	100,00	31,18	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4,00	938.883.000	1,00	33.696.000	1	3.420.365.980	1	2.755.414.761		80,56	2,00	2.789.110.761	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10,00	8.953.663.000	1,00	36.061.125	3	1.098.900.000	3	1.038.116.947	100,00	94,47	4,00	1.074.178.072	40,00	12,00	Dinas Kesehatan
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19,00	45.141.737.000	4,00	1.280.950.000	5	2.671.250.358	5	2.477.722.363	100,00	92,76	9,00	3.758.672.363	47,37	8,33	Dinas Kesehatan
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar					2	69.154.000	2	33.144.000	100,00	47,93	2,00	33.144.000			Dinas Kesehatan
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	8,00	10.549.949.000	2,00	1.540.362.548	4	3.863.536.861	4	3.837.660.317	100,00	99,33	6,00	5.378.022.865	75,00	50,98	Dinas Kesehatan
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan, obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,00	2.236.000.000	1,00	541.061.100	2	520.368.500	2	499.477.850	100,00	95,99	3,00	1.040.538.950	75,00	46,54	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95%	504.927.569.000	90,70	115.417.752.207	100	142.667.866.730	100	134.889.273.962	100,00	94,55	190,70	250.307.026.169	100,00	49,57	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27830	237.057.000	6308,00	1.842.172.425	6000	603.735.814	5333	565.229.525	88,88	93,62	11641,00	2.407.401.950	41,83	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26838	237.057.000	6059,00	358.417.073	6880	310.902.000	5664	253.194.100	82,33	81,44	11723,00	611.611.173	43,68	100,00	Dinas Kesehatan

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25218	237.057.000	6032,00	250.335.536	6656	225.135.039	4207	183.609.490	63,21	81,56	10239,00	433.945.026	40,60	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121983	237.057.000	28840,00	1.135.475.048	14880	42.660.000	25659	42.027.500	172,44	98,52	54499,00	1.177.502.548	44,68	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	242857	142.234.000	61111,00	344.911.565	31323	1.001.819.000	61465	986.463.748	196,23	98,47	122576,00	1.331.375.313	50,47	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1047524	333.207.000	151178,00	1.924.828.860	62059	64.665.000	194138	61.909.285	312,83	95,74	345316,00	1.986.738.145	32,96	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225137	142.234.000	40903,00	564.565.250	26752	99.126.000	40760	96.243.500	152,36	97,09	81663,00	660.808.750	36,27	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320710	803.684.000	30622,00	115.391.500	13951	155.475.000	44616	152.741.200	319,81	98,24	75238,00	268.132.700	23,46	33,36	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20260	179.288.000	68888,00	33.401.750	4183	439.109.800	5122	436.213.140	122,45	99,34	74010,00	469.614.890	365,30	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2823	169.038.000	876,00	175.400.000	691	60.559.000	722	45.622.858	104,49	75,34	1598,00	221.022.858	56,61	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuilosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkuilosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86	754.295.000	9695,00	239.056.460	601	1.372.136.900	7338	1.321.930.466	1220,97	96,34	17033,00	1.560.986.926	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30868	157.545.000	6589,00	161.291.870	7785	130.480.000	7298	126.296.700	93,74	96,79	13887,00	287.588.570	44,99	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	48	326.247.000	5,00	2.954.000	13	60.400.000	13	51.865.000	100,00	85,87	18,00	54.819.000	37,50	16,80	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4,00	21.551.000	0,00	-	1	35.000.000	1	32.059.000	100,00	91,60	1,00	32.059.000	25,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16,00	568.937.000	4,00	2.667.532.635	4	3.436.292.000	4	2.699.911.415	100,00	78,57	8,00	5.367.444.050	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8,00	26.112.000	2,00	67.807.800	2	5.482.800	1	900.000	50,00	16,41	3,00	68.707.800	37,50	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16,00	426.264.000	4,00	1.281.931.000	4	873.050.000	4	797.038.400	100,00	91,29	8,00	2.078.969.400	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen pelayanan promosi kesehatan	1,00	258.558.000	1,00	250.624.000	13	282.303.000	13	257.298.500	100,00	91,14	14,00	507.922.500	1400,00	100,00	Dinas Kesehatan

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4,00	106.712.000	1,00	30.517.080	1	39.592.000	1	37.888.000	100,00	95,70	2,00	68.405.080	50,00	64,10	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,00	595.538.000	1,00	235.579.960	2	611.179.900	2	497.643.089	100,00	81,42	3,00	733.223.049	75,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dilayani sesuai standar	2695,00	93.436.000	18736,00	155.886.875	691	55.878.000	400	33.814.000	57,89	60,51	19136,00	189.700.875	710,06	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan edukasi napza di sekolah	48,00	81.038.000	12,00	13.488.500	12	102.507.000	12	88.765.130	100,00	86,59	24,00	102.253.630	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	20,00	1.319.440.000	4,00	123.347.415	5	7.000.000	5	6.703.692	100,00	95,77	9,00	130.051.107	45,00	9,86	Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8,00	1.352.357.000	1,00	1.764.586.385	2	3.963.393.336	2	3.742.104.761	100,00	94,42	3,00	5.506.691.146	37,50	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,00	55.301.838.000	1,00	21.366.324.200	1	28.928.481.700	1	28.907.041.265	100,00	99,93	2,00	50.273.365.465	50,00	90,91	Dinas Kesehatan
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan					1	8.000.000	1	1.288.000	100,00	16,10	1,00	1.288.000			Dinas Kesehatan
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	36	1.557.984.000	8,00	13.764.000	9	6.000.000	8	5.309.645	88,89	88,49	16,00	19.073.645	44,44	1,22	Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8	280.788.819.000	2,00	59.871.245.051	2	73.436.712.797	2	69.466.720.363	100,00	94,59	4,00	129.337.965.414	50,00	46,06	Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8	85.361.044.000	2,00	17.291.615.144	2	24.514.367.544	2	22.409.539.910	100,00	91,41	4,00	39.701.155.054	50,00	46,51	Dinas Kesehatan
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	71.557.875.000	2,00	2.398.888.325	2	63.612.000	2	34.744.000	100,00	54,62	4,00	2.433.632.325	50,00	3,40	Dinas Kesehatan
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	391.600.000	1,00	561.861.000	12	114.450.000	12	41.700.000	100,00	36,44	13,00	603.561.000	325,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4	1.162.466.000	1,00	33.450.000	1	36.000.000	1	35.865.000	100,00	99,63	2,00	69.315.000	50,00	5,96	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkuilosis	Jumlah orang dengan Tuberkuilosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2400	357.240.000	1616,00	66.900.000	605	49.200.000	543	37.820.000	89,75	76,87	2159,00	104.720.000	89,96	29,31	Dinas Kesehatan

	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	364	19.440.000	107,00	4.835.000	91	26.910.000	91	26.265.000	100,00	97,60	198,00	31.100.000	54,40	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10	10.335.000	0	10.218.821	0,00	98,88	0,00	10.218.821			Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	28	292.800.000	3,00	69.366.500	3	94.000.000	3	81.532.260	100,00	86,74	6,00	150.898.760	21,43	51,54	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar					12	249.084.000	12	236.884.000	100,00	95,10	12,00	236.884.000			Dinas Kesehatan
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					4	1.152.832.100	4	1.076.873.200	100,00	93,41	4,00	1.076.873.200			Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100,00	7.089.000	100,00	4.675.000	100	213.972.700	100	192.395.000	100,00	89,92	200,00	197.070.000	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12,00	7.089.000	3,00	4.675.000	3	213.972.700	3	192.395.000	100,00	89,92	6,00	197.070.000	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit yang dibina	79,00	148.630.000	100,00	30.497.000	85	45.095.000	100	38.449.500	117,65	85,26	200,00	68.946.500	100,00	46,39	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	28,00	47.411.000	7,00	9.089.000	7	9.095.000	7	9.012.500	100,00	99,09	14,00	18.101.500	50,00	38,18	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	8,00	50.610.000	2,00	6.144.000	2	12.000.000	2	11.734.000	100,00	97,78	4,00	17.878.000	50,00	35,33	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28,00	50.609.000	7,00	6.144.000	7	24.000.000	7	17.703.000	100,00	73,76	14,00	23.847.000	50,00	47,12	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar	100,00	156.418.000	98,50	36.396.000	69.2	5.702.753.100	100	4.832.558.236	144,51	84,74	198,50	4.868.954.236	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga kesehatan memiliki izin praktik tenaga kesehatan	79,00	47.411.000	100,00	10.700.000	99	18.500.000	100	17.292.000	100,00	93,47	200,00	27.992.000	100,00	59,04	Dinas Kesehatan
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	210,00	47.411.000	45,00	10.700.000	50	18.500.000	50	17.292.000	100,00	93,47	95,00	27.992.000	45,24	59,04	Dinas Kesehatan
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar	79,00	61.596.000	100,00	17.515.000	69	105.364.000	100	75.776.000	100,00	71,92	200,00	93.291.000	100,00	100,00	Dinas Kesehatan

	Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,00	14.185.000	2,00	2.968.000	2	2.980.000	2	2.961.000	100,00	99,36	4,00	5.929.000	50,00	41,80	Dinas Kesehatan
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan minimal tenaga fungsional kesehatan di UPT Puskesmas Sesuai Standar	52,00	47.411.000	10,00	5.397.000	12	5.397.000	12	4.824.000	100,00	89,38	22,00	10.221.000	42,31	21,56	Dinas Kesehatan
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,00	43.301.000	1,00	9.150.000	1	96.987.000	1	67.991.000	100,00	70,10	2,00	77.141.000	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatkan kompetensinya	79,00	47.411.000	94,78	8.181.000	88,53	5.578.889.100	100	4.739.490.236	100,00	84,95	194,78	4.747.671.236	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100,00	47.411.000	25,00	8.181.000	25	5.578.889.100	25	4.739.490.236	100,00	84,95	50,00	4.747.671.236	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar	100	358.621.000	84,72	82.107.150	70	101.116.000	100	93.917.500	100,00	92,88	184,72	176.024.650	100,00	49,08	Dinas Kesehatan
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki Izin	100	135.122.000	4,00	23.361.100	75	40.530.000	100	38.593.000	100,00	95,22	104,00	61.954.100	100,00	45,85	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16,00	135.122.000	4,00	23.361.100	4	40.530.000	4	38.593.000	100,00	95,22	8,00	61.954.100	50,00	45,85	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yg sudah melaksanakan usaha sesuai ketentuan yg berlaku perusahaan rumah tangga	90,00	116.417.000	53,43	19.477.450	75	23.196.000	100	22.521.500	100,00	97,09	153,43	41.998.950	100,00	36,08	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2320,00	116.417.000	265,00	19.477.450	310	23.196.000	305	22.521.500	98,39	97,09	570,00	41.998.950	24,57	36,08	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	70,00	46.937.000	36,59	3.600.000	40	9.840.000	100	6.825.000	100,00	69,36	136,59	10.425.000	100,00	22,21	Dinas Kesehatan

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4,00	46.937.000	1,00	3.600.000	1	9.840.000	1	6.825.000	100,00	69,36	2,00	10.425.000	50,00	22,21	Dinas Kesehatan
	Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	70,00	47.411.000	100,00	9.950.000	40	9.950.000	100	9.475.000	100,00	95,23	200,00	19.425.000	100,00	40,97	Dinas Kesehatan
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4,00	47.411.000	1,00	9.950.000	1	9.950.000	1	9.475.000	100,00	95,23	2,00	19.425.000	50,00	40,97	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Post Market	80,00	12.734.000	50,00	7.860.000	80	17.600.000	100	16.503.000	125,00	93,77	150,00	24.363.000	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	320,00	47.411.000	80,00	7.860.000	80	17.600.000	80	16.503.000	100,00	93,77	160,00	24.363.000	50,00	51,39	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prersentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	100,00	1.220.201.000	89,22	1.487.805.130	100	568.185.800	100	415.531.465	100,00	73,13	189,22	1.903.336.595	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye GERMAS yang terlaksana	12,00	535.084.000	88,28	1.261.203.230	3	238.350.000	100	109.055.000	100,00	45,75	188,28	1.370.258.230	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12,00	535.084.000	3,00	1.261.203.230	3	238.350.000	3	109.055.000	100,00	45,75	6,00	1.370.258.230	50,00	100,00	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3952,00	685.117.000	96,53	38.051.900	45	329.835.800	100	306.476.465	222,22	92,92	196,53	344.528.365	4,97	50,29	Dinas Kesehatan
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	180,00	685.117.000	45,00	38.051.900	45	329.835.800	45	306.476.465	100,00	92,92	90,00	344.528.365	50,00	50,29	Dinas Kesehatan
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	56.879.444.035	BB	10.202.541.448	BB	10.605.443.747	BB	10.219.628.080		96,36		20.422.169.528		35,90	Dinas PUPR

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100,00	564.385.008	1,00	181.825.020	100,00	177.192.000	22	174.460.700	22,00	98,46	23,00	356.285.720	23,00	63,13	Dinas PUPR
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	102.323.230	5,00	29.703.600	5,00	23.536.000	3,60	23.189.600	72,00	98,53	8,60	52.893.200	43,00	51,69	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	30.598.320	1,00	31.563.000	0,20	31.051.650	20,00	98,38	1,20	61.649.970	30,00	57,54	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.758.100	1,00	26.483.000	1,00	26.051.100	100,00	98,37	2,00	52.809.200	50,00	49,29	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.445.200	1,00	26.465.000	0,10	26.029.450	10,00	98,35	1,10	52.474.650	27,50	48,97	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	107.149.708	1,00	26.831.700	1,00	26.440.000	0,10	26.006.200	10,00	98,36	1,10	52.837.900	27,50	49,31	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	33.462.948	1,00	41.488.100	1,00	42.705.000	0,20	42.132.700	20,00	98,66	1,20	83.620.800	30,00	100,00	Dinas PUPR
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	49.532.229.071	100	8.950.935.219	100,00	8.866.036.947	100	8.601.204.652	100,00	97,01	200,00	17.552.139.871	200,00	35,44	Dinas PUPR
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	548,00	43.776.876.920	137,00	8.255.149.219	12,00	8.250.814.947	12,00	8.002.493.652	100,00	96,99	149,00	16.257.642.871	27,19	37,14	Dinas PUPR
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168,00	5.731.561.124	42,00	690.720.000	42	610.040.000	42,00	593.610.000	100,00	97,31	84,00	1.284.330.000	50,00	22,41	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	23.791.028	0,80	5.066.000	1	5.182.000	1,00	5.101.000	100,00	98,44	1,80	10.167.000	45,00	42,73	Dinas PUPR
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah	100,00	4.626.147.482	100	624.941.852	100	980.231.800	100	960.055.267	100,00	97,94	200,00	1.584.997.119	200,00	34,26	Dinas PUPR
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48,00	34.989.595	12,00	7.600.000	12	10.700.000	12,00	7.545.000	100,00	70,51	24,00	15.145.000	50,00	43,28	Dinas PUPR
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	1.829.434.280	12,00	160.652.000	12	437.900.000	12,00	431.911.000	100,00	98,63	24,00	592.563.000	50,00	32,39	Dinas PUPR

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48,00	486.244.889	12,00	130.152.750	12	127.242.000	12,00	124.230.350	100,00	97,63	24,00	254.383.100	50,00	52,32	Dinas PUPR
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang Disediakan	48,00	144.100.355	12,00	38.337.875	12	32.102.800	12,00	31.775.420	100,00	98,98	24,00	70.113.295	50,00	48,66	Dinas PUPR
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen men Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48,00	127.441.776	12,00	28.440.000	12	32.400.000	12,00	31.500.000	100,00	97,22	24,00	59.940.000	50,00	47,03	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00	2.003.936.587	12,00	259.759.227	12	339.887.000	12,00	333.093.497	100,00	98,00	24,00	592.852.724	50,00	29,58	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	648.113.496	100	101.281.737	100	120.545.000	100	112.047.450	100,00	92,95	200,00	213.329.187	200,00	32,92	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	568.936.500	12,00	83.656.737	12	97.870.000	12,00	90.762.450	100,00	92,74	24,00	174.419.187	50,00	30,66	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48,00	79.176.996	12,00	17.625.000	12	22.675.000	11,70	21.285.000	97,50	93,87	23,70	38.910.000	49,38	49,14	Dinas PUPR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	1.508.568.977	100	343.557.620	100	461.438.000	100	371.860.011	100,00	80,59	200,00	715.417.631	200,00	47,42	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48,00	599.680.216	12,00	96.727.200	5,00	115.770.000	5	92.982.821	100,00	80,32	17,00	189.710.021	35,42	31,64	Dinas PUPR
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20,00	908.888.760	5,00	246.830.420	5,00	345.668.000	5	278.877.190	100,00	80,68	10,00	525.707.610	50,00	57,84	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	85,00	55.406.946.092	69,13	5.420.673.434	0,77	12.293.560.222	77,01	11.720.927.132	#####	95,34	146,14	17.141.600.566	171,93	30,94	Dinas PUPR
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Air Baku untuk pemenuhan kebutuhan Irigasi yang tersedia	100,00	4.802.961.933	1,00	402.158.887	1,00	1.256.784.222	1	1.195.237.142	100,00	95,10	2,00	1.597.396.029	2,00	33,26	Dinas PUPR

	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,60	2.307.256.785	1,00	9.926.380	2,00	913.004.000	2	853.083.782	100,00	93,44	3,00	863.010.162	83,33	37,40	Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan DokumenLingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnyayang Disusun	4,00	1.019.089.726	1,00	392.232.507	4,00	343.780.222	4	342.153.360	100,00	99,53	5,00	734.385.867	125,00	72,06	Dinas PUPR
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi	100,00	50.603.984.159	100	5.018.514.547	100,00	11.036.776.000	100,00	10.525.689.990	100,00	95,37	200,00	15.544.204.537	200,00	30,72	Dinas PUPR
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	2,80	173.543.886	1,00	147.054.008	0,05	7.500.000	0,05	7.446.849	100,00	99,29	1,05	154.500.857	37,50	89,03	Dinas PUPR
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,08	30.155.905.505	1,00	1.105.687.537	3	6.037.248.000	3,00	5.698.251.839	100,00	94,38	4,00	6.803.939.376	98,04	22,56	Dinas PUPR
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	8,00	5.525.817.091	2,00	2.254.780.695	9	2.833.491.000	9,00	2.668.658.290	100,00	94,18	11,00	4.923.438.985	137,50	89,10	Dinas PUPR
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	284,00	4.268.471.665	71,00	863.119.800	71	996.445.000	71,00	993.657.369	100,00	99,72	142,00	1.856.777.169	50,00	43,50	Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	40,00	6.057.687.378	1	351.401.057	10	1.162.092.000	10	1.157.675.643	100,00	99,62	11,00	1.509.076.700	27,50	24,91	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga memiliki akses air bersih	87,00	49.815.293.219	69,56	2.565.258.698	81,5	3.344.972.900	100,00 %	3.159.670.360	1,23	94,46	70,56	5.724.929.058	81,10	11,49	Dinas PUPR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan SPAM	84446,00	49.815.293.219	70503,00	2.565.258.698	200	3.344.972.900	0,60	3.159.670.360	0,30	94,46	70503,60	5.724.929.058	83,49	11,49	Dinas PUPR
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					100	100.943.000	110,00	96.266.809	110,00	95,37	110,00	96.266.809			Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	22,00	2.033.499.381	4	477.647.068	1	310.104.000	1,00	307.817.800	100,00	99,26	5,00	785.464.868	22,73	38,63	Dinas PUPR
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	77204,00	10.682.579.914	19102	1.741.673.530	6	2.373.821.900	42,00	2.230.959.551	700,00	93,98	19144,00	3.972.633.081	24,80	37,19	Dinas PUPR
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	257580,00	36.164.983.802	72900	345.938.100	50	560.104.000	50,00	524.626.200	100,00	93,67	72950,00	870.564.300	28,32	2,41	Dinas PUPR

	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	prosentase penangan Sampah	70,00	24.131.423.347	47,69	2.775.370.112	59	1.764.672.000	80,00	1.702.932.501	135,59	96,50	127,69	4.478.302.613	100,00	18,56	Dinas PUPR
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	2,00	24.131.423.347	1,00	2.775.370.112	1	1.764.672.000	303,00	1.702.932.501	30300,00	96,50	304,00	4.478.302.613	100,00	18,56	Dinas PUPR
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	8,00	19.816.747.561	1,00	2.213.312.350	1	1.350.104.000	1,00	1.295.532.530	100,00	95,96	2,00	3.508.844.880	25,00	17,71	Dinas PUPR
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	12,00	2.981.726.881	450,00	203.118.162	100	204.464.000	300,00	199.001.051	300,00	97,33	750,00	402.119.213	100,00	13,49	Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1200,00	1.332.948.904	3,00	358.939.600	3	210.104.000	3,00	208.398.920	100,00	99,19	6,00	567.338.520	0,50	42,56	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Layanan Air Limbah (SR)	95,00	12.367.996.502	79,41	957.801.542	89	1.658.895.000	100,00	1.576.015.701	112,36	95,00	179,41	2.533.817.243	100,00	20,49	Dinas PUPR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	200,00	12.367.996.502	0,00	957.801.542	100	1.658.895.000	100,00	1.576.015.701	100,00	95,00	100,00	2.533.817.243	50,00	20,49	Dinas PUPR
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			0,00		100	1.160.104.000	100,00	1.088.374.975	100,00	93,82	100,00	1.088.374.975	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			6,00	218.287.547	150	88.687.000	150,00	81.067.126	100,00	91,41	156,00	299.354.673	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	12,00	2.030.198.601	3,00	110.702.700	1	410.104.000	1,00	406.573.600	100,00	99,14	4,00	517.276.300	33,33	25,48	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase drainase lingkungan perkotaan dalam kondisi baik (tidak Tersumbat)	84,00	10.141.395.142	70,18	1.884.282.673	82,4	1.573.385.570	1,00	1.509.706.685	100,00	95,95	71,18	3.393.989.358	100,00	33,47	Dinas PUPR
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	350,00	10.141.395.142	332,00	1.884.282.673	3000	1.573.385.570		1.509.706.685	100,00	95,95	332,00	3.393.989.358	100,00	33,47	Dinas PUPR
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1400,00	6.799.527.852		-	2000	950.443.570	2000,00	890.413.585	100,00	93,68	2000,00	890.413.585	142,86	13,10	Dinas PUPR
	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	14000,00	2.119.551.026		-	500	582.838.000	500,00	579.862.800	100,00	99,49	500,00	579.862.800	3,57	27,36	Dinas PUPR

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0,00	611.158.131		80.142.676	1	40.104.000	1,00	39.430.300	100,00	98,32	1,00	119.572.976	0,00	19,56	Dinas PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Gedung Negara yang Terpelihara dengan Baik	103,00	6.580.512.808	75,00	6.827.514.010	93	2.840.454.925	350,00	2.548.692.165	376,34	89,73	425,00	9.376.206.175	100,00	100,00	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya kegiatan bangunan gedung negara	103,00	6.580.512.808	75,00	6.827.514.010	93	2.840.454.925	350,00	2.548.692.165	376,34	89,73	425,00	9.376.206.175	100,00	100,00	Dinas PUPR
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala dan yang akan dibangun	1,00	1.723.666.045	0,00	-	3	890.104.000	3,00	876.720.135	100,00	98,50	3,00	876.720.135	100,00	50,86	Dinas PUPR
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		-	0,00	-	1	1.322.492.000	1,00	1.079.189.230	100,00	81,60	1,00	1.079.189.230	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya		-	0,00	-	300	363.244.925	300,00	359.828.800	100,00	99,06	300,00	359.828.800	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1,00	4.856.846.762	75,00	237.725.600	46	264.614.000	46,00	232.954.000	100,00	88,04	121,00	470.679.600	100,00	9,69	Dinas PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	presentase Fasilitas Publik yang terpelihara dengan baik	87,00	8.960.195.892	78,00	6.537.422.115	80	15.869.780.809	70,00	15.024.541.140	87,50	94,67	148,00	21.561.963.255	100,00	100,00	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Gedung Negara yang Terpelihara dengan Baik	100,00	8.960.195.892	100,00	6.537.422.115	100	15.869.780.809	70,00	15.024.541.140	70,00	94,67	170,00	21.561.963.255	100,00	100,00	Dinas PUPR
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	4,00	8.960.195.892	0,00	-	9	15.869.780.809	17,00	15.024.541.140	188,89	94,67	17,00	15.024.541.140	100,00	100,00	Dinas PUPR

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang dipelihara/ direhabilitasi/ direkonstruksi	39,82	207.753.403.57 8	32,23	49.751.241.77 8	37,82	46.952.903.08 7	120,00	43.387.051.276	317,29	92,41	152,23	93.138.293.05 4	100,00	44,83	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Sarana Kebinamargaan dalam kondisi baik	39,82	207.753.403.57 8	32,23	49.751.241.77 8	37,82	46.952.903.08 7	120,00	43.387.051.276	317,29	92,41	152,23	93.138.293.05 4	100,00	44,83	Dinas PUPR
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8,00	4.248.277.292	8,00	1.122.421.365	8	1.294.420.000	20,00	1.287.234.900	250,00	99,44	28,00	2.409.656.265	100,00	56,72	Dinas PUPR
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Des	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	8,00	5.224.567.585	8,00	1.376.531.046	7	1.198.955.000	9,81	1.191.027.500	140,16	99,34	17,81	2.567.558.546	100,00	49,14	Dinas PUPR
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,08	17.697.059.279	1,00	3.628.667.860	0,6	4.230.385.990	3,00	4.011.830.715	500,00	94,83	4,00	7.640.498.575	100,00	43,17	Dinas PUPR
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10,00	156.359.426.913	10,00	35.991.360.474	9	33.774.116.480	9,81	30.476.711.511	109,01	90,24	19,81	66.468.071.985	100,00	42,51	Dinas PUPR
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8,00	4.662.979.848	8,00	1.315.689.733	8	1.388.642.000	689,52	1.375.966.300	8618,9 9	99,09	697,52	2.691.656.033	100,00	57,72	Dinas PUPR
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,63	19.561.092.660	3,00	6.316.571.300	15	5.066.383.617	11,82	5.044.280.350	100,00	99,56	14,82	11.360.851.650	100,00	58,08	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	17,64	2.133.511.875	10,98	668.369.297	13,18	665.000.050	62,13	651.650.789	100,00	97,99	73,11	1.320.020.086	100,00	61,87	Dinas PUPR
		Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100,00		100	100	0,00		0,00		100,00		100,00		Dinas PUPR		
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	100,00	1.478.621.871	100	414.959.165	100	549.775.850	13,00	539.833.251	13,00	98,19	113,00	954.792.416	100,00	64,57	Dinas PUPR
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	400,00	1.478.621.870	0	-	13	33.991.300	13,00	33.668.195	100,00	99,05	13,00	33.668.195	3,25	2,28	Dinas PUPR
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0,00	-	0	-	200	515.784.550	200,00	506.165.056	100,00	98,13	200,00	506.165.056	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah	100,00	458.777.706	100	12.659.800	100	17.441.000	0,00	17.345.700	0,00	99,45	100,00	30.005.500	100,00	6,54	Dinas PUPR
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4,00	458.777.706	0	-	1	17.441.000	2,00	17.345.700	200,00	99,45	2,00	17.345.700	50,00	3,78	Dinas PUPR

	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan jasa konstruksi	100,00	196.112.298	100	209.298.037	100	97.783.200	97,27	94.471.838	97,27	96,61	197,27	303.769.875	100,00	154,90	Dinas PUPR
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1,00	-	1,00	26.375.375	1	24.620.300	21,00	17.802.579	100,00	72,31	22,00	44.177.954	100,00	0,00	Dinas PUPR
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	4,00	196.112.297	0,00	-	3	89.622.900	21,00	76.669.259	100,00	85,55	21,00	76.669.259	100,00	39,09	Dinas PUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	94,00	3.412.660.665	97,73	2.376.207.983	91,25	1.418.300.000	71,86	2.145.981.504	78,75	151,31	169,59	4.522.189.487	180,41	132,51	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100,00	3.412.660.665	100	1.312.251.669	100	549.812.000	200,00	850.058.098	200,00	154,61	300,00	2.162.309.767	300,00	63,36	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	8,00	3.412.660.665	6,00	1.312.251.669	2	344.156.000	2,00	489.521.941	0,00	0,00	8,00	1.801.773.610	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota		-	0	-	1	205.656.000	1,00	360.536.157	0,00	0,00	1,00	360.536.157	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	70,00	4.380.000.000	95,77	861.290.879	100	690.199.300	63,00	947.718.016	63,00	137,31	158,77	1.809.008.895	226,81	41,30	Dinas PUPR
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	80,00	4.100.000.000	0	-	16	519.461.000	104	697.792.751	650,00	134,33	104,00	697.792.751	130,00	17,02	Dinas PUPR
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		-	0	-	20	77.335.500	104	115.039.620	520,00	148,75	104,00	115.039.620	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	80,00	280.000.000	25	98.651.915	26	93.402.800	59	134.885.645	226,92	144,41	84,00	233.537.560	105,00	83,41	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang	100,00	2.213.970.683	93,96	118.021.020	100	178.288.700	96,79	348.205.390	96,79	195,30	190,75	466.226.410	190,75	21,06	Dinas PUPR
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	200,00	2.213.970.683	0,00%	-	2	178.288.700	2,00	348.205.390	100,00	195,30	2,00	348.205.390	1,00	15,73	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,95	1.125.555.524	95,8	643.397.986	8,34	210.149.000	160	209.396.878	100,00	99,64	100,00	852.794.864	100,00	75,77	Dinas PUPR
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan rumah korban bencana atau relokasi program	100,00	1.125.555.524	100	643.397.986	100	210.149.000	1,60	209.396.878	0,00	99,64	101,60	852.794.864	100,00	75,77	Dinas PUPR

	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2,00	1.125.555.524	-	2	210.149.000	2,00	209.396.878	0,00	99,64	2,00	209.396.878	100,00	18,60	Dinas PUPR	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Ketersediaan Permukiman Kumuh Yang Tertata	100,00	13.296.228.538	100	1.477.716.417	77,94	249.867.000	77,94	248.919.523	100,00	99,62	177,94	1.726.635.940	100,00	12,99	Dinas PUPR
		Persentase Ketersediaan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100,00	13.296.228.538	100	305.133.527	100	249.867.000	81,19	248.919.523	81,19	99,62	181,19	554.053.050	100,00	4,17	Dinas PUPR
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	3,00	1.212.960.765	0,00	-	0	120.000	0,00	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas PUPR
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	200,00	12.083.267.774	1,00	305.133.527	1	249.747.000	1,00	248.919.523	100,00	99,67	2,00	554.053.050	1,00	4,59	Dinas PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Ketersediaan Kepenghunan Perumahan yang Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas	50,00	3.254.495.284	12,5	565.743.422	100	1.489.984.000	100	1.430.987.982	100,00	96,04	112,50	1.996.731.404	100,00	61,35	Dinas PUPR
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase capain PSU	100,00	3.254.495.284	100	565.743.422	100	1.489.984.000	100	1.430.987.982	100,00	96,04	200,00	1.996.731.404	100,00	61,35	Dinas PUPR
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6,00	1.084.831.761	2,00	159.023.562	4	222.980.000	4,00	221.290.582	100,00	99,24	6,00	380.314.144	100,00	35,06	Dinas PUPR
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	6,00	1.084.831.761	2,00	240.910.910	5	1.145.174.000	5,00	1.090.141.250	100,00	95,19	7,00	1.331.052.160	100,00	100,00	Dinas PUPR
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6,00	1.084.831.761	1,00	165.808.950	1	121.830.000	1,00	119.556.150	100,00	98,13	2,00	285.365.100	33,33	26,31	Dinas PUPR
	SATPOL PP																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Perkantoran	NILAI SAKIP	B	16.816.967.998	BB	13.041.564.632	BB	12.933.683.677	BB	12.792.267.708	100,00	100,00		25.833.832.340		100,00	Satpol PP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian realisasi kinerja dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	40,00	32.200.000	10	26.551.910	10	28.000.000	10	27.573.890	100,00	100,00	20,00	54.125.800	50,00	100,00	Satpol PP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	16.100.000	5	13.273.390	5	14.000.000	5	13.796.320	100,00	100,00	10,00	27.069.710	50,00	100,00	Satpol PP
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	16.100.000	5	13.278.520	5	14.000.000	5	13.777.570	100,00	100,00	10,00	27.056.090	50,00	100,00	Satpol PP
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12,00	15.560.832.910	12	12.301.286.152	12	12.228.710.977	12	12.149.286.148	100,00	100,00	24,00	24.450.572.300	200,00	100,00	Satpol PP

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	295,00	15.272.123.204	295	12.084.479.622	295	11.995.807.677	12	11.918.225.483	4,07	100,00	307,00	24.002.705.105	104,07	100,00	Satpol PP
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	277.324.706	12	208.891.730	12	222.680.000	12	220.882.585	100,00	100,00	24,00	429.774.315	50,00	100,00	Satpol PP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,00	11.385.000	0	7.914.800	5	10.223.300	0	-	0	0	0	7.914.800	0,00	69,52	Satpol PP
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	1236,00	413.478.189	18	56.020.000	14	54.292.000	14	51.116.100	100,00	94,15	32	107.136.100	2,59	25,91	Satpol PP
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1180,00	322.287.500	0	8.670.000	0	-	0				0	8.670.000	0,00	2,69	Satpol PP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56,00	91.190.689	14	47.350.000	14	54.292.000	14	51.116.100	100,00	94,15	28	98.466.100	50,00	100,00	Satpol PP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	290,00	280.821.339	241	317.785.006	239	191.391.000	255	191.768.777	106,69	100,20	496	509.553.783	171,03	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	6.255.425	1	2.085.000	1	2.600.000	0	2.340.000	0,00	90,00	1	4.425.000	25,00	70,74	Satpol PP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,00	58.076.150	0	110.540.000	5	20.800.000	0	18.200.000	0,00	87,50	0	128.740.000	0,00	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32,00	64.063.898	8	41.269.215	8	32.705.500	6	30.585.500	75,00	93,52	14	71.854.715	43,75	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4,00	6.615.950	3	7.639.250	1	4.400.000	0	4.344.000	0,00	98,73	3	11.983.250	75,00	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Daerah	222,00	30.360.000	170	24.000.000	222	24.000.000	0	24.000.000	0,00	100,00	170	48.000.000	76,58	100,00	Satpol PP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	8,00	115.449.916	2	132.251.541	2	114.591.000	2	112.299.277	100,00	98,00	4	244.550.818	50,00	100,00	Satpol PP
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase Tersedianya pengadaan barang milik daerah	4,00	32.748.320	0	9.650.000	1	-	0	-	0,00	#DIV/0!	0	9.650.000	0,00	29,47	Satpol PP
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,00	32.748.320	0	9.650.000	1	-	0	-	0,00	#DIV/0!	0	9.650.000	0,00	29,47	Satpol PP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan telepon/ faximile, listrik, air dan posko damkar yang disediakan	20,00	53.199.690	5	34.381.567	5	59.402.200	5	50.298.730	100,00	84,67	10	84.680.297	50,00	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	1.150.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100,00	100,00	2	2.000.000	50,00	100,00	Satpol PP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16,00	52.049.690	4	33.381.567	4	58.402.200	4	49.298.730	100,00	84,41	8	82.680.297	50,00	100,00	Satpol PP
	Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	104,00	443.687.550	29	295.889.997	29	364.182.000	29	322.224.063	100,00	88,48	58	618.114.060	55,77	100,00	Satpol PP

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00	378.576.550	12	249.301.497	12	283.220.000	12	241.437.563	100,00	85,25	24	490.739.060	100,00	100,00	Satpol PP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	88,00	9.361.000	16	5.890.000	16	5.890.000	16	5.890.000	100,00	100,00	32	11.780.000	36,36	100,00	Satpol PP
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4,00	55.750.000	1	40.698.500	1	75.072.000	1	74.896.500	100,00	99,77	2	115.595.000	50,00	100,00	Satpol PP
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan perda dan perbup	90,00	1.061.628.212	84,00%	791.415.690	84	646.498.000	84	593.971.992	100,00	91,88	8484,00 %	1.385.387.682	94,27	100,00	Satpol PP
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1796,00	520.239.301	86	476.040.090	1012	383.007.300	920	347.696.846	90,91	90,78	1006	823.736.936	56,01	100,00	Satpol PP
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	20,00	121.482.916	5	80.525.490	5	98.583.500	7	97.895.756	140,00	99,30	12	178.421.246	60,00	100,00	Satpol PP
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	48,00	30.876.596	12	14.330.300	12	9.475.800	11	9.304.540	91,67	98,19	23	23.634.840	47,92	76,55	Satpol PP
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	72,00	38.265.169	18	52.107.000	18	60.168.000	6	12.003.700	33,33	19,95	24	64.110.700	33,33	100,00	Satpol PP
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24,00	220.668.690	6	22.508.000	6	73.822.000	6	28.731.000	100,00	38,92	12	51.239.000	50,00	23,22	Satpol PP
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1468,00	35.075.000	0	274.972.300	930	120.363.000	0	49.000.000	0,00	40,71	0	323.972.300	0,00	100,00	Satpol PP
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	28,00	47.420.930	7	25.425.500	7	12.134.000	0	4.438.000	0,00	36,57	7	29.863.500	25,00	62,98	Satpol PP
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang	72,00	17.250.000	18	6.171.500	18	6.461.000	0	5.697.500	0,00	88,18	18	11.869.000	25,00	68,81	Satpol PP

		Telah Dibuat dan Dimutakhirkan															
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	64,00	9.200.000	0	-	16	2.000.000	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Satpol PP
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota	Presentase penegakan perda	104,00	207.186.239	26	166.825.600	26	108.038.200	15	103.541.646	57,69	95,84	41	270.367.246	39,42	100,00	Satpol PP
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	8,00	45.784.462	2	58.956.600	2	16.569.000	0	15.669.000	0,00	94,57	2	74.625.600	25,00	100,00	Satpol PP
	PenangananAtas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	16,00	50.599.807	0	29.528.500	4	68.569.000	2	66.577.066	50,00	97,09	2	96.105.566	12,50	100,00	Satpol PP
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	80,00	110.801.970	20	78.340.500	20	22.900.200	13	21.295.580	65,00	92,99	33	99.636.080	41,25	89,92	Satpol PP
	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kaPembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota	Persentase PPNS yang Aktif	16,00	334.202.672	4	148.550.000	4	155.452.500	4	142.733.500	100,00	91,82	8	291.283.500	50,00	87,16	Satpol PP
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	16,00	334.202.672	4	148.550.000	4	155.452.500	4	142.733.500	100,00	91,82	8	291.283.500	50,00	87,16	Satpol PP
	BPBD																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Perkantoran	NILAI SAKIP	BB	20.505.493.000		4.964.951.913	B	5.217.111.123		5.064.077.802		97,07	0,00	10.029.029.715		48,91	BPBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, laporan capaian realisasi kinerja dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yang tersusun	36,00	120.000.000	9	14.270.140	9,00	17.500.000	5,00	16.712.640	55,56		14,00	30.982.780	38,89	25,82	BPBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	60.000.000	4	7.052.050	4,00	9.000.000	4,00	8.441.400	100,00	93,79	8,00	15.493.450	50,00	25,82	BPBD
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	60.000.000	5	7.218.090	5,00	8.500.000	5,00	8.271.240	100,00	97,31	10,00	15.489.330	50,00	25,82	BPBD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	48,00	19.300.000.000	12	4.521.339.770	12,00	4.537.169.797	12,00	4.410.175.894	100,00	97,20	24,00	8.931.515.664	50,00	46,28	BPBD

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3168,00	18.500.000.000	792	4.367.279.770	792,00	4.393.509.797	792,00	4.270.245.894	100,00	97,19	1584,00	8.637.525.664	50,00	46,69	BPBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200,00	800.000.000	300	154.060.000	300,00	143.660.000	300,00	139.930.000	100,00	97,40	600,00	293.990.000	50,00	36,75	BPBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	786.813.000	12	73.830.843	12,00	261.767.026	9,00	255.762.207	75,00	97,71	21,00	329.593.050	43,75	41,89	BPBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	52,00	37.500.000	6	1.541.000	6,00	7.393.526	5,00	7.180.000	83,33	97,11	11,00	8.721.000	21,15	23,26	BPBD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18,00	125.320.000	0	-	4,00	98.495.000	4,00	96.440.000	100,00	97,91	4,00	96.440.000	22,22	76,95	BPBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	109,00	114.000.000	24	15.476.900	27,00	28.865.000	27,00	26.579.000	100,00	92,08	51,00	42.055.900	46,79	36,89	BPBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	91,00	79.993.000	20	6.367.425	22,00	8.210.500	22,00	7.868.500	100,00	95,83	42,00	14.235.925	46,15	17,80	BPBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Daerah	1200,00	100.000.000	300	24.600.000	300,00	25.440.000	300,00	24.880.000	100,00	97,80	600,00	49.480.000	50,00	49,48	BPBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	132,00	330.000.000	30	25.845.518	35,00	93.363.000	35,00	92.814.707	100,00	99,41	65,00	118.660.225	49,24	35,96	BPBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran tagihan telepon/ faximile, listrik, air dan posko damkar yang disediakan	48,00	230.000.000	12	22.943.360	12,00	35.804.300	12,00	25.552.531	100,00	71,37	24,00	48.495.891	50,00	21,09	BPBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144,00	230.000.000	28	22.943.360	36,00	35.804.300	36,00	25.552.531	100,00	71,37	64,00	48.495.891	44,44	21,09	BPBD
	Pemeliharaan Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	37,00	165.500.000	19	332.567.800	19,00	364.870.000	18,00	355.874.530	94,74	97,53	37,00	688.442.330	100,00	100,00	BPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dan Perizinannya	7,00	630.000.000	9	74.143.800	13,00	19.500.000	13,00	18.124.530	100,00	92,95	22,00	92.268.330	314,29	14,65	BPBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	850.000.000	9	256.464.000	13,00	335.870.000	11,00	328.845.000	84,62	97,91	20,00	585.309.000	200,00	68,86	BPBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	48.000.000	1	1.960.000	1,00	9.500.000	1,00	8.905.000	100,00	93,74	2,00	10.865.000	0,00	22,64	BPBD

	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rasio desa tangguh bencana	28,24	320.000.000	16,57		20,00		20,00		100,00	0,00	36,57		129,50	72,39	BPBD
		Cakupan Pelayanan Pasca bencana sesuai standar	100,00	462.000.000	100	62.487.000	100,00	242.781.000	100,00	231.633.500	100,00	0,00	200,00	231.633.500	200,00	50,14	BPBD
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase warga masyarakat yang mendapat kan informasi kebencanaan	60,00	70.000.000	45	8.320.000	45,00	79.821.000	45,00	77.635.000	100,00	97,26	90,00	85.955.000	150,00	100,00	BPBD
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per JenisBencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	14000,00	70.000.000	3000	8.320.000	3000,00	79.821.000	3000,00	77.635.000	100,00	97,26	6000,00	85.955.000	42,86	100,00	BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pembentukan Desa Siaga Bencana	50,00	320.000.000	0	24.524.500	35,00	68.580.000	35,00	62.080.000	100,00	90,52	35,00	86.604.500	70,00	27,06	BPBD
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	13,00	320.000.000	0	24.524.500	3,00	68.580.000	3,00	62.080.000	100,00	90,52	3,00	86.604.500	23,08	27,06	BPBD
	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Prosentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana	100,00	486.000.000	100	29.642.500	100,00	94.380.000	100,00	91.918.500	100,00	97,39	200,00	121.561.000	200,00	25,01	BPBD
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	392.000.000	5	29.642.500	5,00	94.380.000	5,00	91.918.500	100,00	97,39	10,00	121.561.000	10,00	31,01	BPBD
	PROGRAM PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layananan Kebakaran	40,90	120.000.000	38,1	27.159.500	39,50	89.736.000	39,00	74.738.000	98,73	83,29	77,10	101.897.500	188,51	84,91	BPBD
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran	75,00	120.000.000	57,4	27.159.500	60,00	89.736.000	60,00	74.738.000	100,00	83,29	117,40	101.897.500	156,53	84,91	BPBD
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	100,00	120.000.000	25	27.159.500	90,00	89.736.000	74,00	74.738.000	82,22	83,29	99,00	101.897.500	99,00	84,91	BPBD
	DINAS SOSIAL																
	URUSAN SOSIAL			9.176.840.945		7.397.894.524		7.763.075.768	0,00	7.537.349.709		31,73		9.534.233.712		100,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Sosial	BB (70)	4.400.883.945		3.326.328.651	BB	3.449.105.448	B	3.353.244.099		97,22	#VALUE !	6.679.572.750		100,00	Dinas Sosial
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat capaian perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00	38.228.300	100,00	17.957.400	100,00	19.011.300	100,00	18.420.785	100,00	96,89	200,00	36.378.185	200,00	95,16	Dinas Sosial

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	4,00	19.848.300	4,00	8.195.700	4,00	8.808.600	4,00	8.722.485	100,00	99,02	8,00	16.918.185	200,00	85,24	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	4.011.100	2,00	3.449.500	2,00	3.703.200	2,00	3.253.200	100,00	87,85	4,00	6.702.700	200,00	167,10	Dinas Sosial
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	14.368.900	3,00	6.312.200	3,00	6.499.500	3,00	6.445.100	100,00	99,16	6,00	12.757.300	150,00	88,78	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat capaian kinerja keuangan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	100,00	3.231.572.645	50,00	2.634.384.262	100,00	2.643.539.048	100,00	2.600.175.907	100,00	98,36	150,00	5.234.560.169	150,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	2.992.086.245	28,00	2.460.654.262	28,00	2.467.399.048	28,00	2.426.155.907	100,00	98,33	56,00	4.886.810.169	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	234.291.000	12,00	173.730.000	12,00	174.040.000	12,00	171.940.000	100,00	98,79	24,00	345.670.000	200,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	5.195.400	0,00	-	1,00	2.100.000	1,00	2.080.000	100,00	99,05	1,00	2.080.000	100,00	40,04	Dinas Sosial
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	8.277.000	100,00	5.799.500	100,00	6.500.000	100,00	6.178.200	100,00	95,05	200,00	11.977.700	200,00	100,00	Dinas Sosial
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	8.277.000	1	5.799.500	1,00	6.500.000	1,00	6.178.200	100,00	95,05	2,00	11.977.700	200,00	100,00	Dinas Sosial
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur terlatih yang meningkat kompetensinya	100,00	25.000.000	100	5.000.000	100,00	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	100,00	5.000.000	100,00	20,00	Dinas Sosial
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	25.000.000	1	5.000.000	2,00	10.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	5.000.000	20,00	20,00	Dinas Sosial
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	365.573.000	100,00	243.497.639	100,00	341.132.100	100,00	332.060.768	100,00	97,34	200,00	575.558.407	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	5.094.000	12,00	3.991.000	12,00	3.990.000	12,00	3.916.000	100,00	98,15	24,00	7.907.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	12.681.000	2,00	9.800.000	10,00	4.000.000	9,00	2.800.000	90,00	70,00	11,00	12.600.000	91,67	99,36	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor, jasa, bahan, alat kebersihan kantor, dan logistik bahan bakar unit mesin generator set.	12,00	88.637.000	12,00	64.218.500	12,00	72.661.900	12,00	69.976.300	100,00	96,30	24,00	134.194.800	100,00	100,00	Dinas Sosial

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	25.621.000	12,00	18.785.000	12,00	26.688.200	12,00	23.436.320	100,00	87,82	24,00	42.221.320	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300,00	31.835.000	300,00	25.000.000	300,00	25.000.000	300,00	25.000.000	100,00	100,00	600,00	50.000.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	201.705.000	50,00	121.703.139	60,00	208.792.000	60,00	206.932.148	100,00	99,11	110,00	328.635.287	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan kantor untuk sarana prasarana penunjang kinerja	100,00	188.805.000	100,00	123.900.000	100,00	91.500.000	25,00	84.895.000	25,00	92,78	125,00	208.795.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12,00	188.805.000	8,00	123.900.000	8,00	91.500.000	8,00	84.895.000	100,00	92,78	16,00	208.795.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	100,00	156.564.000	100,00	41.045.000	100,00	59.360.000	100,00	49.841.449	100,00	83,96	200,00	90.886.449	100,00	58,05	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24,00	29.224.000	24,00	32.300.000	24,00	47.550.000	24,00	38.081.449	100,00	80,09	48,00	70.381.449	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,00	127.340.000	10,00	8.745.000	10,00	11.810.000	10,00	11.760.000	100,00	99,58	20,00	20.505.000	100,00	16,10	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	90,00	386.864.000	100,00	254.744.850	95,00	278.063.000	72,50	202.797.490	76,32	72,93	172,50	457.542.340	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2,00	339.749.000	2,00	225.122.500	2,00	238.810.000	2,00	175.101.000	100,00	73,32	4,00	400.223.500	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00	15.535.000	7,00	9.850.000	7,00	12.700.000	1,00	1.415.000	14,29	11,14	8,00	11.265.000	100,00	72,51	Dinas Sosial
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	31.580.000	12,00	19.772.350	10,00	26.553.000	2,00	26.281.490	20,00	98,98	14,00	46.053.840	100,00	100,00	Dinas Sosial
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	90,00	1.124.734.000	82,50	665.554.000	82,50	737.863.000	82,50	692.368.000	100,00	93,83	165,00	1.357.922.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kompetensinya.	90,00	1.124.734.000	82,50	665.554.000	82,50	737.863.000	82,50	692.368.000	100,00	93,83	165,00	1.357.922.000	100,00	100,00	Dinas Sosial

	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	131,00	500.648.000	131,00	281.884.500	131,00	410.391.000	131,00	407.474.000	100,00	99,29	262,00	689.358.500	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	9,00	52.718.000	9,00	26.545.500	9,00	38.259.000	9,00	38.245.500	100,00	99,96	18,00	64.791.000	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan kapasitasnya.	10,00	457.795.000	5,00	308.824.000	5,00	243.335.000	5,00	208.998.500	100,00	85,89	10,00	517.822.500	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00	113.573.000	1,00	48.300.000	1,00	45.878.000	1,00	37.650.000	100,00	82,07	2,00	85.950.000	100,00	75,68	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS).	92,50	355.967.000	84,60	175.455.995	85,00	338.707.200	85,00	319.819.840	100,00	94,42	169,60	495.275.835	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang menerima layanan rehabilitasi sosial	90,00	222.351.000	85,00	170.955.995	85,00	305.407.200	85,00	289.819.840	100,00	94,90	170,00	460.775.835	188,89	100,00	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150,00	65.987.000	66,00	44.654.140	86,00	63.350.000	86,00	61.570.000	100,00	97,19	152,00	106.224.140	100,00	160,98	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50,00	53.470.000	11,00	36.617.700	3,00	12.750.000	3,00	11.850.000	100,00	92,94	14,00	48.467.700	28,00	100,00	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	15,00	93.021.000	10,00	60.055.855	120,00	229.307.200	120,00	216.399.840	100,00	94,37	130,00	276.455.695	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	200,00	9.873.000	144,00	29.628.300	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	29.628.300	0,00	100,00	Dinas Sosial
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang menerima layanan rehabilitasi sosial	82,50	133.616.000	57,98	4.500.000	77,25	33.300.000	0,00	30.000.000	0,00	90,09	57,98	34.500.000	70,28	25,82	Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	0,00	-	0,00	-	20,00	28.800.000	20,00	28.800.000	100,00	100,00	20,00	28.800.000			Dinas Sosial

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	15,00	7.640.000	9,00	4.500.000	9,00	4.500.000	3,00	1.200.000	33,33	26,67	12,00	5.700.000	80,00	74,61	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mendapat bantuan perlindungan dan jaminan sosial	77,50	2.878.858.000	63,62	3.124.101.678	72,50	3.126.802.040	25,12	3.063.310.570	34,65	97,97	88,74	6.187.412.248	100,00	214,93	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	67,50	2.878.858.000	56,12	3.124.101.678	62,50	3.126.802.040	17,62	3.063.310.570	28,19	97,97	73,74	6.187.412.248	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	240000,00	152.600.000	2400000	99.728.800	240000,00	117.344.640	240000,00	114.860.800	100,00	97,88	2640000,00	214.589.600	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapat Pengetasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100,00	2.097.253.000	105,00	2.754.910.000	100,00	2.687.868.700	99,00	2.643.421.610	105,00	1,58	204,00	5.398.331.610	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21000,00	463.216.000	21000,00	260.620.078	21000,00	262.908.700	21000,00	247.994.910	100,00	94,33	42000,00	508.614.988	100,00	100,00	Dinas Sosial
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	165.789.000	10,00	8.842.800	10,00	58.680.000	10,00	57.033.250	100,00	97,19	20,00	65.876.050	100,00	39,73	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat.	100,00	416.398.000	100,00	106.454.200	100,00	110.598.080	100,00	108.607.200	100,00	98,20	200,00	215.061.400	100,00	51,65	Dinas Sosial
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan perlindungan sosial pasca bencana dan selama masa tanggap darurat	100,00	25.468.000	100,00	9.775.000	100,00	10.600.000	100,00	10.294.000	100,00	97,11	200,00	20.069.000	100,00	78,80	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	12.734.000	0,00	-	10,00	5.600.000	10,00	5.344.000	100,00	95,43	10,00	5.344.000	20,00	41,97	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	12.734.000	11,00	9.775.000	10,00	5.000.000	10,00	4.950.000	100,00	99,00	21,00	14.725.000	42,00	100,00	Dinas Sosial
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dan Taruna Siaga Bencana yang berperan aktif dalam kesiapsiagaan bencana	100,00	390.930.000	100,00	96.679.200	100,00	99.998.080	100,00	98.313.200	100,00	98,32	200,00	194.992.400	100,00	49,88	Dinas Sosial
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20,00	148.986.000	20,00	96.679.200	20,00	99.998.080	20,00	98.313.200	100,00	98,32	40,00	194.992.400	100,00	100,00	Dinas Sosial
	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB	13.784.000.000		2.428.907.976	BB	2.754.714.933	-	2.524.702.704		91,65		4.953.610.680		35,94	Disnakertrans

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,00	103.445.000	4,00	10.000.000	5	10.000.000	4	9.872.975	80,00	98,73	8,00	19.872.975	40,00	19,21	Disnakertrans
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	16,00	67.676.000	4,00	5.000.000	4	5.000.000	3	4.939.175	75,00	98,78	7,00	9.939.175	43,75	14,69	Disnakertrans
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4,00	35.769.000	0,00	5.000.000	1	5.000.000	1	4.933.800	100,00	98,68	1,00	9.933.800	25,00	27,77	Disnakertrans
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tenaga pendukung kegiatan yang terbayar honorarnya	100,00	12.022.078.000	60,00%	2.143.356.651	1	2.355.054.933	75	2.167.234.756	7500,00	92,02	75,60	4.310.591.407	75,60	35,86	Disnakertrans
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji nya	104,00	11.233.623.000	26,00	1.998.642.651	26	2.205.934.933	26	2.023.096.756	100,00	91,71	52,00	4.021.739.407	50,00	35,80	Disnakertrans
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4,00	764.749.000	1,00	139.720.000	1	144.120.000	0	139.220.000	0,00	96,60	1,00	278.940.000	25,00	36,47	Disnakertrans
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	23.706.000	1,00	4.994.000	1	5.000.000	1	4.918.000	100,00	98,36	2,00	9.912.000	50,00	41,81	Disnakertrans
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang di asuransikan	100,00	30.818.000	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disnakertrans
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4,00	30.818.000	0,00	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Disnakertrans
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100,00	666.293.000	30	119.825.080	100	178.785.600	100	168.838.360	100,00	94,44	130,00	288.663.440	100,00	43,32	Disnakertrans
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	20.216.000	0,00	-	1	4.646.000	1	4.257.000	0,00	0,00	1,00	4.257.000	25,00	21,06	Disnakertrans
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4,00	212.689.000	0,00	33.859.700	1	43.659.600	1	39.273.700	100,00	89,95	1,00	73.133.400	25,00	34,39	Disnakertrans
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4,00	29.771.000	0,00	3.549.800	1	4.000.000	1	3.702.000	100,00	92,55	1,00	7.251.800	25,00	24,36	Disnakertrans
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1000,00	146.975.000	0,00	24.900.000	250	25.000.000	250	25.000.000	100,00	100,00	250,00	49.900.000	25,00	33,95	Disnakertrans
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64,00	256.642.000	4,00	57.515.580	16	101.480.000	16	96.605.660	100,00	95,20	20,00	154.121.240	31,25	60,05	Disnakertrans
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	100,00	235.166.000	100	59.488.120	100	94.624.400	100	74.533.508	100,00	78,77	100,00	134.021.628	100,00	56,99	Disnakertrans
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebeleur yang disediakan	4,00	16.595.000	-	-	1	-	-	-	0,00	0,00		-		0,00	Disnakertrans

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12,00	218.571.000	1,00	59.488.120	3	94.624.400	3	74.533.508	100,00	78,77	4,00	134.021.628	33,33	61,32	Disnakertrans
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	100,00	214.157.000	65,00	14.210.000	100	21.760.000	100	21.740.000	100,00	99,91	165,00	35.950.000	100,00	16,79	Disnakertrans
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4,00	214.157.000	1,00	14.210.000	1	21.760.000	1	21.740.000	100,00	99,91	2,00	35.950.000	50,00	16,79	Disnakertrans
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100,00	512.043.000	0,60	82.028.125	100	94.490.000	100	82.483.105	100,00	87,29	100,60	164.511.230	100,60	32,13	Disnakertrans
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan nya	16,00	512.043.000	2,00	82.028.125	4	94.490.000	4	82.483.105	100,00	87,29	6,00	164.511.230	37,50	32,13	Disnakertrans
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	73,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	70	400.000.000	70	394.563.056	100,00	98,64	95,00	565.831.556	130,14	46,23	Disnakertrans
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	290,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	70	400.000.000	70	394.563.056	100,00	98,64	95,00	565.831.556	32,76	46,23	Disnakertrans
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	290,00	1.224.000.000	25,00	171.268.500	70	400.000.000	70	394.563.056	100,00	98,64	95,00	565.831.556	32,76	46,23	Disnakertrans
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	73,60	213.532.000	30,00%	147.268.000	80	50.000.000	80	48.375.500	100,00	96,75	80,30	195.643.500	100,00	91,62	Disnakertrans
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	73,60	213.532.000	30,00%	147.268.000	80	50.000.000	80	48.375.500	100,00	96,75	80,30	195.643.500	100,00	91,62	Disnakertrans
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online	4330,00	213.532.000	200,00	147.268.000	1050	50.000.000	1050	48.375.500	100,00	96,75	1250,00	195.643.500	28,87	91,62	Disnakertrans
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial	10,00	231.238.000	0,00	225.514.000	10,1	97.264.000	10.1	94.509.500	100,00	97,17	10,10	320.023.500	100,00	100,00	Disnakertrans
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Hubungan Industrial	46,00	231.238.000	0,00	225.514.000	11	97.264.000	11	94.509.500	100,00	97,17	11,00	320.023.500	23,91	100,00	Disnakertrans
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	4,00	231.238.000	0,00	225.514.000	1	97.264.000	1	94.509.500	100,00	97,17	1,00	320.023.500	25,00	138,40	Disnakertrans
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	50,00	759.707.000	0,00	53.930.266	60	99.968.000	60	94.964.787	0,00	95,00	60,00	148.895.053	100,00	19,60	Disnakertrans
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan transmigran	24,00	759.707.000	0,00	53.930.266	6	99.968.000	1	94.964.787	0,00	95,00	1,00	148.895.053	4,17	19,60	Disnakertrans

	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4,00	151.262.000	1,00	53.930.266	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	53.930.266	25,00	35,65	Disnakertrans
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	24,00	608.445.000	0,00	-	1	99.968.000	1	94.964.787	0,00	0,00	1,00	94.964.787	4,17	15,61	Disnakertrans
	P3AP2KB																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Dinas P3AP2KB	100,00	7.929.612.969		3.736.869.560	100,00	4.075.706.160	100,00	3.279.437.144		80,46		7.016.306.704		88,48	P3AP2KB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pada Perangkat daerah	100,00	22.595.200	98,05%	25.635.800	7,00	26.541.100	7,00	5.426.500	100,00	20,45	7,98	31.062.300	7,98	100,00	P3AP2KB
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,00	2.770.000	1,00	6.206.200	3,00	6.320.100	3,00	6.082.728	100,00	96,24	4,00	12.288.928	80,00	100,00	P3AP2KB
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,00	5.849.500	2,00	5.816.500	3,00	5.850.000	4,00	5.442.500	133,33	93,03	6,00	11.259.000	85,71	100,00	P3AP2KB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,00	8.876.000	3,00	8.854.500	3,00	8.876.000	3,00	8.067.800	100,00	90,89	6,00	16.922.300	200,00	100,00	P3AP2KB
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	5.099.700	1,00	4.758.600	4,00	5.495.000	4,00	4.050.000	100,00	73,70	5,00	8.808.600	100,00	100,00	P3AP2KB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi keuangan	100,00	6.848.435.489	91,06	3.028.099.298	100,00	3.380.295.560	100,00	2.089.261.247	100,00	61,81	191,06	5.117.360.545	100,00	74,72	P3AP2KB
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	6.416.276.489	14,00	2.846.558.398	17,00	3.178.356.260	68,00	2.550.771.305	100,00	80,25	82,00	5.397.329.703	100,00	84,12	P3AP2KB
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	421.660.000	12,00	176.500.000	12,00	196.440.000	12,00	184.540.000	100,00	93,94	24,00	361.040.000	100,00	85,62	P3AP2KB
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00	10.499.000	1,00	5.040.900	3,00	5.499.300	3,00	4.544.454	100,00	82,64	4,00	9.585.354	80,00	91,30	P3AP2KB
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	6,00	61.051.000	0,00	-	1,00	6.500.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah kendaraan yang diasuransikan	6,00	61.051.000	0,00	-	1,00	6.500.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	6,00	5.000.000	1,00	6.625.000	100,00	7.000.000	100,00	-	100,00	0,00	101,00	6.625.000	1683,33	100,00	P3AP2KB

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6,00	5.000.000	1,00	6.625.000	1,00	7.000.000	0,00	-	0,00	0,00	1,00	6.625.000	16,67	100,00	P3AP2KB
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi umum	94,70	222.532.000		122.165.650	13,00	162.104.500	10,00	65.678.569	76,92	0,00	10,00	187.844.219	10,56	84,41	P3AP2KB
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	10.696.000	10,00	3.264.000	6,00	2.864.000	0,00	-	0,00	0,00	10,00	3.264.000	58,82	30,52	P3AP2KB
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	25.820.500	13,00	23.981.000	6,00	27.033.000	6,00	16.805.000	100,00	100,00	19,00	40.786.000	19,00	100,00	P3AP2KB
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,00	50.050.500	11,00	10.240.500	3,00	16.517.500	1,00	7.525.000	33,33	100,00	12,00	17.765.500	80,00	35,50	P3AP2KB
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	566,00	59.700.000	388,00	29.750.000	13,00	34.000.000	13,00	29.025.000	100,00	85,37	401,00	58.775.000	70,85	98,45	P3AP2KB
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26,00	76.265.000	20,00	54.930.150	12,00	81.690.000	12,00	79.981.697	100,00	97,91	32,00	134.911.847	123,08	100,00	P3AP2KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi umum	94,70	144.655.000	37,74	116.231.524	1,00	129.010.000	1,00	85.569.060	100,00	66,33	38,74	201.800.584	40,91	100,00	P3AP2KB
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,00	61.880.000	12,00	52.611.524	12,00	99.010.000	12,00	74.087.120	100,00	74,83	24,00	126.698.644	1200,00	204,75	P3AP2KB
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	82.775.000	1,00	63.620.000	1,00	30.000.000		30.000.000	0,00	100,00	1,00	93.620.000	100,00	113,10	P3AP2KB
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	22,00	679.895.280	11,59	438.112.288	22,00	364.255.000	21,00	108.699.445	95,45	29,84	32,59	546.811.733	148,15	80,43	P3AP2KB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25,00	587.940.000	22,00	290.529.000	36,00	272.710.000	36,00	253.064.000	100,00	92,80	58,00	543.593.000	232,00	92,46	P3AP2KB
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	53,00	32.400.000	22,00	8.263.288	6,00	55.945.000	6,00	51.045.000	100,00	91,24	28,00	59.308.288	52,83	183,05	P3AP2KB
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53,00	9.678.440	36,00	56.750.000	2,00	6.130.000	2,00	6.130.000	100,00	100,00	38,00	62.880.000		649,69	P3AP2KB
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	20.900.000	2,00	60.800.000	2,00	15.000.000	0,00	-	0,00	0,00	2,00	60.800.000	100,00	290,91	P3AP2KB

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	12,00	28.976.840	12,00	21.770.000	2,00	14.470.000	2,00	12.425.000	100,00	85,87	14,00	34.195.000	116,67	118,01	P3AP2KB
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi angkatan kerja perempuan	66,00	2.390.965.800	2,24	1.252.401.988	62,00	888.969.300	1,61	625.392.400	2,59	70,35	3,85	1.877.794.388	5,83	78,54	P3AP2KB
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase OPD yang melaksanakan PPRG	6,00	43.298.000	0,00	19.539.000	6,00	11.879.400	0,00	1.520.000	0,00	12,80	0,00	21.059.000	0,00	48,64	P3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	6,00	43.298.000		19.539.000	6,00	11.879.400	6,00	8.760.300	100,00	73,74	6,00	28.299.300	100,00	65,36	P3AP2KB
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Ekonomi, Sosial pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase Kelompok Ekonomi Produktif Terampil	95,00	2.303.399.800	2,28	1.232.862.988	83,63	851.089.900	1,68	80.166.100	2,01	9,42	3,96	1.313.029.088	4,16	57,00	P3AP2KB
	Sosialisasi Peningkatan partisipasi Perempuan Bidang politik, Hukum Sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	65,00	477.488.800	5,00	200.420.850	10,00	134.182.900	10,00	102.761.900	100,00	76,58	15,00	303.182.750	23,08	63,50	P3AP2KB
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupatn/Kota	100,00	1.759.509.000	50,00	1.032.442.138	6,00	716.907.000	6,00	491.025.200	100,00	68,49	56,00	1.523.467.338	56,00	86,58	P3AP2KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Angka)	9,00	44.268.000		-	9,00	26.000.000	0,00	22.845.000	0,00	0,00	0,00	22.845.000	0,00	51,61	P3AP2KB
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	6,00	22.134.000		-	9,00	26.000.000	9,00	22.845.000	100,00	87,87	9,00	22.845.000		103,21	P3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,01	257.724.000		17.100.918	0,01	113.673.700	4,24	88.087.700	42373,04	77,49	4,24	105.188.618	42373,04	40,81	P3AP2KB

	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100,00	188.472.000		17.100.918	0,01	101.500.000	0,00	30.733.100	0,00	30,28	0,00	47.834.018	0,00	25,38	P3AP2KB
	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pecehan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	188.472.000		17.100.918	1,00	101.500.000	1,00	80.991.000	100,00	79,79	1,00	98.091.918	10,00	52,05	P3AP2KB
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat pendampingan	10,00	47.118.000	0,00	-	10,00	12.173.700	39,57	6.336.700	395,66	52,05	39,57	6.336.700	395,66	13,45	P3AP2KB
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,00	47.118.000	9,00	-	15,00	12.173.700	8,00	6.336.700	53,33	52,05	17,00	6.336.700	170,00	13,45	P3AP2KB
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak	100,00	116.170.900		88.040.247	4,00	59.367.000	4,00	57.902.847	100,00	97,53	4,00	145.943.094	4,00	125,63	P3AP2KB
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana KIE pengendalian penduduk dan KB	100,00	116.170.900		88.040.247	4,00	59.367.000	2,00	38.589.847	50,00	65,00	2,00	126.630.094	2,00	109,00	P3AP2KB
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10,00	116.170.900	4,00	88.040.247	100,00	59.367.000	4,00	57.902.847	4,00	97,53	8,00	145.943.094	80,00	125,63	P3AP2KB
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terbentuknya data terpilah Gender dan Anak	1,00	21.547.700		20.115.200	2,00	11.444.500	0,00	2.376.500	0,00	20,77	0,00	22.491.700	0,00	104,38	P3AP2KB
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,00	21.547.700		20.115.200	2,00	11.444.500	0,00	-	0,00	0,00	0,00	20.115.200	0,00	93,35	P3AP2KB
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3,00	21.547.700	3,00	20.115.200	3,00	11.444.500	3,00	2.376.500	100,00	20,77	6,00	22.491.700	200,00	104,38	P3AP2KB
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Kecamatan yang telah membentuk Forum Anak	100,00	212.117.400	33,75	81.116.605	20,00	127.834.600	30,20	84.263.720	151,00	65,92	63,95	165.380.325	63,95	77,97	P3AP2KB
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase forum anak yang aktif (melakukan kegiatan minimal 3 kali dalam 1 tahun)	10,00	60.627.300	79,17	23.742.755	20,00	84.625.000	15,00	47.498.230	75,00	56,13	94,17	71.240.985	100,00	117,51	P3AP2KB

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5,00	60.627.300	28,00	26.592.200	20,00	84.625.000	20,00	61.263.680	100,00	100,00	48,00	87.855.880	100,00	144,91	P3AP2KB
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kecamatan layak anak		151.490.100	14,96	57.373.850	28,00	43.209.600	9,00	16.946.940	32,14	39,22	23,96	74.320.790	0,00	49,06	P3AP2KB
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3,00	37.594.200	5,00	15.815.650	3,00	17.499.600	3,00	16.946.940	100,00	96,84	8,00	32.762.590	266,67	87,15	P3AP2KB
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	113.895.900	5,00	41.558.200	4,00	25.710.000	4,00	6.053.100	100,00	23,54	9,00	47.611.300	100,00	41,80	P3AP2KB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	1.194.008.600			5,00	322.608.000	5,00	85.849.854	100,00	26,61	5,00	85.849.854	5,00	7,19	P3AP2KB
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	113.895.900	5,00	46.747.200	38,00	253.588.000	7,00	19.118.354	18,42	7,54	12,00	65.865.554	100,00	57,83	P3AP2KB
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	100,00	1.194.008.600	1,00		10,00	253.588.000	9,96	28.280.854	99,55	11,15	10,96	28.280.854	10,96	2,37	P3AP2KB
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100,00	1.194.008.600		-	1,00	69.020.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10,00	268.405.000	0,00	-	20,00	69.020.000	20,00	59.991.500	100,00	86,92	20,00	59.991.500	200,00	22,35	P3AP2KB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	83,00	990.199.700	0,09	312.655.870	10,00	979.662.000	0,00	489.883.041	0,00	50,01	0,09	802.538.911	0,11	81,05	P3AP2KB
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase dokumen perencanaan pengendalian penduduk yang tersedia	1,00	142.247.700	0,00	48.766.280	1,00	34.583.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	48.766.280	0,00	34,28	P3AP2KB
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat kab/kota	1,00	120.732.600	0,00	40.812.180	1,00	25.492.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	40.812.180	0,00	33,80	P3AP2KB

	Kerjasama Pelaksanaan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	44,00	21.515.100	35,00	7.954.100	9,00	9.091.000	9,00	7.893.500	100,00	86,83	44,00	15.847.600	100,00	73,66	P3AP2KB
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen kajian kependudukan	1,00	847.952.000	0,10	263.889.590	1,05	945.079.000	0,10	39.636.617	9,22	4,19	0,19	303.526.207	19,36	35,80	P3AP2KB
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1,00	18.989.500	0,00	-	3,00	9.096.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB
	Pembentukan dan operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	10,00	797.286.300	6,00	260.086.390	6,00	927.031.000	1,00	473.733.541	16,67	51,10	7,00	733.819.931	70,00	92,04	P3AP2KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BENCANA (KB)	Prosentase peserta KB aktif	83,00	9.455.753.423	0,00	1.950.999.978	8,00	2.137.994.000	0,00	1.478.137.182	0,00	69,14	0,00	3.429.137.160	0,00	36,27	P3AP2KB
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana KIE pengendalian penduduk dan KB	100,00	9.153.942.200	0,00	1.808.954.978	1,00	2.053.060.000	0,00	368.447.750	0,00	17,95	0,00	2.177.402.728	0,00	23,79	P3AP2KB
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)		2.340.610.550	0,00	-	1,00	207.730.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	P3AP2KB
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100,00	4.967.927.650	69,00	1.766.762.978	6,00	1.820.826.000	6,00	1.419.814.682	100,00	77,98	75,00	3.186.577.660	75,00	64,14	P3AP2KB
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	100,00	71.135.000	7,00	42.192.000	1,00	24.504.000	1,00	24.015.100	100,00	98,00	8,00	66.207.100	8,00	93,07	P3AP2KB
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) yang melakukan pembinaan lini lapangan	100,00	147.584.000	0,00	42.583.000	80,00	47.818.000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	42.583.000	0,00	28,85	P3AP2KB
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100,00	84.479.000	543,00	18.269.000	80,00	31.231.000	80,00	16.200.900	100,00	51,87	623,00	34.469.900	623,00	40,80	P3AP2KB
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100,00	63.105.000	3,00	24.314.000	9,00	16.587.000	0,00	-	0,00	0,00	3,00	24.314.000	3,00	38,53	P3AP2KB

	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	100,00	154.227.223	0,00	99.462.000	7,00	37.116.000	4,00	5.103.500	57,14	13,75	4,00	104.565.500	4,00	67,80	P3AP2KB
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100,00	154.227.223	100,00	99.462.000	7,00	37.116.000	7,00	18.106.500	100,00	48,78	107,00	117.568.500	107,00	76,23	P3AP2KB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100,00	4.967.927.650	69,00	2.670.188.450	68,00	2.399.819.000	68,00	2.235.797.150	100,00	93,17	137,00	4.905.985.600	137,00	98,75	P3AP2KB
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) yang melakukan pembinaan lini lapangan	100,00	147.584.000	546,00	60.926.000	80,00	2.399.819.000	0,00	859.699.500	0,00	35,82	546,00	920.625.500	546,00	623,80	P3AP2KB
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100,00	63.105.000	3,00	29.695.000	3,00	53.354.000	3,00	43.891.000	100,00	82,26	6,00	73.586.000	6,00	116,61	P3AP2KB
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100,00	84.479.000	543,00	31.231.000	1,00	15.927.000	1,00	8.960.000	100,00	56,26	544,00	40.191.000	544,00	47,58	P3AP2KB
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100,00	154.227.223	2000,00	100.366.000	462,00	2.306.089.000	462,00	2.162.830.150	100,00	93,79	2462,00	2.263.196.150	2462,00	1467,44	P3AP2KB
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	100,00	154.227.223	100,00	100.366.000	19,00	24.449.000	19,00	20.116.000	100,00	82,28	119,00	120.482.000	119,00	78,12	P3AP2KB
DINAS KETAHANAN PANGAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	17.764.715.500		3.163.732.279	BB	3.331.306.751	1,00	3.331.306.751		100,00	1,00	6.495.039.030		36,56	Dinas Ketahanan Pangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20,00	66.000.000		12.863.500	5	13.010.000	1,00	13.010.000	20,00	100,00	1,00	25.873.500	5,00	39,20	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	12,00	50.000.000	2	9.959.000	3	10.000.000	0,00	10.000.000	0,00	100,00	2,00	19.959.000	16,67	39,92	Dinas Ketahanan Pangan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	16.000.000	2	2.904.500	2	3.010.000	0,00	3.010.000	0,00	100,00	2,00	5.914.500	25,00	36,97	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah	48,00	15.918.230.000		2.816.942.060	12	2.922.633.651		2.922.633.651	0,00	100,00	0,00	5.739.575.711	0,00	36,06	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31,00	15.000.000.000	31	2.661.325.060	31	2.771.023.651	31,00	2.771.023.651	100,00	100,00	62,00	5.432.348.711	200,00	36,22	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4,00	910.980.000	1	154.240.000	1	150.110.000	1,00	150.110.000	100,00	100,00	2,00	304.350.000	50,00	33,41	Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	20,00	7.250.000	4	1.377.000	4	1.500.000	4,00	1.500.000	100,00	100,00	8,00	2.877.000	40,00	39,68	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas yang diasuransi	4,00	32.500.000		6.251.280	1	6.500.000	1,00	6.500.000	100,00	100,00	1,00	12.751.280	25,00	39,23	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	32.500.000	1	6.251.280	1	6.500.000	1,00	6.500.000	100,00	100,00	2,00	12.751.280	50,00	39,23	Dinas Ketahanan Pangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	48,00	673.148.000		139.808.806	12	177.533.100		173.848.309	0,00	97,92	0,00	313.657.115	0,00	46,60	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,00	17.000.000	12	3.733.000	12	2.200.000	12,00	2.197.000	100,00	99,86	24,00	5.930.000	100,00	34,88	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,00	95.000.000	5	41.550.000	5	59.000.000	5,00	58.950.000	0,00	0,00	10,00	100.500.000	125,00	105,79	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	12,00	215.000.000	12	40.514.600	12	36.000.000	12,00	35.166.900	100,00	97,69	24,00	75.681.500	200,00	35,20	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	4,00	41.768.000	10	7.573.600	10	6.447.100	10,00	6.263.600	100,00	97,15	20,00	13.837.200	500,00	33,13	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	48,00	81.900.000	12	16.560.000	12	17.160.000	12,00	17.150.000	100,00	99,94	24,00	33.710.000	50,00	41,16	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	232,00	222.480.000	30	29.877.606	30	56.726.000	30,00	54.120.809	100,00	95,41	60,00	83.998.415	25,86	37,76	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran tagihan telp/faxmle, listrik dan kouta yang disediakan	100,00	300.337.500	22	60.000.000	29	63.060.000	29,00	59.921.800	100,00	95,02	51,00	119.921.800	51,00	39,93	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,00	96.337.500	12	19.200.000	12	22.260.000	12,00	19.121.800	100,00	85,90	24,00	38.321.800	50,00	39,78	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48,00	54.000.000	16	10.800.000	16	10.800.000	16,00	10.800.000	100,00	100,00	32,00	21.600.000	66,67	40,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4,00	150.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1,00	30.000.000	100,00	100,00	2,00	60.000.000	50,00	40,00	Dinas Ketahanan Pangan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	72,00	774.500.000	8	127.866.633	8	148.570.000	8,00	128.754.225	100,00	86,66	16,00	256.620.858	22,22	33,13	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau layanan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	72,00	774.500.000	8	127.866.633	8	148.570.000	8,00	128.754.225	100,00	86,66	16,00	256.620.858	22,22	33,13	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Infrastruktur pendukung Kemandirian pangan	100,00	505.000.000	100	520.024.000	100	17.195.000	100,00	17.045.000	100,00	99,13	200,00	520.170.000	200,00	103,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15,00	505.000.000		520.024.000	5	17.195.000	5,00	17.045.000	100,00	99,13	5,00	537.069.000	33,33	106,35	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	5,00	360.000.000	5	500.000.000	5	-	4,00	-	80,00		9,00	500.000.000	180,00	138,89	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Lantai jemur	Jumlah lantai jemur yang tersedia	5,00	95.000.000							0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	5,00	50.000.000	1	20.024.000	1	17.195.000	1,00	17.045.000	0,00	99,13	2,00	37.069.000	40,00	74,14	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Penganeragaman ketersediaan pangan dan ketahanan pangan masyarakat	100,00	2.070.000.000	84,75	282.488.222	84,75	1.441.124.500	84,75	1.420.970.270	100,00	98,60	169,50	1.703.458.492	169,50	82,29	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	20,00	180.000.000	0	77.296.622	1	641.677.000	1,00	627.387.796	100,00	3,00	1,00	704.684.418	5,00	391,49	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan neraca bahan makanan	informasi neraca bahan makanan	5,00	55.000.000	1	42.574.647	1	37.160.000	1,00	36.909.246	100,00	99,33	2,00	79.483.893	40,00	144,52	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyediaan Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	pangan berbasis Sumber daya lokal yang tersedia	5,00	55.000.000	1	22.526.125	1	146.067.000	1,00	138.694.250	100,00	94,95	2,00	161.220.375	40,00	293,13	Dinas Ketahanan Pangan
	Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen	informasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen			0	-	1	108.450.000	1,00	106.623.800	100,00		1,00				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	5,00	40.000.000	1	7.995.850	1	350.000.000	1,00	345.160.500			2,00	353.156.350	40,00	882,89	Dinas Ketahanan Pangan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan harga pangan	5,00	30.000.000	1	4.200.000	0	-	0,00	-			1,00	4.200.000	20,00	14,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (100 ton ekuivalen beras)	90000,00	1.670.000.000		7.920.000	19000	692.367.000		691.856.920	0,00	99,93	0,00	699.776.920	0,00	41,90	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	rencana kebutuhan pangan lokal	9,00	45.000.000	1	7.920.000	1	13.867.000	1,00	13.867.000	100,00	100,00	2,00	21.787.000	22,22	48,42	Dinas Ketahanan Pangan
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah kab/kota	90000,00	1.625.000.000	0	-	10	678.500.000	60,00	677.989.920	600,00	99,92	60,00	677.989.920	0,07	41,72	Dinas Ketahanan Pangan

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	87,00	220.000.000		197.271.600	84,75	107.080.500		101.725.554	0,00	95,00	0,00	298.997.154	0,00	135,91	Dinas Ketahanan Pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Pengeneragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4,00	180.000.000	0	190.426.000	1	91.080.500	1,00	88.441.500	100,00	97,10	1,00	278.867.500	25,00	154,93	Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5,00	40.000.000	1	6.845.600	1	16.000.000	1,00	13.284.054	100,00	83,03	2,00	20.129.654	40,00	50,32	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Jumlah Daerah Rawan Pangan	5,00	140.000.000	1	228.606.000	1	160.681.000	1,00	157.454.932	100,00	7,00	2,00	386.060.932	40,00	275,76	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	5,00	170.000.000		48.321.324	1	100.000.000		98.481.975	0,00	98,48	0,00	146.803.299	0,00	86,35	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan , pemuktahiran dan analisis dan kerentanan pangan	Peta dan Analis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang dimuktahirkan	5,00	170.000.000	1	48.321.324	1	100.000.000	1	98.481.975	100,00	98,48	2,00	146.803.299	40,00	86,35	Dinas Ketahanan Pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan kerawanan pangan kewenagan kab/kota	12,00	140.000.000		176.713.364	12	60.681.000		58.972.957	0,00	97,19	0,00	235.686.321	0,00	168,35	Dinas Ketahanan Pangan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	41,00	50.000.000	0	10.803.364	1	23.298.000	2	22.945.778	200,00	98,49	2,00	33.749.142	4,88	67,50	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,00	90.000.000	2	165.910.000	-	-	0	-		2,00		165.910.000	40,00	184,34	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah intervensi kewaspadaan pangan dan gizi			0	-	1	24.466.000	1	24.266.000	100,00	99,18	1,00	24.266.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan
	Penyusunan peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi kabupaten/kota			0	-	1	12.917.000	1	11.761.179	100,00	91,05	1,00	11.761.179	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Industri pangan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan	100,00	125.000.000	100	4.756.100	100	24.233.000	100	23.307.000	100,00	0,00	200,00	28.063.100	200,00	22,45	Dinas Ketahanan Pangan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pedagang/produsen makanan segar asal tumbuhan yang diuji	100,00	125.000.000		4.716.100	17	24.233.000		23.307.000	0,00	96,18	0,00	28.023.100	0,00	22,42	Dinas Ketahanan Pangan
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asala Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5,00	45.000.000	15	995.000	0	-	0	-		15,00		995.000	300,00	2,21	Dinas Ketahanan Pangan
	Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	5,00	35.000.000	1	490.000	0	-	1	-		2,00		490.000	40,00	1,40	Dinas Ketahanan Pangan
	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota					1	6.250.000	1	6.190.000	100,00	99,04	1,00	6.190.000			Dinas Ketahanan Pangan
	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					17	6.130.000	17	5.356.000	100,00	87,37	17,00	5.356.000			Dinas Ketahanan Pangan

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5,00	45.000.000	1	3.231.100	1	11.853.000	1	11.761.000	100,00	99,22	2,00	14.992.100	40,00	33,32	Dinas Ketahanan Pangan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	22.280.967.900		10.035.820.678	100,00	5.223.300.142	BB	5.155.860.859	#VALUE!	98,71	#VALUE!	15.191.681.537		68,18	DLH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	4,00	17.805.086.294	24	8.760.825.209	12,00	4.337.314.992	12	4.277.943.585	100,00	98,63	36,00	13.038.768.794	100,00	73,23	DLH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,00	16.964.400.000	12	8.445.843.409	12,00	4.169.104.992	12	4.109.733.585	100,00	98,58	24,00	12.555.576.994	100,00	74,01	DLH
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	4,00	840.686.294	12	314.981.800	1,00	168.210.000	1	168.210.000	100,00	100,00	13,00	483.191.800	100,00	57,48	DLH
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	4,00	30.817.394	1	6.206.200	1,00	6.500.000	1	6.304.830	100,00	97,00	2,00	12.511.030	50,00	40,60	DLH
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4,00	30.817.394	1	6.206.200	1,00	6.500.000	1	6.304.830	100,00	97,00	2,00	12.511.030	50,00	40,60	DLH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1535,00	1.234.339.157	51	341.332.913	12,00	293.157.650	12	287.985.992	100,00	98,24	63,00	629.318.905	4,10	50,98	DLH
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	36,00	14.264.187	3	2.656.000	1,00	4.401.250	1	4.303.000	100,00	97,77	4,00	6.959.000	11,11	48,79	DLH
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	341.000.000	12	5.880.000	2,00	61.598.700	2	59.270.000	100,00	96,22	14,00	65.150.000	14,00	19,11	DLH
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	420,00	291.341.164		99.219.200	7,00	47.306.500	7	45.646.500	100,00	96,49	7,00	144.865.700	1,67	49,72	DLH
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	125,00	255.531.784	12	89.639.000	3,00	29.632.200	3	28.911.555	100,00	97,57	15,00	118.550.555	12,00	46,39	DLH
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	162,00	118.623.260	12	33.825.550	1,00	25.020.000	1	25.020.000	100,00	100,00	13,00	58.845.550	8,02	49,61	DLH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	692,00	213.578.762	12	110.113.163	3,00	125.199.000	3	124.834.937	100,00	99,71	15,00	234.948.100	2,17	110,01	DLH
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72,00	151.704.000	12	44.877.037	12,00	14.647.500	12	14.637.450	100,00	99,93	24,00	59.514.487	33,33	39,23	DLH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72,00	151.704.000	12	44.877.037	1,00	14.647.500	1	14.637.450	100,00	99,93	13,00	59.514.487	18,06	39,23	DLH

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	318,00	2.896.938.755	173	882.579.319	12,00	571.680.000	12	568.989.002	100,00	99,53	185,00	1.451.568.321	58,18	50,11	DLH
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	132,00	2.567.952.460	70	813.379.319	17,00	494.980.000	17	493.369.002	100,00	99,67	87,00	1.306.748.321	65,91	50,89	DLH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6,00	266.687.749	8	45.000.000	23,00	76.700.000	23	75.620.000	100,00	98,59	31,00	120.620.000	516,67	45,23	DLH
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	180,00	62.298.546	95	24.200.000	0,00	-	0	-			95,00	24.200.000	52,78	38,85	DLH
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase izin lingkungan (Amdal/ UKL UPL/ SPPL) yang dilaksanakan dengan baik	75,00	1.613.000.000	1	402.450.000	1,00	342.790.000	1	340.546.913	100,00	99,35	2,00	742.996.913	2,67	46,06	DLH
	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota dan dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	3,00	53.000.000	1	-	0,00	-	0	-	100,00		1,00	-	33,33	0,00	DLH
	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan rpplhKabupaten/Kota yang disusun	3,00	275.000.000	0	-	0,00	-	0	-	#DIV/0 !		0,00	-	0,00	0,00	DLH
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen KLHS	1,00	1.560.000.000	1	402.450.000	1,00	342.790.000	1	340.546.913	100,00	99,35	2,00	742.996.913	100,00	47,63	DLH
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1,00	1.560.000.000	1	402.450.000	1,00	342.790.000	1	340.546.913	100,00	99,35	2,00	742.996.913	100,00	47,63	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	75,00	1.429.381.268	1	53.590.015	23,00	277.264.100	23	271.112.300	0,00	97,78	24,00	324.702.315	32,00	22,72	DLH
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6,00	356.491.268	1	53.590.015	22,00	271.702.600	22	265.685.300	100,00	97,79	23,00	319.275.315	383,33	89,56	DLH
	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1,00	336.424.404	1	71.176.000	1,00	143.962.600	1	139.627.600	100,00	96,99	2,00	210.803.600	100,00	62,66	DLH
	pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	20,00	26.000.000	17	41.686.000	20,00	3.650.000	20	3.650.000	100,00	100,0 0	37,00	45.336.000	100,00	174,3 7	DLH
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air,Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah air udara dan laut	40,00	356.491.268	1	53.590.015	1,00	124.090.000	1	122.407.700	100,00	98,64	2,00	175.997.715	5,00	49,37	DLH

	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembersihan sungai dan penyediaan sarana petugas pembersih	12,00	1.072.890.000	0	5.632.000	1,00	5.561.500	1	5.427.000	100,00	97,58	1,00	11.059.000	8,33	1,03	DLH
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	12,00	1.072.890.000	0	5.632.000	1,00	5.561.500	1	5.427.000	100,00	97,58	1,00	11.059.000	8,33	1,03	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pencemaran status mutu air	20,00	34.432.512	1	450.000	1,00	4.500.000	1	4.480.000	100,00	99,56	2,00	4.930.000	10,00	14,32	DLH
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi pengelolaan TPS limbah B3	45,00	34.432.512	1	450.000	1,00	4.500.000	1	4.480.000	100,00	99,56	2,00	4.930.000	4,44	14,32	DLH
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45,00	34.432.512	1	450.000	1,00	4.500.000	1	4.480.000	100,00	99,56	2,00	4.930.000	4,44	14,32	DLH
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase ketersediaan data/informasi SDA dan LH yang dapat diakses	100,00	451.086.659	115	21.254.611	187,00	38.425.000	125	38.078.511	66,84	99,10	240,00	59.333.122	100,00	13,15	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen lingkungan dan kegiatan pengawasan lingkungan hidup	310,00	451.086.659	115	21.254.611	187,00	38.425.000	125	38.078.511	66,84	99,10	240,00	59.333.122	77,42	13,15	DLH
	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi ya ng diberikan	60,00	69.090.861	51	12.250.000	110,00	15.135.000	110	15.135.000	100,00	100,00	161,00	27.385.000	268,33	39,64	DLH
	pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi ya ng diberikan	100,00	215.506.250	1	5.254.611	2,00	-	0	-	0,00	#DIV/0!	1,00	5.254.611	1,00	2,44	DLH
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Jumlah rekomendasi dan atau persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi oleh pemerintah kabupaten/kota	100,00	39.436.545	12	2.100.000	0,00	-	0	-			12,00	2.100.000	12,00	5,33	DLH
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kordinasi dan sinkronisasi pengawasan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD	250,00	127.053.003	51	1.650.000	75,00	23.290.000	75	22.943.511	100,00	98,51	126,00	24.593.511	50,40	19,36	DLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	75,00	379.125.060	4	10.550.000	75,00	62.045.000	6	60.850.738	5,33	98,08	10,00	71.400.738	13,33	18,83	DLH
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	111,00	379.125.060	4	10.550.000	75,00	62.045.000	6	60.850.738	5,33	98,08	10,00	71.400.738	9,01	18,83	DLH

	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat dunia usaha dunia pendidikan filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	111,00	379.125.060	4	10.550.000	6,00	62.045.000	6	60.850.738	100,00	98,08	10,00	71.400.738	9,01	18,83	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah	52,50	4.368.189.243		860.692.250	37,00	1.202.051.900	37,05	1.195.970.413	100,14	99,49	37,05	2.056.662.663	70,57	47,08	DLH
	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan persampahan	52,00	4.368.189.243	801	860.692.250	37,00	1.202.051.900	37,05	1.195.970.413	100,14	99,49	838,05	2.056.662.663	1611,63	47,08	DLH
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilih dikumpulkan diangkut diolah diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	52,00	2.675.323.151	800	752.597.250	31,00	640.446.400	31,00	640.282.713	100,00	99,97	801,00	1.392.879.963	1540,38	52,06	DLH
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan pengumpulan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir	25,00	1.692.866.092	1	108.095.000	1,00	556.205.500	1	550.887.700	100,00	99,04	2,00	658.982.700	8,00	38,93	DLH
	Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	12,00	26.372.578	1	2.002.000	5,00	5.400.000	5	4.800.000	100,00	88,89	6,00	6.802.000	50,00	25,79	DLH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	23.312.000.000	BB	5.226.239.066	BB	5.364.326.540	BB	5.088.710.836	BB	94,86	BB	10.314.949.902	BB	44,25	Disdukcapil
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100,00	40.460.000	100	4.246.000	100	3.244.250	100	3.187.000	100,00	98,24	200,00	7.433.000	200,00	18,37	Disdukcapil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	21.298.000	5	2.267.500	5	2.030.000	5	2.006.750	100,00	98,85	10,00	4.274.250	50,00	20,07	Disdukcapil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	19.162.000	3	1.978.500	2	1.214.250	2	1.180.250	100,00	97,20	5,00	3.158.750	41,67	16,48	Disdukcapil
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Keuangan	100,00	18.240.340.000	100	3.770.155.699	100	3.803.428.990	100	3.580.071.111	100,00	94,13	200,00	7.350.226.810	200,00	40,30	Disdukcapil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288,00	17.680.000.000	72	3.631.738.699	72	3.661.280.990	72	3.439.323.611	100,00	93,94	144,00	7.071.062.310	50,00	39,99	Disdukcapil
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480,00	555.000.000	120	137.620.000	120	141.670.000	120	140.269.500	100,00	99,01	240,00	277.889.500	50,00	50,07	Disdukcapil
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	5.340.000	1	797.000	1	478.000	1	478.000	100,00	100,00	2,00	1.275.000	50,00	23,88	Disdukcapil
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	52.000.000	100	12.989.760	100	6.500.000	100	6.389.600	100,00	98,30	200,00	19.379.360	200,00	37,27	Disdukcapil

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	52.000.000	2	12.989.760	1	6.500.000	1	6.389.600	100,00	98,30	3,00	19.379.360	37,50	37,27	Disdukcapil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	95,00	40.000.000	100	2.875.000	0	-	0	-	0,00	0,00	100,00	2.875.000	105,26	7,19	Disdukcapil
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00	40.000.000	1	2.875.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	2.875.000	12,50	7,19	Disdukcapil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	99,00	3.161.480.000	100	968.836.148	98	1.150.920.300	98	1.128.430.232	100,00	98,05	198,00	2.097.266.380	200,00	66,34	Disdukcapil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	47.480.000	1	6.151.000	1	6.420.000	1	6.179.000	100,00	96,25	2,00	12.330.000	50,00	25,97	Disdukcapil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20,00	2.490.000.000	5	651.076.200	7	933.140.300	7	916.732.750	100,00	98,24	12,00	1.567.808.950	60,00	62,96	Disdukcapil
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16,00	117.000.000	4	30.610.060	3	15.743.000	3	14.677.684	100,00	93,23	7,00	45.287.744	43,75	38,71	Disdukcapil
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	208,00	117.000.000	53	22.230.000	60	25.125.000	60	20.390.000	100,00	81,15	113,00	42.620.000	54,33	36,43	Disdukcapil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,00	390.000.000	12	258.768.888	12	170.492.000	12	170.450.798	100,00	99,98	24,00	429.219.686	50,00	110,06	Disdukcapil
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,00	85.000.000	100	110.622.500	96	30.500.000	96	27.555.000	100,00	90,34	196,00	138.177.500	197,98	162,56	Disdukcapil
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22,00	85.000.000	6	110.622.500	14	30.500.000	14	27.555.000	100,00	90,34	20,00	138.177.500	90,91	162,56	Disdukcapil
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,00	816.000.000	100	172.456.789	98	179.923.000	98	170.652.823	100,00	94,85	198,00	343.109.612	200,00	42,05	Disdukcapil
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	545.000.000	12	120.606.789	12	137.610.000	12	134.855.823	100,00	98,00	24,00	255.462.612	50,00	46,87	Disdukcapil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48,00	271.000.000	12	51.850.000	12	42.313.000	12	35.797.000	100,00	84,60	24,00	87.647.000	50,00	32,34	Disdukcapil
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,00	876.720.000	100	184.057.170	98	189.810.000	98	172.425.070	100,00	90,84	198,00	356.482.240	200,00	40,66	Disdukcapil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20,00	25.600.000	5	2.794.700	5	4.500.000	5	3.254.700	100,00	72,33	10,00	6.049.400	50,00	23,63	Disdukcapil

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	589.120.000	5	107.903.000	5	126.510.000	5	113.389.000	100,00	89,63	10,00	221.292.000	50,00	37,56	Disdukcapil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80,00	172.000.000	26	48.519.470	26	37.120.000	26	35.863.370	100,00	96,61	52,00	84.382.840	65,00	49,06	Disdukcapil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	48.000.000	1	11.822.000	1	12.680.000	1	12.678.000	100,00	99,98	2,00	24.500.000	50,00	51,04	Disdukcapil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	88,00	42.000.000	27	13.018.000	23	9.000.000	23	7.240.000	100,00	80,44	50,00	20.258.000	56,82	48,23	Disdukcapil
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th)	99,00	448.600.000	98,49	-	99,32	82.650.000	99,38	82.575.000	100,06	99,91	99,80	82.575.000	100,00	18,41	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian	100,00		50,17		55		62,56		100,00		100,00	100,00			
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	448.600.000	100	-	100	82.650.000	100	82.575.000	100,00	99,91	50,00	82.575.000	50,00	18,41	Disdukcapil
	pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	57000,00	448.600.000	12	-	12000	82.650.000	12000	82.575.000	100,00	99,91	12012,00	82.575.000	21,07	18,41	Disdukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th)	98,00	383.600.000	99,45	-	98	15.519.000	99,85	15.182.500	101,89	97,83	99,8	15.182.500	101,84	3,96	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian	100,00		100		100		100		100,00		100,00	100,00			
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00	383.600.000	0	-	100	15.519.000	100	15.182.500	100,00	97,83	50,00	15.182.500	50,00	3,96	Disdukcapil
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	48,00	383.600.000	0	9	12	15.519.000	12	15.182.500	100,00	97,83	21,00	15.182.509	43,75	3,96	Disdukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase lembaga yang memanfaatkan data/dokumen kependudukan	80,00	250.000.000	75	26.288.864	70,25	6.786.000	100	5.994.500	142,35	88,34	175,00	32.283.364	218,75	12,91	Disdukcapil
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standar	100,00	250.000.000	100	26.288.864	100	6.786.000	100	5.994.500	100,00	88,34	200,00	32.283.364	200,00	12,91	Disdukcapil
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	48,00	250.000.000	12	26.288.864	12	6.786.000	12	5.994.500	100,00	88,34	24,00	32.283.364	50,00	12,91	Disdukcapil

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan	100,00	356.000.000	100	296.743.000	100	25.425.000	100	22.625.000	100,00	88,99	200,00	319.368.000	200,00	89,71	Disdukcakil
	Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan	100,00	356.000.000	100	296.743.000	100	25.425.000	100	22.625.000	100,00	88,99	200,00	319.368.000	200,00	89,71	Disdukcakil
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	8,00	356.000.000	2	296.743.000	2	25.425.000	2	22.625.000	100,00	88,99	4,00	319.368.000	50,00	89,71	Disdukcakil
	DINAS PMP																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai sakiP	BB	15.068.048.000	BB	3.513.486.879	BB	3.286.635.347	BB	5.291.147.806		160,9 9		8.804.634.685		58,43	Dinas PMP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80,00	124.366.000	16	28.718.780	16	26.399.883	20	26.077.585	125,00	98,78	36,00	54.796.365	45,00	44,06	Dinas PMP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16,00	35.313.000	4	7.254.000	4	5.389.083	4	5.319.685	100,00	98,71	8,00	12.573.685	50,00	35,61	Dinas PMP
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	16,00	61.621.000	4	13.348.900	4	13.850.000	4	13.679.400	100,00	98,77	8,00	27.028.300	50,00	43,86	Dinas PMP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48,00	27.432.000	11	8.115.880	12	7.153.500	12	7.078.500	100,00	98,95	23,00	15.194.380	47,92	55,39	Dinas PMP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai reviu sakiP	144,00	11.193.755.000	27	2.598.895.003	27	2.656.204.924	27	2.614.419.040	100,00	98,43	54,00	5.213.314.043	37,50	46,57	Dinas PMP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	78,00	10.317.373.000	14	2.417.270.603	14	2.463.265.924	14	2.422.251.290	100,00	98,33	28,00	4.839.521.893	35,90	46,91	Dinas PMP
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	62,00	854.000.000	12	176.270.000	12	186.680.000	12	185.980.000	100,00	99,63	24,00	362.250.000	38,71	42,42	Dinas PMP
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Skpd dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran skpd	4,00	22.382.000	1	5.354.400	1	6.259.000	1	6.187.750	100,00	98,86	2,00	11.542.150	50,00	51,57	Dinas PMP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	894,00	1.256.260.000	98	175.250.482	321	286.786.340	320	273.604.044	99,69	95,40	418,00	448.854.526	46,76	35,73	Dinas PMP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	60,00	25.000.000	6	12.586.500	6	10.001.000	6	9.967.750	100,00	99,67	12,00	22.554.250	20,00	90,22	Dinas PMP

	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	24,00	48.000.000	6	9.805.500	6	7.660.000	5	6.710.000	83,33	87,60	11,00	16.515.500	45,83	34,41	Dinas PMP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	350,00	299.135.000	20	90.720.000	20	73.840.340	20	66.738.500	100,00	90,38	40,00	157.458.500	11,43	52,64	Dinas PMP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	65,00	100.000.000	4	25.462.200	4	23.509.000	4	19.382.600	100,00	82,45	8,00	44.844.800	12,31	44,84	Dinas PMP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	220,00	130.000.000	240	33.720.000	240	42.500.000	240	42.080.000	100,00	99,01	480,00	75.800.000	218,18	58,31	Dinas PMP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	175,00	654.125.000	45	108.766.116	45	129.276.000	45	128.725.194	100,00	99,57	90,00	237.491.310	51,43	36,31	Dinas PMP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	130,00	749.000.000	7	309.090.000	7	107.652.000	5	101.550.000	71,43	94,33	12,00	410.640.000	9,23	54,83	Dinas PMP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		247.000.000	2	47.250.000	2	98.540.000	2	92.450.000	100,00	93,82	4,00	139.700.000		56,56	Dinas PMP
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	75,00	502.000.000	5	259.840.000	5	9.112.000	3	9.100.000	60,00	99,87	8,00	268.940.000	10,67	53,57	Dinas PMP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	105,00	290.000.000	16	30.680.539	24	74.105.000	24	67.500.942	100,00	91,09	40,00	98.181.481	38,10	33,86	Dinas PMP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	60,00	240.000.000	9	23.080.444	12	58.850.000	12	55.120.942	100,00	93,66	21,00	78.201.386	35,00	32,58	Dinas PMP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45,00	50.000.000	7	7.550.000	12	15.255.000	12	12.380.000	100,00	81,15	19,00	19.930.000	42,22	39,86	Dinas PMP
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya prosentase administrasi umum	74,00	660.990.000	6	109.367.075	5	135.487.500	3	119.734.430	60,00	88,37	9,00	229.101.505	12,16	34,66	Dinas PMP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30,00	580.740.000	1	668.000	2	2.200.000	1	247.000	50,00	11,23	2,00	915.000	6,67	0,16	Dinas PMP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	15,00	16.250.000	2	98.749.075	2	98.137.500	2	85.040.430	100,00	86,65	4,00	183.789.505	26,67	1131,01	Dinas PMP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	25,00	64.000.000	1	9.950.000	1	35.150.000	1	34.447.000	100,00	98,00	2,00	44.397.000	8,00	69,37	Dinas PMP

	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah pekon yang berkinerja baik	15,00	646.775.000	0	109.506.843	4	125.520.000	4	105.182.710	100,00	83,80	4,00	214.689.553	26,67	33,19	Dinas PMP
	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah pekon mandiri	15,00	646.775.000	0	109.506.843	4	125.520.000	4	105.182.710	100,00	83,80	4,00	214.689.553	26,67	33,19	Dinas PMP
	Pembentukan ,penghapusan,enggabungan dan perubahan status desa	Jumlah dokumen pembentukan,penghapusan,pen ggabungan dan perubahan satatus desa	8,00	200.000.000		19.268.843	2	25.520.000	2	10.007.710	100,00	39,22	2,00	29.276.553	25,00	14,64	Dinas PMP
	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	jumlah sarana dan prasarana desa yang terbangun	8,00	446.775.000		90.238.000	2	100.000.000	2	95.175.000	100,00	95,18	2,00	185.413.000	25,00	41,50	Dinas PMP
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah pekon yang berkinerja baik	21,00	457.000.000	1	73.635.000	4	42.779.000	4	36.648.900	0,00	85,67	5,00	110.283.900	23,81	24,13	Dinas PMP
	Fasilitasi kerja sama antar desa	jumlah pekon maju	21,00	457.000.000	1	73.635.000	4	42.779.000	4	36.648.900		85,67	5,00	110.283.900	23,81	24,13	Dinas PMP
	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten /kota	jumlah dokumen kerja sama antar desa	4,00	357.000.000	1	51.255.000	2	30.779.000	2	26.428.900		85,87	3,00	77.683.900	75,00	21,76	Dinas PMP
	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak kevtiga dalam kabupaten /kota	jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten	4,00	100.000.000	2	22.380.000	2	12.000.000	2	10.220.000		85,17	4,00	32.600.000	100,00	32,60	Dinas PMP
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pekon yang berkinerja baik	90,00	6.745.027.000	331	1.337.381.925	772	1.126.922.450	835	971.139.890	108,16	86,18	1166,00	2.308.521.815	100,00	34,23	Dinas PMP
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pekon berkembang	3447,00	6.745.027.000	331	1.337.381.925	772	1.126.922.450	835	971.139.890	108,16	86,18	1166,00	2.308.521.815	33,83	34,23	Dinas PMP
	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintah desa	504,00	357.420.000	92	226.510.043	126	242.311.300	126	221.306.228	100,00	91,33	218,00	447.816.271	43,25	125,29	Dinas PMP
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	630,00	1.057.337.000	126	56.931.899	126	55.695.000	126	52.286.424	100,00	93,88	252,00	109.218.323	40,00	10,33	Dinas PMP
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	630,00	268.065.000	61	132.349.750	63	92.755.000	126	76.275.280	200,00	82,23	187,00	208.625.030	29,68	77,83	Dinas PMP
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	252,00	268.065.000	63	128.800.300	63	53.239.400	63	50.043.400	100,00	94,00	126,00	178.843.700	50,00	66,72	Dinas PMP
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah bumdes yang aktif	225,00	852.700.000	10	109.093.500	70	66.393.000	70	30.731.850	100,00	46,29	80,00	139.825.350	35,56	16,40	Dinas PMP
	Penyelenggaraan pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah kepala desa			63	20.244.250	63	94.324.000	63	52.420.270	100,00	55,57	126,00	72.664.520			Dinas PMP
	Fasilitasi manajemen pemerintah desa	Jumlah dokumen manajemen pemerintah desa	252,00	600.000.000	60	151.893.258	63	158.642.400	63	145.505.200	100,00	91,72	123,00	297.398.458	48,81	49,57	Dinas PMP
	Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa	252,00	265.065.000	60	38.150.000	63	26.082.200	63	18.856.026	100,00	72,29	123,00	57.006.026	48,81	21,51	Dinas PMP

	Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	504,00	446.775.000	126	73.313.925	126	56.554.400	126	29.564.875	100,00	52,28	252,00	102.878.800	50,00	23,03	Dinas PMP
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	36,00	1.218.432.000	9	291.001.500	9	280.925.750	9	262.491.500	100,00	93,44	18,00	553.493.000	50,00	45,43	Dinas PMP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang akif	30,00	6.033.834.860	292	2.493.975.279	292	2.189.482.122	293	2.138.978.800	100,34	97,69	585,00	4.632.954.079	100,00	76,78	Dinas PMP
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan		12.247.111.000	292	2.493.975.279	292	2.189.482.122	293	2.138.978.800	100,34	97,69	585,00	4.632.954.079	100,00	37,83	Dinas PMP
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	5,00	4.903.065.000	1	1.087.478.500	1	1.089.768.500	1	1.081.132.000	100,00	99,21	2,00	2.168.610.500	40,00	44,23	Dinas PMP
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	600,00	1.116.826.000	150	156.777.575	150	180.000.000	150	168.022.036	100,00	93,35	300,00	324.799.611	50,00	29,08	Dinas PMP
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	2,00	402.097.000	64	166.150.500	64	105.890.027	64	101.626.935	100,00	95,97	128,00	267.777.435	6400,00	66,60	Dinas PMP
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan hasil desa	450,00	1.376.067.000	64	163.711.000	64	90.682.000	64	72.097.000	100,00	79,51	128,00	235.808.000	28,44	17,14	Dinas PMP
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	5,00	982.905.000	3	133.565.600	3	153.527.600	4	151.576.529	133,33	98,73	7,00	285.142.129	140,00	29,01	Dinas PMP
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	36,00	268.065.000	1	63.133.544	1	69.614.000	1	68.707.400	100,00	98,70	2,00	131.840.944	5,56	49,18	Dinas PMP
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	9,00	2.948.086.000	9	620.828.819	9	500.000.000	9	495.816.900	100,00	99,16	18,00	1.116.645.719	200,00	37,88	Dinas PMP
	DINAS PERHUBUNGAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	29.409.257.500		6.428.988.353	BB	7.157.216.380		6.619.853.836		92,49	0,00	13.048.842.189		44,37	Dinas Perhubungan

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,00	27.728.000	11	6.202.700	11	6.281.000	11	5.712.700	100,00	90,95	22,00	11.915.400	110,00	42,97	Dinas Perhubungan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	5.948.000	3	1.319.650	3	1.341.000	3	1.126.900	100,00	84,03	6,00	2.446.550	50,00	41,13	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	4.800.000	1	1.103.600	1	1.105.000	1	1.060.000	100,00	95,93	2,00	2.163.600	50,00	45,08	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	4.800.000	1	1.006.800	1	1.010.000	1	968.000	100,00	95,84	2,00	1.974.800	50,00	41,14	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	1.800.000	1	445.700	1	450.000	1	438.500	100,00	97,44	2,00	884.200	50,00	49,12	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-Dokumen DPA-SKPD perubahan	4,00	1.800.000	1	446.450	1	450.000	1	430.000	100,00	95,56	2,00	876.450	50,00	48,69	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	4.180.000	2	915.100	2	955.000	2	814.300	100,00	85,27	4,00	1.729.400	50,00	41,37	Dinas Perhubungan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	4.400.000	2	965.400	2	970.000	2	875.000	100,00	90,21	4,00	1.840.400	50,00	41,83	Dinas Perhubungan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	523,00	24.940.072.000	124	5.417.447.767	124	5.983.352.280	124	5.554.508.051	100,00	92,83	248,00	10.971.955.818	47,42	43,99	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	511,00	24.932.872.000	121	5.415.858.067	121	5.981.712.280	116	5.552.983.551	100,00	92,83	237,00	10.968.841.618	46,38	43,99	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	3.200.000	1	775.700	1	800.000	1	739.000	100,00	92,38	2,00	1.514.700	50,00	47,33	Dinas Perhubungan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8,00	4.000.000	2	814.000	2	840.000	2	785.500	100,00	93,51	4,00	1.599.500	50,00	39,99	Dinas Perhubungan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,00	80.460.000	3	13.977.550	3	14.019.900	3	13.650.320	100,00	97,36	6,00	27.627.870	50,00	34,34	Dinas Perhubungan

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan barang milik daerah SKPD	8,00	76.000.000	2	12.967.400	2	13.000.000	2	12.721.350	100,00	97,86	4,00	25.688.750	50,00	33,80	Dinas Perhubungan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4,00	4.460.000	1	1.010.150	1	1.019.900	1	928.970	100,00	91,08	2,00	1.939.120	50,00	43,48	Dinas Perhubungan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	8,00	40.000.000	1	5.000.000	2	10.750.000	0	750.000	0,00	6,98	1,00	5.750.000	12,50	14,38	Dinas Perhubungan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarakan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8,00	40.000.000	1	5.000.000	2	10.750.000	0	750.000	0,00	6,98	1,00	5.750.000	12,50	14,38	Dinas Perhubungan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1456,00	1.274.779.000	360	268.482.034	350	283.512.900	350	267.390.420	100,00	94,31	710,00	535.872.454	48,76	42,04	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	32,00	10.600.000	8	2.565.000	8	2.640.000	8	2.362.000	100,00	89,47	16,00	4.927.000	50,00	46,48	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20,00	322.000.000	5	51.867.700	5	46.340.500	5	43.448.000	100,00	93,76	10,00	95.315.700	50,00	29,60	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cerakan dan penggandaan yang disediakan	44,00	235.000.000	11	46.130.800	11	66.404.400	11	53.452.420	100,00	80,50	22,00	99.583.220	50,00	42,38	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang unangan yang disediakan	1104,00	111.000.000	276	27.750.000	276	27.750.000	276	27.750.000	100,00	100,00	552,00	55.500.000	50,00	50,00	Dinas Perhubungan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256,00	596.179.000	60	140.168.534	50	140.378.000	50	140.378.000	100,00	100,00	110,00	280.546.534	42,97	47,06	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang di adakan	25,00	257.850.000	5	35.635.000	78	159.000.000	78	149.550.000	100,00	94,06	83,00	185.185.000	332,00	71,82	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	11,00	149.200.000	0	-	50	25.000.000	50	21.750.000	100,00	87,00	50,00	21.750.000	454,55	14,58	Dinas Perhubungan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	14,00	108.650.000	5	35.635.000	28	134.000.000	28	127.800.000	100,00	95,37	33,00	163.435.000	235,71	150,42	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	56,00	1.028.748.500	14	256.185.579	14	197.180.300	14	186.650.776	100,00	94,66	28,00	442.836.355	50,00	43,05	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	48,00	994.210.500	12	247.779.279	12	117.656.300	12	107.231.076	100,00	91,14	24,00	355.010.355	50,00	35,71	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,00	34.538.000	2	8.406.300	2	79.524.000	2	79.419.700	100,00	99,87	4,00	87.826.000	50,00	254,29	Dinas Perhubungan

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	156,00	1.759.620.000	36	426.057.723	48	503.120.000	14	178.718.508	29,17	35,52	50,00	604.776.231	32,05	34,37	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	52,00	880.840.000	13	211.456.468	13	254.420.000	7	92.117.508	53,85	36,21	20,00	303.573.976	38,46	34,46	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	786.440.000	5	184.006.255	5	196.760.000	2	64.910.000	40,00	32,99	7,00	248.916.255	35,00	31,65	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	84,00	43.040.000	17	18.270.000	30	20.300.000	4	3.700.000	13,33	18,23	21,00	21.970.000	25,00	51,05	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4,00	49.300.000	1	12.325.000	2	31.640.000	1	17.991.000	50,00	56,86	2,00	30.316.000	50,00	61,49	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan titik rawan kecelakaan	82,00	43.511.877.428		9.909.474.725	81	11.036.913.300		10.727.779.471	0,00	97,20	0,00	20.637.254.196	0,00	47,43	Dinas Perhubungan
		Persentase Uji Kir kendaraan	88,00				87,25				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	83,00	38.523.084.500	255	9.357.773.125	81,5	10.421.200.800	221	10.140.844.427	271,17	97,31	476,00	19.498.617.552	573,49	50,62	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan yang di jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1255,00	2.900.000.000	250	549.562.800	215	527.916.400	216	512.827.520	100,47	97,14	466,00	1.062.390.320	37,13	36,63	Dinas Perhubungan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	20,00	35.623.084.500	5	8.808.210.325	5	9.893.284.400	5	9.628.016.907	100,00	97,32	10,00	18.436.227.232	50,00	51,75	Dinas Perhubungan
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pringsewu	88,00	1.365.140.000	0	290.041.000	87,5	310.046.000	7009,00	300.960.750	8010,29	97,07	7009,00	591.001.750	7964,77	43,29	Dinas Perhubungan
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	32500,00	837.500.000	7000	175.000.000	7000	175.000.000	7000	175.000.000	100,00	100,00	14000,00	350.000.000	43,08	41,79	Dinas Perhubungan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	36,00	527.640.000	9	115.041.000	9	135.046.000	9	125.960.750	100,00	93,27	18,00	241.001.750	50,00	45,68	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Laporan pengawasan, pengendalian efektifitas, dan forum lalu lintas	8,00	32.720.000	2	13.412.300	2	14.330.000	2	8.966.500	100,00	62,57	4,00	22.378.800	50,00	68,39	Dinas Perhubungan
	Pegawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	4,00	18.000.000	1	4.400.000	1	3.185.000	1	2.250.000	100,00	70,64	2,00	6.650.000	50,00	36,94	Dinas Perhubungan
	Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4,00	14.720.000	1	9.012.300	1	11.145.000	1	6.716.500	100,00	60,26	2,00	15.728.800	50,00	106,85	Dinas Perhubungan
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi andalalin yang terawasi	4,00	13.500.000	1	3.280.000	1	2.750.000	1	2.749.200	100,00	99,97	2,00	6.029.200	50,00	44,66	Dinas Perhubungan

	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi andalalin yang terawasi	4,00	13.500.000	1	3.280.000	1	2.750.000	1	2.749.200	100,00	99,97	2,00	6.029.200	50,00	44,66	Dinas Perhubungan
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Laporan Pelaksanaan Inspeksi, audit, dan Pemantauan	28,00	2.492.332.928	8	194.732.300	8	283.591.500	8	269.376.594	100,00	94,99	16,00	464.108.894	57,14	18,62	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuh Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota	4,00	80.000.000	1	17.055.800	1	18.240.000	1	17.514.000	100,00	96,02	2,00	34.569.800	50,00	43,21	Dinas Perhubungan
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angktan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan angkutan umum	24,00	2.412.332.928	7	177.676.500	7	265.351.500	7	251.862.594	100,00	94,92	14,00	429.539.094	58,33	17,81	Dinas Perhubungan
	Penyediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8,00	36.000.000	2	7.589.000	2	4.995.000	2	4.882.000	100,00	97,74	4,00	12.471.000	50,00	34,64	Dinas Perhubungan
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan//atau Barang Antar Kota daam 1 (satu) KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk Jasa angkutan orang/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	8,00	36.000.000	2	7.589.000	2	4.995.000	2	4.882.000	100,00	97,74	4,00	12.471.000	50,00	34,64	Dinas Perhubungan
	DINAS KOMINFO																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	13.862.000.000	B	3.608.850.106	BB	3.607.185.490	BB	3.541.908.913		98,19		7.150.759.019		51,59	DISKOMINFO
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	100,00	47.581.000	100	16.762.965	100	16.749.100	100,00	16.265.930	100,00	97,12	200,00	33.028.895	200,00	69,42	DISKOMINFO
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,00	33.931.000	5	13.576.165	5	13.738.100	5,00	13.366.930	100,00	97,30	10,00	26.943.095	50,00	79,41	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	13.650.000	4	3.186.800	1	3.011.000	1,00	2.899.000	100,00	96,28	5,00	6.085.800	125,00	44,58	DISKOMINFO
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasian keuangan	100,00	11.057.896.000	100	2.664.351.422	100	2.849.054.890	75,00	2.819.484.475	75,00	98,96	175,00	5.483.835.897	175,00	49,59	DISKOMINFO
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72,00	10.150.976.000	19	2.454.270.422	18	2.645.329.390	20,00	2.616.094.475	100,00	98,89	39,00	5.070.364.897	54,17	49,95	DISKOMINFO

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800,00	883.550.000	200	207.320.000	200	198.060.000	158,00	198.060.000	79,00	100,00	358,00	405.380.000	44,75	45,88	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,00	23.370.000	2	2.761.000	2	5.665.500	1,00	5.330.000	50,00	94,08	3,00	8.091.000	37,50	34,62	DISKOMINFO
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah	100,00	223.450.000	100	60.446.683	100	36.000.000	75,00	32.385.305	75,00	89,96	175,00	92.831.988	175,00	41,54	DISKOMINFO
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31,00	223.450.000	7	60.446.683	8	36.000.000	6,00	32.385.305	75,00	89,96	13,00	92.831.988	41,94	41,54	DISKOMINFO
	Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi pendapatan daerah Kewenangan perangkat daerah	100,00	98.950.000	100	15.941.400	0	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	15.941.400	100,00	16,11	DISKOMINFO
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48,00	98.950.000	12	15.941.400	0		0,00	-	0,00	0,00	12,00	15.941.400	25,00	16,11	DISKOMINFO
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	85.000.000	27	5.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	27,00	5.750.000	27,00	6,76	DISKOMINFO
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,00	85.000.000	2	5.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	5.750.000	13,33	6,76	DISKOMINFO
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	758.623.000	100	265.709.491	100	318.149.400	100,00	309.736.794	100,00	97,36	200,00	575.446.285	200,00	75,85	DISKOMINFO
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16,00	9.000.000	1	8.980.000	1	4.500.000	1,00	4.250.000	100,00	94,44	2,00	13.230.000	12,50	147,00	DISKOMINFO
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24,00	373.133.000	12	68.350.200	6	86.762.400	6,00	81.873.300	100,00	94,36	18,00	150.223.500	75,00	40,26	DISKOMINFO
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20,00	32.090.000	5	7.163.325	5	7.484.000	5,00	7.057.150	100,00	94,30	10,00	14.220.475	50,00	44,31	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78,00	344.400.000	18	181.215.966	19	219.403.000	19,00	216.556.344	100,00	98,70	37,00	397.772.310	47,44	115,50	DISKOMINFO
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	100,00	130.400.000	100	71.240.000	100	-	0,00	-	0,00		100,00	71.240.000	100,00	54,63	DISKOMINFO
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8,00	42.500.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8,00	43.500.000	1	8.400.000	0	-	0,00	-			1,00	8.400.000	12,50	19,31	DISKOMINFO
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12,00	44.400.000	8	62.840.000	0	-	0,00	-			8,00	62.840.000	66,67	141,53	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	595.600.000	100	180.203.895	100	127.372.100	100,00	124.896.184	100,00	98,06	200,00	305.100.079	200,00	51,23	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	595.600.000	12	180.203.895	12	127.372.100	12,00	124.896.184	100,00	98,06	24,00	305.100.079	50,00	51,23	DISKOMINFO
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	864.500.000	100	328.444.250	100	259.860.000	100,00	239.140.225	100,00	92,03	200,00	567.584.475	200,00	65,65	DISKOMINFO
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00	738.500.000	6	159.464.250	6	182.380.000	6,00	162.656.725	100,00	89,19	12,00	322.120.975	100,00	43,62	DISKOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1,00	40.000.000	14	139.700.000	1	40.120.000	1,00	39.123.500	100,00	97,52	15,00	178.823.500	1500,00	447,06	DISKOMINFO
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25,00	86.000.000	25	29.280.000	25	37.360.000	25,00	37.360.000	100,00	100,00	50,00	66.640.000	200,00	77,49	DISKOMINFO
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65,00	13.801.573.187	15	3.079.749.813	60	2.990.381.800	69,72	2.977.692.502	116,20	99,58	84,72	6.057.442.315	130,34	43,89	DISKOMINFO
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65,00	13.801.573.187	15	3.079.749.813	60	2.990.381.800	69,72	2.977.692.502	116,20	99,58	84,72	6.057.442.315	130,34	43,89	DISKOMINFO
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	48,00	301.820.813	12	356.874.400	12	1.120.000	12,00	1.058.000	100,00	94,46	24,00	357.932.400	50,00	118,59	DISKOMINFO
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	48,00	531.955.627	12	196.325.200	12	231.002.000	12,00	223.111.087	100,00	96,58	24,00	419.436.287	50,00	78,85	DISKOMINFO
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48,00	1.818.625.000	12	330.373.138	12	311.005.000	12,00	310.945.000	100,00	99,98	24,00	641.318.138	50,00	35,26	DISKOMINFO
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	48,00	689.171.747	12	142.340.000	12	143.080.000	12,00	139.180.000	100,00	97,27	24,00	281.520.000	50,00	40,85	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	920,00	10.460.000.000	185	2.053.837.075	225	2.304.174.800	239,00	2.303.398.415	100,00	99,97	424,00	4.357.235.490	46,09	41,66	DISKOMINFO

	Program aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,25	16.593.981.250	2,97	1.933.751.315	2,85	1.602.714.600	3,05	1.554.451.062	107,02	96,99	6,02	3.488.202.377	185,23	21,02	DISKOMINFO
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	3,25	16.593.981.250	2,97	1.933.751.315	2,85	1.602.714.600	3,05	1.554.451.062	107,02	96,99	6,02	3.488.202.377	185,23	21,02	DISKOMINFO
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1,00	2.155.062.500	1	354.438.145	1	241.517.000	1,00	241.474.200	100,00	99,98	2,00	595.912.345	100,00	27,65	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	48,00	12.930.375.000	12	1.452.554.570	12	1.060.730.000	12,00	1.023.732.522	100,00	96,51	24,00	2.476.287.092	50,00	19,15	DISKOMINFO
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	48,00	1.508.543.750	12	126.758.600	12	300.467.600	12,00	289.244.340	100,00	96,26	24,00	416.002.940	50,00	27,58	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.489.044.313		115.434.000		1.003.000		957.000	0,00	95,41	0,00	116.391.000	0,00	7,82	DISKOMINFO
	Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	37,00	1.489.044.313	15	115.434.000	18	1.003.000	18,00	957.000	100,00	95,41	33,00	116.391.000	89,19	7,82	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	37,00	1.489.044.313	15	115.434.000	18	1.003.000	18,00	957.000	100,00	95,41	33,00	116.391.000	89,19	7,82	DISKOMINFO
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	48,00	1.489.044.313	12	115.434.000	12	1.003.000	12,00	957.000	100,00	95,41	24,00	116.391.000	50,00	7,82	DISKOMINFO
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			4.064.671.857		-		-		-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
	Program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi	100,00	4.064.671.857	0,71759	-	81,08	-	100,00	-	123,33	0,00	100,72	-	100,72	0,00	DISKOMINFO
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengamanan informasi	100,00	3.633.659.357	0,71759	-	81,08	-	100,00	-	123,33	0,00	100,72	-	100,72	0,00	DISKOMINFO
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	6,00	1.487.980.000	2	-	2	-	0,00	-	0,00	0,00	2,00	-	33,33	0,00	DISKOMINFO
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48,00	284.468.250	3	-	12	-	3,00	-	0,00	0,00	6,00	-	12,50	0,00	DISKOMINFO
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48,00	352.667.357	3	-	12	-	3,00	-	25,00	0,00	6,00	-	12,50	0,00	DISKOMINFO
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37,00	1.508.543.750	37	-	37	-	37,00	-	100,00	0,00	74,00	-	200,00	0,00	DISKOMINFO
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengamanan informasi	100,00	431.012.500	0	-	81,08	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37,00	431.012.500	0	-	27	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISKOMINFO

	DINAS KOPERASI DAN UMKM																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	100,00	21.828.284.000	BB	4.656.259.460		4.810.265.904	0	4.470.222.426		92,93		9.126.481.886		41,81	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,00	41.602.000	3	11.684.725	3	32.118.000	12	32.016.409	400,00	99,68	15,00	43.701.134	93,75	105,05	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	22.695.000	2	5.698.725	2	5.664.600	2	5.662.100	100,00	99,96	4,00	11.360.825	33,33	50,06	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	18.907.000	1	5.986.000	1	26.453.400	1	26.354.309	100,00	99,63	2,00	32.340.309	50,00	171,05	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan	48,00	19.109.300.000	1	3.866.743.473	1	4.032.914.904	32	3.749.425.849	3200,00	92,97	33,00	7.616.169.322	68,75	39,86	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan honor selama 1 tahun	50,00	17.915.775.000	12	3.629.583.098	12	3.802.842.104	14	3.519.354.549	116,67	92,55	26,00	7.148.937.647	52,00	39,90	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.171.724.000	12	232.205.000	12	225.050.000	14	225.050.000	116,67	100,00	26,00	457.255.000	650,00	39,02	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	4,00	21.801.000	1	4.955.375	1	5.022.800	1	5.021.300	100,00	99,97	2,00	9.976.675	50,00	45,76	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.069.478.000	12	274.341.631	12	368.841.000	24,6623	362.774.503	205,52	98,36	36,66	637.116.134	76,38	59,57	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39,00	25.132.000	12	4.951.000	12	10.835.000	1	10.705.000	8,33	98,80	13,00	15.656.000	33,33	62,30	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan kebutuhan bahan logistik kantor	48,00	318.245.000	13	83.526.900	13	97.924.500	13	97.043.000	100,00	99,10	26,00	180.569.900	54,17	56,74	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	48,00	101.998.000	34	21.250.000	12	25.347.500	12	25.303.900	100,00	99,83	46,00	46.553.900	95,83	45,64	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabardan bahan bacaan	136,00	132.846.000	34	27.200.000	34	28.020.000	34	23.760.000	100,00	84,80	68,00	50.960.000	50,00	38,36	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	48,00	491.257.000	12	137.413.731	12	206.714.000	12	205.962.603	100,00	99,64	24,00	343.376.334	50,00	69,90	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	32,00	233.382.000	1	96.080.000	1	126.500.000	0,72909	92.230.000	72,91		1,73	188.310.000	5,40	80,69	DISKOP,UM KM, PERINDAG

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32,00	233.382.000	1	96.080.000	1	126.500.000	0,7290 91	92.230.000	72,91		1,73	188.310.000	5,40	80,69	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	398.255.000	12	58.333.544	12	75.292.000	12	73.311.941	100,00	97,37	24,00	131.645.485	50,00	33,06	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	398.255.000	12	58.333.544	12	75.292.000	12	73.311.941	100,00	97,37	24,00	131.645.485	50,00	33,06	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	976.267.000	3	345.791.332	3	174.600.000	3	160.463.724	100,00	91,90	6,00	506.255.056	12,50	51,86	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	684.735.000	3	109.954.025	3	139.120.000	3	124.983.724	100,00	89,84	6,00	234.937.749	30,00	34,31	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	189.645.000	1	217.097.307	1	-	0		0,00		1,00	217.097.307	100,00	114,4 8	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20,00	101.887.000	20	18.740.000	20	35.480.000	20	35.480.000	100,00	100,0 0	40,00	54.220.000	200,00	53,22	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Usaha Menengah		270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	8	54.403.200	100,00	99,88	16,00	77.569.200		28,73	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Berkembang/ meningkatnya kualitas Koperasi kabupaten Pringsewu	32,00	270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	8	54.403.200	100,00	99,88	16,00	77.569.200	50,00	28,73	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (unit usaha)	32,00	270.000.000	8	23.166.000	8	54.466.500	8	54.403.200	100,00	99,88	16,00	77.569.200	50,00	28,73	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap Usaha Menengah	400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100	-	0		0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlatihnya pengelola/pengurus Koperasi dan wirausahawan baru	400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100				0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	400,00	1.600.000.000	100	308.769.000	100				0,00		100,00	308.769.000	25,00	19,30	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah	99,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	30	47.840.400	100,00	98,12	60,00	104.820.569	60,61	34,94	DISKOP,UM KM, PERINDAG

	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan terdatanya UMKM	30,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	30	47.840.400	100,00	98,12	60,00	104.820.569	200,00	34,94	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	120,00	300.000.000	30	56.980.169	30	48.755.300	30	47.840.400	100,00	98,12	60,00	104.820.569	50,00	34,94	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah		1.400.000.000	25	227.694.578	25	166.027.000	28	163.676.900	112,00	98,58	53,00	391.371.478		27,96	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terbina dan terdatanya UMKM	6,12	1.400.000.000	25	227.694.578	25	166.027.000	28	163.676.900	112,00	98,58	53,00	391.371.478	866,01	27,96	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro (unit usaha)	120,00	1.100.000.000	25	162.204.943	25	-	0		0,00		25,00	162.204.943	20,83	14,75	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (orang)	100,00	300.000.000	30	65.489.635	30	166.027.000	28	163.676.900	93,33	98,58	58,00	229.166.535	58,00	76,39	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi usaha menengah					25	150.281.500	0,2335 38	148.044.908	0,93	98,51	0,23	148.044.908	0,00	0,00	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terbina dan terdatanya UMKM					25	150.281.500	0,2335 38	148.044.908	0,93	98,51	0,23	148.044.908	0,00	0,00	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang difasilitasi (orang)					25	150.281.500	0,2335 38	148.044.908	0,93	98,51	0,23	148.044.908	0,00	0,00	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal		5.290.250.000	4	151.075.006	4	148.041.600	2,1295 4	144.971.050	53,24	97,93	6,13	296.046.056	0,00	5,60	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangun/terawat/terfasilitasinya sarana distribusi perdagangan daerah		5.290.250.000	4	151.075.006	4	148.041.600	2,1295 4	144.971.050	53,24	97,93	6,13	296.046.056	0,00	5,60	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (unit)		5.290.250.000	4	151.075.006	4	148.041.600	2,1295 43	144.971.050	53,24	97,93	6,13	296.046.056	0,00	5,60	DISKOP,UM KM, PERINDAG

	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib ukur	7,00	5.842.434.000	7	554.480.645	7	618.942.000	14,051 5	573.985.000	200,74	92,74	21,05	1.128.465.645	300,74	19,31	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan atas barang dan jasa yang beredar	7,00	5.842.434.000	7	554.480.645	7	618.942.000	14,051 5	573.985.000	200,74	92,74	21,05	1.128.465.645	300,74	19,31	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	7,00	552.186.000	7	195.034.545	7	168.942.000	7,0514 91	141.605.000	100,74	83,82	14,05	336.639.545	200,74	60,96	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota	7,00	5.290.248.000	7	359.446.100	7	450.000.000	7	432.380.000	100,00		14,00	791.826.100	200,00	14,97	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib ukur	97,00		9	148.088.214	9	61.190.800	9,6075 1	57.755.259	106,75	94,39	18,61	205.843.473	19,18		DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksana dan terawasinya pelaksanaan kemetrolagian	997,00	853.670.000	9	148.088.214	9	61.190.800	9,6075 1	57.755.259	106,75	94,39	18,61	205.843.473	1,87	24,11	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	9,00	443.704.000	557	62.735.214	557	-	0		0,00		557,00	62.735.214	6188,8 9	14,14	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	9,00	409.966.000	557	85.353.000	557	61.190.800	0,6075 06	57.755.259	0,11	94,39	557,61	143.108.259	6195,6 4	34,91	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	1,3102 4	358.522.678	131,02	99,52	2,31	878.880.499	14,44	82,92	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terpromosikannya produk dalam negeri	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	1,3102 4	358.522.678	131,02	99,52	2,31	878.880.499	14,44	82,92	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Cakupan Produk yang dipromosikan, Jumlah Kelembagaan dan kerjasama kemitraan yang dikembangkan	16,00	1.059.952.000	1	520.357.821	1	360.241.100	1,3102 37	358.522.678	131,02	99,52	2,31	878.880.499	14,44	82,92	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase sentra industri kecil yang berkembang	100,00	5.341.950.000	9	1.867.612.228	9	617.649.000	132,58 9	606.929.465	1473,2 2	98,26	141,59	2.474.541.693	141,59	46,32	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan IKM yang mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan daya saing dan omset usaha IKM	9,00	5.341.950.000	9	1.867.612.228	9	617.649.000	114	606.929.465	1266,6 7	98,26	123,00	2.474.541.693	1366,6 7	46,32	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Cakupan IKM yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan	521,00	743.926.000	110	154.654.000	110	169.539.000	110	164.522.300	100,00	97,04	220,00	319.176.300	42,23	42,90	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan IKM yang mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha	32,00	272.276.000	3	89.957.000	3	100.000.000	3	99.225.000	100,00	99,23	6,00	189.182.000	18,75	69,48	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Promosi/Pameran Industri dagang Kecil dan Menengah dan Kegiatan Pembinaan Promosi Kerajinan Daerah (Dekranasda)	36,00	4.325.748.000	1	1.623.001.228	1	348.110.000	1	343.182.165	100,00	98,58	2,00	1.966.183.393	5,56	45,45	DISKOP,UM KM, PERINDAG

	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan bina kelompok pengrajin	9,00	4.467.984.000	9	263.410.432	9	630.461.000	18,667 3	617.626.397	207,41	97,96	27,67	881.036.829	307,41	19,72	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Penyediaan Informasi Industri untuk UII, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya promosi dan pendataan kerajinan dan IKM Kabupaten Pringsewu	9,00	4.467.984.000	9	263.410.432	9	630.461.000	18,667 3	617.626.397	207,41	97,96	27,67	881.036.829	307,41	19,72	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Cakupan jumlah Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9,00	4.467.984.000	200	263.410.432	200	630.461.000	200,78 46	617.626.397	100,39	97,96	400,78	881.036.829	4453,1 6	19,72	DISKOP,UM KM, PERINDAG
	DINAS PMPTSP																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	17.814.000.000	BB	4.694.695.026	BB	4.435.258.242	BB	3.976.179.756		89,65		8.670.874.782		48,67	PMPTSP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,00	78.000.000	2	16.849.435	2	18.537.900	3	17.139.575	150,00	92,46	5,00	33.989.010	62,50	43,58	PMPTSP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2		2	8.985.000	3	7.836.745	150,00	87,22	5,00	7.836.745	0,00	0,00	PMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	78.000.000	2	16.849.435	2	9.552.900	3	9.302.830	150,00	97,38	5,00	26.152.265	62,50	33,53	PMPTSP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan selama 1 Tahun	56,00	15.151.000.000	12	3.287.095.123	12	3.333.051.058	9	2.935.357.967	75,00	88,07	21,00	6.222.453.090	37,50	41,07	PMPTSP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1586,00	15.106.000.000	336	3.272.868.483	392	3.321.824.058	312	2.925.519.217	79,59	88,07	648,00	6.198.387.700	40,86	41,03	PMPTSP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	45.000.000	1	14.226.640	1	11.227.000	1	9.838.750	100,00	87,63	2,00	24.065.390	50,00	53,48	PMPTSP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan selama 1 Tahun	4,00	40.000.000	1	6.412.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	6.412.000	25,00	16,03	PMPTSP
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	40.000.000	1	6.412.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	6.412.000	25,00	16,03	PMPTSP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.432.000.000	12	1.147.218.285	12	430.168.800	9	414.556.762	75,00	96,37	21,00	1.561.775.047	43,75	109,0 6	PMPTSP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48,00	136.000.000	12	7.736.000	6	25.456.000	1	24.761.900	16,67	97,27	13,00	32.497.900	27,08	23,90	PMPTSP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60,00	467.000.000	15	932.704.000	6	130.004.000	2	125.742.400	33,33	96,72	17,00	1.058.446.400	28,33	226,6 5	PMPTSP

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15,00	30.000.000	0	-	10	16.139.000	3	13.193.500	30,00	81,75	3,00	13.193.500	20,00	43,98	PMPTSP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48,00	111.000.000	12	49.485.050	10	28.430.000	7	23.700.000	70,00	83,36	19,00	73.185.050	39,58	65,93	PMPTSP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48,00	113.000.000	12	49.596.800	15	35.443.800	12	33.327.760	80,00	94,03	24,00	82.924.560	50,00	73,38	PMPTSP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960,00	107.000.000	240	27.100.000	240	28.000.000	60	27.710.000	25,00	98,96	300,00	54.810.000	31,25	51,22	PMPTSP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	498.000.000	15	80.596.435	15	166.696.000	13	166.121.202	86,67	99,66	28,00	246.717.637	46,67	49,54	PMPTSP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	485.000.000	12	113.554.773	12	525.810.484	9	485.613.136	75,00	92,36	21,00	599.167.909	43,75	123,54	PMPTSP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	431.000.000	12	79.754.773	12	330.199.180	7	290.696.192	58,33	88,04	19,00	370.450.965	39,58	85,95	PMPTSP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	54.000.000	12	33.800.000	4	34.190.000	2	33.520.000	50,00	98,04	14,00	67.320.000	87,50	124,67	PMPTSP
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38,00	514.263.000	0	-	12	161.421.304	9	161.396.944	75,00	99,98	9,00	161.396.944	23,68	31,38	PMPTSP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	921.000.000	12	123.565.410	12	127.690.000	9	123.512.316	75,00	96,73	21,00	247.077.726	43,75	26,83	PMPTSP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	641.000.000	6	118.065.410	6	127.690.000	6	123.512.316	100,00	96,73	12,00	241.577.726	50,00	37,69	PMPTSP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	280.000.000	1	5.500.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	5.500.000	12,50	1,96	PMPTSP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan persetujuan nilai investasi	7000,00	394.000.000	17,375	47.395.300	1.700	100.000.000	5016	15.693.710	#####	15,69	5033,38	63.089.010	71,91	16,01	PMPTSP
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	7000,00	394.000.000	17,375	47.395.300	1.700	-	5016	15.693.710	#####	0,00	5033,38	63.089.010	71,91	16,01	PMPTSP
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4,00	394.000.000	1	47.395.300	0	-	0	15.693.710	0,00	0,00	1,00	63.089.010	25,00	16,01	PMPTSP
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1,00	150.000.000	0	-	1	100.000.000	0	98.789.537	0,00	98,79	0,00	98.789.537	0,00	65,86	PMPTSP
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1,00	150.000.000	0	-	1	100.000.000	0	98.789.537	0,00	98,79	0,00	98.789.537	0,00	65,86	PMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	22,92	1.824.000.000	1758	283.132.974	5415	180.000.000	537,566	178.587.802	9927,35	99,22	539324,00	461.720.776	#####	25,31	PMPTSP
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan realisasi investasi	40,00	1.824.000.000	245	283.132.974	5	180.000.000	9927	178.587.802	100,00	99,22	10172,00	461.720.776	100,00	25,31	PMPTSP

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4,00	1.577.000.000	1	263.175.724	1	180.000.000	1	178.587.802	100,00	99,22	2,00	441.763.526	50,00	28,01	PMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan atau non perizinan secara online	380,00	1.111.000.000	95,04	348.951.983	95	266.792.400	62	266.302.726	65,26	99,82	157,04	615.254.709	41,33	55,38	PMPTSP
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin dan non izin yang terbit tepat waktu sesuai SOP	380,00	1.111.000.000	95,04	348.951.983	95	266.792.400	62	266.302.726	65,26	99,82	157,04	615.254.709	41,33	55,38	PMPTSP
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6800,00	497.000.000	1818	284.836.870	1.700	210.220.100	1150	210.220.100	67647,06	100,00	2968,00	495.056.970	43,65	99,61	PMPTSP
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60,00	614.000.000	38	64.115.113	15	56.572.300	13	56.082.626	86,67	99,13	51,00	120.197.739	85,00	19,58	PMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio kepatuhan pelaku usaha	360,00	2.595.000.000	94,48	23.222.000	90	448.669.000	47	401.743.870	52,22	89,54	141,48	424.965.870	39,30	16,38	PMPTSP
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase izin dan non izin yang sesuai peruntukannya	360,00	2.595.000.000	94,48	23.222.000	90	448.669.000	47	401.743.870	52,22	89,54	141,48	424.965.870	39,30	16,38	PMPTSP
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	1600,00	1.579.000.000	0	-	415	382.669.000	400	335.835.870	96,39	87,76	400,00	335.835.870	0,00	0,00	PMPTSP
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150,00	596.000.000	0	-	50	66.000.000	42	65.908.000	84,00	99,86	42,00	65.908.000	0,00	0,00	PMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA dan PMDN	120,00	226.000.000	37	44.439.550	25	-	18	-	0,00	0,00	55,00	44.439.550	45,83	19,66	PMPTSP
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data dan informasi investasi yang tersaji pada system/aplikasi	4,00	226.000.000	1	44.439.550	1	-	0	-	0,00	0,00	1,00	44.439.550	25,00	19,66	PMPTSP
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan data dan informasi investasi yang tersaji pada system/aplikasi	1,00	226.000.000	1	44.439.550	1	-	0	-	0,00	0,00	1,00	44.439.550	100,00	19,66	PMPTSP
	PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA																

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	5.276.984.256		3.998.211.831	BB	4.488.665.359	0	4.091.126.996		91,14	0,00	8.089.338.827		153,2 9	DISPORAP AR
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6,00	41.287.000	4	2.836.425	6	5.100.000	4	4.878.885	66,67	95,66	8,00	7.715.310	133,33	18,69	DISPORAP AR
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	8.870.000	4	1.361.425	3	2.100.000	2	1.995.020	66,67	95,00	6,00	3.356.445	150,00	37,84	DISPORAPA R
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	32.417.000	0	1.475.000	2	3.000.000	2	2.883.865	100,00	96,13	2,00	4.358.865	100,00	13,45	DISPORAPA R
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48,00	4.747.166.256	6	3.573.608.753	12	3.830.750.059	12	3.447.527.589	100,00	90,00	18,00	7.021.136.342	37,50	147,9 0	DISPORAP AR
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	4.499.144.256	39	3.394.832.653	38	3.654.478.259	39	3.272.305.804	102,63	89,54	78,00	6.667.138.457	46,43	148,1 9	DISPORAPA R
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	245.970.000	3	177.800.000	12	174.500.000	12	173.540.000	100,00	99,45	15,00	351.340.000	500,00	142,8 4	DISPORAPA R
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	2.052.000	0	976.100	1	1.771.800	1	1.681.785	100,00	94,92	1,00	2.657.885	100,00	129,5 3	DISPORAPA R
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas yang Diasuransi	1,00	8.690.000	1	6.490.000	1	-	0	-	0,00		1,00	6.490.000	100,00	74,68	DISPORAP AR
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	8.690.000	1	6.490.000	1	-	0	-	0,00		1,00	6.490.000	100,00	74,68	DISPORAPA R
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	275.036.000	9	276.945.579	12	495.881.500	14	492.365.283	116,67	99,29	23,00	769.310.862	47,92	279,7 1	DISPORAP AR
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7,00	2.940.000	7	2.387.000	1	4.965.000	1	4.825.000	100,00	97,18	8,00	7.212.000	114,29	245,3 1	DISPORAPA R
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	53.479.000	1	68.599.000	1	246.810.000	1	244.325.000	100,00	98,99	2,00	312.924.000	200,00	585,1 3	DISPORAPA R
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00	56.079.000	3	61.206.600	3	62.051.500	3	61.665.100	100,00	99,38	6,00	122.871.700	200,00	219,1 0	DISPORAPA R
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	18.224.000	2	22.837.850	1	35.871.000	1	35.552.130	100,00	99,11	3,00	58.389.980	150,00	320,4 0	DISPORAPA R

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	324,00	33.118.000	225	33.550.000	1	33.565.000	1	33.550.000	100,00	99,96	226,00	67.100.000	69,75	202,61	DISPORAPAR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,00	111.196.000	7	88.365.129	20	112.619.000	20	112.448.053	100,00	99,85	27,00	200.813.182	337,50	180,59	DISPORAPAR
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48,00	48.134.000	9	38.803.354	12	47.743.800	9	44.386.019	75,00	92,97	18,00	83.189.373	37,50	172,83	DISPORAPAR
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	48.134.000	9	38.803.354	12	47.743.800	9	44.386.019	75,00	92,97	18,00	83.189.373	37,50	172,83	DISPORAPAR
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	16,00	156.671.000	8	99.527.720	4	109.190.000	12	101.969.220	300,00	93,39	20,00	201.496.940	125,00	128,61	DISPORAPAR
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16,00	5.082.000	2	7.627.720	4	5.000.000	3	3.465.220	75,00	69,30	5,00	11.092.940	31,25	218,28	DISPORAPAR
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	139.589.000	3	79.740.000	4	89.490.000	3	83.814.000	75,00	93,66	6,00	163.554.000	37,50	117,17	DISPORAPAR
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16,00	12.000.000	3	12.160.000	8	14.700.000	6	14.690.000	75,00	99,93	9,00	26.850.000	56,25	223,75	DISPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan peningkatan daya saing kepemudaan	57,00	3.665.652.000	44	512.365.650	49	450.000.000	0	425.972.025	0,00	94,66	44,00	938.337.675	77,19	25,60	DISPORAPAR
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelompok Pemuda, Organisasi Pemuda dan Pemuda yang ada di kabupaten Pringsewu	40,00	3.665.652.000	46	512.365.650	260	450.000.000	220	425.972.025	84,62	94,66	266,00	938.337.675	665,00	25,60	DISPORAPAR
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	160,00	224.652.000	0	-	40	100.000.000	40	94.250.000	100,00	0,00	40,00	94.250.000	25,00	41,95	DISPORAPAR
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	24,00	222.524.000	6	10.000.000	170	250.000.000	170	237.272.325	100,00	94,91	176,00	247.272.325	733,33	111,12	DISPORAPAR
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40,00	560.000.000	40	117.586.000	50	100.000.000	50	94.449.700	100,00	94,45	90,00	212.035.700	225,00	37,86	DISPORAPAR

	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	144,00	2.658.476.000	36	384.779.650	0	-	0	-		36,00	384.779.650	25,00	14,47	DISPORAPAR	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi	30,00	7.931.855.500	18	2.782.033.000	25	1.456.000.000	11	1.428.991.808	44,00	98,15	29,00	4.211.024.808	96,67	53,09	DISPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Club Club Olahraga Tingkat SD/SMP/SMA yang ada di Kabupaten Pringsewu	4,00	894.889.000	1	243.899.000	1	150.000.000	1	148.846.450	100,00	99,23	2,00	392.745.450	50,00	43,89	DISPORAPAR
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4,00	373.364.000	1	117.899.000	1	-	0	-	0,00		1,00	117.899.000	25,00	31,58	DISPORAPAR
	Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8,00	521.525.000	2	144.980.000	3	150.000.000	1	148.846.450	33,33	99,23	3,00	293.826.450	37,50	56,34	DISPORAPAR
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	5,00	1.712.670.500	9	276.419.000	1	556.000.000	1	530.145.358	100,00	95,35	10,00	806.564.358	100,00	47,09	DISPORAPAR
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1,00	419.633.000	1	237.438.000	1	556.000.000	1	530.145.358	100,00	95,35	2,00	767.583.358	200,00	182,92	DISPORAPAR
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50,00		50	38.981.000	50	-		-	0,00	0,00	50,00	38.981.000	100,00	#DIV/0!	DISPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Olahragawan dan Pelatih yang ada di Kabupaten Pringsewu	50,00	646.518.750		38.981.000	50	-	0	-	0,00	0,00	0,00	38.981.000	0,00	6,03	DISPORAPAR
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50,00	646.518.750	50	2.073.690.000	50	-	0	-	0,00	0,00	50,00	2.073.690.000	100,00	320,75	DISPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Organisasi Olahraga yang ada Di Kabupaten Pringsewu	40,00	4.892.853.000	62	781.990.000	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00	100,00	68,00	1.531.990.000	170,00	31,31	DISPORAPAR
	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahraagaan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	40,00	4.892.853.000	62	781.990.000	6	750.000.000	6	750.000.000	100,00	100,00	68,00	1.531.990.000	170,00	31,31	DISPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan Atlet Berprestasi yang ada di Kabupaten Pringsewu	4,00	431.443.000	0	387.445.000	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	387.445.000	0,00	89,80	DISPORAPAR
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4,00	431.443.000	1	387.445.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	387.445.000	25,00	89,80	DISPORAPAR

	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi	1,00		1	387.445.000	1	-	0	-	0,00		1,00	387.445.000	100,00		DISPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Organisasi Kepramukaan tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1,00	200.000.000	1	50.000.000	1	-	0	-	0,00		1,00	50.000.000	100,00	25,00	DISPORAPAR
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	jumlah peningkatan kunjungan wisatawan	60000,00	556.027.000	173593	32.500.000	70	350.000.000	223434	344.623.382	#####	98,46	397027,00	377.123.382	661,71	67,82	DISPORAPAR
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4,00	556.027.000	1	32.500.000	1	350.000.000	1	344.623.382	100,00	98,46	2,00	377.123.382	50,00	67,82	DISPORAPAR
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4,00	556.027.000	1	32.500.000	1	350.000.000	1	344.623.382	100,00	98,46	2,00	377.123.382	50,00	67,82	DISPORAPAR
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	6,00	1.186.654.000	6	483.687.637	6	305.299.600	6	291.583.252	100,00	95,51	12,00	775.270.889	200,00	65,33	DISPORAPAR
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan Promosi Pariwisata	4,00	1.186.654.000	1	483.687.637	1	305.299.600	1	291.583.252	100,00	95,51	2,00	775.270.889	50,00	65,33	DISPORAPAR
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4,00	755.642.000	0	-		-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	DISPORAPAR
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4,00	431.012.000	1	279.085.687	1	305.299.600	1	291.583.252	100,00	95,51	2,00	570.668.939	50,00	132,40	DISPORAPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pengembangan sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6,00	431.014.000	6	123.728.650	6	41.096.000	6	40.545.000	100,00	98,66	12,00	164.273.650	200,00	38,11	DISPORAPAR
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	100,00	431.014.000	100	123.728.650	100	41.096.000	100	40.545.000	100,00	98,66	200,00	164.273.650	200,00	38,11	DISPORAPAR
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	100,00	431.014.000	100	123.728.650	100	41.096.000	100	40.545.000	100,00	98,66	200,00	164.273.650	200,00	38,11	DISPORAPAR
	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB	14.302.141.500		2.885.888.763	BB	2.972.628.473	BB	2.564.416.924		86,27		5.450.305.687		38,11	PERPUSARSIP

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	BB	43.101.250	BB	9.229.000	BB	8.363.500	BB	7.731.500		92,44		16.960.500		39,35	PERPUSAR SIP
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,00	21.550.625	5	4.762.000	5	5.081.500	5	4.816.500	100,00	94,79	10,00	9.578.500	47,62	44,45	PERPUSAR SIP
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja tersedia	16,00	21.550.625	4	4.467.000	4	3.282.000	4	2.915.000	100,00	88,82	8,00	7.382.000	50,00	34,25	PERPUSAR SIP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah dalam satu tahun anggaran	100,00	12.094.210.750	100	2.429.764.914	100	2.363.109.473	93,4	2.022.241.397	93,40	85,58	193,40	4.452.006.311	193,40	36,81	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30,00	11.361.489.500	27	2.279.414.914	30	2.228.329.473	24	1.887.551.397	80,00	84,71	51,00	4.166.966.311	170,00	36,68	PERPUSAR SIP
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	732.721.250	12	150.350.000	12	134.780.000	12	134.690.000	100,00	99,93	24,00	285.040.000	50,00	38,90	PERPUSAR SIP
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Perangkat Daerah	100,00	39.000.000	80	6.412.000	100	8.250.000	100	6.382.600	100,00	77,36	180,00	12.794.600	180,00	32,81	PERPUSAR SIP
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,00	39.000.000	1	6.412.000	1	8.250.000	1	6.382.600	100,00	77,36	2,00	12.794.600	33,33	32,81	PERPUSAR SIP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00	100.000.000	0	-	100	-	0	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	PERPUSAR SIP
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	PERPUSAR SIP
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100,00	881.570.375	100	156.587.948	100	188.208.500	100	183.569.065	100,00	97,53	200,00	340.157.013	200,00	38,59	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	43.101.250	1	2.237.000	1	2.332.000	1	2.286.000	100,00	98,03	2,00	4.523.000	50,00	10,49	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	265.222.500	1	44.103.200	1	61.860.500	1	60.747.600	100,00	98,20	2,00	104.850.800	50,00	39,53	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	107.753.125	1	8.891.325	1	9.110.000	1	8.955.500	100,00	98,30	2,00	17.846.825	50,00	16,56	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80,00	77.582.250	20	17.100.000	20	17.400.000	20	17.160.000	100,00	98,62	40,00	34.260.000	50,00	44,16	PERPUSAR SIP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	387.911.250	15	84.256.423	15	97.506.000	15	94.419.965	100,00	96,84	30,00	178.676.388	50,00	46,06	PERPUSAR SIP
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan Barang dalam satu tahun anggaran.	100,00	344.810.000	0	-	100	161.135.000	100	137.890.085	100,00	85,57	100,00	137.890.085	100,00	39,99	PERPUSAR SIP

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23,00	344.810.000	0	-	33	161.135.000	33	137.890.085	100,00	85,57	33,00	137.890.085	143,48	39,99	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	100,00	369.303.750	100	147.135.594	100	58.004.000	100	45.002.753	100,00	77,59	200,00	192.138.347	200,00	52,03	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	129.303.750	12	30.835.594	12	32.402.000	12	19.780.948	0,00	0,00	24,00	50.616.542	50,00	39,15	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	240.000.000	2	116.300.000	1	25.602.000	1	25.221.805	0,00	0,00	3,00	141.521.805	37,50	58,97	PERPUSAR SIP
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100,00	874.955.375	100	136.759.307	100	185.558.000	100	161.599.524	100,00	87,09	200,00	298.358.831	200,00	34,10	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	775.822.500	6	117.110.000	6	131.530.000	6	117.121.000	100,00	89,05	12,00	234.231.000	50,00	30,19	PERPUSAR SIP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	34.481.000	6	3.299.307	6	6.650.000	5	2.989.505	83,33	44,95	11,00	6.288.812	45,83	18,24	PERPUSAR SIP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	64.651.875	10	16.350.000	10	22.490.000	10	21.005.000	100,00	93,40	20,00	37.355.000	50,00	57,78	PERPUSAR SIP
	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat	65,00	1.099.081.875	50	169.541.229	55	569.873.600	52	552.314.351	94,55	96,92	102,00	721.855.580	156,92	65,68	PERPUSAR SIP
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	2,44	387.911.250	0,5	22.890.000	0,57	399.937.300	0,367	387.463.230	64,39	96,88	0,87	410.353.230	35,53	105,79	PERPUSAR SIP
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	40,00	431.012.500	0	-	20	380.092.300	20	368.539.480	100,00	96,96	20,00	368.539.480	0,00	0,00	PERPUSAR SIP
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2,00	387.911.250	2	22.890.000	2	19.845.000	2	18.923.750	100,00	95,36	4,00	41.813.750	200,00	10,78	PERPUSAR SIP
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Budaya baca	65,00	711.170.625	50	146.651.229	55	169.936.300	0	164.851.121	0,00	97,01	50,00	311.502.350	76,92	43,80	PERPUSAR SIP
	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	8,00	280.158.125	1	26.757.475	8	71.971.500	8	70.558.343	100,00	98,04	9,00	97.315.818	112,50	34,74	PERPUSAR SIP
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40,00	215.506.250	10	72.075.254	20	97.964.800	20	94.292.778	100,00	96,25	30,00	166.368.032	75,00	77,20	PERPUSAR SIP

	KEARSIPAN																
	Program Pengelolaan Arsip	Prosentase perangkat daerah, kelurahan dan pekan yang telah menerapkan arsip sesuai standar	21,39	711.170.625	5,68	232.687.801	10,7	220.747.100	13,51	210.552.169	126,26	95,38	19,19	443.239.970	89,71	62,33	PERPUSAR SIP
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	94,00	495.664.375	79,47	96.778.354	88	124.398.800	82	119.128.608	93,18	95,76	161,47	215.906.962	171,78	43,56	PERPUSAR SIP
	Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Penyusutan	550,00	280.158.125	100	52.991.681	150	56.420.000	150	52.601.500	100,00	93,23	250,00	105.593.181	45,45	37,69	PERPUSAR SIP
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	215.506.250	1	43.786.673	1	67.978.800	1	66.527.108	100,00	97,86	2,00	110.313.781	50,00	51,19	PERPUSAR SIP
	Pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional Tingkat Kab/Kota	Prosentase Arsip Yang Tersedia pada JIKN	83,30	215.506.250	0	135.909.447	66,7	96.348.300	26	91.423.561	38,98	94,89	26,00	227.333.008	31,21	105,49	PERPUSAR SIP
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4,00	215.506.250	2	135.909.447	2	96.348.300	2	91.423.561	100,00	94,89	4,00	227.333.008	100,00	105,49	PERPUSAR SIP
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara	83,00	172.405.000	60		78	24.465.500	75	24.118.250	96,15	98,58	135,00	24.118.250	162,65	13,99	PERPUSAR SIP
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pelaksanaan, Penilaian Dan Pemusnahan Arsip	85,00	172.405.000	80,3		85	24.465.500	82	24.118.250	96,47	98,58	162,30	24.118.250	190,94	13,99	PERPUSAR SIP
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2400,00	172.405.000			100	24.465.500	100	24.118.250	100,00	98,58	100,00	24.118.250	4,17	13,99	PERPUSAR SIP
	DINAS PERTANIAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai SAKIP	B	56.867.789.000		13.347.621.928	B	13.563.216.856	BB	12.936.736.860		95,38	BB	26.284.358.788		46,22	Dinas Pertanian
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	431.013.000		123.340.940		121.259.000		119.119.011		98,24	0,00	242.459.951	0,00	56,25	Dinas Pertanian
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00	43.101.000	2	13.641.000	2	17.640.000	2	17.431.500	100,00	98,82	4,00	31.072.500	66,67	72,09	Dinas Pertanian
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	215.506.000	1	49.179.660	2	50.200.000	2	49.162.500	100,00	97,93	3,00	98.342.160	75,00	45,63	Dinas Pertanian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	64.652.000	4	38.538.000	4	53.419.000	2	52.525.011	50,00	98,33	6,00	91.063.011	37,50	140,85	Dinas Pertanian
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	52.820.582.000		12.258.249.846		12.740.251.856		12.136.445.273		95,26	0,00	24.394.695.119	0,00	46,18	Dinas Pertanian

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500,00	51.721.500.000	125	12.036.016.846	125	12.519.491.856	125	11.915.762.273	100,00	95,18	250,00	23.951.779.119	50,00	46,31	Dinas Pertanian
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.077.531.000	1	217.260.000	1	215.760.000	1	215.760.000	100,00	100,00	2,00	433.020.000	50,00	40,19	Dinas Pertanian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,00	21.591.000	2	4.973.000	2	5.000.000	2	4.923.000	100,00	98,46	4,00	9.896.000	50,00	45,83	Dinas Pertanian
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	77.582.000	0	17.563.350		24.090.000		18.811.970	0,00	78,09	0,00	36.375.320	0,00	46,89	Dinas Pertanian
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	56.032.000	2	12.638.350	2	19.500.000	2	14.311.970	100,00	73,39	4,00	26.950.320	50,00	48,10	Dinas Pertanian
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,00	21.551.000	5	4.925.000	5	4.590.000	5	4.500.000	100,00	98,04	10,00	9.425.000	50,00	43,73	Dinas Pertanian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	991.329.000		402.991.258		324.961.000	0	317.745.514		97,78	0,00	720.736.772	0,00	72,70	Dinas Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	43.101.000	1	8.824.750	1	5.105.000	1	5.070.000	100,00	99,31	2,00	13.894.750	50,00	32,24	Dinas Pertanian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	431.013.000	3	157.397.000	3	128.095.000	3	123.145.000	100,00	96,14	6,00	280.542.000	50,00	65,09	Dinas Pertanian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	86.203.000	2	22.891.000	2	14.345.000	2	12.930.000	100,00	90,14	4,00	35.821.000	50,00	41,55	Dinas Pertanian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200,00	107.753.000	300	22.164.000	300	25.000.000	300	24.360.000	100,00	97,44	600,00	46.524.000	50,00	43,18	Dinas Pertanian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,00	323.259.000	10	191.714.508	10	152.416.000	10	152.240.514	100,00	99,88	20,00	343.955.022	38,46	106,40	Dinas Pertanian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	538.766.000		114.913.000		24.000.000		23.350.000		97,29	0,00	138.263.000	0,00	25,66	Dinas Pertanian
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12,00	215.506.000	3	49.428.000	0	-	0	-	0,00	0,00	3,00	49.428.000	25,00	22,94	Dinas Pertanian
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54,00	323.259.000	12	65.485.000	12	24.000.000	12	23.350.000	100,00	97,29	24,00	88.835.000	44,44	27,48	Dinas Pertanian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	590.487.000	0	120.818.456		124.055.000	0	123.886.385		99,86	0,00	244.704.841	0,00	41,44	Dinas Pertanian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	590.487.000	12	120.818.456	12	124.055.000	12	123.886.385	100,00	99,86	24,00	244.704.841	50,00	41,44	Dinas Pertanian

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100,00	1.310.278.000		309.745.078	90	204.600.000	90	197.378.707	100,00	96,47	90,00	507.123.785	90,00	38,70	Dinas Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180,00	818.924.000	45	194.047.078	45	173.740.000	45	167.089.207	100,00	96,17	90,00	361.136.285	50,00	44,10	Dinas Pertanian
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52,00	60.342.000	10	22.700.000	10	9.960.000	10	9.500.000	100,00	95,38	20,00	32.200.000	38,46	53,36	Dinas Pertanian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12,00	431.013.000	3	92.998.000	3	20.900.000	3	20.789.500	100,00	99,47	6,00	113.787.500	50,00	26,40	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi (ton)	507308,00	2.647.000.000	124652	428.164.300	126257	695.105.200	153487	672.323.667	121,57	96,72	278139,00	1.100.487.967	54,83	41,57	Dinas Pertanian
		Jumlah produksi jagung (ton)	154408,00		44105		38352		44070		114,91		88175,00		57,11		
		Jumlah produksi bawang merah (kuintal)	13564,00		1496		3341		1093		32,71		2589,00		19,09		
		Jumlah produksi kakao (ton)	11930,00		2497		2933		2489		84,86		4986,00		41,79		
		Jumlah produksi tembakau (ton)	407,00		99		98		92		93,88		191,00		46,93		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	24,00	888.131.000	6	280.437.300		558.945.200	0	537.768.967		96,21	6,00	818.206.267	25,00	92,13	Dinas Pertanian
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12,00	495.664.000	3	193.937.300	3	272.233.200	3	268.878.820	100,00	98,77	6,00	462.816.120	50,00	93,37	Dinas Pertanian
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12,00	392.467.000	3	86.500.000	3	286.712.000	3	268.890.147	100,00	93,78	6,00	355.390.147	50,00	90,55	Dinas Pertanian
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	12,00	636.605.000	3	115.620.000	3	99.960.000	0	98.800.000	0,00	98,84	3,00	214.420.000	25,00	33,68	Dinas Pertanian
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4,00	593.504.000	1	115.620.000	1	99.960.000	1	98.800.000	100,00	98,84	2,00	214.420.000	50,00	36,13	Dinas Pertanian
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman pakan Ternak serta Pekan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1,00	-	1	-	1	10.930.000	1	10.889.700	100,00	99,63	2,00	10.889.700	200,00	0,00	Dinas Pertanian
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala kecil (laporan)	1,00	-	1	-	1	10.930.000	1	10.889.700	100,00	99,63	2,00	10.889.700	200,00	0,00	Dinas Pertanian
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	8,00	323.259.000	2	32.107.000	2	25.270.000	2	24.865.000	100,00	98,40	4,00	56.972.000	50,00	17,62	Dinas Pertanian

	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	40,00	215.506.000	10	32.107.000	10	25.270.000	10	24.865.000	100,00	98,40	20,00	56.972.000	50,00	26,44	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Pengembangan Prasarana Pertanian					1,01	500.000.000	1,01	-							
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan pengembangan prasarana pertanian						500.000.000	0	-							
	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Jumlah Luasan Kawasan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian					10	500.000.000	0	-							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	jumlah ketersediaan daging (ton)	16532,00	1.781.569.000	4773	685.708.300	4033	64.230.000	4825	63.376.400	119,64	98,67	9598,00	749.084.700	58,06	42,05	Dinas Pertanian
		jumlah ketersediaan telur (ton)	33096,00		9144		8224		9284		112,89		18428,00		55,68		
		jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	21300,00		5282		5275		5375		101,90		10657,00		50,03		
		jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kali)	17040,00		4951		4235		4255		100,47		9206,00		54,03		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,00	260.332.000	1	52.212.000	1	39.940.000	0	39.438.400	0,00	98,74	1,00	91.650.400	25,00	35,21	Dinas Pertanian
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4,00	260.332.000	1	52.212.000	1	39.940.000	1	39.438.400	100,00	98,74	2,00	91.650.400	50,00	35,21	Dinas Pertanian
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	8,00	271.301.000	2	36.361.900	2	24.290.000	0	23.638.000	0,00	97,32	2,00	59.999.900	25,00	22,12	Dinas Pertanian
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4,00	185.098.000	1	36.361.900	1	24.290.000	1	23.938.000	100,00	98,55	2,00	60.299.900	50,00	32,58	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	prosentase lahan yang mendapat pengendalian dan pananggulangan bencana pertanian	300,00	1.683.966.000	75	113.786.100	74	429.448.000	74	422.590.000	100,00	98,40	149,00	536.376.100	49,67	31,85	Dinas Pertanian
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	120,00	1.683.966.000	30	113.786.100	30	429.448.000	0	422.590.000	0,00	98,40	30,00	536.376.100	25,00	31,85	Dinas Pertanian
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	80,00	271.107.000	20	76.350.000	20	279.448.000	20	274.154.900	100,00	98,11	40,00	350.504.900	50,00	129,29	Dinas Pertanian
	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan					1	150.000.000	1	148.435.100	100,00						
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase peningkatan penyuluhan pertanian	33156,00	2.506.553.000	85	690.388.830	82,39	880.500.900	83	836.241.989	#VALUE!	94,97	168,00	1.526.630.819	0,51	60,91	Dinas Pertanian
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	124,00	2.506.553.000	31	690.388.830	31	880.500.900	1	836.241.989	3,23	94,97	32,00	1.526.630.819	25,81	60,91	Dinas Pertanian

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36,00	1.148.864.000	9	155.657.500	9	613.521.900	9	572.243.400	100,00	93,27	18,00	727.900.900	50,00	63,36	Dinas Pertanian
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36,00	172.405.000	9	168.553.030	9	266.979.000	9	263.998.589	100,00	98,88	18,00	432.551.619	50,00	250,89	Dinas Pertanian
	DINAS PERIKANAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	A	15.917.000.000		3.865.484.793	BB	3.992.140.706	BB	3.779.594.652		94,68	#VALUE !	7.645.079.445		48,03	Perikanan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	24,00	112.000.000	6	15.469.525	4	5.000.000	4	4.908.500	100,00	98,17	10,00	20.378.025	41,67	18,19	Perikanan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	72.000.000	4	7.922.425	4	5.000.000	4	4.908.500	100,00	98,17	8,00	12.830.925	50,00	17,82	Perikanan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	40.000.000	2	7.547.100	0	-	0	0		2,00	7.547.100	25,00	18,87	Perikanan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	56,00	12.962.000.000	14	3.425.527.052	14	3.262.836.306	14	3.086.349.102	100,00	94,59	28,00	6.511.876.154	50,00	50,24	Perikanan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	160,00	12.112.000.000	37	3.263.832.817	37	3.107.076.306	37	2.942.964.602	100,00	94,72	74,00	6.206.797.419	46,25	51,25	Perikanan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	830.000.000	12	158.411.235	12	152.760.000	12	140.460.000	100,00	91,95	24,00	298.871.235	50,00	36,01	Perikanan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	8,00	20.000.000	2	3.283.000	2	3.000.000	2	2.924.500	100,00	97,48	4,00	6.207.500	50,00	31,04	Perikanan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang	4,00	26.000.000	0	-	1	6.500.000	1	6.476.400		1,00	6.476.400	25,00	24,91	Perikanan	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	26.000.000	0	-	1	6.500.000	1	6.476.400		1,00	6.476.400	25,00	24,91	Perikanan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan danPelatihan	20,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi kantor	48,00	1.089.000.000	9	155.040.382	12	210.474.400	12	201.544.992	100,00	95,76	21,00	356.585.374	43,75	32,74	Perikanan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12,00	480.000.000	3	70.494.700	3	69.529.000	3	60.878.400	100,00	87,56	6,00	131.373.100	50,00	27,37	Perikanan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	8,00	20.000.000	2	6.680.400	2	5.301.400	2	5.023.210	100,00	94,75	4,00	11.703.610	50,00	58,52	Perikanan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	112,00	124.000.000	25	25.200.000	27	25.200.000	27	25.200.000	100,00	100,00	52,00	50.400.000	46,43	40,65	Perikanan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,00	405.000.000	36	52.665.282	60	110.444.000	60	110.443.382	100,00	100,00	96,00	163.108.664	44,44	40,27	Perikanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Diadakan	136,00	240.000.000	4	37.320.800	29	138.550.000	29	134.430.000	100,00	97,03	33,00	171.750.800	24,26	71,56	Perikanan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120,00	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12,00	80.000.000	3	6.200.000	29	138.550.000	29	134.430.000	100,00	97,03	32,00	140.630.000	266,67	175,79	Perikanan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	80.000.000	1	31.120.800	0	-	0	-			1,00	31.120.800	25,00	38,90	Perikanan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa kantor	48,00	120.000.000	12	21.137.749	12	41.400.000	12	31.804.763	100,00	76,82	24,00	52.942.512	50,00	44,12	Perikanan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	120.000.000	12	21.137.749	12	41.400.000	12	31.804.763	100,00	76,82	24,00	52.942.512	50,00	44,12	Perikanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum	95,00	1.248.000.000	73	210.989.285	85	327.380.000	89,24	314.080.895	104,99	95,94	161,97	525.070.180	170,49	42,07	Perikanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64,00	1.000.000.000	16	201.449.285	17	285.840.000	17	274.595.045	100,00	96,07	33,00	476.044.330	51,56	47,60	Perikanan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12,00	48.000.000	4	9.540.000	14	9.340.000	14	9.340.000	100,00	100,00	18,00	18.880.000	150,00	39,33	Perikanan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	200.000.000	0	-	2	32.200.000	2	30.145.850	100,00	0,00	2,00	30.145.850	25,00	15,07	Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	52327,00	1.733.000.000	12350	436.284.225	12530	1.067.402.500	8600	1.056.801.425	68,64	99,01	20950,00	1.493.085.650	40,04	86,16	Perikanan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20,00	143.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan

	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha-nya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usaha-nya, Lokasi, dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	20,00	143.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pelatihan/Sosialisasi pembudidaya	52,00	450.000.000	10	90.957.750	12	367.530.000	12	356.581.025	100,00	97,02	22,00	447.538.775	42,31	99,45	Perikanan
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	32,00	250.000.000	5	82.102.750	7	203.850.000	7	203.313.920	100,00	99,74	12,00	285.416.670	37,50	114,17	Perikanan
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20,00	200.000.000	5	8.855.000	5	163.680.000	5	162.947.105	100,00	99,55	10,00	171.802.105	50,00	85,90	Perikanan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Data Informasi Pembudidayaan Ikan	260,00	1.140.000.000	29	345.326.475	59	699.872.500	59	690.540.400	100,00	98,67	88,00	1.035.866.875	33,85	90,87	Perikanan
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4,00	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Perikanan
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	140,00	300.000.000	0	-	30	79.497.500	30	77.737.500	0,00	0,00	30,00	77.737.500	21,43	25,91	Perikanan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	80,00	600.000.000	20	325.154.325	20	614.175.000	20	606.612.900	100,00	98,77	40,00	931.767.225	50,00	155,29	Perikanan
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	36,00	120.000.000	9	20.172.150	9	6.200.000	9	6.190.000	100,00	99,84	18,00	26.362.150	50,00	21,97	Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	21,63	950.000.000	-8,70	280.097.348	4,73	278.363.000	6	271.423.750	118,39	97,51	-3,10	551.521.098	-14,33	58,05	Perikanan
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Diterbitkan	73,00	270.000.000	13	23.431.000	8	24.883.000	8	23.248.500	100,00	93,43	21,00	46.679.500	28,77	17,29	Perikanan
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	73,00	270.000.000	13	23.431.000	8	24.883.000	8	23.248.500	100,00	93,43	21,00	46.679.500	28,77	17,29	Perikanan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8,00	120.000.000	2	61.551.948	3	38.445.000	3	37.434.350	100,00	97,37	5,00	98.986.298	62,50	82,49	Perikanan

	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	8,00	120.000.000	2	61.551.948	3	38.445.000	3	37.434.350	100,00	97,37	5,00	98.986.298	62,50	82,49	Perikanan
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia dan Tersalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2968,67	560.000.000	725	195.114.400	735	215.035.000	736	210.740.900	100,08	98,00	1461,36	405.855.300	49,23	72,47	Perikanan
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	2968,67	440.000.000	725	140.825.400	735	179.395.000	736	176.340.900	100,08	98,30	1461,36	317.166.300	49,23	72,08	Perikanan
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12,00	120.000.000	3	54.289.000	8	35.640.000	8	34.400.000	100,00	96,52	11,00	88.689.000	91,67	73,91	Perikanan
	BKPSDM																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB Skala	23.171.328.687	BB	3.983.627.834	BB	5.585.436.954	BB	5.209.183.814		93,26		9.192.811.648		39,67	BKPSDM
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Jasa Administrasi Perencanaan	28,00	91.901.000	7	12.335.400	7	16.431.800	7	15.660.900	100,00	95,31	14,00	27.996.300	50,00	30,46	BKPSDM
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	47.298.000	4	7.795.800	4	9.313.800	4	8.861.900	100,00	95,15	8,00	16.657.700	50,00	35,22	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	44.603.000	3	4.539.600	3	7.118.000	3	6.799.000	100,00	95,52	6,00	11.338.600	50,00	25,42	BKPSDM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	220,00	17.894.785.000	55	3.230.176.784	94	4.737.842.154	94	4.445.872.848	100,00	93,84	149,00	7.676.049.632	67,73	42,90	BKPSDM
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	16.735.008.000	42	3.037.315.884	91	4.535.102.154	81	4.261.248.598	89,01	93,96	123,00	7.298.564.482	73,21	43,61	BKPSDM
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	1.099.422.000	12	190.200.000	12	197.306.000	12	179.480.000	100,00	90,97	24,00	369.680.000	50,00	33,62	BKPSDM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	60.355.000	1	2.660.900	1	5.434.000	1	5.144.250	100,00	94,67	2,00	7.805.150	50,00	12,93	BKPSDM

	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	8,00	84.866.000	2	12.476.250	2	17.900.000	2	13.703.940	100,00	76,56	4,00	26.180.190	50,00	30,85	BKPSDM
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8,00	84.866.000	2	12.476.250	2	17.900.000	2	13.703.940	100,00	76,56	4,00	26.180.190	50,00	30,85	BKPSDM
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	256,00	670.076.687	64	88.742.069	81	109.518.000	81	86.174.957	100,00	78,69	145,00	174.917.026	56,64	26,10	BKPSDM
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16,00	237.057.000	4	4.240.500	1	5.580.000	1	3.770.000	100,00	67,56	5,00	8.010.500	31,25	3,38	BKPSDM
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240,00	433.019.687	60	84.501.569	80	103.938.000	80	82.404.957	100,00	79,28	140,00	166.906.526	58,33	38,54	BKPSDM
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	748,00	2.867.151.000	174	433.313.231	75	429.667.800	75	405.204.181	100,00	94,31	249,00	838.517.412	33,29	29,25	BKPSDM
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	64,00	79.751.000	17	16.861.000	1	17.388.500	1	16.872.500	100,00	97,03	18,00	33.733.500	28,13	42,30	BKPSDM
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	136,00	1.116.040.000	20	187.100.000	3	84.500.000	3	83.700.000	100,00	99,05	23,00	270.800.000	16,91	24,26	BKPSDM
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160,00	507.809.000	62	71.453.700	7	80.813.600	5	75.288.000	71,43	93,16	67,00	146.741.700	41,88	28,90	BKPSDM
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	48,00	222.056.000	12	45.705.300	2	50.261.700	2	45.381.600	100,00	90,29	14,00	91.086.900	29,17	41,02	BKPSDM
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120,00	185.853.000	45	33.630.000	50	38.100.000	50	37.920.000	100,00	99,53	95,00	71.550.000	79,17	38,50	BKPSDM
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,00	755.642.000	18	78.563.231	12	158.604.000	9	146.042.081	75,00	92,08	27,00	224.605.312	12,27	29,72	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48,00	170.681.000	12	63.000.000	12	82.955.200	12	65.074.173	100,00	78,44	24,00	128.074.173	50,00	75,04	BKPSDM

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	170.681.000	12	63.000.000	12	82.955.200	12	65.074.173	100,00	78,44	24,00	128.074.173	50,00	75,04	BKPSDM
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152,00	1.391.868.000	28	143.584.100	42	191.122.000	42	177.492.815	100,00	92,87	70,00	321.076.915	46,05	23,07	BKPSDM
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	482.648.000	4	81.647.750	4	97.890.000	4	85.394.500	100,00	87,24	8,00	167.042.250	50,00	34,61	BKPSDM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	804.678.000	1	38.251.350	1	63.912.000	1	62.988.315	100,00	98,55	2,00	101.239.665	50,00	12,58	BKPSDM
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132,00	104.542.000	23	23.685.000	37	29.320.000	37	29.110.000	100,00	99,28	60,00	52.795.000	45,45	50,50	BKPSDM
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit	0,32	21.320.901.000		2.991.488.280	0,34	2.948.800.500	0,34	2.284.876.853	100,00	77,48	0,34	5.276.365.133	106,25	24,75	BKPSDM
		Indeks Kepuasan ASN	77,00			-	79%		80,37%		101,73		0,80		1,04		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen/laporan terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	268,00	4.081.900.000	66	427.007.922	19	625.642.000	19	529.354.048	100,00	84,61	85,00	956.361.970	31,72	23,43	BKPSDM
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	20,00	3.122.612.000	4	318.514.679	4	473.524.000	4	399.629.436	100,00	84,39	8,00	718.144.115	40,00	23,00	BKPSDM
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48,00	410.883.000	12	39.363.687	12	50.924.000	12	50.100.695	100,00	98,38	24,00	89.464.382	50,00	21,77	BKPSDM
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	192,00	341.644.000	48	52.712.403	1	62.751.000	1	52.257.317	100,00	83,28	49,00	104.969.720	25,52	30,72	BKPSDM
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	8,00	206.761.000	2	16.417.153	2	38.443.000	2	27.366.600	100,00	71,19	4,00	43.783.753	50,00	21,18	BKPSDM
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen terlaksanakanya Mutasi dan Promosi ASN	9600,00	3.296.543.000	2918	807.980.509	10	1.044.362.000	9	657.733.244	90,00	62,98	2927,00	1.465.713.753	30,49	44,46	BKPSDM
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200,00	349.256.000	25	89.289.008	3	99.291.400	3	90.507.361	100,00	91,15	28,00	179.796.369	14,00	51,48	BKPSDM
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8000,00	265.651.000	2561	60.106.460	3	79.669.200	3	73.245.297	100,00	91,94	2564,00	133.351.757	32,05	50,20	BKPSDM

	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1400,00	2.681.636.000	332	658.585.041	4	865.401.400	3	493.980.586	75,00	57,08	335,00	1.152.565.627	23,93	42,98	BKPSDM
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen/laporan atau orang terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	440,00	12.048.973.000	198	1.387.610.269	103	896.681.500	103	785.290.562	100,00	87,58	301,00	2.172.900.831	68,41	18,03	BKPSDM
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40,00	11.875.024.000	26	1.340.638.459	3	848.939.900	3	739.682.477	100,00	87,13	29,00	2.080.320.936	72,50	17,52	BKPSDM
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	400,00	173.949.000	172	46.971.810	100	47.741.600	100	45.608.085	100,00	95,53	272,00	92.579.895	68,00	53,22	BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah orang/ dokumen/laporan terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4092,00	1.893.485.000	1018	368.889.580	1014	382.115.000	1014	312.498.999	100,00	81,78	2032,00	681.388.579	49,66	35,99	BKPSDM
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8,00	354.618.000	2	32.894.352	2	42.983.000	2	20.839.807	100,00	48,48	4,00	53.734.159	50,00	15,15	BKPSDM
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	4064,00	766.846.000	1011	176.256.632	1007	185.995.000	1007	168.415.231	100,00	90,55	2018,00	344.671.863	49,66	44,95	BKPSDM
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	12,00	362.748.000	3	97.874.301	3	116.149.000	3	95.971.484	100,00	82,63	6,00	193.845.785	50,00	53,44	BKPSDM
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8,00	409.273.000	2	61.864.295	3	36.988.000	2	27.272.477	66,67	73,73	4,00	89.136.772	50,00	21,78	BKPSDM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesional ASN	50,00	3.098.225.000		34.066.600	55	169.841.500	77,16	133.542.769	140,29	78,63	77,16	167.609.369	154,32	5,41	BKPSDM
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah dokumen terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	75,00	513.938.000	0	1.462.000	2	126.216.800	2	99.164.489	100,00	78,57	2,00	100.626.489	2,67	19,58	BKPSDM
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	75,00	513.938.000	0	1.462.000	2	126.216.800	2	99.164.489	100,00	78,57	2,00	100.626.489	2,67	19,58	BKPSDM
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4,00	2.584.287.000	1	32.604.600	1	43.624.700	1	34.378.280	100,00	78,80	2,00	66.982.880	50,00	2,59	BKPSDM
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4,00	2.584.287.000	1	32.604.600	1	43.624.700	1	34.378.280	100,00	78,80	2,00	66.982.880	50,00	2,59	BKPSDM

	BAPENDA																BAPENDA
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	28.039.064.138		5.272.643.151	BB	6.208.357.671	BB	5.629.894.153		90,68	#VALUE !	10.902.537.304		38,88	BAPENDA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	20,00	82.571.164	5,00	9.789.115	5	9.825.000	5	9.557.443	100,00	97,28	10,00	19.346.558	50,00	23,43	BAPENDA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersaji	16,00	27.695.168	4,00	5.441.775	4	5.450.000	4	5.343.883	100,00	98,05	8,00	10.785.658	50,00	38,94	BAPENDA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja perangkat Daerah	4,00	54.875.996	1,00	4.347.340	1	4.375.000	1	4.213.560	100,00	96,31	2,00	8.560.900	50,00	15,60	BAPENDA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	48,00	25.171.850.686	6,00	4.709.216.710	12	5.556.321.171	12	5.044.261.962	100,00	90,78	18,00	9.753.478.672	37,50	38,75	BAPENDA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140,00	23.364.777.963	35,00	4.470.889.710	12	5.317.160.171	12	4.806.041.186	100,00	90,39	47,00	9.276.930.896	33,57	39,70	BAPENDA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.772.133.363	1,00	233.560.000	12	230.880.000	12	230.180.000	100,00	99,70	13,00	463.740.000	325,00	26,17	BAPENDA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	34.939.361	1,00	4.767.000	1	8.281.000	1	8.040.776	100,00	97,10	2,00	12.807.776	50,00	36,66	BAPENDA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Keikutsertaan Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek Pelatihan	20,00	102.102.000	0,00	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	BAPENDA
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	102.102.000	0,00	-	0	-	0	-	#DIV/0 !	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	BAPENDA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.532.616.993	6,00	239.445.011	12	261.393.800	12	243.956.366	100,00	93,33	18,00	483.401.377	37,50	31,54	BAPENDA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	217.168.401	0,59	5.981.100	1	8.095.000	1	7.806.000	100,00	96,43	1,59	13.787.100	39,75	6,35	BAPENDA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	62.486.424	4,00	19.765.000	1	38.495.000	1	33.620.000	100,00	87,34	5,00	53.385.000	31,25	85,43	BAPENDA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	666.790.119	3,06	117.669.350	1	89.678.600	1	79.546.500	100,00	88,70	4,06	197.215.850	33,87	29,58	BAPENDA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	170.060.453	1,04	19.102.440	1	22.024.200	1	20.915.938	100,00	94,97	2,04	40.018.378	51,00	23,53	BAPENDA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00	160.810.650	1,00	31.140.000	1	22.500.000	1	22.500.000	100,00	100,00	2,00	53.640.000	50,00	33,36	BAPENDA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	255.300.946	15,00	45.787.121	6	80.601.000	6	79.567.928	100,00	98,72	21,00	125.355.049	35,00	49,10	BAPENDA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48,00	421.170.750	6,00	80.525.800	12	101.617.700	12	95.874.707	100,00	94,35	18,00	176.400.507	37,50	41,88	BAPENDA

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	421.170.750	12,00	80.525.800	12	101.617.700	12	95.874.707	100,00	94,35	24,00	176.400.507	50,00	41,88	BAPENDA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secar Rutin	80,00	728.752.545	30,00	233.666.515	15	279.200.000	15	236.243.675	100,00	84,61	45,00	469.910.190	56,25	64,48	BAPENDA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60,00	440.957.638	15,00	192.636.515	15	236.260.000	15	195.618.675	100,00	82,80	30,00	388.255.190	50,00	88,05	BAPENDA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16,00	217.936.719	4,57	30.155.000	4	32.860.000	4	30.645.000	100,00	93,26	8,57	60.800.000	53,56	27,90	BAPENDA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	4,00	69.858.188	3,00	10.875.000	1	10.080.000	1	9.980.000	100,00	99,01	4,00	20.855.000	100,00	29,85	BAPENDA
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Realisasi Pajak Daerah	98,00	16.683.634.118	13,64	3.551.870.059	96.75	2.410.866.600	91,33	2.158.132.604	94,40	89,52	104,97	5.710.002.663	107,11	34,23	BAPENDA
		% Realisasi Retribusi Daerah	80,00		10,71		75.25		61,45		81,66		72,16		90,20		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	100,00	16.683.634.118	13,64	3.551.870.059	100	2.410.866.600	100	2.158.132.604	100,00	89,52	113,64	5.710.002.663	113,64	34,23	BAPENDA
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak daerah	8,00	1.192.102.433	1,00	423.363.726	2	288.819.000	2	285.952.540	100,00	99,01	3,00	709.316.266	37,50	59,50	BAPENDA
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil analis Pajak Daerah serta pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	464.100.000	1,00	8.761.020	1	5.763.000	1	5.718.000	100,00	99,22	2,00	14.479.020	50,00	3,12	BAPENDA
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	573.174.760	1,00	132.017.100	1	217.671.500	1	212.333.596	100,00	97,55	2,00	344.350.696	50,00	60,08	BAPENDA
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan Pajak Daerah	52,00	1.224.589.936	6,00	770.167.500	13	500.804.400	9	289.501.810	69,23	57,81	15,00	1.059.669.310	28,85	86,53	BAPENDA
	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Dearah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8,00	5.175.878.592	3,00	683.880.600	2	6.647.100	2	6.387.100	100,00	96,09	5,00	690.267.700	62,50	13,34	BAPENDA
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12,00	677.175.434	3,00	124.894.250	3	189.100.000	3	180.388.000	100,00	95,39	6,00	305.282.250	50,00	45,08	BAPENDA

	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	4000,00	362.133.806	1000,00	18.168.400	100	7.268.300	100	6.907.400	100,00	95,03	1100,00	25.075.800	27,50	6,92	BAPENDA
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4,00	37.522.485	1,00	3.721.500	1	2.472.500	1	2.366.500	100,00	95,71	2,00	6.088.000	50,00	16,22	BAPENDA
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	40,00	764.687.824	10,00	49.314.800	10	32.651.000	10	31.795.500	100,00	97,38	20,00	81.110.300	50,00	10,61	BAPENDA
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4,00	775.617.843	1,00	160.000.000	1	8.413.000	1	8.344.140	100,00	99,18	2,00	168.344.140	50,00	21,70	BAPENDA
	Penagihan pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pajak Daerah	4,00	3.756.455.434	1,00	885.454.829	1	791.293.300	1	788.800.045	100,00	99,68	2,00	1.674.254.874	50,00	44,57	BAPENDA
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4,00	43.709.866	1,00	7.075.000	1	5.389.500	1	5.364.000	100,00		2,00		50,00		BAPENDA
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4,00	921.808.865	1,00	187.604.400	1	199.431.000	1	189.093.966	100,00	94,82	2,00	376.698.366	50,00	40,87	BAPENDA
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,00	574.676.839	1,00	77.673.900	1	135.863.000	1	126.451.034	100,00	93,07	2,00	204.124.934	50,00	35,52	BAPENDA
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4,00	140.000.000	1,00	19.773.034	1	19.280.000	1	18.728.973	100,00	97,14	2,00	38.502.007	50,00	27,50	BAPENDA
	BPKAD																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	35,00	128.245.062.188		25.800.131.481		31.443.977.331		26.325.374.855	#DIV/0!	83,72	0,00	52.125.506.336	0,00	40,65	BPKAD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKAD	35,00	385.882.914	97,54%	48.951.714	7,0	50.186.500	7,00	47.378.732	100,00	94,41	7,98	96.330.446	22,79	24,96	BPKAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	8,00	130.400.500	97,93%	34.410.954	2,0	35.137.500	2,00	33.429.862	100,00	95,14	2,98	67.840.816	37,24	52,02	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	46.410.001	0	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,00	46.410.001	0	0	1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	46.410.001			1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4,00	46.410.001			1,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja BPKAD	4,00	32.022.901	97,36%	6.717.640	1,0	6.900.000	1,00	6.390.370	100,00	92,61	1,97	13.108.010	49,34	40,93	BPKAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4,00	37.819.510	96,00%	7.823.120	1,0	8.149.000	1,00	7.558.500	100,00	92,75	1,96	15.381.620	49,00	40,67	BPKAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	60,00	122.184.884.160	86,90%	24.006.217.893	12,0	28.851.507.906	12,00	23.888.763.724	100,00	82,80	12,87	47.894.981.617	21,45	39,20	BPKAD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayar	184,00	101.460.429.079	86,61%	23.036.957.503	46,0	28.077.846.906	46	23.222.604.724	100,00	82,71	46,87	46.259.562.227	25,47	45,59	BPKAD
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00	20.596.015.441	94,24%	955.650.000	1,0	758.440.000	1	651.040.000	100,00	85,84	1,94	1.606.690.000	48,56	7,80	BPKAD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	16,00	64.219.842			4,0	-	4	-	100,00		4,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4,00	64.219.839	98,36%	13.610.390	1,0	15.221.000	1	15.119.000	100,00	99,33	1,98	28.729.390	49,59	44,74	BPKAD
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Perangkat Daerah	94,50%	46.410.001	60,08%	6.007.750	90,0	10.000.000	60,99	6.099.280	67,77	60,99	61,59	12.107.030	6517,54	26,09	BPKAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terselenggaranya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	8,00	46.410.001	60,08%	6.007.750	2,0	10.000.000	2,00	6.099.280	100,00	60,99	2,60	12.107.030	32,51	26,09	BPKAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang Mengikuti Diklat/ Bimtek	1400,00	774.445.134	7,16%	400.040.000	350,0	610.000.000	97,62	595.500.000	27,89	97,62	97,69	995.540.000	6,98	128,55	BPKAD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang mengikuti Diklat	20,00	139.230.005	97,70%	29.310.000	5,0	-	0,00	-	0,00		0,98	29.310.000	4,89	21,05	BPKAD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600,00	371.280.150	0,00%	0	150,0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN pada Perangkat Daerah yang mengikuti Bimtek	600,00	263.934.934	0,00%	370.730.000	150,0	610.000.000	150,00	595.500.000	100,00	97,62	150,00	966.230.000	25,00	366,09	BPKAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	94,50%	2.700.014.235	96,26%	734.086.770	90,0	1.230.895.925	90,0	1.181.334.452	100,00	95,97	90,96	1.915.421.222	9625,67	70,94	BPKAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Penerangan Kantor	16,00	46.479.619	100,00 %	10.015.000	4,0	10.019.500	4,0	9.989.500	100,00	99,70	5,00	20.004.500	31,25	43,04	BPKAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Komputer dan komponen komputer	16,00	60.333.004	97,58%	218.650.000	4,0	364.911.000	4,0	356.919.200	100,00	97,81	4,98	575.569.200	31,10	953,99	BPKAD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16,00	348.075.004			4,0	-	4,0		100,00		4,00	-	25,00	0,00	BPKAD

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	16,00	1.386.335.516	98,38%	297.493.050	4,0	347.062.625	4,0	334.974.150	100,00	96,52	4,98	632.467.200	31,15	45,62	BPKAD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	16,00	147.840.962	94,71%	30.532.495	4,0	39.526.800	4,0	38.095.300	100,00	96,38	4,95	68.627.795	30,92	46,42	BPKAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per undangundangan yang tersisa	16,00	347.146.804	99,94%	74.755.000	4,0	89.800.000	4,00%	63.865.000	1,00	71,12	1,04	138.620.000	6,50	39,93	BPKAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka kordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dibutuhkan	48,00	363.803.361	86,16%	102.641.225	12,0	379.576.000	12,00%	377.491.302	1,00	99,45	0,98	480.132.527	2,05	131,98	BPKAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	94,50	167.076.001	100,00 %	6.000.000	90,0	92.500.000	90,00	86.000.000	100,00	92,97	91,00	92.000.000	96,30	55,06	BPKAD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4,00	139.230.001			1,0	86.500.000	1,00	80.000.000	100,00	0,00	1,00	80.000.000	25,00	57,46	BPKAD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16,00	27.846.004	100,00 %	6.000.000	4,0	6.000.000	4,00	6.000.000	100,00	100,00	5,00	12.000.000	31,25	43,09	BPKAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	98,00	683.619.301	78,58%	114.315.984	95,0	147.282.000	95,0	112.895.308	100,00	76,65	95,79	227.211.292	97,74	33,24	BPKAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telekomunikasi, dan listrik	8,00	675.265.502	78,58%	114.315.984	2,0	145.482.000	2,0	111.095.308	100,00	76,36	2,79	225.411.292	34,82	33,38	BPKAD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	8.353.801			1,0	1.800.000	1,0	1.800.000	100,00	0,00	1,00	1.800.000	25,00	21,55	BPKAD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Perangkat Daerah	94,50	1.302.730.817	95,79%	484.511.370	90,0	451.605.000	90,0	407.403.359	100,00	90,21	90,96	891.914.729	96,25	68,47	BPKAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	52,00	998.629.304	92,64%	173.827.451	13,0	252.900.000	13,0	211.508.359	100,00	83,63	13,93	385.335.810	26,78	38,59	BPKAD
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12,00	69.615.003			2,0	-			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin kantor yang terpelihara	40,00	211.165.510	99,98%	48.140.000	10,0	193.265.000	10,0	190.695.000	100,00	98,67	11,00	238.835.000	27,50	113,10	BPKAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4,00	23.321.026	41,11%	262.543.919	1,0	5.440.000	1,0	5.200.000	100,00	95,59	1,41	267.743.919	35,28	100,00	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase OPD yang menyusun DPA sesuai Renja	100,00			189.822.281.331	100,0		100,00		100,00	98,23	100,00		100,00	27,67	BPKAD

		Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah	90,00				95,5		95,50		100,00		95,50		106,11		BPKAD
		Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100,00	785.723.795.960			100,0	199.344.516.481	100,00	195.825.922.753	100,00		100,00	385.648.204.084	100,00		BPKAD
		Prosentase penyerapan Belanja (Hibah, Bansos, Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga) dan Investasi daerah	100,00				2,5		2,50		100,00		2,50		2,50		BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen Penganggaran Pemda Kab. Pringsewu	1,00	5.413.227.373	96,19%	933.927.148	100,0	1.201.540.400	100,0	1.168.503.702	100,00	97,25	100,96	2.102.430.850	##### ##	38,84	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Buku KUA dan PPAS	4,00	208.752.412	98,20%	35.340.045	1,0	41.238.800	1,0	39.882.840	100,00	96,71	1,98	75.222.885	49,55	36,03	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Buku KUA dan PPAS Perubahan	4,00	213.195.928	98,24%	36.295.725	1,0	36.946.300	1,0	35.643.090	100,00	96,47	1,98	71.938.815	49,56	33,74	BPKAD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD	148,00	70.774.786	35,39%	10.176.770	1,0	26.202.800	1,0	23.816.540	100,00	90,89	1,35	33.993.310	0,91	48,03	BPKAD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku Hasil Verifikasi RKA-SKPD Perubahan	148,00	70.774.786	88,40%	15.854.370	1,0	19.842.900	1,0	14.245.970	100,00	71,79	1,88	30.100.340	1,27	42,53	BPKAD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	148,00	246.055.790	96,52%	41.327.140	1,0	42.817.400	1,0	41.641.360	100,00	97,25	1,97	82.968.500	1,33	33,72	BPKAD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	148,00	246.055.790	97,48%	41.738.864	1,0	46.777.400	1,0	44.773.320	100,00	95,72	1,97	86.512.184	1,33	35,16	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan eraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda, Raperbup, Perbup tentang APBD TA. 2022 dan DPA OPD TA. 2021	8,00	2.120.411.407	99,58%	359.530.590	1,0	388.658.500	1,0	386.160.900	100,00	99,36	2,00	745.691.490	24,95	35,17	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Raperda, Perda, Raperbup, Perbup tentang APBD-P TA. 2021 dan DPA OPD TA. 2021	8,00	2.030.914.943	97,30%	341.602.544	1,0	382.266.500	1,0	368.642.050	100,00	96,44	1,97	710.244.594	24,66	34,97	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku Perbup tentang Pedoman dan Teknis Penyusunan APBD	8,00	206.291.522	97,18%	52.061.100	1,0	216.789.800	1,0	213.697.632	100,00	98,57	1,97	265.758.732	24,65	128,8 3	BPKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya laporan penyerapan anggaran belanja daerah	96,00	1.781.647.495	76,13%	187.337.125	90,0	246.060.765	81,7	201.104.133	90,81	81,73	82,49	388.441.258	85,93	21,80	BPKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku Laporan Pengelolaan KASDA	20,00	676.829.517,00	73,05%	100.148.200	5,0	136.521.000	5,0	111.361.683	100,00	81,57	5,73	211.509.883	28,65	31,25	BPKAD
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,00	118.253.110			1,0	15.026.100	0,0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKAD

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Buku Rekapitulasi SPD dan Anggaran Kas	8,00	166.412.107	74,50%	26.714.425	2,0	33.451.345	2,0	24.697.250	100,00	73,83	2,75	51.411.675	34,31	30,89	BPKAD
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Administrasi / Pembayaran Gaji ASN Kab. Pringsewu	16,00	38.100.758	78,95%	6.481.000	4,0	9.030.400	4,0	7.357.000	100,00	81,47	4,79	13.838.000	29,93	36,32	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Buku Pungut Setor Pajak Pihak Ketiga	4,00	124.074.235	83,40%	22.297.500	1,0	13.832.620	1,0	12.032.700	100,00	86,99	1,83	34.330.200	45,85	27,67	BPKAD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Penerbitan dan Pengelolaan SP2D Secara Prima	4,00	177.114.484	83,05%	31.696.000	1,0	38.199.300	1,0	34.395.500	100,00	90,04	1,83	66.091.500	45,76	37,32	BPKAD
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4,00	480.863.293			1,0	-	1,0		100,00		1,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen LKPD dan Perda Pertanggungjawaban APBD	100,00	3.087.535.823	85,34%	386.908.361	100,0	253.382.600	81,0	205.306.458	81,00	81,03	81,85	592.214.819	81,85	19,18	BPKAD
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	32,00	232.050.008			8,0	-	0,0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4,00	232.050.001	73,56%	29.138.040	1,0	36.700.000	1,0	35.127.500	100,00	95,72	1,74	64.265.540	43,39	27,69	BPKAD
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku LKPD Kab. Pringsewu	28,00	1.528.002.847	84,68%	290.098.631	7,0	106.876.500	7,0	96.818.442	100,00	90,59	7,85	386.917.073	28,02	25,32	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD	8,00	165.089.654	93,18%	51.546.000	2,0	62.785.900	2,0	60.023.528	100,00	95,60	2,93	111.569.528	36,65	67,58	BPKAD
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	4,00	464.100.001	0,00%	0	1,0	-	1,0	-	100,00	0,00	1,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4,00	377.368.993	0,00%	0	1,0	-	1,0	-	100,00	0,00	1,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BA Monitoring dan Evaluasi LK SKPD	300,00	88.874.413	101,62 %	16.125.690	75,0	47.020.200	75,0	13.336.988	100,00	28,36	76,02	29.462.678	25,34	33,15	BPKAD

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersaluranya Belanja BTL (Hibah, Bansos, Bunga, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	100,00	775.441.385.201	82,78%	188.314.108.697	100,0	197.643.532.716	98,2	194.251.008.460	98,24	98,28	99,07	382.565.117.157	99,07	49,34	BPKAD
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4,00	400.000.001			1,0	-	0,0	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan	4,00	735.544.085.201	84,00%	183.078.638.516	1,0	189.113.198.900	1,0	189.112.780.900	100,00	100,00	1,84	372.191.419.416	46,00	50,60	BPKAD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Bantuan Keuangan Tidak Terduga	4,00	21.000.000.001	17,68%	574.708.004	1,0	3.000.000.000	1,0	355.882.328	100,00	11,86	1,18	930.590.332	29,42	4,43	BPKAD
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota ke Desa	4,00	18.497.300.001	80,72%	4.660.762.177	1,0	5.530.333.816	1,0	4.782.345.232	100,00	86,47	1,81	9.443.107.409	45,18	51,05	BPKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase penatausahaan aset daerah yang baik	94,50	4.257.203.402	44,40%	908.938.081	90,0	651.389.900	90,0	615.679.036	100,00	94,52	90,44	1.524.617.117	95,71	35,81	BPKAD
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	94,50	4.257.203.402	94,06%	908.938.081	90,0	651.389.900	90,0	615.679.036	100,00	94,52	90,94	1.524.617.117	96,23	35,81	BPKAD
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku penentuan harga dan jenis barang	4,00	490.347.177	99,21%	198.452.280	1,0	201.036.000	1,0	100.651.417,48	100,00	50,07	1,99	299.103.697	49,80	61,00	BPKAD
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Standart BMD dan Standart Kebutuhan BMD	4,00	209.939.163	0,00%	0	1,0	-	1,0	-	100,00	0,00	1,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Rencana Kebutuhan BMD	8,00	28.638.550	98,09%	4.603.350	2,0	7.370.000	2,0	-	100,00	0,00	2,98	4.603.350	37,26	16,07	BPKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Data BMD	8,00	34.805.182	87,87%	144.770.756	2,0	51.895.300	2,0	7.677.300	100,00	14,79	2,88	152.448.056	35,98	100,00	BPKAD
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah Pemda Bersertifikat	8,00	1.231.828.396	99,78%	366.956.170	2,0	325.330.100	2,0	146.158.051	100,00	44,93	3,00	513.114.221	37,47	41,65	BPKAD
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4,00	193.509.246	0	-	1,0	-	0,0	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	BPKAD
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Ketertiban administrasi Kekayaan daerah	16,00	649.112.592	96,19%	59.524.225	4,0	27.381.500	4,0	14.710.825	100,00	53,73	4,96	74.235.050	31,01	11,44	BPKAD
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang di Rekonsiliasi	16,00	151.162.015	6,75%	1.998.000	4,0	14.032.000	4,0	10.447.000	100,00	74,45	4,07	12.445.000	25,42	8,23	BPKAD

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8,00	193.509.247			2,0	-	2,0	-	100,00		2,00	-	25,00	0,00	BPKAD
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Kegiatan Monev	160,00	1.074.351.892	96,40%	132.633.300	40,0	24.345.000	40,0	9.008.680	100,00	37,00	40,96	141.641.980	25,60	13,18	BPKAD
	BAPPEDA																
	PERENCANAAN																
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			52.101.268.000		9.517.087.753	97,78	8.799.219.009		8.643.249.210		98,23	0,00	18.160.336.963		34,86	BAPPEDA
	PERENCANAAN			48.888.697.000	100	8.838.832.336	97,78	8.079.275.759		7.936.932.672		98,24	100,00	16.775.765.008		34,31	BAPPEDA
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip Bappeda	BB	27.580.611.000	A	4.933.098.398	BB	5.377.151.659	BB	5.285.454.299		98,29		10.218.552.697		37,05	BAPPEDA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersusun	100,00	127.172.000	100	26.625.000	100	24.168.000	100	23.627.800	100,00	97,76	200,00	50.252.800	200,00	39,52	BAPPEDA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	56.562.000	3	11.864.000	3	9.275.000	3	9.055.250	100,00	97,63	6,00	20.919.250	50,00	36,98	BAPPEDA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	30.320.000	100	6.318.000	2	6.395.000	2	6.314.400	100,00	98,74	102,00	12.632.400	1275,00	41,66	BAPPEDA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	40.290.000	39	8.443.000	3	8.498.000	3	8.258.150	100,00	97,18	42,00	16.701.150	350,00	41,45	BAPPEDA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100,00	23.686.240.000	100	4.302.468.065	100	4.458.318.359	100	4.408.486.707	100,00	98,88	200,00	8.710.954.772	200,00	36,78	BAPPEDA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168,00	19.233.933.000	39	3.785.306.165	39	3.970.510.359	39	3.936.335.807	100,00	99,14	78,00	7.721.641.972	46,43	40,15	BAPPEDA
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,00	2.631.924.000	2	246.350.000	1	245.468.000	1	231.452.400	100,00	94,29	3,00	477.802.400	75,00	18,15	BAPPEDA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	1.764.912.000	1	259.210.000	1	230.640.000	1	229.190.000	100,00	99,37	2,00	488.400.000	50,00	27,67	BAPPEDA

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,00	55.471.000	5	11.601.900	5	11.700.000	5	11.508.500	100,00	98,36	10,00	23.110.400	50,00	41,66	BAPPEDA
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi barang milik	100,00	30.817.000	100	6.490.000	100	6.500.000	100	6.330.000	100,00	97,38	200,00	12.820.000	200,00	41,60	BAPPEDA
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4,00	30.817.000	1	6.490.000	1	6.500.000	1	6.330.000	100,00	97,38	2,00	12.820.000	50,00	41,60	BAPPEDA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	95,00	211.393.000	68,93	26.250.000	95	37.500.000	95	35.900.000	100,00	95,73	163,93	62.150.000	172,56	29,40	BAPPEDA
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12,00	96.596.000	6	26.250.000	3	37.500.000	3	35.900.000	100,00	95,73	9,00	62.150.000	75,00	64,34	BAPPEDA
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	200,00	114.797.000	0	0	0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	1.794.923.000	94,02	288.902.451	95	478.325.300	94,5	458.881.885	99,47	95,94	188,52	747.784.336	198,44	41,66	BAPPEDA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	44.745.000	1	9.430.000	1	9.430.000	1	8.830.000	100,00	93,64	2,00	18.260.000	50,00	40,81	BAPPEDA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	86.289.000	1	12.500.000	1	45.700.000	1	41.165.000	100,00	90,08	2,00	53.665.000	25,00	62,19	BAPPEDA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	600.014.000	2	77.532.300	3	88.841.300	3	83.710.200	100,00	94,22	5,00	161.242.500	41,67	26,87	BAPPEDA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	153.015.000	1	29.385.000	1	26.870.000	1	25.762.000	100,00	95,88	2,00	55.147.000	50,00	36,04	BAPPEDA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,00	208.551.000	1	50.550.000	1	41.860.000	1	41.333.000	100,00	98,74	2,00	91.883.000	50,00	44,06	BAPPEDA

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232,00	702.309.000	58	109.505.151	88	265.624.000	86	258.081.685	97,73	97,16	144,00	367.586.836	62,07	52,34	BAPPEDA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan pada perangkat daerah	100,00	509.672.000	100	41.229.000	100	116.260.000	100	115.710.000	100,00	99,53	200,00	156.939.000	200,00	30,79	BAPPEDA
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	8,00	237.057.000	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	BAPPEDA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20,00	272.615.000	7	41.229.000	10	116.260.000	5	115.710.000	50,00	99,53	12,00	156.939.000	60,00	57,57	BAPPEDA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	395.980.000	100	104.468.532	100	114.000.000	100	110.633.872	100,00	97,05	200,00	215.102.404	200,00	54,32	BAPPEDA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	395.980.000	12	104.468.532	12	114.000.000	12	110.633.872	100,00	97,05	24,00	215.102.404	50,00	54,32	BAPPEDA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Secara Rutin	95,00	824.414.000	95	136.665.350	95	142.080.000	95	125.884.035	100,00	88,60	190,00	262.549.385	200,00	31,85	BAPPEDA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24,00	588.827.000	6	93.004.600	6	104.330.000	6	88.857.350	100,00	85,17	12,00	181.861.950	50,00	30,89	BAPPEDA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	152,00	188.176.000	38	33.841.000	38	27.850.000	38	27.384.000	100,00	98,33	76,00	61.225.000	50,00	32,54	BAPPEDA

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	47.411.000	1	9.819.750	1	10.000.000	1	9.642.685	100,00	96,43	2,00	19.462.435	50,00	41,05	BAPPEDA
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Indikator Kinerja PD yang Dievaluasi	100,00	4.978.195.000	97,5	1.114.315.040	97,78	841.583.500	78,29	815.772.077	80,06	96,93	175,79	1.930.087.117	175,79	38,77	BAPPEDA
		Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100,00	2.014.044.000	97,5	282.505.418	97,78	77.138.600	68,48	75.661.741	70,04	98,09	165,98	358.167.159	165,98	17,78	BAPPEDA
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah yang Disusun	44,00	4.008.417.000	100,00	949.834.240	100	752.321.000	92,31	727.923.309	92,31	96,76	192,31	1.677.757.549	437,07	41,86	BAPPEDA
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4,00	237.057.000	1	58.473.750	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	58.473.750	25,00	24,67	BAPPEDA
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4,00	280.158.000	2	201.059.380	1	43.645.800	1	42.329.800	100,00	96,98	3,00	243.389.180	75,00	86,88	BAPPEDA
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	112,00	193.956.000	28	40.623.000	28	36.625.000	28	36.416.000	100,00	99,43	56,00	77.039.000	50,00	39,72	BAPPEDA
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4,00	646.519.000	1	75.450.500	2	110.811.000	2	106.788.000	100,00	96,37	3,00	182.238.500	75,00	28,19	BAPPEDA
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi Oleh Kecamatan	532,00	280.158.000	133	45.953.810	133	36.037.200	133	35.537.200	100,00	98,61	266,00	81.491.010	50,00	29,09	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJMD/RKPD)	24,00	2.370.569.000	7	528.273.800	8	525.202.000	8	506.852.309	100,00	96,51	15,00	1.035.126.109	62,50	43,67	BAPPEDA

	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100,00	323.259.000	100	107.093.600	0	-	0	-	0,00	0,00	100,00	107.093.600	100,00	33,13	BAPPEDA
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4,00	323.259.000	1	107.093.600	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	107.093.600	25,00	33,13	BAPPEDA
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase laporan evaluasi pembangunan daerah pada perangkat daerah	95,00	2.014.044.000	95	282.505.418	95	77.138.600	95	75.661.741	100,00	98,09	95,00	358.167.159	100,00	17,78	BAPPEDA
	Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8,00	246.893.000	1	10.289.000	1	-	0	-	0,00	0,00	1,00	10.289.000	12,50	4,17	BAPPEDA
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24,00	1.767.151.000	5	272.216.418	5	77.138.600	5	75.661.741	100,00	98,09	10,00	347.878.159	41,67	19,69	BAPPEDA
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100,00	646.519.000	100	57.387.200	100	89.262.500	100	87.848.768	100,00	98,42	200,00	145.235.968	200,00	22,46	BAPPEDA
	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4,00	387.911.000	1	44.966.400	1	82.165.500	1	81.080.768	100,00	98,68	2,00	126.047.168	50,00	32,49	BAPPEDA
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4,00	258.608.000	1	12.420.800	1	7.097.000	1	6.768.000	100,00	95,36	2,00	19.188.800	50,00	7,42	BAPPEDA

	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	98,00	7.255.586.000	97,6	1.417.410.560	97,8	995.591.700	97,80	978.327.077	100,00	98,27	195,40	2.395.737.637	199,38	33,02	BAPPEDA
		Capaian Sasaran Perangkat Daerah	98,00	7.060.261.000	97,6	1.091.502.920	97,8	787.810.300	97,80	781.717.478	100,00	99,23	195,40	1.873.220.398	199,38	26,53	BAPPEDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,00	334.425.000	99,49	70.321.400	97,8	65.719.000	97,79	64.593.025	99,99	98,29	197,28	134.914.425	201,31	40,34	BAPPEDA
		Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	98,00	4.847.511.000	92,96	695.670.873	97,8	444.688.700	97,80	441.574.925	100,00	99,30	190,76	1.137.245.798	194,65	23,46	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	64.707.000	1	14.266.000	1	12.389.000	1	12.152.625	100,00	98,09	2,00	26.418.625	50,00	40,83	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00	47.221.000	1	11.215.400	1	9.935.000	1	9.670.000	100,00	97,33	2,00	20.885.400	50,00	44,23	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4,00	51.911.000	1	9.592.600	1	9.175.000	1	8.917.350	100,00	97,19	2,00	18.509.950	50,00	35,66	BAPPEDA

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	14,00	2.645.003.000	4	485.226.493	4	379.042.000	4	376.669.425	100,00	99,37	8,00	861.895.918	57,14	32,59	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1,00	62.562.000	1	14.030.500	1	12.474.000	1	12.381.000	100,00	99,25	2,00	26.411.500	200,00	42,22	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16,00	54.012.000	1	12.127.000	1	10.108.000	1	10.012.500	100,00	99,06	2,00	22.139.500	12,50	40,99	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4,00	54.012.000	1	9.089.900	1	11.638.000	1	11.459.550	100,00	98,47	2,00	20.549.450	50,00	38,05	BAPPEDA
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	21,00	2.202.508.000	4	210.444.380	4	65.646.700	4	64.905.500	100,00	98,87	8,00	275.349.880	38,10	12,50	BAPPEDA

	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	98,00	2.244.925.000	71,39	361.882.198	97,8	260.990.000	97,80	257.310.045	100,00	98,59	169,19	619.192.243	172,64	27,58	BAPPEDA
		Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	98,00	1.214.594.000	98,15	212.938.137	97,8	302.867.300	97,80	300.317.660	100,00	99,16	195,95	513.255.797	199,95	42,26	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	1.241.229.000	2	223.054.898	1	190.990.000	1	188.853.295	100,00	98,88	3,00	411.908.193	75,00	33,19	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,00	119.390.000	1	4.317.000	1	3.000.000	1	2.864.500	100,00	95,48	2,00	7.181.500	12,50	6,02	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16,00	121.761.000	1	7.275.500	1	3.000.000	1	2.693.500	100,00	89,78	2,00	9.969.000	12,50	8,19	BAPPEDA

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4,00	1.090.462.000	1	205.472.137	1	294.867.300	1	292.525.660	100,00	99,21	2,00	497.997.797	50,00	45,67	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4,00	523.945.000	1	116.385.300	1	50.000.000	1	49.663.750	100,00	99,33	2,00	166.049.050	50,00	31,69	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,00	119.300.000	1	5.483.500	1	7.000.000	1	6.502.500	100,00	92,89	2,00	11.986.000	16,67	10,05	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12,00	119.300.000	1	5.366.000	1	7.000.000	1	6.732.500	100,00	96,18	2,00	12.098.500	16,67	10,14	BAPPEDA
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4,00	124.132.000	1	7.466.000	1	8.000.000	1	7.792.000	100,00	97,40	2,00	15.258.000	50,00	12,29	BAPPEDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,00	4.676.236.000	98,24	985.206.962	97,8	668.882.700	97,80	656.424.007	100,00	98,14	196,04	1.641.630.969	200,04	35,11	BAPPEDA

		Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98,00	998.156.000	97,81	182.893.910	97,8	40.254.300	97,80	39.824.893	100,00	98,93	195,61	222.718.803	199,60	22,31	BAPPEDA
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,00	1.808.587.000	3	34.769.177	3	139.968.000	1	138.921.221	33,33	99,25	4,00	173.690.398	33,33	9,60	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12,00	31.892.000	1	7.053.400	1	7.399.000	1	7.184.820	100,00	97,11	2,00	14.238.220	16,67	44,65	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	12,00	35.831.000	1	7.455.200	1	8.348.000	1	8.264.750	100,00	99,00	2,00	15.719.950	16,67	43,87	BAPPEDA
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1,00	37.635.000	1	7.666.200	1	7.906.000	1	7.836.800	100,00	99,12	2,00	15.503.000	200,00	41,19	BAPPEDA

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28,00	2.731.029.000	4	920.986.785	4	497.868.700	4	487.201.016	100,00	97,86	8,00	1.408.187.801	28,57	51,56	BAPPEDA
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28,00	31.262.000	1	6.610.100	1	7.253.000	1	6.963.650	100,00	96,01	2,00	13.573.750	7,14	43,42	BAPPEDA
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28,00	37.635.000	1	8.332.300	1	8.046.000	1	7.888.550	100,00	98,04	2,00	16.220.850	7,14	43,10	BAPPEDA
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	28,00	960.521.000	7	175.227.710	1	32.348.300	1	31.988.093	100,00	98,89	8,00	207.215.803	28,57	21,57	BAPPEDA
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.212.571.000		678.255.417		719.943.250		706.316.538		98,11		1.384.571.955		43,10	BAPPEDA
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Perangkat Daerah	100,00	3.212.571.000	100	678.255.417	100	719.943.250	100,00	706.316.538	100,00	98,11	200,00	1.384.571.955	200,00	43,10	BAPPEDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase laporan data Kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	4,00	237.057.000	1	52.984.500	100	134.230.250	100	133.235.503	100,00	99,26	101,00	186.220.003	2525,03	78,55	BAPPEDA

	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4,00	237.057.000	1	52.984.500	2	134.230.250	2	133.235.503	100,00	99,26	3,00	186.220.003	75,00	78,55	BAPPEDA
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Jurnal Kelitbangan yang diterbitkan/ dipublikasikan	100,00	2.975.514.000	8	625.270.917	100	585.713.000	100,00	573.081.035	100,00	97,84	108,00	1.198.351.952	108,00	40,27	BAPPEDA
	Penelitian, Pengembangan dan Prekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	12,00	695.501.000	1	158.833.706	1	77.635.000	1	75.951.483	100,00	97,83	2,00	234.785.189	16,67	33,76	BAPPEDA
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8,00	1.106.989.000	2	216.054.022	1	192.931.000	1	190.616.594	100,00	98,80	3,00	406.670.616	37,50	36,74	BAPPEDA
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	84,00	299.709.000	3	67.999.897	21	64.491.000	21	61.003.000	100,00	94,59	24,00	129.002.897	28,57	43,04	BAPPEDA
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8,00	693.249.000	1	147.199.292	1	202.468.250	1	197.993.958	100,00	97,79	2,00	345.193.250	25,00	49,79	BAPPEDA

	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4,00	180.066.000	1	35.184.000	1	48.187.750	1	47.516.000	100,00	98,61	2,00	82.700.000	50,00	45,93	BAPPEDA
	INSPEKTORAT																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	BB	50.001.633.000	BB	9.974.600.252	BB	10.407.211.085	BB	10.292.972.404		98,90		20.267.572.656		40,53	INSPEKTORAT
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	206.696.000	100	26.941.000	100	21.995.000	100,00	21.944.000	100,00	99,77	200,00	48.885.000	200,00	23,65	INSPEKTORAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	44.804.000	2	5.817.000	2	5.820.000	2,00	5.820.000	100,00	100,00	4,00	11.637.000	50,00	25,97	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16,00	59.492.000	4	11.735.000	4	5.775.000	4,00	5.754.000	100,00	99,64	8,00	17.489.000	50,00	29,40	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	29.153.000	4	3.414.000	4	4.100.000	4,00	4.080.000	100,00	99,51	8,00	7.494.000	50,00	25,71	INSPEKTORAT
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,00	73.247.000	4	5.975.000	4	6.300.000	4,00	6.290.000	100,00	99,84	8,00	12.265.000	50,00	16,74	INSPEKTORAT

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	100,00	42.528.981.000	100	8.370.153.167	100	9.152.448.365	100,00	9.092.869.934	100,00	99,35	200,00	17.463.023.101	200,00	41,06	INSPEKTORAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3248,00	41.753.022.000	812	8.216.577.057	812	9.001.332.365	812,00	8.949.918.934	100,00	99,43	1624,00	17.166.495.991	50,00	41,11	INSPEKTORAT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,00	733.293.000	1	148.470.000	1	147.400.000	1,00	139.240.000	100,00	94,46	2,00	287.710.000	50,00	39,24	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	42.666.000	1	5.106.110	1	3.716.000	1,00	3.711.000	100,00	99,87	2,00	8.817.110	50,00	20,67	INSPEKTORAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,00	1.137.873.000	50	102.920.128	0	-	0,00	-	0,00	0,00	50,00	102.920.128	25,00	9,04	INSPEKTORAT
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200,00	1.137.873.000	50	102.920.128	0	-	0,00	-	0,00	0,00	50,00	102.920.128	25,00	9,04	INSPEKTORAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	3.051.084.000	98,96	925.504.371	100	798.898.220	91,38	791.226.161	91,38	99,04	190,34	1.716.730.532	190,34	56,27	INSPEKTORAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,00	62.028.000	2	20.364.000	2	5.990.000	2,00	5.971.000	100,00	99,68	4,00	26.335.000	50,00	42,46	INSPEKTORAT

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24,00	253.936.000	6	207.200.000	6	52.727.420	6,00	52.680.000	100,00	99,91	12,00	259.880.000	50,00	102,34	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	212,00	880.344.000	53	165.186.800	53	195.830.000	53,00	193.621.650	100,00	98,87	106,00	358.808.450	50,00	40,76	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28,00	150.527.000	7	37.980.925	7	73.573.800	7,00	72.500.450	100,00	98,54	14,00	110.481.375	50,00	73,40	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200,00	117.770.000	295	21.745.000	300	24.840.000	263,00	20.615.000	87,67	82,99	558,00	42.360.000	46,50	35,97	INSPEKTOR AT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,00	1.586.479.000	20	473.027.646	20	445.937.000	20,00	445.838.061	100,00	99,98	40,00	918.865.707	50,00	57,92	INSPEKTOR AT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	395.430.000	100	14.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	100,00	14.750.000	100,00	3,73	INSPEKTORAT
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	36,00	395.430.000	9	14.750.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	9,00	14.750.000	25,00	3,73	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	842.501.000	100	149.742.839	100	155.119.500	100,00	145.973.078	100,00	94,10	200,00	295.715.917	200,00	35,10	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	617.296.000	12	85.552.839	12	88.239.500	12,00	79.093.078	100,00	89,63	24,00	164.645.917	50,00	26,67	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	356,00	225.205.000	89	64.190.000	89	66.880.000	89,00	66.880.000	100,00	100,00	178,00	131.070.000	50,00	58,20	INSPEKTOR AT

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.234.498.000	100	384.588.747	100	278.750.000	100,00	240.959.231	100,00	86,44	200,00	625.547.978	200,00	28,00	INSPEKTOR RAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4,00	42.196.000	1	7.090.000	1	7.900.000	1,00	6.408.300	100,00	81,12	2,00	13.498.300	50,00	31,99	INSPEKTOR AT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44,00	1.452.685.000	11	234.956.790	11	270.850.000	11,00	234.550.931	100,00	86,60	22,00	469.507.721	50,00	32,32	INSPEKTOR AT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4,00	99.564.000	1	142.541.957	0	-	0,00	-			1,00	142.541.957	25,00	143,17	INSPEKTOR AT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	640.053.000	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	INSPEKTOR AT
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100,00	13.613.509.000	100	1.825.402.308	100	1.933.264.800	100,00	1.864.750.450	100,00	96,46	200,00	3.690.152.758	200,00	27,11	INSPEKTOR RAT
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja	100,00	11.076.256.000	100	1.412.157.500	100	1.463.434.800	100,00	1.417.719.450	100,00	96,88	200,00	2.829.876.950	200,00	25,55	INSPEKTOR AT
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	328,00	4.807.016.000	82	929.977.500	82	961.797.300	82,00	955.211.950	100,00	99,32	164,00	1.885.189.450	50,00	39,22	INSPEKTOR AT

	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40,00	1.253.116.000	10	15.240.000	10	-	0,00	-	0,00	0,00	10,00	15.240.000	25,00	1,22	INSPEKTOR AT
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	328,00	5.016.124.000	82	466.940.000	82	501.637.500	82,00	462.507.500	100,00	92,20	164,00	929.447.500	50,00	18,53	INSPEKTOR AT
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP	100,00	2.537.253.000	100	413.244.808	100	469.830.000	100,00	447.031.000	100,00	95,15	200,00	860.275.808	100,00	33,91	INSPEKTOR RAT
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4,00	1.139.992.000	1	64.464.808	1	68.275.000	1,00	68.240.000	100,00	99,95	2,00	132.704.808	50,00	11,64	INSPEKTOR AT
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,00	1.397.261.000	4	348.780.000	4	401.555.000	4,00	378.791.000	100,00	94,33	8,00	727.571.000	50,00	52,07	INSPEKTOR AT
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100,00	6.671.130.000	100	1.550.913.500	100	890.115.000	100,00	886.358.750	100,00	99,58	200,00	2.437.272.250	200,00	36,53	INSPEKTOR RAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100,00	5.595.947.000	100	1.316.729.500	100	784.815.000	100,00	781.058.750	100,00	99,52	200,00	2.097.788.250	200,00	37,49	INSPEKTOR RAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16,00	4.520.764.000	4	959.629.500	4	469.490.000	4,00	466.985.000	100,00	99,47	8,00	1.426.614.500	50,00	31,56	INSPEKTOR AT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12,00	1.075.183.000	3	357.100.000	3	315.325.000	3,00	314.073.750	100,00	99,60	6,00	671.173.750	50,00	62,42	INSPEKTOR AT

	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Meningkatkan Pendampingan dan Asistensi	8,00	1.075.183.000	3	234.184.000	2	105.300.000	2,00	105.300.000	100,00	100,00	5,00	339.484.000	62,50	31,57	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8,00	1.075.183.000	2	234.184.000	2	105.300.000	2,00	105.300.000	100,00	100,00	4,00	339.484.000	50,00	31,57	INSPEKTORAT
	SEKRETARIAT DAERAH																
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah	25,00	99.564.000	15	11.264.975	0,0	-	0	-	0,00	0,00	15,00	11.264.975	60,00	11,31	Sekretariat Daerah
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan tanah	25,00	99.564.000	15	11.264.975	0,0	-	0	-	0,00	0,00	15,00	11.264.975	60,00	11,31	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	4,00	33.188.000	0	-	0,0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah sebagai dasar pelayanan informasi nilai tanah dan pelayanan pertanahan lainnya	4,00	33.188.000	0	-	0,0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4,00	33.188.000	1	11.264.975	0,0	-	0	-	0,00	#DIV/0!	1,00	11.264.975	25,00	33,94	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	B	146.832.783.000	BB	28.346.114.963	B	31.906.279.154	BB	30.402.083.868	0,00	95,29		58.748.198.831		40,01	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pelaporan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	85,00	247.243.000	85	99.917.234	85	106.269.000	90	103.955.159	105,88	97,82	175,00	203.872.393	205,88	82,46	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	51.133.000	1	19.160.224	2,00	26.541.000	1	25.616.529		96,52		44.776.753		87,57	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	33.188.000	0	6.870.750	1,00	6.005.000	1	5.698.500	100,00	94,90	1,00	12.569.250	25,00	37,87	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,00	49.988.000	1	5.548.650	1,00	6.005.000	1	5.865.750	100,00	97,68	2,00	11.414.400	50,00	22,83	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	33.188.000	1	4.662.400	1,00	5.384.000	1	5.338.500	100,00	99,15	2,00	10.000.900	50,00	30,13	Sekretariat Daerah
	Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4,00	33.188.000	0	4.646.000	1,00	5.384.000	1	5.227.500	100,00	97,09	1,00	9.873.500	25,00	29,75	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	18.206.000	1	3.267.500	1,00	3.755.000	1	3.736.500	100,00	99,51	2,00	7.004.000	50,00	38,47	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	28.352.000	0	55.761.710	1,00	53.195.000	1	52.471.880	100,00	98,64	1,00	108.233.590	25,00	381,75	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan keuangan	100,00	78.627.579.000	1	16.340.589.771	100	17.280.893.269	75	16.712.076.857	75,00	96,71	76,00	33.052.666.628	76,00	42,04	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123,00	73.274.620.000	207	12.331.788.571	207,00	13.304.909.269	207	12.937.064.357	100,00	97,24	414,00	25.268.852.928	336,59	34,49	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,00	5.251.163.000	1	3.989.474.600	1,00	3.960.110.000	1	3.760.320.000	100,00	94,95	2,00	7.749.794.600	5,00	147,58	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	101.796.000	1	19.326.600	1,00	15.874.000	1	14.692.500	100,00	92,56	2,00	34.019.100	50,00	33,42	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang mendapat jaminan pengamanan	100,00	2.367.250.000	50	385.648.264	100	367.000.000	100	346.980.683	100,00	94,55	150,00	732.628.947	150,00	30,95	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40,00	1.137.873.000	10	385.648.264	10,00	367.000.000	10	346.980.683	100,00	94,55	20,00	732.628.947	50,00	64,39	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	32,00	590.983.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	32,00	638.394.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	100,00	960.549.000	55	223.252.000	82,00	19.000.000	82	18.105.000	100,00	95,29	137,00	241.357.000	137,00	25,13	Sekretariat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	24,00	68.746.000	0	64.252.000	6,00	19.000.000	6	18.105.000	100,00	95,29	6,00	82.357.000	25,00	119,80	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	180,00	165.470.000		-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	40,00	80.599.000	0	-	0,00	-	0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200,00	189.646.000	0	89.000.000	20,00	-	0	-	0,00	#DIV/0!		89.000.000		46,93	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	50,00	204.338.000	0	-	0,00	-	0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	260,00	251.750.000	0	70.000.000	65,00	-	0	-	0,00	#DIV/0!	0,00	70.000.000	0,00	27,81	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah pada Sekretariat Daerah	80,00	94.823.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Distribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	32,00	94.823.000	0	-	0,00	-	0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan paket pelayanan administrasi umum	100,00	11.278.647.000	75,00%	3.047.286.770	80,00	1.939.347.828	80	1.874.441.400	100,00	96,65	80,75	4.921.728.170	80,75	43,64	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	16,00	909.421.000	15	241.280.250	4,00	157.930.000	4	144.887.000	100,00	91,74	19,00	386.167.250	118,75	42,46	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20,00	2.336.812.000	24	919.987.875		-	-	-	100,00			919.987.875		39,37	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4,00	237.057.000	1	87.129.750	1,00	222.465.928	-	206.090.000		92,64		293.219.750		123,69	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,00	2.760.212.000	4	433.438.988	5,00	358.758.900	-	330.939.400		92,25		764.378.388		27,69	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	12,00	1.854.027.000	36	440.812.600	3,00	245.669.000	-	238.001.000		96,88		678.813.600		36,61	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12,00	94.823.000	0	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00		-		0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	20,00	47.411.000	0	-		-	0	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3476,00	2.910.874.000	254	924.637.307	869,00	954.524.000	869	954.524.000	100,00	0,00	1123,00	1.879.161.307	32,31	64,56	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60,00	80.599.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	40,00	47.411.000	0	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100,00	2.698.182.000	54,00%	754.941.271	85,0	4.832.010.000	0,85	4.639.490.000	1,00		1,39	5.394.431.271	1,39	199,93	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	13,00	449.697.000	0	-	0,0		0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8,00	449.697.000	3	330.600.000	6,0	4.780.800.000	6	4.594.800.000			9,00	4.925.400.000	112,50	1095,27	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	8,00	449.697.000	3	47.100.000	1,0	39.600.000	1	38.390.000	0,00		4,00	85.490.000	50,00	19,01	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32,00	449.697.000	8	377.241.271	4,0	11.610.000	4	6.300.000			12,00	383.541.271	37,50	85,29	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4,00	449.697.000	0	-	0,0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,00	449.697.000	0	-	0,0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	7.220.041.000	75	1.418.372.770	100	1.373.550.600	100	1.243.897.177	100,00	90,56	175,00	2.662.269.947	175,00	36,87	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	48,00	3.539.259.000	12	579.834.420	12,0	639.000.600	12	588.987.227		92,17		1.168.821.647		33,02	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	48,00	3.633.371.000	14	838.538.350	14,0	734.550.000	12	654.909.950	85,71	89,16	26,00	1.493.448.300	54,17	41,10	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	40,00	47.411.000	0	-		-	-	0,00	0,00		-		0,00	Sekretariat Daerah	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100,00	16.881.992.000	75%	1.942.980.705	100,0	2.222.436.000	100	1.778.695.934	100,00	80,03	100,75	3.721.676.639	100,75	22,05	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dpelihara dan di bayarkan pajaknya	8,00	928.789.000	2	302.049.673	2,0	94.670.000	2	88.593.440	100,00	93,58	4,00	390.643.113	50,00	42,06	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	920,00	13.360.872.000	113	1.059.160.989	230,0	1.667.640.000	85	1.271.120.373	36,96	76,22	198,00	2.330.281.362	21,52	17,44	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	1000,00	237.057.000	3	38.859.000	3,0	25.040.000	1	9.935.000		39,68		48.794.000		20,58	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	184,00	568.415.000	46	148.560.978	46,0	117.550.000	23	104.260.121	50,00	88,69	69,00	252.821.099	37,50	44,48	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	4,00	720.103.000	21	244.685.065	1,0	212.336.000	1	211.685.000	100,00	99,69	22,00	456.370.065	550,00	63,38	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4,00	165.940.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara/rehabilitasi	20,00	900.816.000	5	149.665.000	5,0	105.200.000	2	93.102.000	40,00	0,00	7,00	242.767.000	35,00	26,95	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	3.564.322.000	75%	678.684.806	100,0	783.628.457	100	774.958.546	100,00	98,89	100,75	1.453.643.352	100,75	40,78	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	2.582.907.000	0	-	0,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	531.007.000	2	46.884.806	2,0	20.250.000	-	18.076.000	-	89,26	-	64.960.806	-	12,23	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Medical CheckUp Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	379.291.000	0	45.000.000	2,0	175.500.000	-	169.004.089	-	96,30	-	214.004.089	-	56,42	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	71.117.000	0	586.800.000	2,0	587.878.457	-	587.878.457	-	100,00	-	1.174.678.457	-	1651,75	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100,00	47.411.000	0	-	0,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	12,00	47.411.000	0	-	0,0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat Daerah

	Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan rumah tangga KDH, WKDH dan Sekretariat	100,00	16.153.335.000	75	1.972.284.153	100	1.826.467.000	100%	1.768.379.809	1,00	96,82	76,00	3.740.663.962	76,00	23,16	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang di sediakan	24,00	8.119.132.000	0	1.251.090.853	6,0	1.079.982.000	0	1.072.281.609		99,29		2.323.372.462		28,62	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang di sediakan	24,00	4.952.464.000	0	-	0,0		-	-	0,00	0,00		-		0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di sediakan	304,00	3.081.739.000	0	721.193.300	76,0	746.485.000	-	696.098.200		93,25		1.417.291.500		45,99	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase organisasi yang telah dilakukan penataan	100,00	3.362.249.000	100	676.579.928	100	483.707.000	100	474.871.411	100,00	98,17	200,00	1.151.451.339	200,00	34,25	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16,00	1.456.469.000	4	275.791.576	4,0	139.440.000	4	137.846.057	100,00	98,86	8,00	413.637.633	50,00	28,40	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12,00	934.647.000	3	159.184.298	3,0	105.881.500	3	103.026.302		97,30		262.210.600		28,05	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4,00	308.786.000	1	108.881.674	1,0	103.230.500	1	101.748.163		98,56		210.629.837		68,21	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8,00	87.675.000	2	35.810.300	2,0	15.384.000	2	13.924.300		90,51		49.734.600		56,73	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	8,00	574.672.000	2	96.912.080	2,0	119.771.000	2	118.326.589		98,79		215.238.669		37,45	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	95,00	3.329.160.000	80,00	805.577.291	95	671.970.000	95	666.231.892	100,00	99,15	175,00	1.471.809.183	184,21	44,21	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	96,00	1.175.124.000	0	345.107.391	24,0	310.456.900	24	309.041.967	100,00	99,54	24,00	654.149.358	25,00	55,67	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	96,00	925.598.000	0	267.813.500	24,0	187.682.000	24	183.723.250	100,00	97,89	24,00	451.536.750	25,00	48,78	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	64,00	1.228.438.000	0	192.656.400	24,0	173.831.100	16	173.466.675	66,67	99,79	16,00	366.123.075	25,00	29,80	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	75,00	58.191.570.000	75	9.490.166.194	75	8.427.680.000	80	6.006.014.626	106,67	71,27	155,00	15.496.180.820	206,67	26,63	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan administrasi tata pemerintahan	80,00	3.432.564.000	80	616.811.217	80	488.874.000	80	469.175.286	100,00	95,97	160,00	1.085.986.503	200,00	31,64	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8,00	1.160.597.000	2	219.544.467	2,0	196.723.000	2	182.716.560		92,88		402.261.027		34,66	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4,00	767.270.000	1	127.271.925	1,0	81.512.000	1	77.921.019	100,00	95,59	2,00	205.192.944	50,00	26,74	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12,00	1.504.697.000	0	269.994.825	3,0	210.639.000	3	208.537.707	100,00	99,00	3,00	478.532.532	25,00	31,80	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	90,00	49.499.846.000	57	7.865.809.881	80,0	7.087.393.000	80	4.724.305.820	100,00	66,66	137,00	12.590.115.701	152,22	25,43	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	39,00	44.995.765.000	7	7.544.845.816	3,0	6.711.053.000	3	4.437.679.000		66,12		11.982.524.816		26,63	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11,00	1.896.455.000	0	-			0	-	0,00	0,00	0,00	-		0,00	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Keperpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4,00	1.659.398.000	1	320.964.065	2,0	376.340.000	2	286.626.820		76,16		607.590.885		36,62	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerjasama antar Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat	400,00	474.114.000	0	-	0,0	-	-			0,00	0,00	-		0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah	400,00	474.114.000	0		0,0	-	-			0,00	0,00	-		0,00	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase ketersediaan dokumen fasilitasi dan kordinasi hukum	70,00	4.756.570.000	60%	925.684.386	100,0	799.149.000	100	761.559.020		95,30		1.687.243.406		35,47	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang disusun	2124,00	2.419.718.000	531	264.173.457	531,0	275.556.000	531	261.490.404		94,90		525.663.861		21,72	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	40,00	1.374.138.000	1	373.695.179		242.679.000	-	231.759.070		95,50		605.454.249		44,06	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di dokumentasikan	2124,00	962.714.000	531	287.815.750	531,0	52.264.000	531	268.309.546		513,37		556.125.296		57,77	Sekretariat Daerah
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kerjasama daerah	100,00	502.590.000	75%	81.860.710	100	52.264.000	100	50.974.500	100,00	97,53	100,75	132.835.210	100,75	26,43	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	4,00	167.530.000	10	81.860.710	10,0	52.264.000	10	50.974.500	100,00	97,53	20,00	132.835.210	500,00	79,29	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Kerjasama luar negeri	4,00	167.530.000	0	-	0,0	-	0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	4,00	167.530.000	0	-	0,0	-	0		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaku perekonomian dan pembangunan yang taat kebijakan	80,00	11.379.335.000	80	2.162.590.855	65,0	1.516.439.000	65	1.463.226.144	100,00	96,49	145,00	3.625.816.999	181,25	31,86	Sekretariat Daerah
		Persentase kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100,00		100		95,0		95		100,00	0,00	195,00		195,00		
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan perekonomian	75,00	4.083.543.000	75	749.525.826	75	529.447.000	75	500.166.404	100,00	94,47	150,00	1.249.692.230	200,00	30,60	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	14,00	1.916.842.000	7	379.593.774	4,0	237.196.000	4	222.041.481	100,00	93,61	11,00	601.635.255	78,57	31,39	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	20,00	836.337.000	5	181.579.152	4,0	162.377.000	4	160.819.763	100,00	99,04	9,00	342.398.915	45,00	40,94	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	12,00	382.136.000	6	188.352.900	8,0	129.874.000	4	117.305.160	50,00	90,32	10,00	305.658.060	83,33	79,99	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12,00	474.114.000	0	-	0,0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	12,00	474.114.000	0	-	0,0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan pembangunan	100,00	2.531.039.000	90%	488.144.233	90	351.900.000	100	334.408.601	111,11	95,03	100,90	822.552.834	100,90	32,50	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	8,00	353.487.000	2	72.357.500	2,0	97.949.000	2	91.089.579	100,00	93,00	4,00	163.447.079	50,00	46,24	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24,00	1.831.430.000	4	168.460.821	4,0	139.856.000	4	129.990.817	100,00	92,95	8,00	298.451.638	33,33	16,30	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	346.122.000	4	247.325.912	4,0	114.095.000	4	113.328.205	100,00	99,33	8,00	360.654.117	50,00	104,20	Sekretariat Daerah
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100,00	4.063.245.000	85%	731.729.496	90,0	504.290.000	0,9	501.924.842	1,00	99,53	1,75	1.233.654.338	1,75	30,36	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48,00	373.507.000	12	48.399.050	12,0	49.443.400	12	49.170.085	100,00	99,45	24,00	97.569.135	50,00	26,12	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	48,00	2.850.071.000	12	510.283.346	12,0	382.078.600	12	380.379.059	100,00	99,56	24,00	890.662.405	50,00	31,25	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1200,00	839.667.000	300	173.047.100	100,0	72.768.000	100	72.375.698	0,00	99,46		245.422.798		29,23	Sekretariat Daerah
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan kebijakan Sumber daya alam	80,00	701.508.000	0,8	193.191.300	80	130.802.000	80	126.726.297	100,00	96,88	80,80	319.917.597	101,00	45,60	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	284.468.000	1	112.175.900	1,0	70.168.000	1	68.479.017		97,59		180.654.917		63,51	Sekretariat Daerah

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	4,00	85.160.000	0	-	0,0	-	0		0,00	0,00		-		0,00	Sekretariat Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan	12,00	331.880.000	1	81.015.400	3,0	60.634.000	3	58.247.280	100,00	96,06	4,00	139.262.680	33,33	41,96	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DEWAN																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	133.487.604.99 6		32.238.359.10 5	BB	31.688.303.39 5	BB	31.326.354.069		98,86		63.564.713.17 4		47,62	Sekretariat Dewan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumentasi perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,00	531.340.572	10	18.494.100	10	17.906.336	10	17.028.200	100,00	95,10	20,00	35.522.300	50,00	6,69	Sekretariat Dewan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16,00	54.394.856	4	11.993.500	4	11.405.000	4	10.721.100	100,00	94,00	8,00	22.714.600	50,00	41,76	Sekretariat Dewan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,00	476.945.716	6	6.500.600	6	6.501.336	6	6.307.100	100,00	97,01	12,00	12.807.700	50,00	2,69	Sekretariat Dewan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan administrasi keuangan yg akuntabel	288,00	16.186.686.987	72	3.714.658.755	72	3.919.586.931	69	3.790.709.977	95,83	96,71	141,00	7.505.368.732	48,96	46,37	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	188,00	14.494.089.952	47	3.349.558.255	47	3.536.349.181	47	3.416.245.177	100,00	96,60	94,00	6.765.803.432	50,00	46,68	Sekretariat Dewan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan & Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	48,00	1.622.150.670	12	349.400.000	12	368.020.000	9	360.220.000	75,00	97,88	21,00	709.620.000	43,75	43,75	Sekretariat Dewan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD & Laporan Hasil Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	25.768.865	1	5.700.900	1	5.717.750	1	5.219.600	100,00	91,29	2,00	10.920.500	50,00	42,38	Sekretariat Dewan

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	48,00	44.677.500	12	9.999.600	12	9.500.000	12	9.025.200	100,00	95,00	24,00	19.024.800	50,00	42,58	Sekretariat Dewan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang baik	100,00	737.178.750	25	255.000.000	25	349.829.000	25	348.515.888	100,00	99,62	50,00	603.515.888	50,00	81,87	Sekretariat Dewan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas & Fungsi yang mengikuti pendidikan & Pelatihan	100,00	737.178.750	25	255.000.000	25	349.829.000	25	348.515.888	100,00	99,62	50,00	603.515.888	50,00	81,87	Sekretariat Dewan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3224,00	10.697.967.731	698	3.606.164.410	806	3.488.314.880	804,00	3.433.384.487	99,75	98,43	1502,00	7.039.548.897	46,59	65,80	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88,00	177.593.063	21	87.191.300	22	95.496.380	22,00	93.609.500	100,00	98,02	43,00	180.800.800	48,86	101,81	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12,00	2.076.163.425	3	892.350.155	3	212.170.000	3	205.919.543	100,00	97,05	6,00	1.098.269.698	50,00	52,90	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4,00	343.273.540	1	74.489.000	1	91.821.000	1	86.330.200	100,00	94,02	2,00	160.819.200	50,00	46,85	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	1.429.505.088	1	298.559.600	1	339.583.500	1	322.913.800	100,00	95,09	2,00	621.473.400	50,00	43,47	Sekretariat Dewan

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak danPenggandaan yang disediakan	12,00	1.192.277.838	3	249.542.100	3	354.625.000	3	336.238.616	100,00	94,82	6,00	585.780.716	50,00	49,13	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Per-UU yang disediakan	2976,00	3.703.764.750	637	1.187.775.000	744	1.375.705.000	744	1.374.820.940	100,00	99,94	1381,00	2.562.595.940	46,40	69,19	Sekretariat Dewan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48,00	44.677.500	12	32.836.480	12	34.500.000	10	29.731.380	83,33	86,18	22,00	62.567.860	45,83	140,04	Sekretariat Dewan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,00	1.730.712.527	20	783.420.775	20	984.414.000	20	983.820.508	100,00	99,94	40,00	1.767.241.283	50,00	102,11	Sekretariat Dewan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	884,00	89.355.000	216	98	213	664.850.000	161	656.599.646	75,59	98,76	377,00	656.599.744	42,65	734,82	Sekretariat Dewan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	800,00	22.338.750	196	98	200	100.000.000	150	98.000.000	75,00	98,00	346,00	98.000.098	43,25	438,70	Sekretariat Dewan
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	32,00	22.338.750	8	100	8	184.850.000	6	182.000.000	75,00	98,46	14,00	182.000.100	43,75	814,73	Sekretariat Dewan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan	20,00	22.338.750	5	100	5	380.000.000	5	376.599.646	100,00	99,11	10,00	376.599.746	50,00	1685,86	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,00	1.051.663.673	20	1.377.373.743	22	340.425.500	21	335.920.055	95,45	98,68	41,00	1.713.293.798	46,59	162,91	Sekretariat Dewan
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik yang disediakan	48,00	714.840.000	11	326.900.000	12	200.425.500	11	196.314.055	91,67	97,95	22,00	523.214.055	45,83	73,19	Sekretariat Dewan

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor yang disediakan	40,00	336.823.673	9	390.000.000	10	140.000.000	10	139.606.000	100,00	99,72	19,00	529.606.000	47,50	157,24	Sekretariat Dewan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	244,00	3.173.176.654	54	1.023.070.418	61	916.910.000	59	842.079.755	96,72	91,84	113,00	1.865.150.173	46,31	58,78	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	64,00	89.355.000	16	12.564.424	16	25.900.000	16	13.177.164	100,00	50,88	32,00	25.741.588	50,00	28,81	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	64,00	2.547.691.654	11	422.960.862	16	473.360.000	16	446.570.274	100,00	94,34	27,00	869.531.136	42,19	34,13	Sekretariat Dewan
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20,00	268.065.000	5	80.625.000	5	92.650.000	4	62.489.411	80,00	67,45	9,00	143.114.411	45,00	53,39	Sekretariat Dewan
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48,00	178.710.000	10	487.638.132	12	305.000.000	12	301.925.831	100,00	98,99	22,00	789.563.963	45,83	441,81	Sekretariat Dewan
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	48,00	89.355.000	12	19.282.000	12	20.000.000	12	17.917.075	100,00	89,59	24,00	37.199.075	50,00	41,63	Sekretariat Dewan
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	324,00	99.387.541.069	81	21.613.689.372	81	21.476.797.748	81	21.439.360.061	100,00	99,83	162,00	43.053.049.433	50,00	43,32	Sekretariat Dewan

	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	160,00	98.730.781.818	40	21.404.115.332	40	21.258.627.748	40	21.235.129.311	100,00	99,89	80,00	42.639.244.643	50,00	43,19	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4,00	510.440.438	1	201.770.000	1	203.170.000	1	200.357.000	100,00	98,62	2,00	402.127.000	50,00	78,78	Sekretariat Dewan
	Pelaksanaan Medical Chek Up	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chack Up DPRD	160,00	146.318.813	40	7.804.040	40	15.000.000	40	3.873.750	100,00	25,83	80,00	11.677.790	50,00	7,98	Sekretariat Dewan
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan administrasi DPRD	184,00	1.632.694.560	48	265.343.000	26	513.683.000	22	462.756.000	84,62	90,09	70,00	728.099.000	38,04	44,59	Sekretariat Dewan
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100,00	1.565.678.310	19	207.168.000	25	408.183.000	21	379.080.000	84,00	92,87	40,00	586.248.000	40,00	37,44	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4,00	22.338.750	1	48.175.000	1	105.500.000	1	83.676.000	100,00	79,31	2,00	131.851.000	50,00	590,2 3	Sekretariat Dewan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap peran legislatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	464,00	96.207.595.189	149	19.531.044.45 0	121	19.055.280.10 0	149	17.875.645.227	123,14	93,81	298,00	37.406.689.67 7	64,22	38,88	Sekretariat Dewan
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan daerah dan Peraturan DPRD yang dihasilkan dan disahkan	52,00	9.928.113.421	11	1.280.754.843	13	1.568.581.000	7	1.413.924.321	53,85	90,14	18,00	2.694.679.164	34,62	27,14	Sekretariat Dewan
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	32,00	9.066.284.446	6	1.181.204.843	8	1.318.981.000	6	1.262.569.005	75,00	95,72	12,00	2.443.773.848	37,50	26,95	Sekretariat Dewan
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Peyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	20,00	861.828.975	5	99.550.000	5	-	0	-	0,00	#DIV/ 0!	5,00	99.550.000	25,00	11,55	Sekretariat Dewan

	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun					1	249.600.000	1	151.355.316	100,00	60,64	1,00	151.355.316			Sekretariat Dewan
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	32,00	8.818.543.241	10	1.078.350.875	8	1.788.244.000	7	1.618.841.186	87,50	90,53	17,00	2.697.192.061	53,13	30,59	Sekretariat Dewan
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA & PPAS	4,00	1.852.280.005	2	212.409.039	1	325.231.000	1	301.893.837	100,00	92,82	3,00	514.302.876	75,00	27,77	Sekretariat Dewan
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Pembahasan Perubahan KUA & Perubahan PPAS	4,00	1.852.280.005	2	205.451.801	1	402.676.000	1	390.081.482	100,00	96,87	3,00	595.533.283	75,00	32,15	Sekretariat Dewan
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	16,00	1.660.836.917	2	202.096.496	4	357.873.000	4	249.806.288	100,00	69,80	6,00	451.902.784	37,50	27,21	Sekretariat Dewan
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan	4,00	1.661.444.531	1	206.455.797	1	330.642.000	1	317.160.974	100,00	95,92	2,00	523.616.771	50,00	31,52	Sekretariat Dewan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4,00	1.791.701.783	1	251.937.742	1	371.822.000	1	359.898.605	100,00	96,79	2,00	611.836.347	50,00	34,15	Sekretariat Dewan
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas DPRD	148,00	13.077.719.012	69	5.031.699.591	42	6.481.029.600	79	6.075.048.667	188,10	93,74	148,00	11.106.748.258	100,00	84,93	Sekretariat Dewan
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	6,00	44.677.500	0	-	6	453.868.000	6	398.315.505	100,00	87,76	6,00	398.315.505			Sekretariat Dewan
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24,00	8.699.115.815	6	3.449.369.213	6	4.264.418.000	4	3.996.972.679	66,67	93,73	10,00	7.446.341.892	41,67	85,60	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	28,00	872.223.642	7	195.226.500	7	245.226.600	28	244.648.460	400,00	99,76	35,00	439.874.960	125,00	50,43	Sekretariat Dewan
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	32,00	1.810.779.075	8	470.898.000	8	474.898.000	8	470.283.000	100,00	99,03	16,00	941.181.000	50,00	51,98	Sekretariat Dewan
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12,00	825.461.490	2	128.205.878	3	184.760.000	3	118.388.923	100,00	64,08	5,00	246.594.801	41,67	29,87	Sekretariat Dewan

	Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk hukum daerah, publikasi & dokumentasi Dewan	12,00	825.461.490	12	788.000.000	12	857.859.000	12	846.440.100	100,00	98,67	24,00	1.634.440.100	0,00	0,00	Sekretariat Dewan
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Laporan Hasil Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	64,00	15.428.389.487	14	2.363.772.855	16	1.990.620.500	16	1.820.939.697	100,00	91,48	30,00	4.184.712.552	46,88	27,12	Sekretariat Dewan
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunker DPRD	48,00	9.500.232.536	9	1.144.811.045	12	1.038.360.000	12	1.001.114.850	100,00	96,41	21,00	2.145.925.895	43,75	22,59	Sekretariat Dewan
	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokir DPRD yang disusun	12,00	978.247.371	2	129.911.910	3	177.160.500	3	127.238.547	100,00	71,82	5,00	257.150.457	41,67	26,29	Sekretariat Dewan
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reses	4,00	4.949.909.580	1	1.089.049.900	1	775.100.000	1	692.586.300	100,00	89,35	2,00	1.781.636.200	50,00	35,99	Sekretariat Dewan
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan & Pengawasan Kode Etik DPRD	8,00	1.218.520.732	4	161.121.461	2	228.438.000	2	201.007.576	100,00	87,99	6,00	362.129.037	75,00	29,72	Sekretariat Dewan
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8,00	1.218.520.732	2	161.121.461	2	228.438.000	2	201.007.576	100,00	87,99	4,00	362.129.037	50,00	29,72	Sekretariat Dewan
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	160,00	46.470.595.721	41	5.949.704.405	40	6.998.367.000	38	6.745.883.780	95,00	96,39	79,00	12.695.588.18 5	49,38	27,32	Sekretariat Dewan
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60,00	40.227.942.678	15	5.025.252.852	15	5.725.717.000	14	5.614.375.952	93,33	98,06	29,00	10.639.628.804	48,33	26,45	Sekretariat Dewan
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4,00	248.384.561	1	54.212.900	1	55.660.000	1	50.164.000	100,00	90,13	2,00	104.376.900	50,00	42,02	Sekretariat Dewan

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48,00	4.834.663.969	12	602.003.653	12	981.990.000	11	864.064.028	91,67	87,99	23,00	1.466.067.681	47,92	30,32	Sekretariat Dewan
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48,00	1.159.604.513	12	268.235.000	12	235.000.000	12	217.279.800	100,00	92,46	24,00	485.514.800	50,00	41,87	Sekretariat Dewan
	KESBANGPOL																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB	14.373.534.204	BB	3.127.178.630	BB	3.141.082.242	BB	3.035.691.288		96,64		6.162.869.918		42,88	Kesbangpol
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah	100,00	43.101.250	87,5	11.112.730	100	15.684.300	6	12.883.540	6,00	82,14	93,50	23.996.270	93,50	55,67	Kesbangpol
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,00	21.550.625	5	5.826.500	5	6.362.500	5	5.104.165	100,00	80,22	10,00	10.930.665	47,62	50,72	Kesbangpol
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja tersedia	16,00	21.550.625	4	5.286.230	4	9.321.800	4	7.779.375	100,00	83,45	8,00	13.065.605	50,00	60,63	Kesbangpol
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48,00	11.741.846.315	9	2.644.418.177	12	2.767.468.542	12	2.686.687.814	100,00	97,08	21,00	5.331.105.991	43,75	45,40	Kesbangpol
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92,00	10.883.178.903	21	2.422.873.177	16	2.530.961.242	16	2.450.445.924	100,00	96,82	37,00	4.873.319.101	40,22	44,78	Kesbangpol
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	858.667.413	12	221.545.000	12	236.507.300	12	236.241.890	100,00	99,89	24,00	457.786.890	200,00	53,31	Kesbangpol
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase pembayaran jasa asuransi barang milik daerah.	100,00	94.822.750		6.453.625	100	6.500.000	100	6.444.500	100,00	99,15	100,00	12.898.125	100,00	13,60	Kesbangpol

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	94.822.750	0	6.453.625	2	6.500.000	2	6.444.500	100,00	99,15	2,00	12.898.125	200,00	13,60	Kesbangpol
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek.	100,00	129.303.750		2.560.000	100	10.000.000	83	8.000.000	83,00	80,00	83,00	10.560.000	83,00	8,17	Kesbangpol
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00	129.303.750	0	2.560.000	6	10.000.000	5	8.000.000	83,33	80,00	5,00	10.560.000	20,83	8,17	Kesbangpol
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian pelayanan administrasi Umum	100,00	1.189.817.462	51	270.987.448	100	211.127.600	34	109.186.121	34,00	51,72	85,00	380.173.569	85,00	31,95	Kesbangpol
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28,00	31.443.224	3	6.350.000	7	4.000.000	6	3.385.900	85,71	84,65	9,00	9.735.900	32,14	30,96	Kesbangpol
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120,00	348.459.942	22	57.489.240	30	71.256.300	30	65.906.250	100,00	92,49	52,00	123.395.490	43,33	35,41	Kesbangpol
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32,00	144.163.768	5	23.430.835	8	15.943.300	8	14.969.890	100,00	93,89	13,00	38.400.725	40,63	26,64	Kesbangpol
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120,00	118.054.324	16	27.195.000	30	27.390.000	30	27.390.000	100,00	100,00	46,00	54.585.000	38,33	46,24	Kesbangpol
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	547.696.204	1	156.522.373	1	92.538.000	1	92.537.854	100,00	100,00	2,00	249.060.227	50,00	45,47	Kesbangpol

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	351.059.681	69	75.743.050	100	28.901.800	4	28.627.300	4,00	99,05	73,00	104.370.350	73,00	29,73	Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	92.452.181	10	30.643.050	12	28.901.800	12	28.627.300	100,00	99,05	22,00	59.270.350	45,83	64,11	Kesbangpol
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	100,00	823.582.995	50	115.903.600	100	101.400.000	62	88.858.240	62,00	87,63	112,00	204.761.840	112,00	24,86	Kesbangpol
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	540.963.789	4	81.975.600	6	93.890.000	5	81.348.240	83,33	86,64	9,00	163.323.840	37,50	30,19	Kesbangpol
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72,00	92.973.706	18	7.510.000	18	7.510.000	18	7.510.000	100,00	100,00	36,00	15.020.000	50,00	16,16	Kesbangpol
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	100,00	545.179.651	37,21	102.261.500	100	609.404.000	86,76	528.745.450	86,76	86,76	123,97	631.006.950	123,97	115,74	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi Bela Negara, Jumlah Rapat FKUB dan FPK, Jumlah Sosialisasi Bahaya Paham Radikalisme	100,00	545.179.651	37,21	102.261.500	100	609.404.000	86,76	528.745.450	86,76	86,76	123,97	631.006.950	123,97	115,74	Kesbangpol

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	16,00	545.179.651	4	97.451.500	4	15.908.000	4	13.352.000	100,00	83,93	8,00	110.803.500	50,00	20,32	Kesbangpol
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka					36	460.331.000	33	383.573.450	91,67	83,33	33,00	383.573.450			Kesbangpol
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila					36	133.165.000	24	131.820.000	66,67	98,99	24,00	131.820.000			Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Politik	84,00	2.955.391.379	62,69	1.107.468.020	84	881.631.200	83,13	872.450.113	100,00	98,96	145,82	1.979.918.133	173,59	66,99	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Dan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Verifikasi Bantuan Parpol, Sosialisasi LPJ Bantuan Parpol	84,00	2.955.391.379	62,69	1.107.468.020	84	881.631.200	83,13	872.450.113	100,00	98,96	145,82	1.979.918.133	173,59	66,99	Kesbangpol

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1070,00	2.955.391.379	308	1.107.468.020	620	881.631.200	620	872.450.113	100,00	98,96	928,00	1.979.918.133	86,73	66,99	Kesbangpol
	ROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Cakupan Ormas Sinergi	74,30	9.943.215.737	8,07	16.762.333.000	72,34	24.927.296.000	72,18	24.871.740.500	99,78	99,78	80,25	41.634.073.500	108,01	418,72	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Sosialisasi Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	74,30	9.943.215.737	8,07	16.762.333.000	72,34	24.927.296.000	72,18	24.871.740.500	99,78	99,78	80,25	41.634.073.500	108,01	418,72	Kesbangpol
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	520,00	9.943.215.737	150	16.762.333.000	150	24.927.296.000	110	24.871.740.500	73,33	99,78	260,00	41.634.073.500	50,00	418,72	Kesbangpol

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kemitraan Ketahanan Masyarakat	3,00	1.037.881.034	2	142.193.610	3	64.596.000	2,00	61.422.000	66,67	95,09	4,00	203.615.610	133,33	19,62	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3,00	1.037.881.034	2	142.193.610	3	64.596.000	2,00	61.422.000	66,67	95,09	4,00	203.615.610	133,33	19,62	Kesbangpol
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200,00	432.795.386	50	47.505.590	50	54.596.000	49	52.083.000	98,00	95,40	99,00	99.588.590	49,50	23,01	Kesbangpol

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00	605.085.648	140	94.688.020	140	10.000.000	140	9.339.000	100,00	93,39	280,00	104.027.020	50,00	17,19	Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka Konflik	85,71	3.275.493.782	77,82	755.137.578	85	581.000.000	81,37	556.175.700	95,73	95,73	159,19	1.311.313.278	185,73	40,03	Kesbangpol
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi TIM RAD, TIM WADIN dan FKDM	85,71	3.275.493.782	77,82	755.137.578	85	581.000.000	81,37	556.175.700	95,73	95,73	159,19	1.311.313.278	185,73	40,03	Kesbangpol

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	164,00	124.665.366	41	27.557.000	41	9.561.000	38	8.700.100	92,68	91,00	79,00	36.257.100	48,17	29,08	Kesbangpol
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400,00	3.150.828.416	62	727.580.578	100	331.342.200	100	327.418.800	100,00	98,82	162,00	1.054.999.378	40,50	33,48	Kesbangpol
	Pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					12	240.096.800	12	220.056.800	100,00	91,65	12,00	220.056.800	0,00	0,00	Kesbangpol
	KECAMATAN PRINGSEWU																

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	B	24.585.961.177	B	5.148.667.575	B	5.519.035.570	B	4.865.659.577		88,16		10.014.327.15 2		40,73	Kec. Pringsewu
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	10,00	17.058.613	0	-	10	3.600.000	10	3.500.000	0,00	0,00	10,00	3.500.000	100,00	20,52	Kec. Pringsewu
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	5.689.365	0	-	10	1.200.000	10	1.100.000	0,00	0,00	10,00	1.100.000	100,00	19,33	Kec. Pringsewu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	11.369.248	0	-	10	2.400.000	10	2.400.000	0,00	0,00	10,00	2.400.000	100,00	21,11	Kec. Pringsewu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi keuangan perangkat daerah	56,00	22.249.303.413	12	4.770.802.569	26	5.159.231.670	12	4.545.287.088	46,15	88,10	24,00	9.316.089.657	42,86	41,87	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43,00	19.897.082.865	41	4.402.602.569	14	4.704.711.670	14	4.110.387.088	100,00	87,37	55,00	8.512.989.657	127,91	42,79	Kec. Pringsewu
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12,00	2.352.220.548	12	368.200.000	12	454.520.000	12	434.900.000	100,00	95,68	24,00	803.100.000	200,00	34,14	Kec. Pringsewu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,00	1.379.478.996	3	195.761.125	12	234.736.500	3	215.223.620	25,00	91,69	6,00	410.984.745	12,50	29,79	Kec. Pringsewu

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14,00	62.149.201	1	13.605.000	12	13.252.000	1	13.247.370	8,33	99,97	2,00	26.852.370	14,29	43,21	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	188.365.393	1	16.550.000	6	38.780.000	1	37.360.000	16,67	96,34	2,00	53.910.000	25,00	28,62	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	395.368.197	1	72.121.125	4	59.346.500	1	54.337.500	25,00	91,56	2,00	126.458.625	50,00	31,99	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	125.166.030	1	7.349.000	4	8.900.000	1	8.887.000	25,00	99,85	2,00	16.236.000	50,00	12,97	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	136,00	90.176.435	20	18.960.000	22	19.010.000	14	18.960.000	63,64	99,74	34,00	37.920.000	25,00	42,05	Kec. Pringsewu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	518.253.740	12	67.176.000	15	95.448.000	13	82.431.750	86,67	86,36	25,00	149.607.750	41,67	28,87	Kec. Pringsewu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan	20,00	592.642.188	5	102.850.000	55	29.200.000	3	26.800.000	5,45	91,78	8,00	129.650.000	40,00		Kec. Pringsewu
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20,00	592.642.188	5	102.850.000	55	29.200.000	3	26.800.000	5,45	91,78	8,00	129.650.000	40,00		Kec. Pringsewu

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faximile, Listrik dan Kuota serta tagihan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	48,00	56.893.650	12	33.400.461	12	44.897.400	12	29.878.869	100,00	66,55	24,00	63.279.330	50,00	111,2 2	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48,00	56.893.650	12	33.400.461	12	44.897.400	12	29.878.869	100,00	66,55	24,00	63.279.330	50,00	111,2 2	Kec. Pringsewu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin	13,00	290.584.317	13	45.853.420	9	47.370.000	3	44.970.000	33,33	94,93	16,00	90.823.420	123,08	31,26	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13,00	282.050.270	12	44.150.000	5	47.370.000	5	44.970.000	100,00	94,93	17,00	89.120.000	130,77	31,60	Kec. Pringsewu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00	8.534.048	1	1.703.420	4	-	1	-	25,00	#DIV/0!	2,00	1.703.420	15,38	19,96	Kec. Pringsewu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	100,00	22.865.474.965	18	3.644.467.790	100	3.745.580.900	16	3.714.999.480	16,00	99,18	34,00	7.359.467.270	34,00	32,19	Kec. Pringsewu

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat Kecamatan	40,00	3.547.710.221	10	319.457.790	10	423.240.900	7	399.999.480	70,00	94,51	17,00	719.457.270	42,50	20,28	Kec. Pringsewu
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40,00	94.822.750	10	12.600.000	10	13.816.000	2	8.825.000	20,00	63,88	12,00	21.425.000	30,00	22,59	Kec. Pringsewu
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40,00	3.452.887.471	10	306.857.790	10	409.424.900	9	391.174.480	90,00	95,54	19,00	698.032.270	47,50	20,22	Kec. Pringsewu
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	20,00	19.317.764.744	15	3.325.010.000	5	3.322.340.000	5	3.315.000.000	100,00	99,78	20,00	6.640.010.000	100,00	34,37	Kec. Pringsewu
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20,00	28.446.825	5	9.010.000	5	6.340.000	0	-	0,00		5,00	9.010.000	25,00	31,67	Kec. Pringsewu
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20,00	8.296.990.625	10	1.000.000.000	5	1.000.000.000	10	1.000.000.000	200,00	100,00	20,00	2.000.000.000	100,00	24,11	Kec. Pringsewu
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20,00	10.992.327.294	5	2.316.000.000	5	2.316.000.000	5	2.315.000.000	100,00	99,96	10,00	4.631.000.000	50,00	42,13	Kec. Pringsewu

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka kriminalitas Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	90,00	1.252.252.942	53	240.000.000	90	246.125.000	10	229.000.000	11,11	93,04	63,00	469.000.000	70,00	37,45	Kec. Pringsewu
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	60,00	1.252.252.942	10	240.000.000	15	246.000.000	13	229.000.000	86,67	93,09	23,00	469.000.000	38,33	37,45	Kec. Pringsewu
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60,00	1.252.252.942	10	240.000.000	15	246.000.000	13	229.000.000	86,67	93,09	23,00	469.000.000	38,33	37,45	Kec. Pringsewu
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	118.528.438	1	5.660.000	100	7.100.000	0	-	0,00	0,00	1,00	5.660.000	1,00	4,78	Kec. Pringsewu
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	1,00	118.528.438	250	5.660.000	1	7.100.000	0	-	0,00	0,00	250,00	5.660.000	##### ##	4,78	Kec. Pringsewu
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku ; Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250,00	118.528.438	250	5.660.000	1	7.100.000	0	-	0,00	0,00	250,00	5.660.000	100,00	4,78	Kec. Pringsewu

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	31.528.564	10	2.450.000	100	10.800.000	0	-	0,00	0,00	10,00	2.450.000	10,00	7,77	Kec. Pringsewu
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	40,00	31.528.564	10	2.450.000	10	10.800.000	0	-	0,00	0,00	10,00	2.450.000	25,00	7,77	Kec. Pringsewu
	Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	40,00	31.528.564	10	2.450.000	1	10.800.000	0	-	0,00	0,00	10,00	2.450.000	25,00	7,77	Kec. Pringsewu
	KECAMATAN GADINGREJO																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	10.271.277.261	BB	2.248.940.204	B	2.292.002.049		1.654.167.678		72,17	#VALUE !	3.903.107.882		38,00	Kec. Gadingrejo
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100,00 %	13.381.600	100,00 %	2.069.800	100,00	3.109.700		2.634.500	0,00	84,72	1,00	4.704.300	100,00	35,15	Kec. Gadingrejo
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,00	4.423.481	2	673.300	2	1.026.400	2	907.500	100,00	88,42	4,00	1.580.800	50,00	35,74	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	8,00	4.421.111	2	613.900	2	1.025.750	2	851.250	100,00	82,99	4,00	1.465.150	50,00	33,14	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	4.537.008	2	782.600	2	1.057.550	2	875.750	100,00	82,81	4,00	1.658.350	50,00	36,55	Kec. Gadingrejo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,00	8.963.555.939	1	2.019.341.947	100	2.039.034.699	98,09	2.000.066.696	98,09	98,09	99,09	4.019.408.643	9909,00	44,84	Kec. Gadingrejo

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	76,00	8.108.483.020	19	1.834.810.747	19	1.845.227.899	19	1.814.799.646	100,00	98,35	38,00	3.649.610.393	50,00	45,01	Kec. Gadingrejo
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	850.948.604	12	183.843.300	12	192.850.500	12	184.648.300	100,00	95,75	24,00	368.491.600	50,00	43,30	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,00	4.124.316	2	687.900	2	956.300	2	618.750	100,00	64,70	4,00	1.306.650	100,00	31,68	Kec. Gadingrejo
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	1,00	1.498.838.670	0	-	100	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4,00	44.755.000	0	-	1	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	1,00	827.034.461	95,00%	134399950	95	150.736.350	76,64	112.516.400	80,67	74,64	77,59	246.916.350	7759,00	29,86	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	19.471.334	2	1.614.750	1	4.518.750	3	2.593.000	300,00	57,38	5,00	4.207.750	125,00	21,61	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	147.664.883	1	29.933.000	1	18.600.000	0	14.848.750	0,00	79,83	1,00	44.781.750	25,00	30,33	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	385.714.190	1	60.900.400	1	68.729.000	1	47.653.350	100,00	69,34	2,00	108.553.750	50,00	28,14	Kec. Gadingrejo

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4,00	74.198.802	1	9.321.800	1	10.485.000	1	7.623.800	100,00	72,71	2,00	16.945.600	50,00	22,84	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	144,00	34.136.190	36	10.020.000	144	13.320.000	36	12.525.000	25,00	94,03	72,00	22.545.000	50,00	66,04	Kec. Gadingrejo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	92,00	165.849.063	23	22.610.000	23	35.083.600	23	27.272.500	100,00	77,74	46,00	49.882.500	50,00	30,08	Kec. Gadingrejo
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	1,00	86.202.500	100	5.600.000	100	6.750.000	63,08	4.258.125	63,08	63,08	163,08	9.858.125	#####	11,44	Kec. Gadingrejo
	Pengadaan Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	16,00	86.202.500	1	5.600.000	1	6.750.000	1	4.258.125	100,00	63,08	2,00	9.858.125	12,50	11,44	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	128.098.424	1	31.561.357	100	27.001.300	91,20	24.626.073	91,20	91,20	92,20	56.187.430	9220,00	43,86	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	56.033.134	12	12.561.357	12	18.001.300	12	15.626.073	100,00	86,81	24,00	28.187.430	50,00	50,30	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,00	72.065.290	5	19.000.000	5	9.000.000	5	9.000.000	100,00	100,00	10,00	28.000.000	50,00	38,85	Kec. Gadingrejo

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	339.206.838	100	55.967.150	100	65.370.000	66,79	43.661.370	66,79	66,79	166,79	99.628.520	166,79	29,37	Kec. Gadingrejo
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	16,00	311.234.126	3	42.272.150	3	49.510.000	3	35.657.370	100,00	72,02	6,00	77.929.520	37,50	25,04	Kec. Gadingrejo
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20,00	27.972.711	5	4.280.000	5	9.740.000	5	1.884.000	100,00	19,34	10,00	6.164.000	50,00	22,04	Kec. Gadingrejo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	4,00	42.239.225	1	9.415.000	1	6.120.000	1	6.120.000	100,00	100,00	2,00	15.535.000	50,00	36,78	Kec. Gadingrejo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	83.142.311	100	12.640.000	90	20.830.000		16.747.500	100,00	80,40	100,00	29.387.500	#####	35,35	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1,00	83.142.311	1	12.640.000	90	12.640.000	100	12.640.000	100,00	100,00	101,00	25.280.000	10100,00	30,41	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92,00	83.142.311	23	12.640.000	23	12.640.000	23	12.640.000	100,00	100,00	46,00	25.280.000	50,00	30,41	Kec. Gadingrejo

	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Diliimpahkan Kepada Camat	1,00	39.495.000	0	-	100	8.190.000	0	4.107.500	0,00	50,15	0,00	4.107.500	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha Yang Dilaksanakan	75,00	19.747.500	0	-	25	6.582.500	25	3.357.500	100,00	51,01	25,00	3.357.500	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan Pada Urusan Pemerintahan	21,00	19.747.500	0	-	7	1.607.500	7	750.000	100,00	46,66	7,00	750.000	0,00	0,00	Kec. Gadingrejo
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	81.892.375	100	6.288.500	90	6.633.000	87,95	5.834.000	97,72	87,95	187,95	12.122.500	187,95	14,80	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	1,00	81.892.375	100	6.288.500	90	6.633.000	87,95	5.834.000	97,72	87,95	187,95	12.122.500	#####	14,80	Kec. Gadingrejo
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,00	81.892.375	23	6.288.500	23	6.633.000	23	5.834.000	100,00	87,95	46,00	12.122.500	200,00	14,80	Kec. Gadingrejo
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	100,00	1.238.212.710	90	252.000.000	90	253.882.500	90	252.000.000	100,00	99,26	180,00	504.000.000	180,00	40,70	Kec. Gadingrejo
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	1.238.212.710	23	252.000.000	90	253.882.500	90	252.000.000	100,00	99,26	113,00	504.000.000	113,00	40,70	Kec. Gadingrejo

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	92,00	1.238.212.710	23	252.000.000	23	253.882.500	23	252.000.000	100,00	99,26	46,00	504.000.000	50,00	40,70	Kec. Gadingrejo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	69.586.968		8.450.000	90	8.611.500	87,8	7.561.500	97,56		87,80	16.011.500	87,80	23,01	Kec. Gadingrejo
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	69.586.968		8.450.000	90	8.611.500	87,8	7.561.500	97,56		87,80	16.011.500	87,80	23,01	Kec. Gadingrejo
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	232,00	69.586.968	58	8.450.000	58	8.611.500	48	7.561.500	82,76		106,00	16.011.500	45,69	23,01	Kec. Gadingrejo
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	84.478.450		8.920.500		8.835.000	25	7.755.000		87,78	25,00	16.675.500	25,00	19,74	Kec. Gadingrejo

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	92,00	84.478.450		8.920.500	23	8.835.000	23	7.755.000	100,00	87,78	23,00	16.675.500	25,00	19,74	Kec. Gadingrejo
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23,00	84.478.450	23	8.920.500	23	8.835.000	23	7.755.000	100,00	87,78	46,00	16.675.500	200,00	19,74	Kec. Gadingrejo
	KECAMATAN PAGELARAN																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	B	2.698.766.593	BB	1.713.416.554	B	1.818.875.402	B	1.645.406.142		90,46		3.358.822.696		124,46	Kec. Pagelaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	12,00	3.183.469	12	980.700	10	2.887.500	10	2.548.800		88,27	22,00	3.529.500		110,87	Kec. Pagelaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	3.183.469	12	980.700	10	2.887.500	10	2.548.800	100,00	88,27	22,00	3.529.500	220,00	110,87	Kec. Pagelaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.341.880.067	100	1.481.268.638	95	1.548.905.452	90	1.386.937.885	94,74	89,54	190,00	2.868.206.523	190,00	122,47	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	76,00	1.751.832.816	19	1.228.441.638	19	1.282.053.452	38	1.120.785.885	200,00	87,42	57,00	2.349.227.523	75,00	134,10	Kec. Pagelaran
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	587.008.485	12	250.530.000	12	265.790.000	12	265.090.000	100,00	99,74	24,00	515.620.000	200,00	87,84	Kec. Pagelaran

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	3.038.766	4	2.297.000	1	1.062.000	1	1.062.000	100,00	100,00	5,00	3.359.000	500,00	110,54	Kec. Pagelaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100,00	9.188.891	100	2.560.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	2.560.000	100,00	27,86	Kec. Pagelaran
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1,00	9.188.891	1	2.560.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	2.560.000	100,00	27,86	Kec. Pagelaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	95,00	202.496.974	100	144.324.850	100	170.662.450	97	165.628.407	97,00	97,05	197,00	309.953.257	207,37	153,07	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1,00	13.122.258	1	4.580.000	1	3.545.000	4	3.348.000	400,00	94,44	5,00	7.928.000	500,00	60,42	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1,00	9.232.059	1	5.860.500	1	6.025.000	1	5.660.000	100,00	93,94	2,00	11.520.500	200,00	124,79	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1,00	100.543.204	1	73.445.650	1	67.865.650	4	66.204.700	400,00	97,55	5,00	139.650.350	500,00	138,90	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1,00	18.545.616	1	8.729.700	1	12.297.800	3	12.092.000	300,00	98,33	4,00	20.821.700	400,00	112,27	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	237,00	12.912.149	20	15.815.000	136	24.425.000	135	24.425.000	99,26	100,00	155,00	40.240.000	65,40	311,64	Kec. Pagelaran

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	22,00	48.141.688	88	35.894.000	88	56.504.000	88	53.898.707	100,00	95,39	176,00	89.792.707	800,00	186,52	Kec. Pagelaran
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kebutuhan	95,00	40.516.875	100	19.600.000	100	25.400.000	93,5	23.750.000	93,50	93,50	193,50	43.350.000	203,68	106,99	Kec. Pagelaran
	Pengadaan Mebel	Jumlah Sarana dan sarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,00	23.152.500	1	19.600.000	8	9.900.000	8	9.500.000	100,00	95,96	9,00	29.100.000	900,00	125,69	Kec. Pagelaran
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2,00	17.364.375	0	-	3	15.500.000	3	14.250.000	100,00	91,94	3,00	14.250.000	150,00	82,06	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	11.460.488	100	5.193.496	95	10.400.000	80,8831	7.399.680	85,14	71,15	180,88	12.593.176	180,88	109,88	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00	11.460.488	1	5.193.496	1	10.400.000	12	7.399.680	1200,00	71,15	13,00	12.593.176	108,33	109,88	Kec. Pagelaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95,00	90.856.198	95	59.488.870	95	60.620.000	69	59.141.370	72,63	97,56	164,00	118.630.240	172,63	130,57	Kec. Pagelaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ang tersedia dan dibayarkan pajaknya	5,00	73.410.789	3	41.030.000	3	41.070.000	9	41.050.000	300,00	99,95	12,00	82.080.000	240,00	111,81	Kec. Pagelaran

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	3,00	1.910.081	3	1.471.370	3	2.450.000	3	1.171.370	100,00	47,81	6,00	2.642.740	200,00	138,36	Kec. Pagelaran
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20,00	9.168.390	12	3.490.000	12	7.920.000	12	7.920.000	100,00	100,00	24,00	11.410.000	120,00	124,45	Kec. Pagelaran
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1,00	6.366.938	1	13.497.500	1	9.180.000	2	9.000.000	200,00	98,04	3,00	22.497.500	300,00	353,35	Kec. Pagelaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	16.616.549	100	11.160.000	65	11.100.000	97	10.800.000	149,23	97,30	197,00	21.960.000	197,00	132,16	Kec. Pagelaran
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	16.616.549	100	11.160.000	65	11.100.000	97	10.800.000	149,23	97,30	197,00	21.960.000	197,00	132,16	Kec. Pagelaran
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	88,00	16.616.549	22	11.160.000	22	11.100.000	22	10.800.000	100,00	97,30	44,00	21.960.000	50,00	132,16	Kec. Pagelaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	14.817.600	51	4.800.000	85	4.440.000	93	4.130.000	109,41	93,02	144,00	8.930.000	144,00	60,27	Kec. Pagelaran

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100,00	14.817.600	51	4.800.000	85	4.440.000	82	4.130.000	96,47	93,02	133,00	8.930.000	133,00	60,27	Kec. Pagelaran
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	88,00	14.817.600	22	4.800.000	22	4.440.000	66	4.130.000	300,00	93,02	88,00	8.930.000	100,00	60,27	Kec. Pagelaran
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	100,00	291.427.463	100	213.000.000	80	213.000.000	100	213.000.000	125,00	100,00	200,00	426.000.000	200,00	146,18	Kec. Pagelaran
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	291.427.463	100	213.000.000	80	213.000.000	94	213.000.000	117,50	100,00	194,00	426.000.000	194,00	146,18	Kec. Pagelaran
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksanadi Wilayah Kecamatan	88,00	291.427.463	22	213.000.000	22	213.000.000	88	213.000.000	400,00	100,00	110,00	426.000.000	125,00	146,18	Kec. Pagelaran
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	22.895.507	97	8.170.000	80	10.860.000	97	10.500.000	121,25	96,69	194,00	18.670.000	194,00	81,54	Kec. Pagelaran
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	22.895.507	97	8.170.000	80	10.860.000	97	10.500.000	121,25	96,69	194,00	18.670.000	194,00	81,54	Kec. Pagelaran

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kehadiran peserta Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1,00	22.895.507	1	8.170.000	1	10.860.000	1	10.500.000	100,00	96,69	2,00	18.670.000	200,00	81,54	Kec. Pagelaran
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	12.386.588	100	5.300.000	80	5.300.000	100	5.300.000	125,00	100,00	200,00	10.600.000	200,00	85,58	Kec. Pagelaran
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100,00	12.386.588	100	5.300.000	100	5.300.000	100	5.300.000	100,00	100,00	200,00	10.600.000	200,00	85,58	Kec. Pagelaran
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asert Desa	88,00	12.386.588	22	5.300.000	22	5.300.000	22	5.300.000	100,00	100,00	44,00	10.600.000	50,00	85,58	Kec. Pagelaran
	KECAMATAN BANYUMAS																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	8.829.846.000	BB	1.596.790.914	BB	1.763.307.851		1.600.778.893		90,78	#VALUE !	3.197.569.807		36,21	Kec. Banyumas
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100	36.514.000	90	5.845.000	100			5.970.000	0,00	#DIV /0!	90,00	11.815.000	90,00	32,36	Kec. Banyumas

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	21.383.000	3	2.915.000	3	3.140.000	3	3.140.000	100,00	100,00	6,00	6.055.000	50,00	28,32	Kec. Banyumas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	15.131.000	3	2.930.000	3	2.850.000	3	2.830.000	100,00	99,30	6,00	5.760.000	50,00	38,07	Kec. Banyumas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.461.514.000	99	1.380.675.214	100	1.503.378.951	89	1.362.469.843	89,00	90,63	188,00	2.743.145.057	188,00	36,76	Kec. Banyumas
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	76,00	6.502.770.000	19	1.164.284.214	19	1.293.691.851	19	1.153.019.743	100,00	89,13	38,00	2.317.303.957	50,00	35,64	Kec. Banyumas
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	944.308.000	12	214.662.500	36	206.171.100	12	205.934.100	33,33	99,89	24,00	420.596.600	50,00	44,54	Kec. Banyumas
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,00	14.436.000	4	1.728.500	3	3.516.000	3	3.516.000	100,00	100,00	7,00	5.244.500	58,33	36,33	Kec. Banyumas
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	32.396.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4,00	32.396.000	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	717.473.000	100	115.231.200	100	148.019.000	66	140.084.050	66,00	94,64	166,00	255.315.250	166,00	35,59	Kec. Banyumas

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	16.219.000	1	3.463.000	1	3.951.000	1	3.951.000	100,00	100,00	2,00	7.414.000	50,00	45,71	Kec. Banyumas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	55.355.000	1	10.313.000	1	7.219.000	1	7.219.000	100,00	100,00	2,00	17.532.000	50,00	31,67	Kec. Banyumas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	405.703.000	1	61.211.000	1	65.538.000	1	65.185.600	100,00	99,46	2,00	126.396.600	50,00	31,15	Kec. Banyumas
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4,00	83.526.000	1	11.750.200	1	6.933.000	1	6.894.000	100,00	99,44	2,00	18.644.200	50,00	22,32	Kec. Banyumas
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	28,00	35.274.000	7	7.494.000	7	7.980.000	7	7.860.000	100,00	98,50	14,00	15.354.000	50,00	43,53	Kec. Banyumas
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	320,00	121.396.000	178	21.000.000	80	56.398.000	55	48.974.450	68,75	86,84	233,00	69.974.450	72,81	57,64	Kec. Banyumas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	100	67.002.000	100	23.070.000	100	29.454.000	3	22.010.000	3,00	74,73	103,00	45.080.000	103,00	67,28	Kec. Banyumas
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	8,00	56.893.000	5	23.070.000	1	15.120.000	1	10.320.000	100,00	68,25	6,00	33.390.000	75,00	58,69	Kec. Banyumas
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	12,00	10.109.000	0	-	2	14.334.000	2	11.690.000	100,00	81,55	2,00	11.690.000	16,67	115,64	Kec. Banyumas

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	70.547.000		15.624.000	100	11.067.000	8	6.298.500	8,00	56,91	8,00	21.922.500	8,00	31,08	Kec. Banyumas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	34.989.000		6.039.000	12	6.745.000	11	6.298.500	91,67	93,38	11,00	12.337.500	22,92	35,26	Kec. Banyumas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	35.558.000		9.585.000	6	4.322.000	6	-	100,00	0,00	6,00	9.585.000	50,00		Kec. Banyumas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	444.400.000	100	56.345.500	100	65.398.900	22	63.946.500	22,00	97,78	122,00	120.292.000	122,00	27,07	Kec. Banyumas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	12,00	369.966.000	4	48.370.600	5	57.100.000	4	56.857.000	80,00	99,57	8,00	105.227.600	66,67	28,44	Kec. Banyumas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Yang terbayarkan Pajaknya	4,00	7.111.000	1	1.215.245	1	2.072.900	1	1.085.000	100,00	52,34	2,00	2.300.245	50,00	32,35	Kec. Banyumas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40,00	34.136.000	10	6.759.655	10	6.226.000	2	6.004.500	20,00	96,44	12,00	12.764.155	30,00	37,39	Kec. Banyumas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8,00	33.187.000	0	-	0	-	0	-			0,00	-	0,00	0,00	Kec. Banyumas

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1,00	41.194.304	11	8.708.300	100	5.450.000	100	4.430.000	100,00	81,28	111,00	13.138.300	##### ##	31,89	Kec. Banyumas
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	41.194.304	11	8.708.300	100	5.450.000	100	4.430.000	100,00	81,28	111,00	13.138.300	111,00	31,89	Kec. Banyumas
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44,00	41.194.304	11	8.708.300	11	5.450.000	3	4.430.000	27,27	81,28	14,00	13.138.300	31,82	31,89	Kec. Banyumas
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,00	64.641.800	11	6.912.000	100	12.093.000	11	12.013.000	11,00	99,34	22,00	18.925.000	2200,0 0	29,28	Kec. Banyumas
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	64.641.800	11	6.912.000	100	12.093.000	11	12.013.000	11,00	99,34	22,00	18.925.000	22,00	29,28	Kec. Banyumas
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80,00	64.641.800	11	6.912.000	11	12.093.000	11	12.013.000	100,00	99,34	22,00	18.925.000	27,50	29,28	Kec. Banyumas
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	100	789.094.000	79	139.946.300	100	140.077.000	70	140.077.000	70,00	100,0 0	149,00	280.023.300	149,00	35,49	Kec. Banyumas

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	789.094.000	79	139.946.300	100	140.077.000	70	140.077.000	70,00	100,00	149,00	280.023.300	149,00	35,49	Kec. Banyumas
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	80,00	789.094.000	79	139.946.300	80	140.077.000	70	140.077.000	87,50	100,00	149,00	280.023.300	186,25	35,49	Kec. Banyumas
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	40.767.000	100	19.125.000	100	12.082.000	99,17	11.982.000	99,17	99,17	199,17	31.107.000	199,17	76,30	Kec. Banyumas
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	40.767.000	25	19.125.000	100	12.082.000	30	11.982.000	30,00	99,17	55,00	31.107.000	55,00	76,30	Kec. Banyumas
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	175,00	40.767.000	25	19.125.000	50	12.082.000	40	11.982.000	80,00	99,17	65,00	31.107.000	37,14	76,30	Kec. Banyumas

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,00	39.211.000	11	7.972.000	100	7.650.000	14	6.970.000	14,00	91,11	25,00	14.942.000	2500,00	38,11	Kec. Banyumas
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100	39.211.000	11	7.972.000	100	7.650.000	14	6.970.000	14,00	91,11	25,00	14.942.000	25,00	38,11	Kec. Banyumas
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44,00	39.211.000	11	7.972.000	22	7.650.000	14	6.970.000	63,64	91,11	25,00	14.942.000	56,82	38,11	Kec. Banyumas
	KECAMATAN ADILUWIH																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	BB	12.295.391.467	BB	1.930.788.488	BB	2.008.090.572		1.970.153.908		98,11		3.900.942.396		31,73	Kec. Adiluwih
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,00	17.273.123	8	3.438.600	8	5.590.500	8	5.503.600	100,00	98,45	16,00	8.942.200	50,00	51,77	Kec. Adiluwih
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,00	8.841.010	4	1.760.000	4	3.828.000	4	3.741.100	100,00	97,73	8,00	5.501.100	50,00	62,22	Kec. Adiluwih
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,00	8.432.113	4	1.678.600	4	1.762.500	4	1.762.500	100,00	100,00	8,00	3.441.100	50,00	40,81	Kec. Adiluwih

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12,00	9.688.545.146	12	1.710.705.118	12	1.755.003.572	12	1.726.027.286	100,00	98,35	24,00	3.436.732.404	200,00	35,47	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	8.462.739.110	14	1.495.300.118	14	1.528.558.072	12	1.501.621.786	85,71	98,24	26,00	2.996.921.904	216,67	35,41	Kec. Adiluwih
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22,00	1.218.346.434	22	213.920.000	5	223.460.000	5	221.420.000	100,00	99,09	27,00	435.340.000	122,73	35,73	Kec. Adiluwih
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24,00	7.459.602	6	1.485.000	4	2.985.500	4	2.985.500	100,00	100,00	10,00	4.470.500	41,67	59,93	Kec. Adiluwih
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	1168,00	740.172.045	292	143.655.470	100	164.877.200	100	162.177.078	100,00	98,36	392,00	305.832.548	33,56	41,32	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32,00	28.158.616	8	5.592.000	12	5.885.500	12	5.885.500	100,00	100,00	20,00	11.477.500	62,50	40,76	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	91.800.000	4	21.800.000	5	17.000.000	5	16.278.750	100,00	95,76	9,00	38.078.750	56,25	41,48	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16,00	368.808.258	4	66.723.800	6	68.079.000	6	66.159.000	100,00	97,18	10,00	132.882.800	62,50	36,03	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24,00	66.567.280	6	13.123.670	13	14.363.700	13	14.363.330	100,00	100,00	19,00	27.487.000	79,17	41,29	Kec. Adiluwih

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48,00	30.943.535	12	15.600.000	13	15.600.000	13	15.600.000	100,00	100,00	25,00	31.200.000	52,08	100,83	Kec. Adiluwih
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1032,00	153.894.356	258	20.816.000	160	43.949.000	160	43.890.498	100,00	99,87	418,00	64.706.498	40,50	42,05	Kec. Adiluwih
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	8,00	66.307.576	2	7.100.000	4	3.850.000	2	3.850.000	50,00	100,00	4,00	10.950.000	50,00	16,51	Kec. Adiluwih
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	33.153.788	1	2.100.000	2	3.850.000	2	3.850.000	100,00	100,00	3,00	5.950.000	75,00	17,95	Kec. Adiluwih
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4,00	33.153.788	1	5.000.000	2	-	0	-	0,00	0,00	1,00	5.000.000	25,00	15,08	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	12,00	49.730.681	12	5.999.300	12	13.499.300	12	13.499.300	100,00	100,00	24,00	19.498.600	200,00	39,21	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	49.730.681	12	5.999.300	12	13.499.300	12	13.499.300	100,00	100,00	24,00	19.498.600	200,00	39,21	Kec. Adiluwih
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Prosentase Administrasi Umum	80,00	457.245.986	20	59.890.000	18	65.270.000	18	59.096.644	100,00	90,54	38,00	118.986.644	47,50	26,02	Kec. Adiluwih

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16,00	419.671.693	4	2.650.000	4	3.700.000	4	3.700.000	100,00	100,00	8,00	6.350.000	50,00	1,51	Kec. Adiluwih
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	11.603.826	4	44.720.000	4	47.060.000	4	40.886.644	100,00	86,88	8,00	85.606.644	50,00	737,74	Kec. Adiluwih
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40,00	20.444.836	10	7.020.000	8	9.010.000	8	9.010.000	100,00	100,00	18,00	16.030.000	45,00	78,41	Kec. Adiluwih
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	5.525.631	2	5.500.000	2	5.500.000	2	5.500.000	100,00	100,00	4,00	11.000.000	50,00	199,07	Kec. Adiluwih
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Tingkat Pelayanan Publik	56,00	29.047.500	14	9.584.200	4	3.224.000	4	3.224.000	100,00	100,00	18,00	12.808.200	32,14	44,09	Kec. Adiluwih
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56,00	29.047.500	14	9.584.200	4	3.224.000	4	3.224.000	100,00	100,00	18,00	12.808.200	32,14	44,09	Kec. Adiluwih
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56,00	29.047.500	14	9.584.200	4	3.224.000	4	3.224.000	100,00	100,00	18,00	12.808.200	32,14	44,09	Kec. Adiluwih

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	14,00	62.163.352	14	10.604.000	4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	18,00	22.168.000	128,57	35,66	Kec. Adiluwih
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintah tingkat Kecamatan	14,00	62.163.352	14	10.604.000	4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	18,00	22.168.000	128,57	35,66	Kec. Adiluwih
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilaya Kecamatan	14,00	62.163.352	14	10.604.000	4	11.604.000	4	11.564.000	100,00	99,66	18,00	22.168.000	128,57	35,66	Kec. Adiluwih
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka kriminalitas	52,00	961.459.838	13	162.000.000	14	162.000.000	14	162.000.000	100,00	100,00	27,00	324.000.000	51,92	33,70	Kec. Adiluwih
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52,00	961.459.838	13	162.000.000	14	162.000.000	14	162.000.000	100,00	100,00	27,00	324.000.000	51,92	33,70	Kec. Adiluwih
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52,00	961.459.838	13	162.000.000	14	162.000.000	14	162.000.000	100,00	100,00	27,00	324.000.000	51,92	33,70	Kec. Adiluwih
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	4,00	171.294.569	1	12.311.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	12.311.000	25,00	7,19	Kec. Adiluwih

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	4,00	171.294.569	1	12.311.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	12.311.000	25,00	7,19	Kec. Adiluwih
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4,00	171.294.569	1	12.311.000	0	-	0	-	0,00	0,00	1,00	12.311.000	25,00	7,19	Kec. Adiluwih
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan kantor pemerintahan kelurahan/pekon yang baik.	56,00	81.199.151	14	11.904.500	4	11.904.500	4	11.904.500	100,00	100,00	18,00	23.809.000	32,14	29,32	Kec. Adiluwih
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi dan Koordinasi Pembinaan	56,00	81.199.151	14	11.904.500	4	11.904.500	4	11.904.500	100,00	100,00	18,00	23.809.000	32,14	29,32	Kec. Adiluwih
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	56,00	81.199.151	14	11.904.500	4	11.904.500	4	11.904.500	100,00	100,00	18,00	23.809.000	32,14	29,32	Kec. Adiluwih
	KECAMATAN AMBARAWA																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		BB	6.743.037.640	BB	1.438.935.101	BB	1.619.526.393		1.070.885.859		66,12	#VALUE !	2.509.820.960		37,22	Kec. Ambarawa
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	5.685.463.240	64	1.189.017.412	100	1.349.412.793	64	921.068.775	64,00	68,26	128,00	2.110.086.187	128,00	37,11	Kec. Ambarawa

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	52,00	5.357.743.240	13	1.100.457.412	13	1.176.792.793	13	792.738.775	100,00	67,36	26,00	1.893.196.187	50,00	35,34	Kec. Ambarawa
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48,00	327.720.000	12	88.560.000	12	172.620.000	12	128.330.000	100,00	74,34	24,00	216.890.000	50,00	66,18	Kec. Ambarawa
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	5.720.000	0	-	1	5.720.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Ambarawa
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	5.720.000	0	-	1	5.720.000	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Ambarawa
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	581.752.800	63	146.603.750	100	145.438.200	63	84.783.600	63,00	58,30	126,00	231.387.350	126,00	39,77	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4,00	29.400.000	3	7.001.500	1	7.350.000	1	6.266.000	100,00	85,25	4,00	13.267.500	100,00	45,13	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4,00	49.160.000	3	23.985.500	1	12.290.000	1	10.400.000	100,00	84,62	4,00	34.385.500	100,00	69,95	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4,00	315.508.000	1	74.277.750	1	78.877.000	1	43.790.500	100,00	55,52	2,00	118.068.250	50,00	37,42	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4,00	68.484.800	1	16.679.000	1	17.121.200	1	11.717.100	100,00	68,44	2,00	28.396.100	50,00	41,46	Kec. Ambarawa

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	40,00	38.640.000	30	8.760.000	6	9.660.000	6	9.585.000	100,00	99,22	36,00	18.345.000	90,00	47,48	Kec. Ambarawa
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	424,00	80.560.000	24	15.900.000	12	20.140.000	12	17.647.377	100,00	87,62	36,00	33.547.377	8,49	41,64	Kec. Ambarawa
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	100	97.160.000	9	23.050.000	100	24.290.000	72	17.599.000	72,00	72,45	81,00	40.649.000	81,00	41,84	Kec. Ambarawa
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	20,00	36.800.000	6	14.550.000	4	9.200.000	4	8.770.000	100,00	95,33	10,00	23.320.000	50,00	63,37	Kec. Ambarawa
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	12,00	60.360.000	0	8.500.000	2	15.090.000	1	8.829.000	50,00	58,51	1,00	17.329.000	8,33	28,71	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	94.661.600	24	13.058.304	100	23.665.400	24	8.116.484	24,00	34,30	48,00	21.174.788	48,00	22,37	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48,00	67.541.600	12	5.958.304	12	16.885.400	12	4.056.484	100,00	24,02	24,00	10.014.788	50,00	14,83	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,00	27.120.000	12	7.100.000	12	6.780.000	12	4.060.000	100,00	59,88	24,00	11.160.000	100,00	41,15	Kec. Ambarawa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	284.000.000	24	56.305.635	100	71.000.000	24	68.569.735	24,00	96,58	48,00	124.875.370	48,00	43,97	Kec. Ambarawa

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	24,00	248.480.000	6	52.170.000	6	62.120.000	6	62.049.500	100,00	99,89	12,00	114.219.500	50,00	45,97	Kec. Ambarawa
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaaraan Yang terbayarkan Pajaknya	24,00	12.800.000	1	1.305.635	6	3.200.000	1	840.235	16,67	26,26	2,00	2.145.870	8,33	16,76	Kec. Ambarawa
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20,00	22.720.000	5	2.830.000	8	5.680.000	5	5.680.000	62,50	100,00	10,00	8.510.000	50,00	37,46	Kec. Ambarawa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	8,00	-	2	-	0	-	0	-	0,00		2,00	-	25,00	0,00	Kec. Ambarawa
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	0,00	-	0		0	-			0,00	0,00	100,00	10.900.000	0,00	0,00	Kec. Ambarawa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	47.640.000	100	10.900.000	100	11.910.000	100	10.920.000	100,00	91,69	200,00	21.820.000	100,00	45,80	Kec. Ambarawa
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	47.640.000	100	10.900.000	100	11.910.000	100	10.920.000	1111,11	91,69	101,00	21.820.000	200,00	45,80	Kec. Ambarawa

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48,00	47.640.000	1	10.900.000	9	11.910.000	1	10.920.000	1,00	168,5 2	101,00	19.440.000	210,42	40,81	Kec. Ambarawa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	100,00	25.920.000	100	8.520.000	100	6.480.000	9	5.040.000	9,00	77,78	109,00	13.560.000	101,00	52,31	Kec. Ambarawa
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	25.920.000	100	8.520.000	100	6.480.000	9	5.040.000	900,00	77,78	18,00	13.560.000	109,00	52,31	Kec. Ambarawa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36,00	25.920.000	9	8.520.000	1	6.480.000	9	5.040.000	900,00	77,78	18,00	13.560.000	50,00	52,31	Kec. Ambarawa
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	100,00	698.400.000	90	169.030.000	100	179.371.000	90	170.232.000	90,00	94,90	180,00	339.262.000	180,00	48,58	Kec. Ambarawa
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	698.400.000	90	169.030.000	100	179.371.000	90	170.232.000	90,00	94,90	180,00	339.262.000	180,00	48,58	Kec. Ambarawa
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	432,00	698.400.000	90	164.100.000	1	174.600.000	1	166.100.000	100,00	95,13	91,00	330.200.000	21,06	47,28	Kec. Ambarawa

	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4,00	19.084.000	1	4.930.000	1	4.771.000	1	4.132.000	100,00	86,61	2,00	9.062.000	50,00	47,48	Kec. Ambarawa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	17.600.000	96,174 9	17.600.000	100	22.380.000	52	11.660.000	52,00	52,10	148,17	29.260.000	148,17	166,2 5	Kec. Ambarawa
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	17.600.000	96,174 9	17.600.000	100	22.380.000	52	11.660.000	52,00	52,10	148,17	29.260.000	148,17	166,2 5	Kec. Ambarawa
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama Ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regionaldan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4,00	17.600.000	1	17.600.000	1	22.380.000	1	11.660.000	100,00	52,10	2,00	29.260.000		166,2 5	Kec. Ambarawa
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	34.920.000	49,00%	9.868.500	100	8.730.000	50	4.260.000	50,00	48,80	50,49	14.128.500	50,49	40,46	Kec. Ambarawa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100,00	34.920.000	49,00%	9.868.500	100	8.730.000	50	4.260.000	50,00	48,80	50,49	14.128.500	50,49	40,46	Kec. Ambarawa

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36	34.920.000	9	9.868.500	9	8.730.000	9	4.260.000	100,00	48,80	18,00	14.128.500	50,00	40,46	Kec. Ambarawa
	KECAMATAN PARDASUKA																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	9.428.637.000	BB	1.581.581.360	BB	1.839.630.056		1.505.349.980		81,83		3.086.931.340		32,74	Kec. Pardasuka
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	100	10.453.000	100	-	100	2.879.100		1.250.000	0,00	43,42	100,00	1.250.000	100,00	11,96	Kec. Pardasuka
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	3.342.000	0	-	4	1.147.200	2	500.000	50,00	43,58	2,00	500.000	12,50	14,96	Kec. Pardasuka
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	16	7.111.000	0	-	4	1.731.900	2	750.000	50,00	43,31	2,00	750.000	12,50	10,55	Kec. Pardasuka
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7.903.678.000	100	1.406.730.068	100	1.548.167.306	97	1.269.893.848	97,00	82,03	197,00	2.676.623.916	197,00	33,87	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	56	6.945.828.000	14	1.223.790.068	14	1.359.447.306	14	1.127.673.848	100,00	82,95	28,00	2.351.463.916	50,00	33,85	Kec. Pardasuka
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	953.110.000	12	182.940.000	12	188.720.000	9	142.220.000	75,00	75,36	21,00	325.160.000	43,75	34,12	Kec. Pardasuka
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	4.740.000	4	-	4	-	0	-	0,00	0,00	4,00	-	25,00	0,00	Kec. Pardasuka

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	47.411.000	100	2.454.087	100	16.877.000	100	11.654.256	100,00		200,00	14.108.343	200,00	29,76	Kec. Pardasuka
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4	47.411.000	1	2.454.087	1	16.877.000	1	11.654.256	100,00		2,00	14.108.343	50,00	29,76	Kec. Pardasuka
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	996.642.000	100	114.465.108	100	168.381.650	79	132.406.855	79,00	78,63	179,00	246.871.963	179,00	24,77	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	21.857.000	1	3.610.000	1	5.325.000	1	3.110.000	100,00	58,40	2,00	6.720.000	50,00	30,75	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	284.551.000	1	18.000.000	1	43.745.000	1	40.377.390	100,00	92,30	2,00	58.377.390	50,00	20,52	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	317.159.000	1	46.032.200	1	51.224.750	1	40.109.465	100,00	78,30	2,00	86.141.665	50,00	27,16	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	110.416.000	1	19.822.908	1	31.136.900	1	22.915.000	100,00	73,59	2,00	42.737.908	50,00	38,71	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	40	56.894.000	10	12.000.000	10	12.000.000	6	12.000.000	60,00	100,00	16,00	24.000.000	40,00	42,18	Kec. Pardasuka
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	420	205.765.000	292	15.000.000	292	24.950.000	48	13.895.000	16,44	55,69	340,00	28.895.000	80,95	14,04	Kec. Pardasuka

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	133.644.000	100	15.209.125	100	44.790.000	77	34.470.021	77,00	76,96	177,00	49.679.146	177,00	37,17	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	48.303.000	12	6.860.325	12	24.000.000	9	20.810.021	75,00	86,71	21,00	27.670.346	43,75	57,28	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	85.341.000	12	8.348.800	12	20.790.000	9	13.660.000	75,00	65,70	21,00	22.008.800	43,75	25,79	Kec. Pardasuka
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	336.809.000	100	42.722.972	100	58.535.000	95	55.675.000	95,00	95,11	195,00	98.397.972	195,00	29,21	Kec. Pardasuka
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Yang terbayarkan Pajaknya	12	289.446.000	4	38.008.000	4	47.060.000	4	44.200.000	100,00	93,92	8,00	82.208.000	66,67	28,40	Kec. Pardasuka
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12	47.363.000	3	4.714.972	3	11.475.000	0	11.475.000	0,00	100,00	3,00	16.189.972	25,00	34,18	Kec. Pardasuka
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	107.454.000	13	8.875.000	100	6.225.000	99,75	6.210.000	99,75	99,76	112,75	15.085.000	100,00	14,04	Kec. Pardasuka
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	107.454.000	13	8.875.000	13	6.225.000	13	6.210.000	100,00	99,76	26,00	15.085.000	26,00	14,04	Kec. Pardasuka

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48	107.454.000	13	8.875.000	13	6.225.000	13	6.210.000	100,00	99,76	26,00	15.085.000	54,17	14,04	Kec. Pardasuka
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	62.625.000	13	13.332.000	100	16.782.000	65	12.282.000	65,00	73,19	78,00	25.614.000	100,00	40,90	Kec. Pardasuka
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100	62.625.000	13	13.332.000	13	16.782.000	13	12.282.000	100,00	73,19	26,00	25.614.000	26,00	40,90	Kec. Pardasuka
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52	62.625.000	13	13.332.000	13	16.782.000	13	12.282.000	100,00	73,19	26,00	25.614.000	50,00	40,90	Kec. Pardasuka
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	1	957.688.000	12	210.000.000	100	222.000.000	95	212.000.000	95,00	95,50	107,00	422.000.000	100,00	44,06	Kec. Pardasuka
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	957.688.000	12	210.000.000	12	222.000.000	6	212.000.000	50,00	95,50	18,00	422.000.000	18,00	44,06	Kec. Pardasuka
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	52	957.688.000	12	210.000.000	12	222.000.000	6	212.000.000	50,00	95,50	18,00	422.000.000	34,62	44,06	Kec. Pardasuka

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	195.113.000	1	26.990.000	0	-	0	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	1,00	26.990.000	62,95	13,83	Kec. Pardasuka
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	195.113.000	1	26.990.000	0	-	0	-	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	1,00	26.990.000	1,00	13,83	Kec. Pardasuka
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4	195.113.000	1	26.990.000	0	-	0	-	#DIV/0 !	#DIV/ 0!	1,00	26.990.000	25,00	13,83	Kec. Pardasuka
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	87.496.000	13	8.100.000	100	8.949.900	95,00	7.374.900	95,00	82,40	108,00	15.474.900	##### ##	17,69	Kec. Pardasuka
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Kegiatan Pembinaan antar suku, antar umat beragama demi terwujudnya Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100	87.496.000	13	8.100.000	13	8.949.900	13	7.374.900	100,00	82,40	26,00	15.474.900	26,00	17,69	Kec. Pardasuka

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	44	87.496.000	13	8.100.000	13	8.949.900	13	7.374.900	100,00		26,00	15.474.900	59,09	17,69	Kec. Pardasuka
	KECAMATAN SUKOHARJO																
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sakip	BB	9.602.927.174	BB	1.654.852.906	BB	1.761.280.699	BB	1.531.201.650		86,94	#VALUE !	3.186.054.556		33,18	Kec. Sukoharjo
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	24	18.631.564	100	7.840.768	5	3.625.800	5	3.625.800	100,00	100,00	105,00	11.466.568	437,50	61,54	Kec. Sukoharjo
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	7.272.898	6	3.528.000	3	1.452.800	3	1.452.800	100,00	100,00	9,00	4.980.800	75,00	68,48	Kec. Sukoharjo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	11.358.666	5	4.312.768	2	2.173.000	2	2.173.000	100,00	100,00	7,00	6.485.768	58,33	57,10	Kec. Sukoharjo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48	8.473.672.516	100	2.824.089.639	12	1.440.570.699	12	1.256.948.072	100,00	87,25	112,00	4.081.037.711	233,33	48,16	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	7.530.444.181	78	2.439.879.639	12	1.238.578.699	48	1.055.456.072	400,00	85,22	126,00	3.495.335.711	225,00	46,42	Kec. Sukoharjo

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	24	935.467.847	5	384.210.000	6	200.600.000	4	200.250.000	66,67	99,83	9,00	584.460.000	37,50	62,48	Kec. Sukoharjo
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	7.760.488	0	-	4	1.392.000	4	1.242.000	100,00	89,22	4,00	1.242.000	16,67	16,00	Kec. Sukoharjo
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	603.132.329	100	278.176.461	12	157.492.250	12	133.234.728	100,00	84,60	112,00	411.411.189	233,33	68,21	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	41.290.567	3	16.547.000	1	6.363.000	3	6.350.000	300,00	99,80	6,00	22.897.000	16,67	55,45	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	471.500.793	15	166.652.865	3	81.228.750	12	75.993.000	400,00	93,55	27,00	242.645.865	225,00	51,46	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	50.360.718	4	19.438.596	1	8.368.500	4	6.231.000	400,00	74,46	8,00	25.669.596	20,00	50,97	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	39.980.251	5	19.680.000	10	12.000.000	40	12.000.000	400,00	100,00	45,00	31.680.000	93,75	79,24	Kec. Sukoharjo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	116	55.858.000	4	49.532.000	12	32.660.728	300,00	65,94	128,00	88.518.728			Kec. Sukoharjo

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12	31.544.354	10	83.887.000	3	65.650.000	6	47.446.000	200,00	72,27	16,00	131.333.000	133,33	416,34	Kec. Sukoharjo
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	31.544.354	10	83.887.000	3	65.650.000	6	47.446.000	200,00	72,27	16,00	131.333.000	133,33	416,34	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Tagihan Telepon/Faksimile, Listrik dan Kuota yang Disediakan	48	124.824.071	25	43.075.089	8	27.202.700	51,5578	24.405.050	644,47	89,72	76,56	67.480.139	159,50	54,06	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	76.486.587	21	17.600.089	2	11.402.700	9	10.880.050	450,00	95,42	30,00	28.480.139	62,50	37,24	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	48.337.484		25.475.000	6	15.800.000	6	13.525.000	100,00	85,60	6,00	39.000.000	25,00	80,68	Kec. Sukoharjo
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secar Rutin	28	351.122.340	12	118.911.000	7	66.739.250	12	65.542.000	171,43	98,21	24,00	184.453.000	85,71	52,53	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	296.558.152	12	85.170.000	2	41.070.000	12	41.063.900	600,00	99,99	24,00	126.233.900	300,00	42,57	Kec. Sukoharjo
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	6.874.650	3	2.650.000	3	2.250.000	6	1.250.000	200,00	55,56	9,00	3.900.000	75,00	56,73	Kec. Sukoharjo

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	47.689.538	3	31.091.000	2	23.419.250	2	23.228.100	100,00	99,18	5,00	54.319.100	62,50	113,90	Kec. Sukoharjo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pencapaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IKM)	98	72.521.444	100	19.140.000	98	3.968.000	69,304	2.750.000	71,01	69,30	169,30	21.890.000	172,76	30,18	Kec. Sukoharjo
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase sasaran Koordinasi Kegiatan Musrenbang	4	72.521.444	2	19.140.000	1	3.968.000	3	2.750.000	300,00	69,30	5,00	21.890.000	125,00	30,18	Kec. Sukoharjo
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	55.642.995	2	19.140.000	1	3.968.000	1	2.750.000	100,00	69,30	3,00	21.890.000	75,00	39,34	Kec. Sukoharjo
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	16.878.449			0	-	0	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	Kec. Sukoharjo
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	943.012.249	100	365.500.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100,00	100,00	200,00	545.500.000	200,00	57,85	Kec. Sukoharjo
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	1120	943.012.249	100	365.500.000	2	180.000.000	8	180.000.000	400,00	100,00	108,00	545.500.000	9,64	57,85	Kec. Sukoharjo

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18	943.012.249	100	365.500.000	2	180.000.000	8	180.000.000	400,00	100,00	108,00	545.500.000	600,00	57,85	Kec. Sukoharjo
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	98	158.510.827	50	5.500.000	100	6.334.000	0	3.750.000	0,00	59,20	50,00	9.250.000	51,02	5,84	Kec. Sukoharjo
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Sasaran Kegiatan MTQ dan FKUB	10	158.510.827	1	5.500.000	50	6.334.000	50	3.750.000	100,00	59,20	51,00	9.250.000	510,00	5,84	Kec. Sukoharjo
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya, Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	130	158.510.827	50	5.500.000	50	6.334.000	50	3.750.000	100,00	59,20	100,00	9.250.000	76,92	5,84	Kec. Sukoharjo
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Pembinaan Kepada Aparatur Pemerintahan Kecamatan	98	80.889.188	100	6.300.000	100	2.880.000	62,5	1.800.000	62,50	62,50	162,50	8.100.000	165,82	10,01	Kec. Sukoharjo
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Realisasi ADD	12	80.889.188	3	6.300.000	2	2.880.000	2	1.800.000	100,00	62,50	5,00	8.100.000	41,67	10,01	Kec. Sukoharjo

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	80.889.188	3	6.300.000	2	2.880.000	2	1.800.000	100,00	62,50	5,00	8.100.000	41,67	10,01	Kec. Sukoharjo
	KECAMATAN PAGELARAN UTARA																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP	BB Skala	2.216.565.832		1.468.327.314	B	1.619.720.813		1.092.495.723		67,45	0,00	2.560.823.037		115,53	Kec. Pagelaran Utara
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Review LAKIP	1,00	3.980.609	100	2.573.300	100	2.763.000	100		100,00	0,00	200,00	2.573.300	20000,00	64,65	Kec. Pagelaran Utara
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,00	2.037.420	4	1.273.400	4	1.005.000	4	1.005.000	100,00	100,00	8,00	2.278.400	200,00	111,83	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	1.943.189	4	1.299.900	4	1.758.000	4	-	100,00	0,00	8,00	1.299.900	200,00	66,90	Kec. Pagelaran Utara
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.879.191.879	96	1.225.878.084	100	1.357.886.213	94	1.269.870.455	94,00	93,52	190,00	2.495.748.539	190,00	132,81	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	154,00	1.460.871.351	126	1.028.274.084	154	1.147.071.213	142	1.060.055.455	92,21	92,41	268,00	2.088.329.539	174,03	142,95	Kec. Pagelaran Utara
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	416.602.728	227	195.980.000	212	209.040.000	213	208.040.000	100,47	99,52	440,00	404.020.000	191,30	96,98	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00	1.717.800	5	1.624.000	5	1.775.000	5	1.775.000	100,00	100,00	10,00	3.399.000	200,00	197,87	Kec. Pagelaran Utara

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100,00	8.373.102	100	2.000.000	0	-	0	-	0,00	0,00	100,00	2.000.000	100,00	23,89	Kec. Pagelaran Utara
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	1,00	8.373.102	1	2.000.000	0	-	0	-	0,00		1,00	2.000.000	100,00		Kec. Pagelaran Utara
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100,00	206.411.835	0,9833	144.346.200	95	177.669.000	96	92.969.300	101,05	52,33	96,98	237.315.500	96,98	114,97	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1,00	15.662.666	1	7.675.500	1	11.267.500	3	7.040.200	300,00	62,48	4,00	14.715.700	400,00	93,95	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1,00	18.438.651	1	10.005.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	10.005.000	100,00	54,26	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1,00	102.612.926	1	86.601.000	1	95.322.500	3	54.756.500	300,00	57,44	4,00	141.357.500	400,00	137,76	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1,00	16.979.349	1	14.654.700	1	14.195.000	3	11.672.600	300,00	82,23	4,00	26.327.300	400,00	155,05	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10,00	14.516.618	10	11.400.000	10	11.400.000	11	8.550.000	110,00	75,00	21,00	19.950.000	210,00	137,43	Kec. Pagelaran Utara
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	92,00	38.201.625	10	14.010.000	154	45.484.000	55	10.950.000	35,71	24,07	65,00	24.960.000	70,65	65,34	Kec. Pagelaran Utara

	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan	100,00	13.491.541	75	31.450.000	100	22.900.000	0	-	0,00	0,00	75,00	31.450.000	75,00	233,1 1	Kec. Pagelaran Utara
	Pengadaan Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1,00	13.491.541	4	26.250.000	7	22.900.000	0	-	0,00	0,00	4,00	26.250.000	400,00	194,5 7	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	23.874.743	94	18.450.000	100	25.871.600	71	18.383.000	71,00	71,05	165,00	36.833.000	##### ##	154,2 8	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12,00	12.732.602	10	9.600.000	12	17.101.600	10	14.612.000	83,33	85,44	20,00	24.212.000	166,67	190,1 6	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,00	11.142.141	12	8.850.000	12	8.770.000	5	3.771.000	41,67	43,00	17,00	12.621.000	141,67	113,2 7	Kec. Pagelaran Utara
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	81.242.123	34	53.015.630	100	55.531.000	0,8523	47.329.000	0,85	85,23	34,85	100.344.630	3485,2 3	123,5 1	Kec. Pagelaran Utara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perijinanya	4,00	79.077.364	4	44.742.000	4	44.770.000	3,5	39.700.000	87,50	88,68	7,50	84.442.000	187,50	106,7 8	Kec. Pagelaran Utara

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4,00	2.164.759	1	887.730	4	3.900.000	1	768.000	25,00	19,69	2,00	1.655.730	50,00	76,49	Kec. Pagelaran Utara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2,00	12.706.115	4	7.385.900	4	6.861.000	4	6.861.000	100,00	100,00	8,00	14.246.900	400,00	112,13	Kec. Pagelaran Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pencapaian program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	20.374.200	100	13.870.000	90	15.185.000	100	15.185.000	111,11	100,00	200,00	29.055.000	200,00	142,61	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100,00	20.374.200	100	13.870.000	90	15.185.000	100	15.185.000	111,11	100,00	200,00	29.055.000	200,00	142,61	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10,00	20.374.200	10	13.870.000	10	15.185.000	10	15.185.000	100,00	100,00	20,00	29.055.000	200,00	142,61	Kec. Pagelaran Utara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00	14.817.600	95	11.325.000	90	15.045.000	0	-	0,00	0,00	95,00	11.325.000	95,00	76,43	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	100,00	14.817.600	95	11.325.000	90	15.045.000	0	-	0,00	0,00	95,00	11.325.000	95,00	76,43	Kec. Pagelaran Utara

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,00	14.817.600	9	11.325.000	10	15.045.000	0	-	0,00	0,00	9,00	11.325.000	90,00	76,43	Kec. Pagelaran Utara
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	100,00	214.241.080	46	132.000.000	90	132.000.000	108	132.000.000	120,00	100,00	154,00	264.000.000	154,00	123,23	Kec. Pagelaran Utara
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	214.241.080	46	132.000.000	90	132.000.000	108	132.000.000	120,00	100,00	154,00	264.000.000	154,00	123,23	Kec. Pagelaran Utara
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	10,00	214.241.080	10	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	100,00	100,00	22,00	264.000.000	220,00	123,23	Kec. Pagelaran Utara
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00	25.467.750	96	3.425.000	0	-	0	-	0,00	0,00	96,00	3.425.000	96,00	13,45	Kec. Pagelaran Utara
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	25.467.750	96	3.425.000	0	-	0	-	0,00	0,00	96,00	3.425.000	96,00	13,45	Kec. Pagelaran Utara

	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85,00	25.467.750	34	3.425.000	0	-	0	-	0,00	0,00	34,00	3.425.000	40,00	13,45	Kec. Pagelaran Utara
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	12.351.859	93	8.135.000	100	4.720.000	59	2.825.000	59,00	59,85	152,00	10.960.000		88,73	Kec. Pagelaran Utara
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92,00	12.351.859	93	8.135.000	23	4.720.000	59	2.825.000	100,00	59,85	152,00	10.960.000	165,22	88,73	Kec. Pagelaran Utara
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10,00	12.351.859	9	8.135.000	10	4.720.000	5	2.825.000	50,00	59,85	14,00	10.960.000	140,00	88,73	Kec. Pagelaran Utara

2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2024 disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah
	Adanya ancaman inflasi daerah yang belum mampu di kendalikan
	Makin mengecilnya cadangan pangan daerah
	Indeks Pangan Harapan masih rendah
	Keterbatasan lahan menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Pringsewu
Indeks Pembangunan Manusia	Hasil pertanian dan perikanan, masih dijual dalam bentuk mentah sehingga belum mampu menghasilkan nilai tambah
	Masih adanya anak putus sekolah
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu masih berada di bawah Nasional
Indeks Rasa Aman	Masih terjadinya kekerasan perempuan dan anak di masyarakat
	Masih banyaknya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum tertangani
	Masih adanya keluarga yang rentan terhadap masalah sosial

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan
Indeks Pendidikan	Masih tingginya angka kriminilatis yang terjadi di Pringsewu
	Indeks Pangan Harapan masih rendah
	Hasil pertanian dan perikanan, masih dijual dalam bentuk mentah sehingga belum mampu menghasilkan nilai tambah
	Belum berfungsi secara optimalnya keberadaan Perpustakaan di Sekolah dan di Pekon
Indeks Desa Membangun	Masih adanya anak putus sekolah
	Indeks Desa Membangun Kabupaten Pringsewu masih relatif rendah
	Masih sedikitnya status pekon mandiri di Kabupaten Pringsewu
Angka Pengangguran Terbuka	Masih relatif tingginya TingkatPengangguran Terbuka
Angka kemiskinan	Masih terdapat warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
Indeks Kesehatan	Masih terdapat angka prevalensi stunting
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Pringsewu masih rendah (B)
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Pringsewu masih Rendah (CC)
	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pringsewu masih masuk kategori kurang
Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu masuk masuk kategori Inovatif
	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pringsewu masih dalam kategori Cukup
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih relatif rendah
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Masih banyaknya kondisi jalan rusak di Pringsewu, sementara itu anggaran yang tersedia sangat terbatas
	Kondisi Infrastruktur Ibukota Kabupaten belum tertata dengan rapih
	Belum semua Perangkat Daerah memiliki gedung kantor sendiri yang representatif, dan saat ini masih menyewa rumah penduduk
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Masih terdapatnya kawasan kumuh yang belum tertangani
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Belum semua program unggulan dan prioritas daerah, dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	Masih adanya pencemaran limbah makibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
Indeks Risiko Bencana	Masih adanya ancaman bencana banjir, puting beliung dan kebakaran
	Belum seluruh Pekon ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana

2.3.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi secara sistematis berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, di mana setiap permasalahan dalam urusan tersebut merupakan penjabaran yang lebih mendalam dari akar permasalahan yang terjadi di tingkat Kabupaten. Proses identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan, termasuk tantangan, hambatan, dan kebutuhan spesifik di setiap sektor urusan pemerintahan. Hasil dari identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tersebut kemudian disusun dan disajikan secara terstruktur dalam tabel berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif.

Tabel 2. 2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Belum tercukupinya jumlah pendidik
	Belum optimalnya pelayanan pendidikan dari segi kuantitas maupun kualitas.
	Meningkatnya kasus kenakalan remaja akibat penerapan pendidickn karakter belum optimal
	Masih adanya angka putus sekolah
	Lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat akibat perkembangan zaman
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat masih bersifat hiburan belum sampai pada penanaman nilai kehidupan
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Masih adanya kematian ibu
	Masih adanya kematian Neonatal
	Masih adanya Penyakit Menular dan Tidak Menular
	Masih adanya kasus stunting
	Masih adanya kasus gizi buruk dan wasting

Urusan	Permasalahan
	Belum adanya fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan Kasus KJSU (kanker, Janutung, Stroke, Urologi)
	Belum optimalnya perbekalan kesehatan khususnya di RSUD Pringsewu
	Banyak Bangunan Puskesmas Pembantu yang belum terstandar
	Akses pelayanan Kesehatan yang belum merata dikarenakan luas wilyah kerja
	Belum memadainya Lokasi bangunan Fasilitas kesehatan atau puskesmas
	Kurangnya Jumlah Dokter Spesialis Di RSUD Pringsewu
	Ratio tempat tidur pasien terhadap populasi dipuskesmas sukoharjo belum tercukupi
Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Masih rendahnya kondisi jalan mantab kabupaten
	Masterplan drainase belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu
	Sebagian besar jalan aspal belum memenuhi ketentuan yang ada (sepertilebar aspal, street furniture, dan lain- lain)
	Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak
	Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan mendukung ketahanan pangan, dimana persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
	Belum optimalnya pemantauan terhadap kualitas air bersih atau air minum bagi masyarakat
	Terbatasnya instalasi pengolahan air limbah komunal
	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Pringsewu
	Masih terdapat perangkat daerah yang belum mempunyai gedung perkantoran yang representatif
	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu
	Masih kurangnya kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang
	Belum optimalnya penanganan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Kumuh Perkotaan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Pringsewu
Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni, baik yang bersifat Perbaikan/ Peningkatan Kualitas maupun hunian baru/perumahan yang terjangkau

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga
	Tingginya potensi kerawanan dan konflik sosial karena tingkat kemajemukan masyarakat serta perubahan sosial
	Maraknya penyakit masyarakat baik yang menular maupun tidak menular
	Belum tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sesuai standar keamanan dan keselamatan
	Belum terpenuhinya daerah layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK (tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhi waktu tanggap kurang dari 15 menit)
	Masih adanya pelanggaran perda oleh masyarakat
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) daerah belum optimal terdata dalam DT-SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) terlatih dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) lainnya belum optimal melaksanakan kegiatan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
	Kurangnya kepedulian dari sebagian masyarakat terhadap permasalahan terkait anak telantar, penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan pengemis serta korban bencana.
	Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan sementara hasil penjangkauan dan penertiban dalam upaya koersif anak jalanan, orang telantar, gelandangan dan pengemis, serta orang dengan gangguan jiwa.
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, dan korban bencana.
	Masyarakat miskin belum maksimal dalam mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS)
	Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal
	Belum tuntasnya persoalan penduduk miskin
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	
Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	Kurangnya tenaga kerja yang teramoil (Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat pelatihan)
	Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum dipahami secara menyeluruh aturan ketenagakerjaan oleh tenaga kerja maupun perusahaan (jumlah perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak)
	Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi (jumlah pelatihan kerja LPK)
	Masih tingginya angka perkawinan usia dini
	Kesadaran KB bagi pria masih rendah
	Tingginya angka unmetneed KB
	Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Belum optimalnya lembaga penyedia dan jejaring dalam rangka penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
	Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia
	Belum optimalnya kelembagaan PUG
	Belum optimalnya update data pilah, data gender, perempuan dan anak
Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Rendahnya konsumsi keberagaman pangan
	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan, terutama untuk pelaku usaha dengan usia lanjut
Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa
	Masih rendahnya Bukti Hak Milik Tanah berupa sertifikat
	Kurangnya data/administrasi pertanahan
	Belum adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi
Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LH
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan terutama di Kawasan perkotaan
	Adanya kerusakan kawasan resapan dan lindung sempadan sungai akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan yang tidak berizin

Urusan	Permasalahan
	Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Ketergantungan dengan pemerintah pusat sangat tinggi, terutama dalam jaringan komunikasi data dan ketersediaan blanko
	Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal
	Belum optimalnya pelaksanaan system pelayanan pencatatan sipil yang terintegrasi
	Belum akuratnya <i>database</i> kependudukan (masih adanya data anomali) sebagai akibat kurang tertibnya pelaporan
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya penyelesaian siklus tahunan desa, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas
	Masih kurangnya peran lembaga pekon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
	Masih maksimalnya peran lembaga pekon dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
	Belum maksimalnya pengelolaan aset pekon dalam upaya peningkatan PAD
	Masih minimnya dukungan dan perhatian pemerintah pekon terhadap pengelolaan Bumpekon
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih minimnya sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat pekon
	Kesadaran KB bagi pria masih rendah
	Kurangnya regenerasi kader IMP
Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Keterbatasan anggaran dalam operasional kegiatan perlengkapan jalan maupun pengadaan terkait program bidang perhubungan
	Masih belum seimbangnya realisasi perlengkapan jalan (LPJU, RPPJ, APILL, rambu, guardrail, halte) dengan kebutuhan
	Rendahnya kesadaran berlalu lintas di jalan
	Menurunnya kualitas dan kuantitas angkutan umum yang beroperasi
	Maraknya parkir liar dan pungutan tidak sesuai tarif
	Belum adanya pelayanan bidang perhubungan berbasis IT
	Masih banyaknya kendaraan yang belum memenuhi syarat kelayakan jalan

Urusan	Permasalahan
	Terdapat permasalahan di lapangan terkait retribusi parkir dimana pendapatan yang tercatat dengan yang disetorkan berbeda
Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi publik pemerintah daerah
	Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik
Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi aktif
	Belum optimalnya jumlah UMKM yang mendapatkan Pemberdayaan
Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapan milik mereka
	Sarana perdagangan bangunan pasar yang perlu ditingkatkan kualitasnya
	Kurangnya promosi produk unggulan Kabupaten
Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Masih sulitnya menembus perizinan untuk usaha ekspor
	Belum optimalnya pemantauan terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan bimtek
	Belum adanya pemetaan pelaku usaha tentang tolok ukur standarisasi produk dan proses produksi
Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Kurangnya kompetensi SDM Aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan (Jumlah ASN bersertifikat)
	Pertumbuhan PMA dan PMDN belum optimal
	Belum tersedianya regulasi yang mendukung daya saing dan iklim investasi
	Data dan informasi potensi investasi dan produk unggulan daerah belum optimal
	Belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM)
	Fasilitasi kerjasama penanaman modal belum optimal
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Kurangnya Minat Pemuda Dalam Berwirausaha (Persentase Rasio Wirausaha Pemuda)
	Minimnya Jumlah Atlet yang Belum Masuk Pada tingkat (Nasional & Internasional)
	Belum Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Cabang Olahraga
Urusan Pemerintah Bidang Statistik	Belum optimalnya tata kelola statistik sektoral daerah
Urusan Pemerintah Bidang Persandian	Belum optimalnya tata kelola, infrastruktur, dan pemanfaatan layanan keamanan informasi serta jaringan komunikasi sandi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang aman dan terpercaya

Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	Lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam Masyarakat akibat perkembangan zaman
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi Seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat masih bersifat hiburan beum sampai pada penanaman nilai kehidupan
	Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkeaktifitas dan berekspresi
Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan dan Arsip	Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi
	Prasarana dan sarana perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan
	Kerja sama perpustakaan belum optimal
	Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai
	Belum semua Perangkat Daerah mengelola arsip dengan baik
	Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip belum optimal
	Kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip belum memadai
Urusan Pemerintah Pilihan	
Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	Destinasi wisata belum mampu menarik wisatawan mancanegara
	Masih kurang kuatnya pencitraan yang mampu membuat destinasi lebih unggul. Misalkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan sadar wisata sebagai tuan rumah yang baik sehingga meningkatkan minat berkunjung kembali (<i>repeater</i>) maupun lama tinggal wisatawan
	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata masih konvensional, belum optimal memanfaatkan teknologi informasi
	Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata belum secara terarah dikembangkan untuk berbagai segmen wisatawan
	Regulasi kawasan pariwisata belum terintegrasi antar pemangku kepentingan
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian	Keterbatasan penyuluhan dari segi kualitas dan kuantitas
	Generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian
	Masih kurangnya ketersediaan Benih dan Pupuk
	Belum optimalnya penanganan bencana pertanian

Urusan	Permasalahan
	Belum optimalnya Produktivitas hasil eprtanian (Padi)
	Belum ditetapkan PERDA LP2B (Perda terakhir No. 6 Tahun 2016)
	Data kepemilikan kebun sawit rakyat belum teridentifikasi secara menyeluruh sehingga diperlukan pendataan
	Rendahnya produksi kakao
	Rendahnya produktivitas tembakau
	Kurangnya Pengetahuan Peternak dalam manajemen budidaya peternakan yang baik
	Kurangnya Bahan Obat dan Alat Pendampingan Usaha Peternakan
	Rendahnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dalam mendukung produktivitas ternak
	Masih terbatasnya produk peternakan yang telah memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan
	Kurangnya Kesadaran Terhadap konsumsi Produk Protein Hewani
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran
Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Menurunnya produksi ikan pada musim kemarau
	Menurunnya ketersediaan benih ikan
	Masih rendahnya kelompok pembudidaya ikan yang memiliki pemahaman teknologi
	Kurang memdaiynan sarana dan prasarana UPT Pengembangan Budi Daya Ikan (PBI)
Urusan Pemerintahan Penunjang	
Urusan Penunjang Perencanaan	Masih belum optimalnya kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi
	Masih kurangnya pemahaman pentingnya perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah
	Minimnya motivasi perangkat daerah dalam inovasi daerah
	Belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan karya hasil inovasi daerah (KOMPAS IPTEK)
Urusan Penunjang Kepegawaian	Masih Rendahnya Indeks Sistem Merit
	Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) belum memperhitungkan aspek penilaian kinerja sebagai faktor yang utama disamping disiplin kerja

Urusan	Permasalahan
Urusan Bidang Penunjang Pemerintahan	Belum terdapat kebijakan internal tentang perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
	Belum Maksimalnya Indeks Profesionalitas ASN
	Masih terdapat ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan belum sesuai dengan jabatan yang diemban
	Masih banyak ASN belum mengikuti diklat atau sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya, atau belum melakukan pemutakhiran data pengembangan kompetensinya
	Belum melakukan identifikasi dan monitoring terhadap pegawai dengan kinerja bermasalah dalam pemantauan kinerja
	Masih terdapat oknum ASN yang tidak patuh terhadap aturan hukum dan aturan kepegawaian yang mengakibatkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN
	Capaian realisasi pajak PBB-P2 masih rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2
	Belum adanya database pajak daerah berbasis NIK menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan pajak daerah dalam hal pencapaian target pajak
	Tidak tercapainya target PBB-P2 dan BPHTB dikarenakan nilai NJOP sebagai dasar penetapan belum sesuai dengan kondisi aktual
	Masih kurangnya minta masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor
	Belum tercapainya target pajak BPHTB karena masih kurangnya minat masyarakat untuk mengurus pemindahan hak atas tanah dan bangunan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terdapat 6 (enam) bidang pelayanan dasar yang wajib meurumiliki SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang sosial serta bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pada dasarnya rencana pencapaian SPM sebagian besar telah tergambar dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Dalam bidang pendidikan misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebagai pengampu SPM bidang pendidikan dasar telah memasukkan rencana pencapaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam Renja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan yang dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Adapun Kinerja terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib, sebagai berikut:

A. SPM Bidang Pendidikan

Sebagaimana evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. Untuk mengevaluasi pelaksanaan SPM di Kabupaten Pringsewu berdasarkan indikator-indikator pemahaman program, yaitu salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022. SPM menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang mengatur jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pemenuhan SPM Pendidikan oleh pemerintah daerah, dan pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan.

Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara nasional, Target batas waktu pencapaian indikator SPM secara nasional dalam pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

Tabel 2.3 Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini					81.70%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		11.393	9.852	1.541	86.47
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					
	• Angka partisipasi sekolah	%	84.55	70.73	13.82	83.65%
	• Angka partisipasi murni		75.37	44.51	30.86	59.06%
	• Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	43.03	41.67	1.36	96.84%
	• Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	68.56	74.11	0	100.00%
	• Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1	0.23	0.77	23.00%
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00%
	• Indeks distribusi guru	%	2	0.66	1.34	33.00%
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	71.33	37.64	33.69	52.77%
	• Proporsi PTK penggerak	%	2	0.3	1.7	15.00%
2	Pendidikan Dasar					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.06%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	65430	56479	8951	86.32%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.51%
	Sekolah Dasar (SD)					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Angka partisipasi kasar	%	100	92.27	7.73	92.27%
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	99.72	0.28	99.72%
	• Kemampuan literasi	Nilai	77.5	77.2	0.3	99.61%
	• Kemampuan numerasi	Nilai	67	66.56	0.44	99.34%
	• Perbedaan skor literasi	Nilai	100	60.25	39.75	60.25%
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	46.77	53.23	46.77%
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	74.96	71.73	3.23	95.69%
	• Indeks iklim kebinekaan	Nilai	73.27	72.57	0.7	99.04%
	• Indeks iklim inkluvitas	Nilai	62.09	54.82	7.27	88.29%
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50	50.00%
	• Indeks distribusi guru	%	2	0.37	1.63	18.50%
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	100	28.32	71.68	28.32%
	• Proporsi PTK penggerak	%	2	0.06	1.94	3.00%
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	• Angka partisipasi kasar	%	100	108.49	-8.49	100.00%
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	96.29	3.71	96.29%
	• Kemampuan literasi	Nilai	69.07	70.35	-1.28	100.00%
	• Kemampuan numerasi	Nilai	67.81	64.87	2.94	95.66%
	• Perbedaan Skor Literasi	Nilai	100	67.15	32.85	67.15%
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	100	59.63	40.37	59.63%
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	71.78	68.2	3.58	95.01%
	• Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	70.16	72.43	-2.27	100.00%
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	50	26.5	23.5	53.00%
	• Indeks distribusi guru	%	2	0.34	1.66	17.00%
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	100	39.12	60.88	39.12%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Target	Realisasi	Belum Terpenuhi	
	• Proporsi PTK penggerak	%	2	0.18	1.82	9.00%
3	Pendidikan Kesetaraan					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.99%
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1047	916	131	87.49%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					11.65%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	58.23%
	• Angka partisipasi kasar	%	100	70.15	29.85	70.15%
	• Angka partisipasi sekolah	%	100	17.61	82.39	17.61%
	• Kemampuan literasi	Nilai	54.54	49.09	5.45	90.01%
	• Kemampuan numerasi	Nilai	56.67	49.09	7.58	86.62%
	• Perbedaan Skor Literasi	Nilai	58.71	58.71	0	100.00%
	• Perbedaan Skor numerasi	Nilai	57.86	53.86	4	93.09%
	• Indeks iklim keamanan	Nilai	56.63	56.63	0	100.00%
	• Indeks iklim kebinekaan	Nilai	63.04	65.15	-2.11	100.00%
	• Indeks iklim inklusivitas	Nilai	52.46	52.18	0.28	99.47%
	• Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00%
	• Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00%
	• Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00%
	• Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00%

Permasalahan dan Solusi

Selain ketercapaian SPM, kinerja dari pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Pringsewu maka dilakukan analisis efektifitas terhadap pencapaian SPM. Perhitungan efektifitas apabila menunjukkan hasil persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa capaian SPM semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase, hasilnya menunjukkan semakin tidak efektif. Kesimpulan bahwa tidak tercapainya target pelaksanaan indikator SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten Pringsewu ini disebabkan belum peserta didik baik PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu masih ada peserta didik yang belum terlayani atau tidak sekolah. Selain itu kurangnya sumberdaya manusia terutama untuk guru mata pelajaran dan masih banyak guru yang belum bersertifikasi, namun hal ini sudah diatasi oleh pemerintah daerah dengan membuka rekrutment guru PPPK pada Tahun 2024 meskipun hasil rekrutmen ini masih belum berimplikasi maksimal pada pelaksanaan indikator SPM bidang pendidikan dasar.

Sedangkan Pembangunan Kabupaten Pringsewu periode 2023-2026, bidang pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan Pringsewu. Hal tersebut sejalan dengan dengan judul misi pembangunan Pringsewu, yaitu Membangun SDM Unggul dan Berkarakter. Perlu dipahami bahwa tujuan pembangunan pendidikan di Pringsewu untuk periode 2023-2026 adalah meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses Pendidikan.

Dalam permasalahan yang ada dalam rangka upaya optimalisasi penerapan dan pencapaian target indicator SPM bidang pendidikan yang masih adanya “GAP” antara capaian masing-masing indicator dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah / target nasional. GAP merupakan suatu kondisi yang mencerminkan belum optimalnya penerapan dan pencapaian target indicator SPM. GAP dapat terjadi yang disebabkan oleh banyak factor, baik internal maupun eksternal.

Adapun faktor yang mempengaruhi / menghambat optimalisasi pelaksanaan SPM di Kabupaten Pringsewu yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah salah satu faktor yang berasal dari dalam lingkungan SKPD pelaksana SPM yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan SPM bidang pendidikan dasar di kabupaten Pringsewu ini adalah:

- a.** Keterbatasannya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas,
- b.** Keterbatasan sarana dan prasarana kantor,
- c.** belum terpenuhi sarana dan prasarana sekolah disemua jenjang yang sesuai dengan standar nasional pendidikan khususnya SD
- d.** tidak terakomodirnya program/kegiatan penerapan SPM dalam proses perencanaan ataupun penganggaran,
- e.** Keterbatasannya SDM perencana SPM
- f.** Terbatasnya alokasi anggaran

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah permasalahan dari luar SKPD yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dasar di Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun adalah:

- 1.** Masih kurangnya kepedulian masyarakat tentang kegiatan pendidikan luar biasa terutama bagi anak-anak yang memiliki kelainan khusus dari anak-anak normal lainnya serta adanya kondisi masyarakat tertentu yang tidak mendukung proses/kegiatan penerapan SPM.
- 2.** Tidak tersinkronisasi antara data pendukung yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pringsewu dengan data Disdukcapil dan Kemenag Kab. Pringsewu sehingga penghitungan pencapaian SPM kurang maksimal.

Solusi yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan penataan anggaran pada tahun berjalan (penataan anggaran TA.2025) untuk mengakomodir program/kegiatan yang terkait dengan SPM Pendidikan Dasar.
2. Memasukan program/kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM dalam proses perencanaan dan penganggaran baik pada satuan kerja penyelenggara dalam Renstra/Renja maupun RPJMD.
3. Adanya penetapan target capaian SPM oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada target capaian secara nasional baik indikator, nilai maupun batas waktunya sebagai acuan bagi satuan kerja penyelenggara dalam mengoptimalkan penerapan SPM dan pencapaian target indikatornya.
4. adanya upaya pengoptimalan pegawai yang ada dan mengikut sertakan mereka dalam diklat-diklat sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
5. pengajuan sarana dan prasarana Kantor dalam setiap musyawarah pembangunan.
6. Menganggarkan kembali dana untuk indikator-indikator yang belum mencapai 100% sehingga untuk tahun kedepan apa yang diharapkan dapat tercapai.
7. peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan melalui diklat dan kualifikasi guru

B. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan. Adapun Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut

**Tabel 2.4 Sasaran dan Capaian SPM Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu Tahun 2024**

No	URAIAN	Sasaran	Target (%)	Capaian	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	7.830	100	5.333	68,11
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu satu tahun	7.805	100	5.664	72,56
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu satu tahun	7.212	100	5.650	78,34
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	34.970	100	25.659	73,37
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu satu tahun ajaran	62.329	100	61.465	98,61
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				
	Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama	270.378	100	194.138	71,80
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				
	Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu satu tahun perhitungan	49.708	100	40.760	82,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80.661	100	44.616	55,31
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)				
	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5.122	100	5.122	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				

No	URAIAN	Sasaran	Target (%)	Capaian	Capaian (%)
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	722	100	722	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.338	100	7.338	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama	7.298	100	7.298	100

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2020 pasal 4 yang menyebutkan bahwa ”Capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen)” dan Permendagri no 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel:

Tabel 2.5. Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019 - 2024

NO	Indikator S P M	Tahun Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ibu hamil	89,9	87,2	91,0	92,9	90,4	68,1
2	Pelayanan Ibu bersalin	92,8	95,6	96,8	89,1	90,9	72,6
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	94,7	99,1	101,0	97,5	95,1	78,3
4	Pelayanan Balita	78,9	44,0	46,4	65,8	93,9	73,4
5	Pelayanan Kesehatan pd pendidikan dasar	62,9	12,5	76,2	71,7	98,0	98,6
6	Pelayanan kesehatan pd usia produktif	15,2	7,5	13,7	28,7	58,0	71,8
7	Pelayanan kesehatan pd usia lanjut	28,4	15,8	53,1	76,2	76,6	82,0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	64,7	26,0	12,5	34,9	38,8	55,3
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	146,5	59,8	14,8	78,0	100,0	100,0

NO	Indikator S P M	Tahun Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	84,4	55,2	80,9	84,6	100,0	100,0
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	44,4	44,7	35,7	100,0	100,0	100,0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	64,5	100,0	105,5	100,0	100,0	100,0
	Rata-Rata	72,29	53,94	60,63	76,60	86,80	83,3

Pada Tahun 2024, sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal maka ada perubahan pencatatan dan penilaian dengan menambahkan capaian dan mutu SPM. Berikut penilaian SPM tersebut :

Tabel 2.6 Capaian sasaran SPM Bidang Kesehatan 2024
sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021

N O	Indikator S P M	Sasaran	Capaian	Capaian %	PERMENDAGRI 59				
					IP MUTU	20%	IP PENCAPAIAN	80%	IP SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	7830	5333	68,1%	98,1%	20%	68,1%	54,5 %	74,1%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	7805	5664	72,6%	100,0 %	20%	72,6%	58,1 %	78,1%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7212	5650	78,3%	100,0 %	20%	78,3%	62,7 %	82,7%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	34970	25659	73,4%	100,0 %	20%	73,4%	58,7 %	78,7%
5	Pelayanan Kesehatan pd usia pendidikan dasar	62329	61465	98,6%	100,0 %	20%	98,6%	78,9 %	98,9%
6	Pelayanan kesehatan pd usia produktif	270378	194138	71,8%	100,0 %	20%	71,8%	57,4 %	77,4%

N O	Indikator S P M	Sasaran	Capaian	Capaian %	PERMENDAGRI 59				
					IP MUTU	20%	IP PENCAPAIAN	80%	IP SPM
7	Pelayanan kesehatan pd usia lanjut	49708	40760	82,0%	100,0 %	20%	82,0%	65,6 %	85,6%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	80661	44616	55,3%	100,0 %	20%	55,3%	44,3 %	64,3%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	5122	5122	100,0%	100,0 %	20%	100,0%	80,0 %	100,0 %
10	Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	722	722	100,0%	100,0 %	20%	100,0%	80,0 %	100,0 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	7338	7338	100,0%	100,0 %	20%	100,0%	80,0 %	100,0 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7298	7298	100,0%	100,0 %	20%	100,0%	80,0 %	100,0 %
RATA-RATA SPM				83,3%		20,0 %		66,7 %	86,6%

Hasil capaian Indeks SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu tahun 2024 bidang Kesehatan Kabupaten Pringsewu adalah 86,6% dengan demikian tergolong **Tuntas Madya**.

Berikut analisa kendala dan Solusi yang sudah dilakukan untuk pencapaian SPM 2024

Tabel 2.7. Analisa Permasalahan dan Strategi Pemenuhan SPM

NO	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	INOVASI/ SOLUSI
1	Pelayanan kesehatan ibu Hamil	Kendala K6 Ibu hamil belum paham pentingnya periksa USG pada Trimester 1 dan 3	1. Melakukan sosialisasi pada ibu hamil dan keluarga pentingnya

NO	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	INOVASI/ SOLUSI
		- Ibu hamil tidak mempunyai kendaraan untuk ke puskesmas - Dokter yang dilatih dalam 1 puskesmas ada yang baru satu dokter dan adanya oembatasan rujukan spesialistik serta oembatasan diagnise BPJS - Dokter yang sudah dilatih USG ada yang tugas belajar dr spesialis - Dokter yang dilatih USG rata rata puskesmas baru 1 sehingga untuk penjadwalan pemeriksaan USG masih minim sekali ada yang 1 puskesmas hanya 1 minggu sekali dan dibatasi jumlah pasien hanya 5	skrining Kesehatan oleh dokter pada TW 1 dan TW 3 pada waktu kelas ibu hamil dan lokmin linsek 2. Membuat surat edaran peningkatan pelayanan ibu hamil 3. Pelatihan USG untuk dokter umum 4. Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program secara berkala 5. Sasaran menggunakan sasaran real
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1. Sasaran yang terlalu tinggi dengan menggunakan data pusdatin dan ada 1 ibu hamil yang melahirkan dengan dukun 2. Sudah dilakukan sweeping setiap bulannya tetapi sasaran tidak sesuai dengan data sasaran pusatin	1. Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program secara berkala 2. Sasaran menggunakan sasaran real dan menetapkan dengan SK Bupati 3. Melakukan kemitraan dengan dukun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1. Sasaran yang terlalu tinggi 2. Pelayanan Kesehatan Baru Lahir belum sesuai standar dengan alat skrining PJB hanya 1 per puskesmas	1. Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program secara berkala 2. Sasaran menggunakan sasaran real
4	Pelayanan kesehatan balita	1. Sasaran yang terlalu tinggi 2. Pelayanan skrining SDIDTK palaksanaan belum lengkap 3. Puskesmas sudah melakukan SDIDTK di Pusyandu maupun PAUD 4. Puskesmas juga sudah melakukan pelatihan untuk kader posyandur dan guru PAUD	1. Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan program secara berkala 2. Sasaran menggunakan sasaran real
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	- Belum semua paham akan Definisi Operasional dan Indikator Program Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar - Sasaran masih menggunakan sekolah SD, SMP , dan SMA. - Perhitungan masih ada yang terpaku hitungan tahun berjalan bukan Tahun Ajar	- Persamaan Persepsi terkait indikator program dan DO Pelayanan Kesehatan Usia Pend Dasar - Menggunakan sasaran real SD, SMP atau usia 7 sampai 15 tahun atau kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. - Perhitungan menggunakan Tahun Ajaran.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	- Total sasaran besar 270.378 jiwa - Anggran tidak sesuai dengan jumlah SDM tenaga pelayanan	Penguatan integrasi bersama multi sektor dalam pergerakan sasaran

NO	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN	INOVASI/ SOLUSI
		- Kesadaran masyarakat usia produktif untuk mengunjungi lanan/posko kesehatan minim - Sistem integrasi layanan primer (ILP) banyak keterbatasan untuk inovasi program - Terbatasnya pelaksana. SDM input dan pelaksanaan pelayanan	- Menghitung kebutuhan anggaran pelaksanaan dengan kesesuaian jumlah SDM dan batasan oengunaan anggaran - Perlu penguatan dari pemerintah kabupaten terkait apresiasi dan punishment melalui evaluasi pencaptain target SPM
7	Pelayan Kesehataan Usia Lanjut	Permasalahan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, antara lain : - Masih terdapat sasaran dan yang lansia dilakukan pemeriksaan kesehatan - Sasaran yang datang ke posyandu atau fasilitas kesehatan hanya lansia itu saja - Belum semua paham akan Definisi Operasional, dan indikator Program - Dari hasil laporan, tidak ada puskesmas yang melaksanakan PJP dan Homecare, hasil konfirmasi, semua Puskesmas sudah dilatih PJP - BMHP Kolesterol tidak tersedia karena anggaran tidak mencukupi	Hal – hal yang perlu dilakukan, antara lain : - Persamaan Persepsi terkait Indikator Program dan Definisi Operasional - Dilakukan dengan sasaran Real PRINGSILAT (PRINGSEWU SKRINING LANSIA SEHAT)
8	Pelayan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Penderita penyandang HT tidak patuh berkunjung ke fasyankes/RS, sehingga Fasyankes se kabupaten tidak bisa menangkap jumlah target sasaran yang ditetapkan dengan jumlah 80.662	- Kerjasama multi sektor untuk perluasan promosi kesehatan terkait kepatuhan pengobatan dengan Hipertensi - Berintegrasi dan penguatan dengan BPJS terkait pengelolaan penyakit kronis HT melalui kegiatan prolanis

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang kesehatan kabupaten Pringsewu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang kesehatan kabupaten Pringsewu tahun 2024

No	Bidang Urusan/Indikator	2024		Keterangan
		Target Capaian	Capaian	
1	Angka kematian ibu	129/100.000 KH	194/100.000 KH	Belum terpenuhi Kematian ibu tinggi akibat ibu hamil yang menderita hipertensi belum rutin mengkonsumsi obat hipertensi sehingga meningkatkan resiko saat melahirkan
2	Angka kematian bayi	5/1.000 KH	8/1000 KH	Belum terpenuhi Masih tinggi ibu hamil dengan komplikasi
3	Angka prevalensi stunting	10,91%	19,5%	Belum terpenuhi Beberapa faktor penyebabnya antaralain: Pengetahuan ibu hamil yang kurang terkait gizi saat mengandung. Bayi dan balita belum mendapatkan gizi yang baik secara merata termasuk asupan MP-ASI Tidak Memadai (Monoton & Kurang Variasi) Infeksi Berulang (Terutama Diare & ISPA) Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam pencegahan dan penanganan stunting antara lain: Sosialisasi PMT Lokal Tingkat Kabupaten Pringsewu Pendampingan Balita Stunting ke RSUD Pringsewu Pembekalan Kader dalam Pelaksanaan PMT Lokal Pelaksanaan PMT Lokal Ibu Hamil KEK Pelaksanaan PMT Lokal Balita BB Tidak Naik, Balita BB Kurang, Balita BB Gizi Kurang Penguatan koordinasi lintas sektor untuk intervensi sensitif penanganan stunting Target stunting pada tahun 2026 yaitu 15,65%
4	Angka kesakitan	43,50%	67,88%	Belum terpenuhi

				Data angka kesakitan meningkat karena penarikan data lebih luas mencakup klinik swasta tidak terbatas dari puskesmas
us	Rumah tangga ber PHBS	60%	61,52%	Sudah terpenuhi Masyarakat yang dipantau masih belum menerapkan PHBS dengan baik salah satunya merokok
6	Universal health coverage jaminan kesehatan	70%	98%	Sudah terpenuhi Kerjasama anatar pemerintah dengan BPJS yang baik sehingga meningkatkan kepesertaan
7	Kategori Nilai Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	Sudah terpenuhi
8	Presentase Puskesmas Akreditasi Utama/Paripurna	60%	70%	
9	Kategori Kabupaten Kota Sehat	3	9	Tatanan terpenuhi Ada perubahan dari Permenkes No 13 tahun 2022

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah.

Jenis-jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu:

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

- 1. Penyediaan kebvutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Bidang Urusan Perumahan Rakyat

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah 100% sedangkan Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah 0%, hal ini disebabkan pada Tahun 2024 tidak ada rumah warga Kabupaten Pringsewu yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah daerah. Rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	640	940	-300	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	100.00%
			(1)	(2)	(3)	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	JARINGAN PERPIPAAN					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	160	235	-75	100.00%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	160	235	-75	100.00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	0	0	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20.00%
	A. Jumlah yang Harus Dilayani:	Orang	72	156	-84	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang Belum terlayani	100.00%
			(1)	(2)	(3)	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	18	39	-21	100.00%
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga	Rumah Tangga	18	39	-21	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)		(3)			(4)
	tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
	3 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	18	39	-21	100.00%

Sumber :SPM Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

D. SPM Bidang Sosial

Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu mencakup informasi tentang kondisi aktual penerapan SPM mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagai implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar termasuk di dalamnya ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM merupakan salah satu materi muatan dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial sebagaimana termuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang

Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelayanan dasar diberikan kepada penerima layanan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1. Kriteria Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia**
Telantar di luar Panti Sosial penerima Rehabilitasi Sosial dasar:
 - b.** Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
 - c.** Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus
- 2. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya yang mencukupi kriteria-kriteria Tuna Sosial penerima layanan yang meliputi:**
 - a.** Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b.** Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c.** Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d.** Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli
- 3. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:**
 - a.** Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
 - b.** Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c.** Adanya surat penetapan bencana dari bupati/walikota

Upaya pemenuhan pelayanan dasar sosial di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam bentuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, dengan mengacu pada tahapan dan target pencapaian yang sudah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a.** Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b.** Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti skala kabupaten/kota;
- c.** Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti skala Kab/kota;
- d.** Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kabupaten/kota;
- e.** Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut

Tabel 2.9
Target Capaian Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Tahun Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasara	Tahun	Target
		Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti	2024	100%
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti yang Terpenuhi		
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di	2024	100%
		Persentase (%) Anak Telantar di luar panti		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti	2024	100%
		Persentase (%) Lanjut Usia Telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di Luar Panti	2024	100%
		Persentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
5.	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial.	2024	100%
		Persentase (%) korban bencana alam dan sosial skala kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat		

3. Realisasi Capaian

Analisis dan rincian atas capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2024 disertai rata-rata capaian Indikator SPM berdasarkan jenis dan mutu pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Realisasi Capaian Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS UTAMA			94.50%
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				80.96%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				60.96%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.20%
		2303	1755	548	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan	2303	2303	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	5	5	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanaan	1	1	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	5	5	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	5	5	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	5	5	0	100.00%
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	5	5	0	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	1755	1755	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%

	12 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	1755	1755	0	100.00%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				96.54%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				76.54%
		Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum	95.67%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	47,990	45,914	2,076	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00%
	1 . Layanan data dan	45,914	45,914	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	1	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanan	149	149	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	149	149	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	149	149	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	149	149	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	149	149	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas	1	1	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan	45,914	45,914	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	45914	45914	0	100.00%
	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / QUANTITY			TOTAL PENCAPAIAN
	2	3			4
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				96.49%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				76.49%
		Jumlah Total yang	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	95.62%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	26,471	25,311	1160	

	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/	100.00%
	1 . Layanan data dan	25,311	25,311	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	1	1	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanaan	143	143	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	143	143	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	143	143	0	100.00%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	143	143	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	143	143	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	143	143	0	100.00%
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah /	1	1	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi	25,311	25,311	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	25311	25311	0	100.00%
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Banti				100.00%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00%
		Jumlah Total yang	Jumlah Total yang Terlavani	Yang Belum Terlayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	7	7	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				20.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/	100.00%
	1 . Layanan data dan	7	7	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi	7	7	0	100.00%
	3 . Penyediaan permakanaan	7	7	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	7	7	0	100.00%

	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	7	7	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan	7	7	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga	7	7	0	100.00%
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	7	7	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	1	1	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan	1	1	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan	7	7	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	7	7	0	100.00%
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	2	3			4
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi				96.00%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00%
		Jumlah Total yang	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	• Jumlah yang Harus Dilayani:	122	122	0	
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16.00%
	• Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	80.00%
	1 . Penyediaan permakanan	122	122	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	122	122	0	100.00%
	3 . Penyediaan tempat	0	0	0	0%
	4 . Penanganan khusus bagi	122	122	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan	122	122	0	100.00%

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani secara optimal sesuai target dan batasan waktu pencapaian, sedangkan di sisi lain jumlah PPKS semakin bertambah mengingat kondisi sosial masyarakat yang dinamis
2. Keterbatasan sumber daya meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang sepadan dengan beban kerja organisasi ditinjau dari jumlah dukungan personil dan kapasitas aparatur, Sumber Daya Anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan pendukung SPM disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta kondisi sarana prasarana operasional kantor penunjang kinerja pelayanan yang kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.
3. Kurang optimalnya pencapaian sasaran dan target akibat berbagai faktor internal maupun eksternal di luar kemampuan organisasi perangkat daerah, salah satunya adalah tipologi kelembagaan perangkat daerah di mana Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu sebagai Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial merupakan perangkat daerah Tipe C sehingga kurang sebanding dengan volume pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Uraian permasalahan di atas memunculkan beberapa aspek yang diharapkan dapat menjadi fokus perhatian maupun antisipasi terkait peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Langkah-langkah yang dapat diambil sebagai solusi dari kendala atau permasalahan tersebut, antara lain mencakup:

1. Akselerasi dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial baik antar instansi pemerintah, maupun lintas sektor.
2. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) melalui Pendidikan, Pelatihan, atau Bimtek

3. Menjalin kerjasama dengan Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial, Lembaga Sosial, pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan pihak terkait lainnya yang peduli pada penanganan masalah sosial di Kabupaten Pringsewu

E. SPM BIDANG TRANTIBUMLINMAS

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu sebagai implementasi dari Kebijakan dan Strategi penanganan masalah-masalah Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dijadikan Acuan dalam target pencapaiannya.

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas merupakan Penjabaran dari Target yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan PERMENDAGRI Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas mencakup 4 (Empat) pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban terjadi Kebakaran

B. Target dan Indikator Penerimaan SPM

Target dan Indikator pada SPM Trantibumlinmas telah ditentukan sesuai Lampiran Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk Target dan Indikator SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu tahun 2024 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.1

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM BIDANG TRANTIBUMLIMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						keterangan
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						keterangan
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (Sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaranyang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						keterangan
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	

C. Realisasi

Tabel 2.12
Realisasi SPM Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN 1	INDIKATOR PENCAPAIAN 2	PERHITUNGAN		REALISASI %
1.e.3	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	2485	X 100	99%
				2500		
1.e.4	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang berada dikawasan Rawan Bencana	917	X 100	100%
				917		
1.e.5	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang menjadi korban bencana	437	X 100	97%
				437		
1.e.6	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah Jumlah Layanan Pemadaman Dikabupaten/kota	Jumlah kejadian kebakaran dikabupaten/kota	18	X 100	67%
				31		
1.e.7	WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN(15 MENIT)	Rata-rata waktu tanggap,dihitung dari pelaporan,penyiapan tim dan peralatan, Jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Jumlah Bencana Kebakaran Non-Response Time	31	X 100	67%
				18		

D. Permasalahan dan Solusi

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana : Bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi dan Menyeluruh dalam rangka memberikan Perlindungan kepada Masyarakat dari Ancaman, Resiko dan Dampak Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut meliputi tahap pra-Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana / Tahap Pemulihan.

Adapun faktor-faktor Permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Pringsewu berdasarkan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Sertifikasi Pendidikan & Pelatihan Dasar (Diklatsar) yang Relevan dan Masih perlunya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta mengoptimalkan Peran Serta Swasta dan Lembaga-Lembaga Non-Pemerintah dalam upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana Alam dan ketika terjadi Kebakaran. Kuantitas dan Kualitas Personil yang memiliki Sertifikat Penanggulangan Kebakaran masih kurang memadai.
2. Masih banyaknya Sungai dan Drainase yang rusak akibat tergerus air pada saat musim hujan yang akan berdampak timbulnya bencana banjir di Kabupaten Pringsewu
3. Belum adanya Peta Rawan Bencana yang lebih kompleks di Kabupaten Pringsewu sehingga masih sulit untuk menyusun Program – Program Penanggulangan Bencana (PB) yang berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana
4. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana dan kejadian Kebakaran dan belum adanya Standart Oprasional Prosedur (SOP) baik dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana

ataupun terkait dengan Penanganan Pengungsi Bencana Alam ataupun Bencana Kebakaran di Kabupaten Pringsewu

5. Masih perlunya Pembinaan Petugas Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Kebakaran dan jumlah Kendaraan Pemadam Kebakaran hanya 3 (tiga) Unit untuk menjangkau Wilayah seluas 625 km²
6. Kegiatan Penanggulangan Bencana masih belum berorientasi pada Mitigasi Bencana : Identifikasi, Kajian, dan Pemantauan Resiko Bencana serta Penetapan Sistem Peringatan Dini masih kurang memadai
7. Perlu di bentuknya UPTD Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

Adapun faktor-faktor Solusi yang perlu diterapkan BPBD Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Perbaikan dan Pembersihan Saluran Air tentu harus ada. Di Wilayah tertentu bisa diadakan secara Gotong-Royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus menerus dengan waktu berkala. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya Banjir
3. Tersedia Informasi dan Peta Kawasan Rawan Bencana untuk tiap Jenis Bencana. Sehingga nantinya dalam menyusun Program-Program Penanggulangan Bencana (PB) yang berbasis Masyarakat di Daerah Rawan Bencana dapat Terealisasi dengan baik.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana sesuai dengan kebutuhan dan Ketenntuan yang berlaku
5. Mengembangkan Kapasitas & Kapabilitas serta Kompetensi Aparatur ASN dan Non-ASN baik Petugas Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Kebakaran di Kabupaten Pringsewu agar dapat menciptakan Personil Penanggulangan Bencana yang handal dan Berkompetensi

6. Diperlukan adanya Sosialisasi untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam menghadapi Bencana Alam, terutama yang bermukim di Daerah Rawan Bencana, untuk mengambil langkah apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara Penyelamatan Diri (Evakuasi) jika Bencana timbul, dan Pengaturan serta penataan Kawasan Rawan Bencana untuk Mengurangi Ancaman Bencana yang akan terjadi.
7. Perlu adanya pembentukan dan penambahan UPTD Pos Komando Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Sehingga saat Masyarakat membutuhkan bantuan Petugas Pemadam Kebakaran dapat dengan cepat (Respon Time) dilaksanakan

B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penerapan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Permendagri RI Nomor Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas mencakup 3 (tiga) pelayanan dasar yaitu :

1. Ketentraman dan ketertiban umum
2. Penanganan K3
3. Perlindungan masyarakat

B. Target Dan Indikator Penerimaan SPM

Target dan Indikator pada SPM Trantibumlinmas telah ditentukan sesuai lampiran Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk target dan indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM BIDANG
TRANTIBUMLIMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						keterangan
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu Capaian	
1	ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	Cakupan penegakan perda dan perbup	Setiap Tahun	Urusan ketentraman dan Ketrertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Meningkatnya peran serta satlinmas	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang jasa dan Sumber Daya Manusia	a. Rasio sat Linmas Perkecamatan b. prosentase poskamling	Setiap Tahun	

Realisasi SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERHITUNGAN	REALISASI %
1	ketentraman dan ketertiban	Cakupan penegakan perda dan perbup	$\frac{36}{} \times 100$	100
2	Meningkatnya peran serta satlinmas	Rasio sat Linmas Perkecamatan	$\frac{1806}{} \times 100$	40,85
		prosentase poskamling aktif	$\frac{905}{} \times 100$	6,91

D. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh satpol.pp Kabupaten Pringsewu salah satunya adalah kurangnya anggaran di beberapa kegiatan khususnya pada kegiatan-kegiatan yang peruntukannya untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta kurang/minimnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Pringsewu. Adapun faktor-faktor Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurang nya sumber daya manusia (SDM) yang ada di Satuan polisi Pamong Praja dalam memahami tentang produk hukum yang ada (perda dan perkada)
2. Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan serta penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Masih perlunya pembinaan bagi anggota satuan polisi pamong praja
4. Masih minimnya pegawai satuan polisi pamong praja yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS)
5. Masih minimnya tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang undangan (perda dan perkada)

Solusi yang perlu diterapkan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut

1. Pengadaan sarana dan prasarana penanganan serta penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (TRANTIBUM)
2. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur ASN dan Non ASN
3. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang ada (perda dan perkada)
4. Peralihan status pegawai satuan polisi pamong praja yang masih berstatus Non ASN

BAB III

KERANGKA EKONOMI

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pringsewu dalam RPJMD difokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang selaras dengan tata ruang. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memperkuat struktur perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bersih untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah melibatkan optimalisasi potensi sumber daya yang ada dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Aspek agama dan budaya juga menjadi bingkai utama dalam menciptakan harmoni sosial dan lingkungan di Kabupaten Pringsewu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pringsewu antara lain :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan gender, melalui :
 - a. Membangun pedesaan dan menata perkotaan.
 - b. Mengembangkan sistem perekonomian masyarakat yang terpadu dan kawasan strategis secara berkelanjutan.
 - c. Memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
 - d. Mewujudkan kesetaraan gender, kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkualitas dan berwawasan lingkungan, melalui :
 - a. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
 - b. Peningkatan kesejahteraan petani.
 - c. Pengelolaan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.

Selain melihat arah kebijakan ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, dapat pula dilihat arah kebijakan ekonomi pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan sasaran, strategi, dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Berdasarkan RPJPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, Pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.	1. Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan. 2. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat. 3. Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.
2.	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas system pendukung produktivitas potensi daerah.	1. Optimalisasi sistem pendukung peningkatan produksi dan pasca panen hasil pertanian danperikanan. 2. Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal. 3. Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal dan promosi pariwisata.

Sumber : Hasil Analisis, 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 menitikberatkan pada pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini mencakup penyusunan anggaran yang efisien dan efektif, dengan memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah mendukung prioritas pembangunan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang taat aturan dan mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan anggaran. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, dimana semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan

infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan ini juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi, serta penggalan potensi sumber pendapatan lainnya. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk dalam pengelolaan belanja modal dan operasional agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik dapat mendukung tercapainya keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah. Sebagai elemen fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Prinsip ini menekankan bahwa proses penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat

perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD harus disusun dengan menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, serta manfaat dari setiap kegiatan yang dibiayai, sehingga masyarakat dapat memahami dan merasakan dampak nyata dari penggunaan anggaran.

2. Disiplin Anggaran. Anggaran daerah harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Disiplin dalam penganggaran mengacu pada penerapan asas efisiensi, efektivitas, serta ketepatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang disusun tidak hanya harus relevan dan bermanfaat, tetapi juga harus dilakukan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
3. Keadilan Anggaran. Pendapatan daerah bersumber dari pajak, retribusi, dan berbagai beban lain yang ditanggung oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan anggaran secara adil dan merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara obyektif dan proporsional, tanpa diskriminasi, sehingga pelayanan publik dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat secara setara.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Sumber daya keuangan yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Efisiensi dalam anggaran berarti penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, sementara efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus dilakukan dengan jelas dan terarah, mencakup tujuan, sasaran, serta manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari setiap program yang dijalankan.

5. Tertib Anggaran. Tertib anggaran adalah prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah yang menekankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan serta prosedur dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Prinsip ini memastikan bahwa anggaran disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tepat waktu dan tepat sasaran.
6. Ekonomis Anggaran. Ekonomis anggaran adalah prinsip dalam pengelolaan keuangan yang menekankan pada penggunaan sumber daya keuangan secara hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan nilai manfaat yang optimal dengan biaya seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas layanan atau hasil yang diharapkan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menyesuaikan dengan dinamika serta prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kapasitas keuangan daerah serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kondisi faktual di lapangan. Dalam hal ini, arah kebijakan keuangan daerah menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, APBD Kabupaten Pringsewu juga harus mengalokasikan anggaran dengan proporsi tertentu untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta dana desa. Dimana, penentuan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD. 323
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai elemen yang meningkatkan nilai kekayaan bersih. Sebagai salah satu komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah memegang peran krusial dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Besaran pendapatan daerah tidak hanya mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah, tetapi juga menggambarkan sejauh mana daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup berbagai sumber penerimaan lokal seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Pajak daerah dan retribusi merupakan dua sumber utama PAD yang mencerminkan kontribusi langsung masyarakat terhadap pendanaan pembangunan daerah. Selain itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, seperti keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), juga menjadi sumber penting yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola aset secara produktif.

Sumber pendapatan lain yang signifikan adalah pendapatan transfer, yang mencakup dana yang diterima dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer dari pemerintah pusat terdiri dari berbagai jenis dana, termasuk dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa. Dana perimbangan mencakup dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Dana insentif daerah diberikan berdasarkan kinerja tertentu, sedangkan dana desa dialokasikan untuk mendukung pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, transfer antar daerah mencakup pendapatan dari bagi hasil pendapatan daerah serta bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah lain, yang berfungsi untuk mendukung kerja sama antar daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Kategori terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dan sumber pendapatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hibah merupakan bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, atau badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah ini bersifat tidak mengikat dan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana darurat, di sisi lain, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada daerah untuk menanggulangi kebutuhan mendesak pasca bencana yang tidak dapat diatasi hanya dengan menggunakan APBD. Pendapatan dari sumber ini memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas keuangan dalam menghadapi situasi darurat serta mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan berbagai sumber pendapatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan pendapatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini harus didasarkan pada realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 meliputi :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi

Daerah sebagai berikut : a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak. b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah. c. Memberikan reward dalam bentuk undian bagi wajib pajak di setiap kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo. d. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang telah lunas sebelum jatuh tempo. e. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self-assessment. f. Mendayagunakan aset daerah.

2. Optimalisasi data pendukung pendapatan transfer, yang meliputi : a. Memperhitungkan celah fiskal secara seksama, sebagai bahan perhitungan dana alokasi umum. b. Menjaga kondusifitas dan kepatuhan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan secara baik dan terukur, terutama terhadap pelayanan masyarakat. d. Melaksanakan berbagai inovasi dalam rangka mendukung penerimaan dana insentif daerah. e. Menyediakan data secara lengkap dan proaktif menyusun laporan dalam rangka penerimaan dana alokasi khusus fisik dan non fisik. f. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa/pekon dalam rangka pengelolaan dana desa. g. Memberikan dukungan sarana dan prasarana terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan pajak yang menjadi kewenangan provinsi. h. Optimalisasi penerimaan 325 yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
3. Optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui : a. Melakukan upaya-upaya yang terstruktur untuk mendapatkan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah. c. Memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan,

terutama dalam penerapan standar pelayanan minimal, sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan dana operasional sekolah dan dana operasional pelayanan kesehatan. d. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah dan mengoptimalkan penerimaan dari dana desa. e. Membuka ruang untuk bekerjasama antar pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama.

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya diimplementasikan melalui analisis penerimaan pendapatan secara logis terhadap realisasi pendapatan pada tahun-tahun yang lalu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proyeksi pendapatan di tahun yang akan datang. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2027 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2. Realisasi dan Proyeksi Anggaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2027

Kode	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2027
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	1.183.950.490.522,07	1.235.522.727.154,05	1.319.462.591.517,00	1.378.054.542.632,00	1.418.505.177.590,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.012.103.494,07	143.895.708.025,05	166.675.720.517,00	177.597.267.102,00	184.264.295.930,00
4.1.1	Pajak Daerah	42.249.092.713,00	44.313.095.284,10	54.500.000.000,00	64.950.000.000,00	67.130.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.987.432.564,00	70.208.970.943,00	82.384.886.162,00	84.856.432.747,00	88.151.828.200,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.861.479.355,28	4.110.225.880,64	3.861.479.355,00	3.861.479.355,00	4.015.938.530,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.914.098.861,79	25.262.415.917,31	25.929.355.000,00	23.929.355.000,00	24.966.529.200,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.045.938.387.028,00	1.109.627.019.129,00	1.152.786.871.000,00	1.200.457.275.530,00	1.234.240.881.660,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	978.201.658.132,00	1.020.4809.320.264	1.072.786.871.000,00	1.122.786.871.000,00	1.154.970.477.130,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	67.736.728.896,00	89.146.698.865,00	80.000.000.000,00	77.670.404.530,00	79.270.404.530,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran atau kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam suatu periode anggaran tertentu. Konsep ini diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa belanja daerah menjadi instrumen penting dalam mendanai berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Dengan kata lain, belanja daerah adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam hal pengeluaran atau belanja. Desentralisasi ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayahnya. Lebih dari itu, kebijakan belanja daerah diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menjalankan operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan mengalokasikan belanja secara efektif dan efisien, pemerintah daerah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka peluang kerja baru.

Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, kebijakan anggaran belanja daerah berpedoman pada prinsip "money follows program". Prinsip ini menegaskan bahwa alokasi anggaran harus berfokus pada program-program yang memiliki manfaat nyata dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi tugas rutin dari perangkat daerah (PD) tertentu. Oleh karena itu, setiap program atau kegiatan yang diusulkan harus melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan skala prioritas dan relevansi dengan kebutuhan daerah. Hal ini memastikan bahwa sumber daya keuangan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran tidak dialokasikan secara serampangan, melainkan berdasarkan pertimbangan yang matang dan terukur.

Lebih lanjut, belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pringsewu. Setiap pengeluaran anggaran harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah mencakup pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari beberapa kategori utama. Pertama, urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang menjadi kebutuhan fundamental masyarakat. Kedua, urusan wajib non-pelayanan dasar, seperti administrasi pemerintahan dan ketertiban umum. Ketiga, urusan pilihan, yang mencakup bidang-bidang tertentu sesuai potensi dan kebutuhan daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau perdagangan. Terakhir, urusan penunjang, yang mendukung kelancaran fungsi-fungsi pemerintahan secara keseluruhan.

Dengan pengelolaan belanja yang efektif, transparan, dan berbasis pada prioritas kebutuhan masyarakat, diharapkan Kabupaten Pringsewu dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan

kualitas hidup warganya. Implementasi kebijakan belanja daerah yang baik akan menciptakan sinergi antara program pemerintah dan aspirasi masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara lebih operasional lagi, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam hal ini belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah. Belanja modal tersebut meliputi :

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

- dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah keperluan mendesak untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal ketersediaan belanja tidak terduga tersebut, tidak mencukupi untuk pengembalian kelebihan pembayaran, maka menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. Untuk belanja bagi hasil, dalam penganggaran belanjanya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk belanja bantuan keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan ini terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, dan bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa atau pekon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah sebagaimana dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
4. Mengalokasikan belanja untuk bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD, bidang kesehatan minimal 10% dari APBD, dan transfer dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belanja tak terduga diarahkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya.
8. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat

serta pencapaian sasaran program pembangunan yang dicanangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Tahun 2026.

9. Mendukung program strategis terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, mengacu pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemanfaatan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
12. Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program program pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
14. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
15. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya diimplementasikan melalui analisis pengelolaan belanja sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi dan proyeksi belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2027 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2027

Kode	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2027
	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	1.192.339.898.255,41	1.262.632.154.395,00	1.344.962.591.517,00	1.395.554.542.632,00	1.432.505.177.590,00
5.1	BELANJA OPERASI	885.292.662.811,92	941.711.359.114,19,00	1.009.845.147.640,00	1.025.180.147.640,00	1.030.001.962.220,00
5.1.1	Belanja Pegawai	518.692.552.094,00	557.751.144.354,00	616.588.734.627,00	636.588.734.627,00	646.586.396.700,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	322.753.571.217,92	338.866.855.040,19,00	376.258.513.443,00	371.258.513.443,00	366.450.750.000,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	193.572.600,00	683.213.300,00	125.164.070,00	160.164.070,00	165.170.600,00
5.1.5	Belanja Hibah	41.019.566.900,00	43.925.846.420,00	15.672.735.500,00	15.672.735.500,00	15.299.644.920,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.633.400.000,00	2.484.300.000,00	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	118.733.126.746,49	126.650.286.821,00	137.766.951.661,00	168.009.236.592,00	186.734.244.880,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.487.633.605,00	349.584.000,00	261.000.000,00	10.511.000.000,00	10.551.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.322.519.067,02	28.345.716.271,00	26.500.544.958,00	29.395.949.488,00	22.599.904.530,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.355.794.313,35	22.393.796.332,45	28.676.227.530,00	33.026.227.530,00	44.038.276.600,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.227.717.935,12	68.747.998.810,00	78.231.635.423,00	92.393.515.824,00	102.663.515.000,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.339.461.826,00	6.813.191.408,00	4.020.543.750,00	4.570.543.750,00	6.770.548.750,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0	-	77.000.000,00	112.000.000,00	115.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	574.708.004,00	375.382.328,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	574.708.004,00	375.382.328,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	187.739.400.693,00	193.895.126.132,00	194.350.492.216,00	198.865.158.400,00	212.268.970.490,00

5.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.660.762.177,00	4.297.918.944,00	6.180.333.816,00	7.195.000.000,00	7.413.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	183.078.638.516,00	187.393.198.900,00	188.170.158.400,00	191.670.158.400,00	204.855.970.490,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.389.407.733,34)	(9.109.427.241,59)	(25.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(14.000.000.000,00)

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang memerlukan pengembalian dan/atau pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada periode anggaran mendatang. Dalam konteks pemerintahan daerah, pembiayaan daerah terbagi menjadi dua kategori utama: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi berbagai sumber, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Selain itu, penerimaan pembiayaan juga mencakup penerimaan dari pinjaman daerah, pengembalian pemberian pinjaman daerah, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua penerimaan ini berfungsi sebagai sumber dana tambahan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencakup berbagai aktivitas pengeluaran yang juga diatur oleh regulasi. Contoh pengeluaran ini antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo, penyertaan modal daerah untuk investasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau entitas lainnya, serta pembentukan dana cadangan untuk kebutuhan mendatang. Pengeluaran pembiayaan juga bisa berupa pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain dan pengeluaran lain yang dianggap strategis sesuai kebijakan daerah. Kategori pengeluaran ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan fiskal yang sehat dan akuntabel.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2026 akan difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber penerimaan yang ada dan pengelolaan pengeluaran yang efisien. Prioritas akan diberikan pada pemanfaatan SiLPA secara strategis, pengelolaan utang yang prudent, serta peningkatan kapasitas fiskal melalui penyertaan modal yang produktif. Selain itu, pemerintah daerah akan memastikan bahwa kebijakan pembiayaan mendukung berbagai program pembangunan prioritas, termasuk penguatan infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi yang tepat sasaran.

Penerimaan pembiayaan hanya akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan, yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan melakukan penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diluar yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kemudian berdasarkan arah kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan tersebut, maka realisasi dan proyeksi pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2027 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2027

Kode	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN BERJALAN 2025	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2027
	2	3	4	5	6	7
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.131.544.868,07	39.242.137.134,00	26.500.000.000,00	20.000.000.000,00	16.500.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.	50.131.544.868,07	39.242.137.134,00	26.500.000.000,00	20.000.000.000,00	16.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	7.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.631.544.868,07	31.742.137.134,73,00	25.500.000.000,00	17.500.000.000,00	14.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	39.242.137.134,73	22.632.709.893,00	0,00	0,00	0,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Kesehatan Untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata
3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
12. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah
13. Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan maju
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif.
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air dan kemandirian pangan
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kemudian syarat utama dalam menentukan tujuan adalah harus bersifat Measurable atau terukur. Berikut ini adalah indikator

tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan diatas, diperlukannya sebuah sasaran untuk menjadi tolak ukur dan arahan yang jelas serta memberikan gambaran yang spesifik dari hasil yang akan dicapai dari tujuan tersebut. Sasaran adalah hasil atau target spesifik yang diinginkan untuk dicapai sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan tertentu. Sasaran dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dan mengukur kemajuan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kesehatan Untuk Semua

- a. Memperbaiki kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, pola hidup sehat, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- b. Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama pada kelompok rentan, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

2. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

- a. Meningkatkan Akses dan Kualitas pendidikan Masyarakat.
- b. Meningkatkan Keterserapan Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi di Dunia Kerja.

3. Perlindungan Sosial Yang Adaptif
 - a. Menurunkan persentase penduduk miskin melalui peningkatan akses terhadap peluang ekonomi dan kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - c. Meningkatkan aksesibilitas, kesejahteraan, dan kemandirian penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
 - a. Meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan.
 - b. Pemberdayaan UMKM, Koperasi, dan BUMD sebagai pelopor perekonomian daerah.
 - c. Menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja di sektor produktif.
 - d. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
5. Penerapan Ekonomi Hijau
 - a. Meningkatkan Implementasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Aktivitas Badan Usaha
6. Transformasi Digital
 - a. Meningkatkan Akses dan Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 - a. Mengurangi disparitas harga barang dan jasa antar wilayah untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah.
 - b. Meningkatkan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Meningkatkan Jumlah dan Persentase Desa Mandiri untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Sosial di Pedesaan
9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
 - a. Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik melalui Reformasi Hukum dan Digitalisasi
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi Substansial
 - a. Demokrasi dan Keamanan Publik untuk Mewujudkan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan
11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
 - a. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi dan Kemandirian Fiskal Daerah Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah
12. Ketangguhan Diplomasi dan Daya Saing Daerah
 - a. Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Kepemimpinan yang Efektif dan Inovatif
13. Beragama Maslahat, dan Berkebudayaan maju
 - a. Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan dan Kerukunan Sosial untuk Masyarakat yang Harmonis dan Berdaya Saing
14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif,
 - a. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
 - a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan
 - b. Meningkatkan Akses Sanitasi Aman dan Pengelolaan Sampah untuk Kesehatan Masyarakat

16. Berketahanan Energi, Air dan kemandirian pangan
 - a. Menjaga ketahanan energi dan air dengan memperluas akses dan ketersediaan energi dan air
17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
 - a. Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana dan Pengurangan Risiko
 - b. Mengurangi dampak Pencemaran lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Sedangkan tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Mengembangkan potensi keunggulan daerah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, modern dan inovatif
4. Mempertahankan ketahanan dan kemandirian pangan
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkelanjutan

Berdasarkan tujuan yang telah di buat dirumuskan beberapa sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu. Sasaran sebagai arah pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang telah ditentukan (ditetapkan) oleh daerah untuk dicapai, yang dalam usaha pencapaiannya pemerintah daerah telah menentukan misi dan tujuan (arah) pembangunan daerah. Selain merupakan capaian daerah maka sasaran tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung dan Nasional. Adapun sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Terwujudnya Birokrasi yang profesional, modern dan inovatif
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan
5. Meningkatnya jalan mantab untuk mendukung aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana

Tabel 4. 1. Indikator Target Kinerja Sasaran Yang Akan Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2025 – 2029

No	Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran	Indikator		Target Capaian Kinerja							Kondisi Akhir
						Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Optimalisasi kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	73,85-74	73,90-74,5	73,95-75	73,95-75,5	74-76	74,5-76,5	74,5-76,5
			Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	73,85-74	73,90-74,5	73,95-75	73,95-75,5	74-76	74,5-76,5	74,5-76,5
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah	Mengembangkan potensi keunggulan daerah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,58	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,2
			Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,58	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,2	5,2
				2	Indeks Daya Saing Daerah	3,7	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	4,00
3	Penyelenggaraan tata kelola yang profesional, moderen dan inovatif	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, modern dan inovatif		1	Indeks Reformasi Birokrasi	73,84	75,01	77,02	79,50	80,01	81,20	82,25	82,05

No	Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran	Indikator		Target Capaian Kinerja							Kondisi Akhir
						Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Terwujudnya Birokrasi yang profesional, modern dan inovatif	1	Indeks Reformasi Birokrasi	73,84	75,01	77,02	79,50	80,01	81,20	82,25	82,05
				2	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,64	83	83,50	84	84,50	85	85,50	85,50
4	Mempertahankan Swasembada pangan yang berwawasan lingkungan	Mempertahankan ketahanan dan kemandirian pangan		1	Indeks Ketahanan Pangan	87,35	87,38	87,40	87,42	87,45	87,47	87,50	87,50
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Indeks Ketahanan Pangan	87,35	87,38	87,40	87,42	87,45	87,47	87,50	87,50
5	Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkelanjutan		1	Persentase Jalan Mantab (%)	43,00	44,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	74,00
				2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,20	66,91	67,17	67,42	67,67	67,92	68,174	68,174
			Meningkatnya jalan mantab untuk mendukung aksesibilitas ke fasilitas pelayanan dasar	1	Persentase Jalan Mantab (%)	43,00	44,00	50,00	56,00	62,00	68,00	74,00	74,00

No	Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran	Indikator		Target Capaian Kinerja							Kondisi Akhir
						Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,20	66,91	67,17	67,42	67,67	67,92	68,174	68,174
				2	Indeks Risiko Bencana	88,2	95,00	94,60	94,05	93,65	93,25	93,00	93,00

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Dalam program pembangunan nasional lima tahunan, Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 yakni "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dijabarkan dalam tema pembanguan setiap tahunnya. Pada Tahun 2026 tema pembangunan nasional yakni

"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"

Tema tersebut mendorong program prioritas diarahkan kepada swasembada pangan dan energi serta sektor-sektor ekonomi lain yang pengaruhnya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusifitas dalam pertumbuhan ekonomi penting dalam rangka memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang terpinggirkan atau dengan kata lain semua lapisan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan. Selain mendorong kepada kesejahteraan masyarakat, tema ini juga memberikan manfaat yang luas terhadap peningkatan kualitas hidup dengan pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan serta mengurangi kesenjangan baik antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

Prioritas pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah 2025-2029 termaktub dalam ASTA CITA atau misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang terinci sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan

- agromaritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Adapun sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target untuk setiap sasaran utama pembangunan tahun.

Tabel 4. 2. Sasaran dan Target Utama Makro Pembangunan Nasional

No	Sasaran Kerangka Ekonomi Makro	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi/GNI (%)	6,3 (2026) 8,0 (2029)
2	Penurunan Intensitas Emisi GRk (%)	45,17 (2029)
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,20 (2029)
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5-5,0 (2029)
5	Rasio Gini	0,372-0,375 (2029)

No	Sasaran Kerangka Ekonomi Makro	Target
6	Indeks Modal Manusia	0,59 (2029)

Sumber: RPJMN 2025-2029

4.2.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026

Tema Pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 yakni:

“Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Tema ini menekankan pada Ketahanan pangan yang kuat, Infrastruktur berkualitas untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan, Pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata (inklusif), serta Pembangunan yang berkelanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2026 berfokus pada:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi. Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penguatan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Dengan mendorong hilirisasi atau proses pengolahan hasil produksi secara lebih lanjut, diharapkan akan tercipta nilai tambah yang lebih besar, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah untuk memperlancar arus barang, jasa, dan manusia. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi teknis maupun lingkungan, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Penguatan SDM yang unggul dan inovatif. Pengembangan SDM diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bersaing di era digital serta globalisasi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, serta dukungan terhadap inovasi dan kewirausahaan, terutama bagi generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.
4. Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi antara program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Pendekatan berbasis data terpadu digunakan untuk memastikan bahwa bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin dan rentan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
5. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Perwujudan pemerintahan yang baik ditandai dengan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien. Fokus utama prioritas ini adalah memperkuat kapasitas birokrasi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan integritas. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Prioritas ini meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan, serta konservasi sumber daya alam. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan

produktif, serta mencegah bencana ekologis yang dapat menghambat pembangunan.

7. Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Masyarakat yang harmonis merupakan fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif. Prioritas ini menitikberatkan pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Dengan menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat jati diri budaya daerah, pembangunan dapat berlangsung dalam suasana yang damai dan berkelanjutan.

Adapun sasaran dan target Pembangunan tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sasaran dan target Pembangunan tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung

No	Sasaran Kerangka Ekonomi Makro	Target (2026)
1	Pertumbuhan Ekonomi/GNI (%)	5,0-5,4
2	Inflasi (%)	2,5 -/+ 1,0
3	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	54,0-56,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,90-4,10
5	Tingkat Kemiskinan (%)	9,25-9,75
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,8-74,4
7	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,56
8	Indeks Gini	0,26-0,31
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	125-127
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) (%) -Sumber data SEB Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Penyelarasan RPJPN dan RPJPD	9,95
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,20

4.2.3 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2026

Berpedoman pada tema Pembangunan nasional dan Provinsi Lampung 2026, maka tema pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2026 ditujukan untuk **“Pemantapan Ketahanan Pangan dan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Dengan prioritas pembangunan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui perluasan dan peningkatan akses Pendidikan, pelatihan-pelatihan informal tentang kewirausahaan/bisnis, serta peningkatan kerjasama dan pelatihan dalam hal magang baik nasional maupun internasional.

2. Mengembangkan potensi keunggulan daerah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi

Prioritas ini berfokus pada mendorong hilirisasi produk unggulan, pengembangan UMKM, kawasan ekonomi lokal, serta penciptaan iklim investasi yang inklusif dan ramah lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional, modern dan inovatif

Prioritas ini berfokus pada Digitalisasi layanan publik, penguatan integritas ASN, serta penerapan manajemen pemerintahan yang responsive, transparan, partisipatif, dan berbasis data.

4. Mempertahankan ketahanan dan kemandirian pangan

Penguatan ketahanan dan swasembada pangan didorong melalui peningkatan produksi pangan, pengelolaan lahan yang optimal, penguatan kelembagaan pangan, serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang ketat.

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkelanjutan

Pengembangan infratraktur meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta digitalisasi.

Infrastruktur lainnya seperti infrastruktur penunjang wajah kota perlu diprioritaskan dalam upaya menarik minat Masyarakat berkunjung di Kabupaten Pringsewu yang bisa mendorong roda perekonomian daerah.

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, maka sasaran dan target utama makro Pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4. Sasaran dan target utama makro Pembangunan kabupaten Pringsewu Tahun 2026

No	Sasaran Kerangka Ekonomi Makro	Target (2026)
1	Pertumbuhan Ekonomi/GNI (%)	4,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,37
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,1
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,90-74,5
5	Indeks Gini	0,26-0,31
6	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	39,88
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,17

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

DPRD memiliki peran strategis sebagai perwakilan langsung dari rakyat. Setiap anggotanya dipilih melalui proses demokratis dalam pemilihan umum, mencerminkan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena itu, DPRD tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi juga harus menjadi saluran yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang mereka wakili.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, kontribusi DPRD sangat penting, khususnya melalui penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD (pokir). Sesuai ketentuan dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, DPRD diberikan ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat berdasarkan hasil kegiatan reses—yakni penjangkaran aspirasi yang dilakukan langsung di tengah masyarakat. Pokok-pokok pikiran ini menjadi masukan penting dalam perumusan kegiatan, penentuan lokasi, dan sasaran program pembangunan yang harus selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

Kegiatan reses telah dilaksanakan secara aktif oleh anggota DPRD melalui kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing, para legislator tidak hanya menyampaikan informasi pembangunan, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah. Reses menjadi momentum penting untuk memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap realitas dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Dari berbagai hasil penjangkaran aspirasi selama masa reses, ditemukan bahwa masyarakat masih menghadapi beragam tantangan, terutama di sektor infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Persoalan-persoalan ini menjadi catatan penting yang perlu direspons dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah. Kehadiran DPRD dengan suara dan pokok pikirannya menjadi salah satu pilar penting dalam menjembatani antara kebutuhan rakyat dan arah kebijakan pembangunan.

No. Perangkat Daerah	Jumlah Usulan
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	376
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7
3 Dinas Kesehatan	2
4 Satpol PP	1
5 Dinas Sosial	31
6 Dinas Ketahanan Pangan	1
7 Sekretariat Daerah	24
8 Dinas Lingkungan Hidup	6
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	4
11 Dinas Perhubungan	33
12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	25
13 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24
14 Dinas Perpustakaan dan Arsip	2
15 Dinas Pertanian	67
16 Badan Pendapatan Daerah	1
17 Inspektorat	2
18 Kesatuan Bangsa dan Politik	2

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mendanai program-program pembangunan dengan mempertimbangkan sumber pendapatan dan alokasi belanja secara akurat. Dalam proses ini, kapasitas riil menjadi faktor kunci dalam menetapkan Pagu Indikatif, yaitu alokasi anggaran awal yang digunakan sebagai dasar perencanaan belanja pembangunan. Dengan memahami kapasitas riil, pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan yang realistis dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi pendanaan yang tersedia.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap seluruh penerimaan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber-sumber lainnya. Penerimaan ini kemudian dipetakan dan dialokasikan ke berbagai pos belanja, baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan dasar yang wajib dan mengikat, seperti pembayaran gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan layanan publik dasar. Setelah belanja rutin ini dipenuhi, sisa kapasitas fiskal dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam konteks Kabupaten Pringsewu, kapasitas riil keuangan dihitung dengan mempertimbangkan total pendapatan daerah dikurangi dengan kewajiban rutin tersebut. Hal ini memastikan bahwa anggaran pembangunan tidak mengganggu alokasi untuk kebutuhan dasar operasional pemerintahan. Penghitungan ini menjadi dasar dalam menyusun kerangka pendanaan pembangunan yang

mencerminkan kemampuan daerah secara realistis. Kerangka ini mencakup proyeksi pendapatan dan belanja selama periode perencanaan, yang akan menjadi panduan dalam mengalokasikan dana untuk setiap program perangkat daerah. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari risiko defisit anggaran dan memastikan kesinambungan pelaksanaan program prioritas.

Kerangka pendanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu untuk periode 2026 dirancang untuk mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki. Melalui kerangka ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan dan kondisi keuangan yang ada. Hal ini mencakup pengalokasian dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis pada kapasitas riil keuangan daerah, Kabupaten Pringsewu dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan. Adapun hasil analisis kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1. Kerangka Pendanaan dalam Proyeksi Tahun 2026

Kode	URAIAN	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026
4	PENDAPATAN	1.378.054.542.632,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.597.267.102,00
4.1.1	Pajak Daerah	64.950.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	84.856.432.747,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.861.479.355,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.929.355.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.200.457.275.530,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.122.786.871.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	77.670.404.530,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.1	Hibah	0,00
5	BELANJA	1.395.554.542.632,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.025.180.147.640,00
5.1.1	Belanja Pegawai	635.588.734.627,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	371.258.513.443,00

Kode	URAIAN	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2026
5.1.3	Belanja Bunga	0
5.1.4	Belanja Subsidi	160.164.070,00
5.1.5	Belanja Hibah	15.672.735.500,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	168.009.236.592,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.511.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.385.949.488,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.026.227.530,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.393.515.824,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.570.543.750,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	112.000.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.500.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	198.865.158.400,00
5.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.195.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	191.670.158.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.500.000.000,00
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	17.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Program dan kegiatan prioritas merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Program dan prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2026, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, perkiraan capaian pembangunan tahun 2025 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026. Selain itu, program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2026 merupakan rencana perwujudan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2026.

Dalam penentuan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2026 terjabarkan di bawah ini.

5.2.1 Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Wajib Pelayanan

A. Dasar Pendidikan.

1. Program pengelolaan pendidikan.
2. Program pengembangan kurikulum.
3. Program pendidikan dan tenaga kependidikan.

B. Kesehatan.

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
4. *Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.*

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA).
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
3. *Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*
4. *Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah*
5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
6. Program pengembangan permukiman.
7. Program penataan bangunan gedung.
8. *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*
9. Program penyelenggaraan jalan.
10. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*
11. Program penyelenggaraan penataan ruang.

D. Perumahan dan kawasan permukiman

1. Program pengembangan perumahan.
2. Program kawasan permukiman.
3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

- E. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - 1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - 2. Program penanggulangan bencana.
 - 3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- F. Sosial.
 - 1. Program pemberdayaan sosial.
 - 2. Program rehabilitasi sosial.
 - 3. Program perlindungan dan jaminan sosial.
 - 4. *Program penanganan bencana*

5.2.2 Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- A. Tenaga Kerja.
 - 1. Program perencanaan tenaga kerja.
 - 2. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja.
 - 3. Program penempatan tenaga kerja.
 - 4. Program hubungan industrial.
- B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - 1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
 - 2. Program perlindungan perempuan.
 - 3. *Program peningkatan kualitas keluarga.*
 - 4. *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.*
 - 5. Program pemenuhan hak anak.
 - 6. Program perlindungan khusus anak.
- C. Pangan.
 - 1. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.
 - 2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
 - 3. Program penanganan kerawanan pangan.
 - 4. Program pengawasan keamanan pangan.
- D. Pertanahan
 - 1. Program pengelolaan izin lokasi.
- E. Lingkungan hidup.
 - 1. *Program perencanaan lingkungan hidup*
 - 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. *Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).*
 4. *Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*
 5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).
 6. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
 7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
 8. Program pengelolaan persampahan.
- F. Kependudukan dan pencatatan sipil.
1. Program pendaftaran penduduk.
 2. Program pencatatan sipil.
 3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 4. *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*
- G. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
1. Program penataan desa
 2. *Program peningkatan kerjasama desa*
 3. Program administrasi pemerintahan desa.
 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
- H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
1. Program pengendalian penduduk.
 2. Program pembinaan keluarga berencana.
 3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
- I. Perhubungan
1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- J. Komunikasi dan informatika.
1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 2. Program pengelolaan aplikasi informatika.
- K. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 2. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*
 3. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
 4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- L. Penanaman modal.
1. Program pengembangan iklim penanaman modal.
 2. Program promosi penanaman modal.

3. Program pelayanan penanaman modal.
 4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 5. *Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*
- M. Kepemudaan dan olahraga
1. Program pengembangan kapasitas saya saing kepemudaan.
 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.
 3. *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*
- N. Statistik
1. Program penyelenggaraan statistik sektoral.
- O. Persandian
1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- P. Kebudayaan
1. Program pengembangan kebudayaan.
 2. Program pengembangan kesenian tradisional.
- Q. Perpustakaan
1. Program pembinaan perpustakaan.
- R. Kearsipan.
1. Program pengelolaan arsip.
 2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

5.2.3 Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan.
 1. Program pengelolaan perikanan budidaya.
 2. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.
- b. Pariwisata
 1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
 2. Program pemasaran pariwisata.
 3. *Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif*
- c. Pertanian
 1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
 3. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 4. *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian*
 5. Program penyuluhan pertanian.

- d. Perdagangan.
 - 1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 - 2. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - 3. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
 - 4. *Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.*
- e. Perindustrian.
 - 1. Program perencanaan dan pembangunan industri.
 - 2. *Program Pengendalian Izin Usaha Industri*
 - 3. *Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*
- f. Transmigrasi
 - Program pembangunan kawasan transmigrasi.

5.2.4 Program dan Kegiatan Urusan Penunjang

- 1. Sekretariat Daerah.
 - 1. Program administrasi umum
 - 2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 - 3. Program perekonomian dan pembangunan.
- 2. Sekretariat DPRD
 - 1. Program administrasi umum sekretariat DPRD Kabupaten.
 - 2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 3. Perencanaan.
 - 1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - 2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
- 4. Keuangan
 - 1. Program pengelolaan keuangan daerah.
 - 2. Program pengelolaan barang milik daerah.
 - 3. Program pengelolaan pendapatan daerah.
- 5. Kepegawaian
 - Program kepegawaian daerah.
- 6. Pendidikan dan pelatihan
 - Program pengembangan sumber daya manusia.
- 7. Penelitian dan pengembangan
 - Program Penelitian dan pengembangan daerah.
- 8. Pengawasan

1. Program penyelenggaraan pengawasan.
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Tabel 5. 2. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1 1	Pendidikan	4	13	55	277.752.243.519,34
1 1 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	13	55	277.752.243.519,34
1 2	Kesehatan	5	24	88	261.474.620.055
1 2 01	Dinas Kesehatan	5	24	88	261.474.620.055
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	23	67	85.029.314.904,666
1 3 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	12	23	67	85.029.314.904,666
1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	4	9	42.514.657.452,333
1 4 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	4	9	42.514.657.452,333
1 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	22	53	12.930.277.650
1 5 01	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	7.706.738.719
1 5 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	12	20	5.223.538.931
1 6	Sosial	5	14	36	6.320.703.826
1 6 01	Dinas Sosial	5	14	36	6.320.703.826
					0
					0
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
2 7	Tenaga Kerja	4	9	16	2.623.089.054
2 7 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	9	16	2.623.089.054
2 8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	18	34	3.162.108.376
2 8 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	18	34	3.162.108.376
2 9	Pangan	5	13	33	3.866.544.098
2 9 01	Dinas Ketahanan Pangan	5	13	33	3.866.544.098
2 10	Pertanahan	1	1	1	12.077.060.970,66
2 10 10	Sekretariat Daerah	1	1	1	12.077.060.970,66
2 11	Lingkungan Hidup	7	15	31	5.540.172.900
2 11 01	Dinas Lingkungan Hidup	7	15	31	5.540.172.900
2 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	4.729.890.885
2 12 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	4.729.890.885
2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	46	6.052.489.516
2 13 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5	11	46	6.052.489.516
2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	1.581.054.188

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
2 14 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	1.581.054.188
2 15	Perhubungan	2	15	39	14.465.113.399
2 15 01	Dinas Perhubungan	2	15	39	14.465.113.399
2 16	Komunikasi dan Informatika	3	10	26	2.695.456.162,666
2 16 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	10	26	2.695.456.162,666
2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	10	20	2.915.535.548,33
2 17 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	10	20	2.915.535.548,33
2 18	Penanaman Modal	6	12	28	4.770.107.741
2 18 01	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal	6	12	28	4.770.107.741
2 19	Kepemudaan dan Olahraga	4	14	28	4.537.481.644,66
2 19 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4	14	28	4.537.481.644,66
2 20	Statistik	1	1	1	1.347.728.081,33
2 20 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1.347.728.081,33
2 21	Persandian	1	2	5	0
2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2	5	-0
2 22	Kebudayaan	2	4	5	138.876.121.759,67
2 22 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	4	5	138.876.121.759,67
2 23	Perpustakaan	2	10	22	2.883.564.713,33
2 23 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	10	22	2.883.564.713,33
2 24	Kearsipan	2	3	4	1.441.782.456,66
2 24 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	3	4	1.441.782.356,66
3	URUSAN PILIHAN				
3 25	Kelautan dan Perikanan	3	14	30	4.667.599.523
3 25 01	Dinas Perikanan	3	14	30	4.667.599.523
3 26	Pariwisata	3	4	6	2.268.740.822,33
3 26 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3	4	6	2.268.740.822,33
3 27	Pertanian	6	24	60	15.439.730.571
3 27 01	Dinas Pertanian	6	24	60	15.439.730.571
3 28	Kehutanan				0
3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral				0
3 30	Perdagangan	4	4	6	

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
					2.332.428.438,66
3 30 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	4	6	2.332.428.438,66
3 31	Perindustrian	3	3	5	1.749.321.329
3 31 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	3	5	1.749.321.329
3 32	Transmigrasi	1	1	3	1.311.544.527
3 32 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	3	1.311.544.527
4	UNSUR PENDUKUNG				
4 1	Sekretariat Daerah	3	20	66	24.154.121.941,33
4 1 01	Sekretariat Daerah	3	20	66	24.154.121.941,33
4 2	Sekretariat DPRD	2	17	73	47.760.462.595
4 2 01	Sekretariat DPRD	2	17	73	47.760.462.595
5	UNSUR PENUNJANG				
5 1	Perencanaan	3	15	54	5.457.947.554
5 1 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	54	5.457.947.554
5 2	Keuangan	5	20	98	342.236.887.329
5 2 02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	67	314.852.337.496
5 2 03	Badan Pendapatan Daerah	2	7	31	9.384.549.833
5 3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	13	33	6.908.432.298
5 3 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	33	6.908.432.298
5 4	Penelitian dan Pengembangan	1	2	6	2.728.973.777
5 4 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	6	2.728.973.777
6	UNSUR PENGAWASAN				
6 1	Inspektorat	3	11	29	13.532.844.244
6 1 01	Inspektorat Kabupaten	3	11	29	13.532.844.244
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 1	Kecamatan	53	101	198	26.074.368.403
7 1 01	Kecamatan Pringsewu	5	11	22	9.523.184.946
	Kecamatan Gadingrejo	6	13	27	2.690.053.675
	Kecamatan Pagelaran	6	12	23	2.083.387.689
	Kecamatan Banyumas	6	9	15	1.968.077.176
	Kecamatan Sukoharjo	6	11	21	1.995.439.293
	Kecamatan Adiluwih	6	11	23	2.228.058.531
	Kecamatan Pagelaran Utara	6	12	23	1.646.663.440
	Kecamatan Ambarawa	6	11	23	1.820.663.606
	Kecamatan Pardasuka	6	11	21	2.118.840.047

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8 1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	26	7.921.122.358
8 1 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	26	7.921.122.358
JUMLAH					1.395.554.542.632

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau tujuan telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Alat ini berfungsi untuk mengukur hasil (output), dampak (impact), dan manfaat (outcome) dari pelaksanaan berbagai program pembangunan. **Hasil (outcome)** adalah kondisi yang diinginkan atau ditargetkan pada penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu. Outcome menunjukkan efektivitas keluaran dari beberapa kegiatan dalam program tertentu. Sementara itu, dampak (impact) menggambarkan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pencapaian outcome tersebut, memberikan gambaran tentang manfaat jangka panjang yang diperoleh masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, indikator kinerja menyediakan informasi terukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menentukan langkah strategis di masa mendatang.

Indikator kinerja sendiri memegang peran penting dalam konteks pembangunan daerah, yaitu sebagai alat evaluasi objektif untuk menilai keberhasilan suatu program. Indikator ini membantu pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi capaian yang telah diraih. Melalui data yang dikumpulkan dari indikator kinerja, pengambil kebijakan dapat memperoleh informasi konkret dan akurat untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Informasi ini tidak hanya membantu dalam mengevaluasi keberhasilan, tetapi juga mendukung penyusunan kebijakan baru yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya indikator kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pembangunan daerah juga dapat ditingkatkan, menciptakan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab kepada publik.

Disisi lain, indikator kinerja juga berfungsi sebagai kerangka kerja evaluatif yang menyediakan gambaran komprehensif mengenai kemajuan pembangunan daerah. Dengan memantau indikator ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan menyesuaikan kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Misalnya, jika suatu program pendidikan tidak mencapai target peningkatan kualitas SDM, indikator kinerja dapat menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, indikator ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, memungkinkan pemerintah untuk merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. Proses ini memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga memperhatikan outcome dan impact yang berkelanjutan.

Penerapan indikator kinerja dalam pembangunan daerah memerlukan proses yang sistematis dan terencana. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembangunan yang jelas, sesuai dengan visi pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. Setelah tujuan ditentukan, indikator kinerja dirancang dengan mempertimbangkan parameter yang relevan untuk setiap tujuan tersebut. Indikator harus memiliki definisi yang jelas dan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, indikator harus memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan mampu mencerminkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas pengukuran, indikator tersebut harus memenuhi kriteria **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Adapun kriteria SMART antara lain sebagai berikut.

1. *Specific*: Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*: Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*: Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Kriteria SMART memastikan bahwa indikator kinerja dirumuskan dengan spesifik dan jelas, mudah diukur, realistis untuk dicapai, relevan dengan tujuan kebijakan, serta memiliki batas waktu tertentu untuk evaluasi. Kriteria ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih terarah dan implementasi program yang lebih efektif. Dengan menggunakan indikator yang memenuhi kriteria SMART, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, merumuskan keputusan strategis berbasis data, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, indikator kinerja bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung pengelolaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pringsewu, atau IKU daerah, merupakan tolok ukur pencapaian kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja Penjabat Bupati Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Pencapaian IKU daerah didukung oleh IKU perangkat daerah, yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mendukung tujuan pembangunan. Dengan demikian, perangkat daerah bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang sejalan dengan target IKU daerah, sehingga memberikan dampak yang terukur terhadap pembangunan. Baik IKU daerah maupun IKU perangkat daerah berfungsi sebagai indikator kinerja dampak (impact) yang mengukur pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025-029 dan RPJPD Kabupaten Pringsewu 2025-2045. Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan target IKU daerah tahun 2026

berdasarkan kebutuhan strategis pembangunan dan arah kebijakan RPJMD dan RPJPD, sehingga diharapkan mampu mendorong kemajuan di berbagai sektor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana Target Pembangunan Makro dan IKU daerah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6. 1. Target Pembangunan Makro 2026

No.	Indikator Sasaran Pembangunan Makro	Satuan	Baseline (2024)	Target 2026
1.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,58	4,7
2.	Angka kemiskinan	Persen	8,32	8,15
3.	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	4,39	4,37
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,84	73,85-74,5
5.	Gini Rasio	Nilai	0,266	0,26-0,31
6.	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	Rupiah	35,55	39,88
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,43	67,17

Tabel 6. 2. Target Indeks Kinerja Utama Tahun 2025-2026

Indikator Utama Pembangunan		Baseline	Target	
		2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,84	73,85	73,90-74,5
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,58	4,58	4,7
3.	Indeks Daya Saing Daerah	3,75	3,80	3,85
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	73,00	75,01	77,02
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,64	83	83,50
6.	Indeks Ketahanan Pangan	87,35	87,38	87,40
7.	Persentase Jalan Mantab	43,00	44,00	50,00
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,20	66,91	67,17
9.	Indeks Resiko Bencana	88,2	95,00	94,60

6.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026

Capaian kinerja makro merupakan gambaran umum mengenai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Indikator-indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja makro ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan tingkat ketimpangan pendapatan (Gini

rasio). Semua indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui evaluasi indikator makro tersebut, pemerintah daerah dapat melihat efektivitas kebijakan pembangunan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau intervensi lebih lanjut. Capaian makro yang positif menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Selain kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga menjadi tolok ukur penting. Evaluasi ini didasarkan pada indikator kinerja spesifik untuk setiap urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Penilaian ini memastikan bahwa setiap sektor berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencerminkan transparansi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Akuntabilitas ini dinilai melalui laporan pertanggungjawaban berkala yang mencakup pencapaian visi dan misi daerah secara terukur. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dalam penetapan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Melihat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang telah dianalisis dimana telah dirumuskan secara runtut dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Menetapkan alat ukur keberhasilan urusan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Alat ukur tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perumusan indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah terpilih.
3. Perumusan program pembangunan dalam mencapai keberhasilan. Nomenklatur program menggunakan nomenklatur

yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah selama masa jabatan mereka. Terdapat dua indikator utama yang diukur pada akhir periode kepemimpinan, salah satunya adalah **Indikator Kinerja Daerah (IKD)**. IKD berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib, pelayanan non-dasar wajib, maupun urusan pemerintahan pilihan. Target dari IKD menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara keseluruhan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

Indikator Kinerja Daerah ini terbagi ke dalam empat aspek utama: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. aspek geografi dan demografi sering digunakan untuk menganalisis kondisi suatu wilayah atau populasi. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator makro yang mencakup berbagai aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Aspek pelayanan umum mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, seperti penyediaan infrastruktur dasar, baik fisik maupun sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, aspek daya saing daerah mengukur kemampuan ekonomi daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan IKD untuk urusan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu tahun 2026 dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan daerah berjalan efektif, berorientasi pada hasil, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 6. 3. Aspek Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2026
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	88,4
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,52
3	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan sanitasi aman	%	79,42
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	67,17
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	29,32
6	Indeks Risiko Bencana	Nilai	87,25
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,16
8	Rasio Penduduk	%	104,4
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	704
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,8
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,15-7,50
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	39,88
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,37
5	Indeks Gini	Nilai	0,26-0,31
6	IPM / Indeks Modal Manusia	Nilai	73,90-74,5
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,2
8	Indeks Keluarga Sehat	Nilai	0,5
9	Prevalensi Stunting	%	16,22
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,07
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	65
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	66,594
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	74,6
15	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,17
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,15
17	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	93,05
18	Jumlah Atlet Berprestasi Nasional & Internasional	Atlet / Orang	21
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri sosial.	Persen	90
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	14,28
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,90
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,85
4	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0,019
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,85
6	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	69,5
7	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	36,36
8	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	81

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2026
9	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	2,26
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	96,14
11	Persentase Desa Mandiri	%	24,35
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (atas harga berlaku)	%	0,34
13	Kontribusi PDRB Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	17,02
14	Kontribusi PDRB Pertanian & Perikanan	%	22,93
15	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/ Tahun	41,86
IV	Aspek Pelayanan Umum		
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	55,00
2	Indeks SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	3,5
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,48
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	80,088
5	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai	6,1
6	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,8
7	Persentase pendidikan politik dan budaya politik se Kabupaten Pringsewu	Persen	100
8	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	62

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045.

RKPD Tahun 2026 merupakan rencana kerja tahun kedua atas Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2029 dan yang merupakan tahap pertama atas RPJPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2025-2045, disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Selain itu dapat disampaikan juga dalam penyusunan dokumen ini, masih berada di tengah-tengah ketidakpastian perekonomian global dan nasional, yang juga turut berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah secara keseluruhan. Karena itu, ketika dalam proses penyusunan RKPD 2026 nanti, situasi ekonomi nasional sudah stabil, maka hal itu juga akan menjadi pedoman penting dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi terhadap target pendapatan dan belanja yang telah dirumuskan.

Harapannya dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dan terintegrasi dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Lampung. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunannya secara nasional.

TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				420.535.584.929,00								420.535.584.929,00		
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				418.978.820.329,00								418.978.820.329,00		
	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				418.978.820.329,00								418.978.820.329,00		
	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	-	-		-	328.103.539.152,00					-	-	328.103.539.152,00		
	1	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan	-	-		-	560.456.050,00			-	Tata kelola Pemerintahan	-	-	560.456.050,00		
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan			9 Dokumen	59.673.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM	-	Tata kelola Pemerintahan	-		59.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN		
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan			2 Laporan	192.950.050,00	Kab. Pringsewu, Semua	DANA ALOKASI UMUM	-	Tata kelola Pemerintahan	-		192.950.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN		
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	307.833.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		307.833.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		326.861.315.602,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	326.861.315.602,00		
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/bulan	326.389.334.152,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		326.389.334.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	454.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		454.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	17.181.450,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.181.450,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		124.108.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	124.108.000,00		
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			286 Orang	124.108.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		124.108.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		329.984.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	329.984.500,00		
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	12.245.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.245.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	114.704.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		114.704.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			24 Paket	27.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			24 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	150.485.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00					
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.355.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	95.355.000,00					
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	95.355.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	132.320.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	132.320.000,00					
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	116.080.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		116.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	16.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-			-	90.770.319.177,00			-			-	90.770.319.177,00					
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	47.767.110.850,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	47.767.110.850,00					
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	1.063.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.063.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	245.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		245.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	1.584.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.584.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				39 Paket	390.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	3.120.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				354 Peserta Didik	420.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		420.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar															
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	190.754.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		190.754.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				265 Satuan Pendidikan	57.846.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		57.846.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				265 Satuan Pendidikan	35.910.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		35.910.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				795 Orang	227.417.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		227.417.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar															
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	272.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		272.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	140.212.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.212.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				804 Orang	326.019.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		326.019.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	100.566.850,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.566.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	68.477.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		68.477.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	396.595.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		396.595.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	1.483.875.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.483.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				7 Paket	180.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				6 Paket	449.724.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		449.724.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	505.975.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		505.975.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	46.142.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		46.142.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				62 Satuan Pendidikan	19.733.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.733.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				186 Orang	138.861.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		138.861.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				62 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	107.542.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		107.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penegeunaan Apikasi Bidang Pendidikan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				124 Orang	143.857.302,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		143.857.302,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	37.545.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		37.545.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	102.117.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		102.117.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	281.145.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		281.145.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	67.278.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		67.278.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				62 Satuan Pendidikan	109.767.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		109.767.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan															
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				62 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				10 Buku	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				250 Paket	142.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		142.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-				-	17.422.041.900,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	17.422.041.900,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	684.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		684.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				6 Paket	140.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																
							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	705.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1 Peserta Didik	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				970 Orang	2.664.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.664.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	46.142.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		46.142.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				245 Satuan Pendidikan	200.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		200.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				245 Satuan Pendidikan	5.945.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD, DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.945.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				245 Orang	150.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	132.752.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		132.752.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				245 Orang	411.611.250,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		411.611.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	188.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		188.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	136.346.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		136.346.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	185.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		185.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	297.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	1.145.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2500 Paket	2.099.327.150,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.099.327.150,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				15 Paket	2.067.090.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.067.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				245 Satuan Pendidikan	123.023.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		123.023.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.469.346.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.469.346.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	21.117.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				13 Dokumen	29.208.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	48.951.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	16.420.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	81.993.714.355,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	85.326.000.000,00	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/bulan	81.638.586.355,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		85.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	65.495.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	319.563.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	336.000.000,00	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.379.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.870.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.571.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	29.820.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	182.923.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	289.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	292.000.000,00	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	289.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		292.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	272.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	295.000.000,00	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	176.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	8.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20.510.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	68.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		74.000.000,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	140.210.575.500,00					-		134.695.555.800,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang terlaksana	-			80 %	27.750.511.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	28.938.793.300,00	
1	02	02	2.01	0007		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	16.695.228.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		19.044.203.172,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0009		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	2.550.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		1.434.187.128,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5400 Orang	113.362.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		120.362.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							0				20727 0	233.057.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		178.657.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							0				0 0	61.974.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		71.974.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							0				0 0	76.250.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							0				0 0	154.298.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		66.798.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
							0				0 0	92.445.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		101.879.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	49.904.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		59.904.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	100.428.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	393.320.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		430.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	544.689.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		564.689.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya															
						0					13 0	39.592.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		42.592.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	115.806.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		118.806.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				77730 Orang	19.944.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA															
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				13 Orang	41.145.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 Dokumen	20.677.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							0				0 0	897.326.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		490.778.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat															
							0				0 0	32.734.902.700,00	-	PAJAK ROKOK, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.742.402.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				13 Unit	39.936.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		23.854.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	75.000.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		77.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	124.892.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
							0				0 0	40.030.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	36.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1297 Orang	45.720.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		25.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				110 Orang	28.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	43.272.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				4 Tatanan	58.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		42.500.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	308.882.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		310.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas Menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	-			100 %	37.302.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-		60.000.000,00					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
							0				0 0	37.302.500,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit yang dibina	-			100 %	107.615.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-		47.000.000,00					
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	2.980.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				61 Orang	5.397.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
							0				0 0	22.020.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang ditingkatnya Kompetensinya	-			88.62 %	3.268.147.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.622.000.000,00	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							0				0 0	3.268.147.600,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.622.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar Persentase sarana kefarmasian sesuai standar	-			80 % 82 %	174.815.000,00					-	-	106.000.000,00	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek,Toko Obat, Toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki izin	-			72 %	14.275.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	12.000.000,00	
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				0 0	14.275.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri rumah tangga yang sudah melaksanakan usaha sesuai ketentuan yang berlaku	-			90 %	55.986.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	40.000.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				10 Dokumen	55.986.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM memiliki Sertifikat laik higiene sanitasi	-			70 %	10.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	11.000.000,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta	Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Restoran dan Depot Air Minum (DAM)												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Dokumen	10.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	-			70 %	49.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	11.000.000,00	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											0 0	49.500.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pemeriksaan post market	-			80 %	44.404.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	32.000.000,00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan															
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				40 Unit	44.404.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	815.441.700,00					-	-	806.648.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah duia usaha yg memanfaatkan CSR untuk program kesehatan	-			23 organisasi	42.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	41.350.000,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	41.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampanye Germas yang terlaksana	-			3 Kampanye	146.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	105.298.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	146.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	105.298.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			988 UKBM	627.341.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	660.000.000,00		
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				13 Dokumen	627.341.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HIBAH, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		660.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	X					NON URUSAN						5.280.000,00							5.500.000,00		
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.280.000,00							5.500.000,00		
12	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			BB Skala	5.280.000,00					-		5.500.000,00		
	X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	5.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	5.500.000,00		
	X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	5.280.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Banyumas						2.430.533.000,00							2.456.021.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.430.533.000,00							2.456.021.000,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.430.533.000,00							2.456.021.000,00		
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	2.423.867.000,00					-		2.448.355.000,00		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							0				0 0	13.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.500.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							0				0 0	90.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		92.600.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							0				2 0	1.702.850.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.712.850.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							0				0 0	27.585.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		29.000.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							0				0 0	4.455.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.455.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	6.666.000,00					-		7.666.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			25 UKBM	6.666.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	7.666.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							0				0 0	6.666.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.666.000,00	PUSKESMAS BANYUMAS
						Puskesmas Pagelaran						2.788.103.000,00							2.865.129.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.788.103.000,00							2.865.129.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.788.103.000,00							2.865.129.000,00	
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	2.788.103.000,00						-	2.865.129.000,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	90.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		92.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2295 Orang	81.450.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		83.450.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				191 Orang	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	240.968.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		242.968.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	21.450.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.450.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		27.500.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional					Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	77.475.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		79.475.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							-				-	1.315.659.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.330.000.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	15.450.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.450.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	2.475.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		4.475.000,00	PUSKESMAS FAJAR MULIA			
						Puskesmas Gadingrejo					3.982.832.000,00								4.013.357.000,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.982.832.000,00								4.013.357.000,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.982.832.000,00								4.013.357.000,00				
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	3.977.492.000,00						-		4.006.017.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	3.977.492.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	4.006.017.000,00				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				929 Orang	54.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		56.000.000,00	PUSKESMAS GADINGREJO			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				766 Orang	69.120.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		72.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6680 Orang	141.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		143.300.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				555 Orang	18.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	358.388.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		360.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	41.550.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		43.550.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	132.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		134.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2.722.331.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.752.331.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.500.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	3.030.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	6.252.000,00					-		8.252.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			39 UKBM	6.252.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	8.252.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	6.252.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.252.000,00	PUSKESMAS PRINGSEWU	
						Puskesmas Ambarawa						2.755.369.000,00							2.773.600.000,00		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.755.369.000,00						2.773.600.000,00		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.755.369.000,00						2.773.600.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	2.755.369.000,00						-	2.773.600.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.755.369.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	2.773.600.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				622 Orang	54.000.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		56.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5462 Orang	157.950.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		160.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				454 Orang	4.050.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	375.466.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		380.000.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		7.300.000,00	PUSKESMAS AMBARAWA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				855 Orang	126.735.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		128.735.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7458 Orang	55.800.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		57.800.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				620 Orang	27.000.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		29.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	543.155.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		545.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	20.100.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		22.100.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	29.700.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		31.700.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	97.875.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		99.875.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							0				0 0	2.418.228.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.438.228.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.100.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	6.252.000,00					-		8.252.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			53 UKBM	6.252.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	8.252.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	6.252.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.252.000,00	PUSKESMAS SUKOHARJO
						Puskesmas Bandung Baru						1.330.556.000,00							1.347.477.000,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.330.556.000,00							1.347.477.000,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.330.556.000,00							1.347.477.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	1.326.293.000,00						-	1.342.214.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	1.326.293.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-	-	1.342.214.000,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				278 Orang	68.400.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		70.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2444 Orang	67.950.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		69.950.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				203 Orang	17.550.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		19.550.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	220.595.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		222.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
											0 0	49.650.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			51.650.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	99.249.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-		101.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	770.064.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-		772.064.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	20.850.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-		22.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
							0				0 0	1.485.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			2.000.000,00	PUSKESMAS BANDUNG BARU	
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	4.263.000,00						-		5.263.000,00		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			15 UKBM	4.263.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	-	5.263.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional			Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	29.250.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		31.250.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	107.646.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		110.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							0				0 0	1.477.063.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		295.000.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	24.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		26.900.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	6.240.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		8.240.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU	
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	6.252.000,00					-		7.252.000,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			24 UKBM	6.252.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	7.252.000,00				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	6.252.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.252.000,00	PUSKESMAS BUMI RATU			
						Puskesmas Rejosari						2.350.804.000,00								2.391.889.000,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.350.804.000,00								2.391.889.000,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.350.804.000,00								2.391.889.000,00			
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	2.344.552.000,00					-		2.383.637.000,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.344.552.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.383.637.000,00				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				644 Orang	21.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		23.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5591 Orang	135.600.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		137.600.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				675 Orang	10.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		12.800.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	315.389.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		317.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	15.750.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	46.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		48.800.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	148.776.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						0					0 0	1.619.942.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		1.639.942.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	6.795.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.795.000,00	PUSKESMAS REJOSARI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		24.500.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.200.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	-			100 %	6.252.000,00					-		8.252.000,00				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM	-			25 UKBM	6.252.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	8.252.000,00				
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	6.252.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		8.252.000,00	PUSKESMAS REJOSARI			
						Puskesmas Wates																2.522.477.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																2.522.477.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																2.522.477.000,00	
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Terhadap layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	-			74,5 %	2.486.755.000,00					-		2.522.477.000,00				
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CDR TBC	-			80 %	2.486.755.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.522.477.000,00				
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				403 Orang	31.680.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		33.680.000,00	PUSKESMAS WATES			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional					Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3527 Orang	82.407.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		84.407.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					293 Orang	17.100.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.100.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2 Dokumen	246.587.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		248.000.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.550.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		30.000.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2 Dokumen	172.260.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		175.000.000,00	PUSKESMAS WATES					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				438 Orang	11.475.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	307.331.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		310.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	15.975.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		33.500.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	136.950.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		138.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2.228.372.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.258.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.400.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA				
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.000.000,00	PUSKESMAS PARDASUKA				
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																	127.447.383.098,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	126.892.785.098,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	123.463.588.098,00	
34	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.870.465.386,00					-		11.554.531.012,00					
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	104.739.000,00			-	-	-	-	144.945.000,00					
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7.249.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-		23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							0				1 0	19.498.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							0				1 0	19.498.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-	23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19.498.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	19.498.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		27.265.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	19.498.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		23.536.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.704.338.986,00			-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.228.962.112,00				
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				122 Orang/bulan	9.174.577.086,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.360.120.112,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	523.024.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		861.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							0				1 0	6.737.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		7.182.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	870.187.400,00			-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	971.187.400,00				
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.935.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		18.935.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
	1	03	01	2.06	0002	Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	12	13	-	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	239.826.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			339.826.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	117.366.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			117.366.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17.189.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			17.189.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	435.870.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			435.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.200.000,00			-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-		209.436.500,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			128.236.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	71.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			81.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
35	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	9.108.276.000,00							-		9.108.276.000,00	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.713.025.000,00			-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-		2.713.025.000,00	
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																
						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,9 KM	1.935.775.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			1.935.775.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				3 Dokumen	308.325.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			308.325.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	02	2.01	0129	Rehabilitasi Embung																
						Jumlah Embung yang Direhabilitasi				2 Unit	468.925.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-			468.925.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.395.251.000,00			-		Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-		6.395.251.000,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				6 Liter/Detik	3.145.446.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.145.446.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				50 SR	8.435.891.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-REGULER	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		8.435.891.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
37	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	1.258.569.000,00					-		1.000.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.258.569.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.000.000.000,00	
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	111.649.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		77.949.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	2.01	0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan														
							Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				300 Orang	140.226.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		109.751.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				1 Ton/hari	1.006.694.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		812.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
38	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	6.209.817.300,00					-		5.987.738.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.209.817.300,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	5.987.738.000,00	
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				300 Orang	318.280.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		249.901.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				320 Rumah Tangga	5.329.888.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		5.329.888.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	561.649.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		407.949.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
39	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	6.173.301.000,00					-	-	4.188.790.000,00					
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.173.301.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	4.188.790.000,00					
	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
							Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2000 M	4.750.107.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.157.949.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
							Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				300 M	1.011.569.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		922.916.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	411.625.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		107.925.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
40	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	2.981.877.100,00					-	-	2.507.501.954,00					
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	2.981.877.100,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	2.507.501.954,00					
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	1.021.649.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		607.949.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.346.740.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		1.560.344.954,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				8 KM	5.202.373.893,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		5.201.373.893,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan																	50.421.930.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							0				7 0	50.421.930.540,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	1.440.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				7 KM	1.440.875.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar																	7.767.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2,9 KM	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan																	1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							Panjang jembatan yang dibangun				100 Meter	1.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	800.000.000,00					-		800.000.000,00					
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	705.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		-	705.000.000,00				
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																	245.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				21 Lembaga	245.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	460.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-							
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		-	50.000.000,00				
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					20 Sistem Informasi	94.271.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		93.698.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	222.664.200,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	496.274.200,00		
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK															
						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					1 Dokumen	222.664.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		146.274.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR															
						Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR					2 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.500.000.000,00							3.429.197.000,00		
45	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	150.000.000,00						-		150.000.000,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	150.000.000,00		
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	150.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
46	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	773.970.000,00						-		1.037.720.000,00	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	110.162.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	314.770.000,00		
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP															
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					1 Dokumen	110.162.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		314.770.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Yang Ditingkatkan	-			1 Dokumen	663.808.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	722.950.000,00		
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penvelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	186.050.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		222.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				7,58 Ha	477.758.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
47	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-			-	434.000.000,00					-	-	200.000.000,00					
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota	-	-			-	434.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	200.000.000,00					
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	434.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
48	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	2.142.030.000,00					-	-	2.041.477.000,00					
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan Yang Dilaksanakan	-			1 Dokumen	2.142.030.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	2.041.477.000,00					
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3 Dokumen	267.865.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		314.770.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
							Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	58.407.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		86.699.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																		
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				8 Lokasi	1.815.758.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		1.640.008.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT				
	X					NON URUSAN															554.598.000,00			
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															554.598.000,00			
49	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	554.598.000,00					-	-	554.598.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	554.598.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	554.598.000,00							
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					12 Unit	216.430.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		216.430.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
	X	XX	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																				
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya					5 Unit	338.168.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		338.168.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT						
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															5.223.538.931,00				6.277.325.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															5.223.538.931,00				6.277.325.000,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															5.223.538.931,00				6.277.325.000,00	
50	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.934.126.431,00						-	5.783.000.000,00							
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.362.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00							
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	8.121.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	8.241.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.386.675.031,00			-	-	-	-	5.215.000.000,00							
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					966 Orang/bulan	4.220.154.031,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					150 Dokumen	157.611.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Dokumen Laporan	8.910.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.000.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00							
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang	32.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.858.000,00			-	-	-	-	154.000.000,00							
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					16 Paket	8.105.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	29.398.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	32.866.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10 Paket	2.925.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					300 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	16.564.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.801.400,00			-	-	-	-	60.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36 Laporan	37.801.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	346.430.000,00			-	-	-	-	284.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					13 Unit	24.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					13 Unit	308.190.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	13.440.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
51	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-			-	157.153.500,00					-		324.325.000,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	5.186.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					5000 Orang	5.186.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun										-			
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	72.165.000,00			-	-	-	-	81.000.000,00	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					10 Unit	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					20 Dokumen laporan	57.165.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	28.325.000,00			-	-	-	-	28.325.000,00	
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					25 Orang	28.325.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28.325.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	51.477.500,00			-	-	-	-	190.000.000,00	
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					120 Desa/ Kawasan Dokumen	14.328.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				25 Orang	14.050.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				9 Kecamatan Laporan	6.868.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	16.231.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
52	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	132.259.000,00						-	170.000.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	42.523.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	42.523.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	89.736.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				90 Orang	89.736.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						11.914.969.919,00							12.510.673.415,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.914.969.919,00							12.510.673.415,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.914.969.919,00							12.510.673.415,00	
53	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	10.829.432.819,00						-	11.370.859.460,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	28.500.000,00			-		Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	29.925.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	15.225.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	14.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	14.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.875.799.519,00			-		Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	10.369.589.390,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penvediaan Gali dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				285 Orang/bulan	9.643.002.519,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.125.152.540,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	234.986.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	223.797.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		234.986.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		9.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	49.652.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	52.134.600,00					
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	49.652.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		52.134.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	444.911.300,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	467.111.970,00					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.110.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.615.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	203.966.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		214.336.395,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	40.067.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		42.070.875,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.608.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		6.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				222 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		25.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1		05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	160.159.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		168.109.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			17.500.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	18.375.000,00	
	1		05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	17.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		18.375.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			52.750.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	55.387.500,00	
	1		05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		1.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	51.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		54.337.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			360.320.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	378.336.000,00	
	1		05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	290.160.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		304.668.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16 Unit	9.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.447.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1		05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	60.210.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		63.220.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
54	1		05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			1.085.537.100,00					-		1.139.813.955,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				20 Laporan	102.054.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		107.156.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	24.045.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	22.900.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-							
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-			-	132.541.500,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	139.168.575,00					
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	132.541.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		139.168.575,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1					DINAS SOSIAL																	7.275.973.876,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	7.275.973.876,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	7.275.973.876,00	
55	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.302.108.126,00					-		3.878.166.576,00					
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.500.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.500.000,00					
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.776.496.626,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.043.366.576,00					
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.597.456.626,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.856.466.576,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	175.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		182.400.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.500.000,00	DINAS SOSIAL				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.500.000,00					
	1	06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	6.500.000,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.000.000,00					
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.431.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	344.000.000,00					
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.390.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	44.164.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12.613.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	53.764.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.000.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	80.000.000,00					
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	60.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL				
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.380.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	59.800.000,00					
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	49.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.800.000,00	DINAS SOSIAL				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional			Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	9.580.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	242.800.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	315.000.000,00		
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	229.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
56	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	918.112.800,00					-	-	1.117.500.000,00		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	918.112.800,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.117.500.000,00		
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	150.191.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		160.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial				12 Orang	25.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				300 Orang	122.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		130.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	44.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				142 Orang	459.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		630.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti				200 Laporan	115.821.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL	
57	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			-	346.507.300,00					-	-	435.307.300,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	-	-			-	340.507.300,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	429.307.300,00	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	45.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	37.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	229.307.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		229.307.300,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	28.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	-	-			-	6.000.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	6.000.000,00	
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
58	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	1.639.865.600,00						-	1.705.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.639.865.600,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	1.705.000.000,00	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	59.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	53.214.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20000 Orang	265.965.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan				100 Usulan	1.261.135.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		1.300.000.000,00	DINAS SOSIAL
59	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	114.110.000,00						-	140.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	5.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	103.510.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	110.000.000,00		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	103.510.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02	0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana															
							Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai				10 Keluarga	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		0,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	06	2.02	0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah															
							Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				80 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		0,00	DINAS SOSIAL	
	2					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						3.934.633.581,00							4.467.500.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.753.827.581,00							4.277.500.000,00		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.753.827.581,00							4.277.500.000,00		
60	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.213.827.581,00					-		3.727.500.000,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.900.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.000.000,00		
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.722.814.781,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.175.500.000,00		
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	2.565.894.781,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	151.920.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		170.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	246.420.800,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		265.000.000,00						
	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4.646.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	64.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	54.940.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	5.540.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					250 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	160.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					16 Laporan	156.294.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	124.192.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	164.000.000,00						
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	7.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	155.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	116.392.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.760.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	23.000.000,00						
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	21.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.740.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	86.000.000,00						
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	86.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					4 Unit	84.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
61	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	450.000.000,00						-	450.000.000,00						
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	450.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	450.000.000,00						
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				320 Orang	450.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
62	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	50.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	50.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	55.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi	Pasar Kerja Online													
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1150 Orang	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
63	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	40.000.000,00						-	45.000.000,00	
	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	45.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						180.806.000,00							190.000.000,00	
	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						180.806.000,00							190.000.000,00	
64	3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-			-	180.806.000,00						-	190.000.000,00	
	3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	180.806.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	190.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	55.460.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	2.01	0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				6 Kepala Keluarga	125.346.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					10.131.876.440,00							5.456.919.420,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.131.876.440,00							5.456.919.420,00	
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.527.746.320,00							5.444.568.420,00	
65	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.613.690.420,00						-	4.316.119.820,00	
	2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	27.456.100,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	27.456.100,00	
	2	08	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.035.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.035.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	5.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	-		5.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	8.876.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.876.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	5.695.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.695.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.934.843.320,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.593.100.220,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					17 Orang/bulan	3.692.976.020,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.351.232.920,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	236.280.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		236.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	5.587.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.587.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.500.000,00	
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.750.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					2 Orang	5.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	194.018.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	216.923.500,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.064.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.864.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	33.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		29.093.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	9.370.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.437.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	01	2.06	0006	Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	34.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		34.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	113.094.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		127.029.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	177.710.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	-	-	177.710.000,00	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	99.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	-		99.010.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	78.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		78.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	273.913.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	294.430.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	207.020.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		227.530.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	31.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		31.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6.130.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.130.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	14.993.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	14.470.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.470.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
66	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-				-	330.530.200,00						-	552.887.800,00	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	0,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				8 Lembaga	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	304.530.200,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	526.887.800,00	
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				6 Lembaga	54.540.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		132.843.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				120 orang	124.990.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		134.182.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				400 Orang	125.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		259.861.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	26.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	26.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				10 Lembaga	26.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
67	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-			-	171.614.700,00						-	178.188.700,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	101.500.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	101.500.000,00	
	2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	101.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		101.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	70.114.700,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	76.688.700,00	
	2	08	03	2.02	0003	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				13 Orang	3.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				13 orang	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				13 Orang	24.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		24.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				13 orang	5.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				13 orang	26.464.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		33.038.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
68	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	83.622.000,00						-	0,00	
	2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	83.622.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				4 Dokumen	83.622.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
69	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-			-	2.897.000,00						-	11.444.500,00	
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.897.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	11.444.500,00	
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2.897.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		11.444.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-			-	86.695.000,00						-	127.834.600,00	
	2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	86.695.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	102.124.600,00	
2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	2.070.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.499.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
						jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	84.625.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		84.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	25.710.000,00	
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan					4 Lembaga	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		25.710.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
71	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	238.697.000,00						-	258.093.000,00	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	169.677.000,00			-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	189.073.000,00	
	2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota					25 Orang	11.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		11.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota					25 Orang	20.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					25 Orang	91.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		91.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota					25 Orang	45.077.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		64.473.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota					25 Orang	1.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		1.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.020.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	69.020.000,00	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
						jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek					20 Orang	69.020.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.604.130.120,00							12.351.000,00	
72	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-			-	706.624.200,00						-	0,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	42.984.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	32.984.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	663.640.200,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	14	02	2.02	0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan														
							Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB														
							Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				6 Unit	663.640.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-			-	1.803.308.920,00					-		12.351.000,00	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.778.957.920,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana														
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	480.656.020,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				20 Laporan	1.287.703.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	10.598.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	22.831.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	
	2	14	03	2.02	0004	Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				131 Orang	22.831.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Proeram Baneza Kencana .di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.038.810.948,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	3.160.709.378,00					
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2.869.050.948,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		2.993.009.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	169.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		167.700.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	6.500.000,00					
	2	09	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	134.438.750,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	170.908.000,00					
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.143.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		2.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	52.507.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		50.758.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	12.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		6.150.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		19.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	46.838.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		62.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN				
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.399.400,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	82.232.470,00					
	2	09	01	2.08	0002	Penediaan Jasa Komunikasi. Sumber Dava Air dan Listrik																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	42.599.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		42.332.470,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	10.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		11.340.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		28.560.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.010.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	139.650.000,00	
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	133.010.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		139.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
76	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-			-	354.335.000,00					-		427.100.000,00	
	2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	161.040.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	211.900.000,00	
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		22.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
						Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	150.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
						Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	11.040.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		39.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	130.000.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	145.350.000,00	
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		15.350.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	130.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	63.295.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	69.850.000,00	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Dava Lokal														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	720.605.000,00					-	-	944.004.000,00	
	4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	720.605.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	944.004.000,00	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				531 Dokumen	238.654.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		405.892.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	285.799.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		299.590.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				531 Dokumen	196.151.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		238.522.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
					Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu						17.634.341.893,00							26.902.209.940,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.634.341.893,00							26.902.209.940,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						17.634.341.893,00							26.902.209.940,00	
83	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	17.634.341.893,00					-	-	26.902.209.940,00	
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.397.671.569,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.331.524.003,00	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	14.180.937.969,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.219.332.003,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				101 Dokumen	2.200.859.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.095.525.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.874.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.667.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	209.250.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	429.712.000,00	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				10 Dokumen	209.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		429.712.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	21.000.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	94.500.000,00	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	21.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		36.750.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		36.750.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	717.562.652,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.579.930.000,00				
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.776.052,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		134.951.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		380.436.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	33.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		28.350.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	270.749.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		304.646.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	284.093.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		289.997.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				869 Laporan	111.444.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		441.550.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	398.002.000,00				
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		193.252.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		204.750.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.139.250.000,00				
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		450.450.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		688.800.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU			
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.538.139.000,00				

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				76 Paket	56.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		654.155.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					373.147.000,00							504.557.500,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					373.147.000,00							504.557.500,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					373.147.000,00							504.557.500,00	
84	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	103.675.000,00						-	126.138.000,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	103.675.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	126.138.000,00	
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.287.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.370.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8.356.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.773.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	8.356.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.773.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.345.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.662.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.345.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.662.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.640.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.822.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	53.346.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		56.076.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
85	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	269.472.000,00						-	378.419.500,00	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		-	269.472.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	378.419.500,00	
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	116.462.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		217.759.500,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	48.360.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.778.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	104.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		109.882.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu					473.188.000,00							782.012.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				473.188.000,00							782.012.000,00				
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				473.188.000,00							782.012.000,00				
86	4	01	03		PROGRAM PEREONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				473.188.000,00						-	782.012.000,00				
	4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				-	-			Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	615.861.000,00				
	4	01	03	2.01	0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				9 Dokumen	186.275.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		306.215.000,00	BAGIAN PEREONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	03	2.01	0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	88.050.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		169.844.000,00	BAGIAN PEREONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	03	2.01	0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				6 Dokumen	93.667.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		139.802.000,00	BAGIAN PEREONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				-	-			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	166.151.000,00			
	4	01	03	2.04	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen	69.068.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		94.976.000,00	BAGIAN PEREONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	03	2.04	0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	36.126.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		71.175.000,00	BAGIAN PEREONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
					Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu				7.128.579.700,00								8.036.974.000,00			
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7.128.579.700,00								8.036.974.000,00			
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH				7.128.579.700,00								8.036.974.000,00			
87	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				-	-					-		8.036.974.000,00			
	4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				-	-			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	8.036.974.000,00			
	4	01	02	2.02	0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	2.748.527.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.437.920.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	02	2.02	0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	4.145.803.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.353.093.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU		
	4	01	02	2.02	0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					2 Dokumen	234.249.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		245.961.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu						436.568.000,00							306.770.000,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						436.568.000,00							306.770.000,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						436.568.000,00							306.770.000,00	
88	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	436.568.000,00					-		306.770.000,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	378.294.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	303.482.000,00	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					2 Dokumen	165.195.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		287.723.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					1 Dokumen	50.287.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.553.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					4 Dokumen	162.811.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		11.206.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	58.274.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.288.000,00	
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					10 Dokumen	58.274.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.288.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP						5.540.172.900,00							7.164.551.323,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.540.172.900,00							7.164.551.323,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.540.172.900,00							7.164.551.323,00	
89	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.513.117.500,00					-		5.593.832.463,00	
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.514.860.370,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	4.610.036.768,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan	3.342.180.370,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.421.918.768,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	172.680.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		188.118.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.825.000,00	
	2	11	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.825.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	280.484.600,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	284.530.635,00	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	6.410.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.531.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	35.234.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	42.719.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.110.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	74.489.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		60.098.010,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	25.020.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.271.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	96.612.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.370.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	29.579.600,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	32.537.560,00	
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	29.579.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		32.537.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				20 Dokumen	3.040.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.344.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	7.611.345,00		
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota															
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		7.611.345,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
92	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	1.800.000,00					-		4.207.500,00		
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.800.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	4.207.500,00		
	2	11	05	2.02	0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3															
							Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan				1 Usaha	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		4.207.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
93	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PLPH)	-	-			-	16.145.000,00					-		17.689.350,00		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.145.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	17.689.350,00		
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH															
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				100 Dokumen	10.145.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		8.977.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup															
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		5.561.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				75 Badan Usaha	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
94	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-			-	68.055.000,00					-		76.392.225,00				
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	68.055.000,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	76.392.225,00				
2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																							
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				7 Entitas	68.055.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		76.392.225,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
95	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-			-	867.430.600,00					-		878.054.540,00				
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-			-	867.430.600,00			-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	878.054.540,00				
2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	263.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		313.742.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																							
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				14 Ton	601.880.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		554.312.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2 11 11 2.01 0023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																							
							Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah				1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												4.729.890.885,00									4.730.004.085,00		
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												4.729.890.885,00									4.730.004.085,00		
2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												4.729.890.885,00									4.730.004.085,00		
96	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.206.005.885,00					-		4.209.119.085,00				
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.846.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.846.000,00				
2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1.910.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.910.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penvusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	89.988.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		89.913.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.415.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	13.415.000,00					
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13.415.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.415.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	227.301.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	228.321.000,00					
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	160.731.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		161.751.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	66.570.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		66.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	183.050.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	183.050.000,00					
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.670.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.670.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		79.740.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	37.120.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		37.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	10.220.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
97	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	478.040.000,00						-	478.040.000,00					
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	440.300.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	440.300.000,00					
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				13000 Dokumen	440.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		440.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4.280.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Dokumen	9.600.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	7.153.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.618.911.565,90			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	192.452.000,00	
2	13	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					18 Orang/bulan	2.426.259.565,90	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					16 Dokumen	186.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		186.240.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	6.412.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.212.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	313.202.800,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	314.057.540,00	
2	13	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	9.621.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.001.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	7.160.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5 Paket	78.166.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.396.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					4 Paket	13.919.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2	13	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					240 Dokumen	42.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		43.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN M

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	79.520.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		133.960.000,00	
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	19.040.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	60.480.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		91.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	67.060.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	70.000.000,00	
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	54.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.360.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	165.507.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	170.247.500,00	
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			2 Unit	4.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	84.527.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		85.947.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	76.680.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
102	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	-	-			-	38.583.250,00			-		-		110.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	38.583.250,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	110.000.000,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				126 Desa	38.583.250,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
103	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-	-			-	0,00			-		-		54.500.000,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	0,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	54.500.000,00	
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									-					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
104	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	817.144.200,00					-		1.130.500.000,00	
		2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	817.144.200,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.130.500.000,00	
2 13 04 2.01 0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	224.079.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		269.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				126 Dokumen	30.028.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				126 Dokumen	11.603.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																				
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				63 Orang	24.147.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		49.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				126 Dokumen	114.945.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																				
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				9 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0012 Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa				126 Dokumen	66.605.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa																				
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa				63 Dokumen	11.156.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																				
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				126 Orang	34.514.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa																				
							Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				126 Desa	115.655.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2 13 04 2.01 0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				9 Dokumen	179.411.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
105	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	1.931.526.600,10					-		2.222.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional			Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.931.526.600,10			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.222.000.000,00		
2 13 05 2.01 0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					1 Dokumen	1.071.658.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.093.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																					
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					150 Lembaga	180.000.000,10	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		183.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					2 Unit	19.590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					126 Dokumen	118.708.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																					
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					9 Laporan	69.411.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																					
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					9 Laporan	42.159.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
2 13 05 2.01 0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																					
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					126 Dokumen	430.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	
						DINAS PERHUBUNGAN						14.465.113.399,00							10.842.524.775,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.465.113.399,00							10.842.524.775,00		
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						14.465.113.399,00							10.842.524.775,00		
106	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			B8 Skala	5.645.052.699,00						-	937.214.775,00		
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			100 persen	8.568.500,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.679.025,00		
2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	1.161.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.339.275,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																					
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1.195.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.254.750,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																					
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.155.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No						Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.770.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	772.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	4.675.587.999,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.820.000,00		
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				127 Orang/bulan	4.673.947.999,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordniasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	840.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 persen	13.979.900,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	14.119.000,00		
	2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	979.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.119.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 persen	73.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	18.726.750,00		
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	71.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1.750.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.676.750,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	-			100 persen	255.095.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	235.770.000,00		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	2.640.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.770.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	55.068.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		68.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	56.850.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		38.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				276 Dokumen	27.750.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		29.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	112.787.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		98.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	-			100 persen	66.200.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	47.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	11.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	55.200.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang umum pemerintah daerah	-			100 persen	109.051.300,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	142.500.000,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	104.351.300,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		106.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4.700.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-			100 persen	443.570.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	464.600.000,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	221.310.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		232.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	191.610.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		201.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	17.650.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		13.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
107	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase penurunan titik rawan kecelakaan Persentase uji KIR Kendaraan	-			82 % 88 %	8.820.060.700,00						-	9.905.310.000,00	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-			100 persen	8.260.091.700,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	9.402.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				67 Unit	199.930.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		266.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				350 Unit	8.060.161.700,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		9.136.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			100 persen	364.535.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-	-	300.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10000 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	114.535.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota	-			100 persen	12.820.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.910.000,00	
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	2.505.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
						Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	10.315.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	-			100 persen	2.590.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.700.000,00	
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
						Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi					1 Laporan	2.590.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan PenyelenggaraanKompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-			100 persen	172.236.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		181.700.000,00	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					1 Laporan	11.737.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Klaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
						Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					7 Laporan	160.499.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-			100 persen	7.788.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		6.000.000,00	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					2 Laporan	7.788.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.086.368.488,00							8.886.561.155,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.086.368.488,00							8.886.561.155,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.920.084.988,00							8.564.227.155,00	
108	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.997.334.288,00						-	3.957.193.755,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.076.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.619.000,00	
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	12.339.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.075.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	3.737.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.543.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.134.983.088,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.141.393.455,00	
	2	16	01	2.02	0001	Penvediaan Gaii dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.931.446.288,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.935.422.455,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200.760.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.776.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.211.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	61.000.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	61.000.000,00	
	2	16	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	61.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		61.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.975.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.000.000,00	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	9.975.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	356.101.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	279.921.400,00	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	88.879.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.924.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.489.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.489.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	255.232.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		176.007.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	500.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	42.500.000,00	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	125.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	125.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	125.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	125.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	211.488.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	192.539.900,00	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	211.488.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		192.539.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	207.210.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	207.220.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	162.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		162.740.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	9.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					12 Unit	7.320.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					20 Unit	27.160.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	2.450.327.400,00						-	2.773.236.800,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.450.327.400,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.773.236.800,00	
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media														
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media					12 Laporan	731.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.094.118.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
						Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo					1 Komunitas	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik														
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					24 Permohonan	1.031.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.031.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				12 Laporan	12.721.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.572.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
112	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						152.531.000,00							307.731.000,00						
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	152.531.000,00					-		307.731.000,00						
		2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	152.531.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	307.731.000,00						
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		155.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				37 Perangkat Daerah	151.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		151.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah																			
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	1.031.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.031.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan					6.997.285.316,00							7.604.072.816,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.664.602.616,00							5.347.412.016,00						
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.664.602.616,00							5.347.412.016,00						
113	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.263.217.716,00					-		4.927.881.716,00						
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.938.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.026.600,00						
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	6.606.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.594.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	11.332.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.432.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.344.017.416,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.229.684.916,00						
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	4.099.874.616,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.985.542.116,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	239.120.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		239.120.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.022.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.022.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	222.001.700,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	279.910.200,00						
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	5.835.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					10 Paket	7.515.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	96.524.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	76.939.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	22.555.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	17.045.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	28.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					30 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	126.195.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	91.702.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	444.900.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	178.100.000,00						
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	178.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	444.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.750.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	70.550.000,00						
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	70.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Laporan	80.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	153.610.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	153.610.000,00						
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	127.670.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	127.670.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
	2	17	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	25.940.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	25.940.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-							
114	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-			-	67.966.500,00						-	67.966.500,00						
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	67.966.500,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	67.966.500,00						
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	5	6	7	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	14	Target	Pagu Indikatif (Rp)	17
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				8 Unit Usaha	67.966.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	15	67.966.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
115	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-			-	103.524.400,00					-	-	48.755.300,00	
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	103.524.400,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	48.755.300,00	
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				30 Unit Usaha	103.524.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		48.755.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
116	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-			-	104.700.000,00					-	-	166.027.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	104.700.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	166.027.000,00	
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	104.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		166.027.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
117	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	125.194.000,00					-	-	136.781.500,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	125.194.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	136.781.500,00	
	2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
							Jumlah yang Difasilitasi				25 Orang	125.194.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		136.781.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.332.682.700,00							2.256.660.800,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						533.696.200,00							623.078.300,00	
118	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-			-	118.947.000,00					-	-	137.435.200,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	118.947.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	137.435.200,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				7 Unit	118.947.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		137.435.200,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
119	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-			-	74.081.600,00					-	-	84.370.000,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	74.081.600,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	84.370.000,00	
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				7 Laporan	74.081.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		84.370.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
124	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.569.712.741,00					-	-	4.885.500.000,00		
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	29.500.000,00		
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.660.025.626,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	3.707.500.000,00		
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				392 Orang/bulan	3.653.136.626,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		3.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.889.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	261.727.500,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	363.500.000,00		
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.200.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		17.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	49.493.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				280 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		29.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	114.234.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	511.749.615,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	570.000.000,00	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	244.401.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	226.348.015,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116.210.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	215.000.000,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	116.210.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
125	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-			-	100.000.000,00					-	-	100.000.000,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	100.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
126	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-			-	0,00					-	-	225.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	225.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
127	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	73.690.000,00					-	-	180.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	73.690.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	180.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1800 Pelaku Usaha	58.775.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	7.210.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				50 Kegiatan Usaha	7.705.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
128	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-			-	26.705.000,00					-		120.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	26.705.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	120.000.000,00	
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				15 Kegiatan Usaha.	14.590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	12.115.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata						6.806.222.467,00							9.214.557.377,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.331.874.467,00							7.964.557.377,00	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.331.874.467,00							7.964.557.377,00	
129	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			88 Skala	4.358.514.617,00						-		5.439.557.377,00
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,laporan realisasi kinerja dan evaluasi kinerja yang tersusun	-			1 Dokumen	2.700.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.460.000,00	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.860.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			44 orang	3.832.027.187,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.710.997.377,00	
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.657.567.887,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.508.997.377,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	173.430.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.029.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	-			1 unit	6.500.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.000.000,00					
	2	19	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pemenuhan kebutuhan adminitrasi perkantoran	-			7 item	376.977.630,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	554.100.000,00					
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.220.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	220.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							0				4 0	46.769.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		57.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.365.130,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		37.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	33.565.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	53.788.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.979.800,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	53.000.000,00					
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.979.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		53.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n sarana dan prasarana aparatur	-			14 unit	89.330.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	105.000.000,00					
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		82.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	4.590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
130	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-			-	450.359.850,00			-			-	475.000.000,00					
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	450.359.850,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	475.000.000,00					
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				60 Orang	199.749.150,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				60 Kegiatan	150.507.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		155.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				60 Orang	100.103.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		110.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
131	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi	-			30 prestasi	1.436.000.000,00			-			-	1.950.000.000,00	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Club Club Olahraga Tingkat SD/SMP/SMA yang ada di Kabupaten Pringsewu	-			1 Dokumen	36.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	50.000.000,00	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-			1 Unit	36.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peringkat porda yang semakin baik	-			5 Besar	450.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	600.000.000,00	
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-			3 Kegiatan	450.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Organisasi Olahraga yang ada Di Kabupaten Pringsewu	-			40 Organisasi	950.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.300.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	-			10 Dokumen	950.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
132	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-			-	87.000.000,00			-			-	100.000.000,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	87.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	100.000.000,00	
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-			1 Organisasi	87.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						474.348.000,00							1.250.000.000,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						474.348.000,00							1.250.000.000,00	
133	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	jumlah peningkatan kunjungan wisatawan	-			60000 orang	100.000.000,00			-			-	500.000.000,00	
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Tempat Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu	-			1 laporan	100.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.000.000,00	
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
134	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya	-			6 pasang	174.348.000,00			-			-	500.000.000,00	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan Promosi Pariwisata	-			1 Dokumen	174.348.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	500.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-			1 Kegiatan	174.348.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
135	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-			-	200.000.000,00			-			-	250.000.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	200.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	250.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-			100 Orang	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						4.325.347.070,00							4.569.929.120,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.325.347.070,00							4.569.929.120,00	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					20 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	97.286.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Kebutuhan Barang dalam satu tahun anggaran.	-			100 %	197.475.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	180.000.000,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					72 Unit	90.475.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	107.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	-			100 %	60.805.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	65.000.000,00	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	60.805.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik daerah yang terpelihara	-			100 %	176.460.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	171.650.000,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					6 Unit	120.810.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					15 Unit	14.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	31.050.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
137	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat	-			65 %	525.736.300,00					-		616.066.300,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	-			0.72 %	364.258.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	364.095.500,00	
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				6 Perpustakaan	213.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		199.095.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	117.293.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				64 Perpustakaan	22.895.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				100 Eksemplar	11.070.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Budaya baca	-			65 %	161.477.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	-	251.970.800,00		
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				20 Perpustakaan	122.663.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		178.599.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				8 Orang	38.814.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		73.371.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
138	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-			-	15.300.000,00					-		30.000.000,00						
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.300.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	30.000.000,00						
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				30 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-								
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	15.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-								
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		257.970.500,00	
139	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase perangkat daerah, kelurahan dan pekan yang telah menerapkan arsip sesuai standar	-			21 %	221.958.000,00						-	232.970.500,00						
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis	-			94 %	123.378.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	-	119.970.500,00						
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				250 Berkas	34.772.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	35.565.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		34.970.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
							Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				37 Lembaga	53.041.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah	-			94 %	29.654.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	-	33.000.000,00						
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	29.654.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD		33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2		24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Arsip Yang Tersedia pada JIKN	-			83,3 %	68.926.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	-	80.000.000,00						
	2		24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	23.238.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD								
	2		24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	45.688.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD								
140	2		24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara	-		83 %	23.844.000,00						-	25.000.000,00						
	2		24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pelaksanaan, Penilaian Dan Pemusnahan Arsip	-		85 %	23.844.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	-	25.000.000,00						
	2		24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				300 Arsip	23.844.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD								
							DINAS PERIKANAN					4.667.599.523,00								5.130.000.000,00					
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					4.667.599.523,00								5.130.000.000,00					
	3		25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.667.599.523,00								5.130.000.000,00					
141	3		25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	4.059.938.623,00						-	4.293.000.000,00						
	3		25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	4.250.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	7.500.000,00						
	3		25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN					
	3		25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	3.423.841.873,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	3.574.000.000,00						
	3		25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.263.641.873,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		3.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN					
	3		25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	157.200.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		170.000.000,00	DINAS PERIKANAN					
	3		25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		4.000.000,00	DINAS PERIKANAN					
	3		25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	6.500.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	6.500.000,00						

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
142	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-			-	10.000.000,00					-		15.000.000,00					
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	10.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu	-	15.000.000,00					
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
143	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-			-	420.369.000,00					-		541.000.000,00					
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan yang mendapatkan Pemberdayaan	-			16 Kelompok	274.115.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu	-	388.500.000,00					
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																	30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas					6 Kelompok	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					9 Kelompok	274.115.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu		358.500.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	146.254.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	152.500.000,00					
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3 Unit	59.969.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan					9 Dokumen	18.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		7.500.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					14 Unit	68.045.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		85.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
144	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-			-	17.946.900,00					-		18.000.000,00					
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	17.946.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu	-	18.000.000,00					
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																	18.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota					2 Pelaku Usaha	17.946.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	Masyarakat Kabupaten Pringsewu		18.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
145	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-			-	159.345.000,00					-		263.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	55.000.000,00	
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko					14 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06		2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	60.585.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	85.000.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko					6 Unit Usaha	60.585.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		85.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06		2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang Tersedia dan Tersalurkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			761,40 Ton	98.760.000,00			-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-	-	123.000.000,00	
	3	25	06		2.03	0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					746.47 Ton	37.230.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		98.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06		2.03	0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					3 Pelaku Usaha	61.530.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi 2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						DINAS PERTANIAN														
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
146	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	14.133.808.071,00						-	15.010.000.000,00	
	3	27	01		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.951.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	56.000.000,00	
	3	27	01		2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01		2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	8.940.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		9.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01		2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	11.012.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		12.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01		2.01	0006 Koordinasi dan Penvusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	20.999.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		21.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.450.622.071,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	14.231.000.000,00	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	13.226.622.071,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		14.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	219.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		225.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.590.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	19.000.000,00	
	3	27	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		14.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	4.590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	229.275.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	241.000.000,00	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.105.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		6.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	83.015.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		84.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.345.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		26.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	101.810.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.900.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	112.000.000,00	
3	27	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	32.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		33.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	8.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		79.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3	27	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	119.800.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	120.000.000,00	
3	27	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	119.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		120.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.670.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	231.000.000,00	
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	189.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		190.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	14.280.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		21.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.650.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
147	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			-	307.368.000,00					-		378.100.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	186.313.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	236.900.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	132.306.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		136.600.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	54.007.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		100.300.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	84.990.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	100.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	84.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	12.315.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	13.200.000,00					
	3		27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																13.200.000,00	DINAS PERTANIAN
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	12.315.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		13.200.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-			-	23.750.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	28.000.000,00					
	3		27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																28.000.000,00	DINAS PERTANIAN
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	23.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		28.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
148	3		27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-			-	323.300.000,00					-		338.000.000,00					
	3		27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-			-	305.800.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	317.000.000,00					
	3		27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																3.000.000,00	DINAS PERTANIAN
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																310.000.000,00	DINAS PERTANIAN
							Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				10 Ha	300.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		310.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3		27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																4.000.000,00	DINAS PERTANIAN
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		4.000.000,00	DINAS PERTANIAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional			Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	17.500.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	21.000.000,00					
	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
							Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
							Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
149	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	73.020.000,00					-		75.000.000,00					

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				20 Ha	56.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		68.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				5 Ha	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																		
							Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 laporan	2.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		3.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
151	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			-	538.634.500,00					-		559.600.000,00					
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	538.634.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-	-	559.600.000,00					
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	40.512.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		40.600.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	438.555.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		459.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				55 Orang	59.567.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 3. Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Sosial	-		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN				
						SEKRETARIAT DPRD						47.760.462.595,00						52.567.493.855,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						47.760.462.595,00						52.567.493.855,00						
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						47.760.462.595,00						52.567.493.855,00						
152	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	31.887.257.120,00					-		32.709.389.150,00					
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.897.336,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.610.153,00					
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penvusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	11.462.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.783.750,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6.435.336,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.826.403,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	3.956.127.062,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.133.179.870,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	3.607.853.562,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.723.377.733,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	340.152.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		393.246.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.060.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.056.137,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.060.750,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	331.405.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	262.300.500,00	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	331.405.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		262.300.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	2.794.055.880,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.766.338.424,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	102.131.380,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		107.237.949,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	223.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		222.258.750,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	103.961.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		109.159.050,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	411.721.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		429.070.425,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	600.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		382.839.592,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Unit	40.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-		-	22.058.260.533,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.807.938.860,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	21.377.374.533,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.128.313.760,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	680.886.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		648.125.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-		-	390.971.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	514.715.250,00	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				25 Laporan	252.121.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		369.867.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD													
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	138.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		144.847.500,00	SEKRETARIAT DPRD
153	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-		-	15.873.205.475,00						-	19.858.104.705,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-		-	1.363.779.200,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.726.550.700,00	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	1.147.604.200,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.476.491.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD													
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	216.175.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.059.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-		-	1.450.473.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.707.381.900,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	331.567.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		393.635.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional			Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	378.616.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		432.040.350,00	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	29.255.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.787.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	339.679.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		406.524.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	371.356.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		432.394.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	4.678.351.175,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.275.679.480,00					
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3.381.640.475,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.609.396.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	194.621.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		309.987.930,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	473.609.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		498.642.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				3 Dokumen	134.435.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		193.150.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	494.044.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		664.501.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	1.986.123.400,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.376.750.075,00					
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	968.941.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.118.437.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	19.937.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		28.657.125,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses					Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	997.245.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.229.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	172.302.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		215.022.150,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					2 Laporan	172.302.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		215.022.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	6.222.175.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.556.720.400,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					15 Dokumen	5.251.597.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.377.597.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					1 Laporan	46.266.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.938.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					12 Dokumen	695.312.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		882.735.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					12 Dokumen	229.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		240.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	5					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					8.186.921.331,00								9.270.701.410,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.186.921.331,00								9.270.701.410,00	
	5	01				PERENCANAAN					7.323.990.331,00								7.948.558.060,00	
154	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP BAPPEDA	-			BB Nilai	5.821.933.931,00						-	5.720.329.160,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	-			100 Persen	26.103.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	30.070.600,00	
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah				3 Dokumen	12.126.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		13.489.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		7.658.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	7.707.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		8.922.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan 100 Persen	5.188.094.931,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.793.412.310,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.915.388.931,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.357.112.110,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	147.491.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0.0 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	273.451.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	260.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan																	15.357.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	12.606.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-								
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 Persen	6.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	6.825.000,00						
	5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	6.825.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah								
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			95 Persen	14.150.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	23.415.000,00						
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	23.415.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0.0 Orang	14.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA								
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	301.469.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	508.104.250,00						
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	9.902.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.430.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA								
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	66.570.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.0 Paket	20.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA								
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	82.247.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		103.783.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.470.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		38.713.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	41.860.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		43.953.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	122.462.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		245.182.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	28.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	112.434.000,00				
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	28.560.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		112.434.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	126.267.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	108.633.000,00				
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	126.267.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		108.633.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Secara Rutin	-			95 Persen	130.790.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	137.435.000,00				
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	93.140.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		97.797.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	27.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		29.138.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
155	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan	-			97.90 Persen	618.850.100,00					-		828.158.050,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	-			100 Persen	370.051.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA	-	657.435.450,00	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	31.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		83.061.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	32.266.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		39.679.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	53.190.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		120.797.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				133 Usulan	26.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		38.309.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				7 Dokumen	225.705.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BAPPEDA		375.588.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun	-			95 Persen	162.294.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	80.995.300,00	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	162.294.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		80.995.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase dokumen implementasi data Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang diterapkan	-			95 Persen	86.504.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	89.727.300,00	
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	86.504.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		89.727.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
156	5		01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		97.90 Persen	883.206.300,00						-	1.400.070.850,00					
		5		01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Keselarasan Perencanaan dan Capaian Sasaran Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		97.90 Persen	413.839.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah	-	535.926.950,00					
		5		01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	8.370.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		12.986.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	9.390.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		10.395.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
								Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	8.368.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		9.656.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				4 Laporan	298.097.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		397.989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	9.346.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		13.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	8.366.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		10.611.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	9.390.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		12.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5		01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	62.512.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		68.963.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	230.623.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		404.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	264.586.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		382.481.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	40.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		78.635.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	90.670.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		162.872.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	68.542.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		79.865.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
						BADAN PENDAPATAN DAERAH						9.384.549.833,00							10.399.237.677,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.384.549.833,00							10.399.237.677,00				
	5	02				KEUANGAN						9.384.549.833,00							10.399.237.677,00				
158	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.237.912.233,00						-	7.378.891.527,00				
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.313.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.366.250,00				
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	5.204.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.772.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	4.109.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.593.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.526.642.283,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.312.256.947,00				
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37 Orang/bulan	6.278.252.283,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.058.239.897,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	242.040.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		245.322.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penvyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-		1 Laporan	6.350.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.695.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.500.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	22.000.000,00					
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	11.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		22.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	330.510.950,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	658.962.080,00					
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.961.250,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		6.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	103.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		143.283.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	119.347.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		130.590.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.189.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		241.280.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				35 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		23.625.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	60.413.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		113.933.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.248.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	116.093.250,00					
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	112.248.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		116.093.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	247.698.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	259.213.000,00					
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	203.930.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		214.126.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	32.860.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		34.502.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	10.908.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.584.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
159	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-			-	2.146.637.600,00					-		3.020.346.150,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	2.146.637.600,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.020.346.150,00	
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Dokumen	224.888.100,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		241.983.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.297.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	215.751.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		261.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				13 Unit	273.950.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		344.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	223.382.600,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		407.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	188.975.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		202.256.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				100 Obyek Pajak	49.956.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		102.184.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	20.097.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.596.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	8.316.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		34.283.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	5.421.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.799.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	517.727.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		926.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	9.182.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.350.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					1 Dokumen	191.335.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		205.795.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	32.003.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		180.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	185.651.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		79.102.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							314.852.337.496,00						259.756.190.146,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							314.852.337.496,00						259.756.190.146,00		
	5	02				KEUANGAN							314.852.337.496,00						259.756.190.146,00		
160	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	108.616.443.280,00						-	59.887.713.265,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	50.186.500,00			-	-	-	-	50.186.500,00		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35.137.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.137.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.900.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	8.149.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.149.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	107.177.684.280,00			-	-	-	-	58.369.012.265,00		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	106.506.183.280,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.586.151.265,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	656.280.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		767.640.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.221.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.221.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00		
	5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	92.557.000,00			-	-	-	-	92.557.000,00		
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	62.557.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	62.557.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	812.973.500,00			-	-	-	-	812.974.500,00		
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.019.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.019.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	214.975.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		214.975.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Nasional	Daerah																			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					4 Paket	292.660.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		292.661.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					4 Paket	33.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		33.850.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											4 Dokumen	74.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
											4 Dokumen	74.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		74.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	186.669.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		186.669.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	36.000.000,00			-	-	-	-	36.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					1 Unit	30.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4 Unit	6.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	147.282.000,00			-	-	-	-	147.282.000,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 Laporan	145.482.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		145.482.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	289.760.000,00			-	-	-	-	369.701.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					13 Unit	226.510.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		293.151.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10 Unit	57.810.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		71.110.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit	5.440.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
161	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	205.425.942.316,00					-		199.208.869.981,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.234.928.400,00			-	-	-	-	1.048.934.400,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					1 Dokumen	44.979.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.979.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					1 Dokumen	45.937.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.937.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					1 Dokumen	18.552.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.552.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					37 Dokumen	17.934.900,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		17.934.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					37 Dokumen	42.817.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.817.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					37 Dokumen	42.817.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.817.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	45.386.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		65.888.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				321 Laporan	590.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.662.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	1.062.317.100,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.137.902.955,00	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	97.741.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		102.628.365,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3 Dokumen	75.688.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		79.472.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	888.887.800,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		955.802.190,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	406.798.400,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	910.646.940,00	
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				3 Dokumen	302.084.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		800.697.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
							Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				200 Orang	104.714.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		109.949.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	212.522.960,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	297.076.458,00	
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	14.026.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		45.132.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1007 Orang	113.991.960,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		119.691.558,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				2 Dokumen	59.515.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		93.415.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	24.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		38.837.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
164	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-			-	217.550.500,00						-	160.994.925,00	
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	217.550.500,00						-	160.994.925,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-	-	-	100.758.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	105.795.900,00		
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	100.758.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.795.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-	-	-	-	116.792.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	55.199.025,00		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	116.792.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.199.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
165	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						4.711.411.338,00							4.820.496.174,00		
	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.711.411.338,00					-		4.820.496.174,00		
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.342.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.253.390,00		
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.520.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.779.490,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	6.822.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		7.473.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.141.508.638,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.030.627.584,00		
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	3.949.153.138,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.828.670.584,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	186.906.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		196.251.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.449.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.705.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.900.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	18.795.000,00		
	5	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	17.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.795.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	111.822.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	209.783.700,00	
	5	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	350.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.859.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								-					
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80 Orang	111.472.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		203.924.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	262.648.700,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	330.754.200,00	
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								-					
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 Paket	17.388.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.257.925,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0 Paket	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								-					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			54 Paket	69.747.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		84.475.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			8 Paket	34.775.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.546.985,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								-					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50 Dokumen	38.100.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		40.005.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-					
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	102.637.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		107.768.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	52.600.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	55.230.000,00	
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	52.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	109.590.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	158.052.300,00	
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	84.740.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.977.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		42.982.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					37 Unit	24.850.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		26.092.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					INSPEKTORAT							13.523.844.244,00								0,00	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							13.523.844.244,00								0,00	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							13.523.844.244,00								0,00	
166	6	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			88 Skala	10.680.621.244,00					-	0,00			
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	18.837.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2.909.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	7.140.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	3.150.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	5.637.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	9.860.756.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	0,00		
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					812 Orang/bulan	9.716.658.844,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	141.240.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.857.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			50 Orang	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0,00	
601012.050009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	313.579.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	0,00	
601012.060001Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.300.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
601012.060002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
601012.060004Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				53 Paket	150.579.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
601012.060005Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	20.455.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
601012.060006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	24.840.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
601012.060009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	113.905.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	64.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas S. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	
601012.070005Pengadaan Mebel																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
12	13	14	15	16	17																		
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	64.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	159.529.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0,00				
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	97.539.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				89 Laporan	61.990.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	263.919.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	0,00				
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	7.900.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	246.020.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.999.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	INSPEKTORAT			
167	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	-			100 %	1.914.913.000,00						-	0,00				
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja	-			100 %	1.514.720.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja	-	0,00				
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				82 Laporan	1.073.170.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja		0,00	INSPEKTORAT			
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				10 Laporan	7.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				82 Dokumen	433.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Internal terhadap Satuan Kerja		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP	-			100 %	400.192.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP	-	0,00					
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian																		
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	73.642.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	326.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan APIP		0,00	INSPEKTORAT				
168	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	-			100 %	928.310.000,00						-	0,00					
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			100 %	811.310.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	0,00					
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				82 Rekomendasi	476.860.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				50 Rekomendasi	334.450.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	-			2 Laporan	117.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi	-	0,00					
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				2 perangkat daerah	117.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi		0,00	INSPEKTORAT				
						KECAMATAN PRINGSEWU						5.794.014.946,00							6.151.649.396,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						5.794.014.946,00							6.151.649.396,00					
	7	01				KECAMATAN						5.794.014.946,00							6.151.649.396,00					
169	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.502.385.946,00						-	5.838.979.396,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.600.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.600.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen Dokumen	1.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.200.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.400.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.400.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.059.054.146,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	5.365.329.596,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	4.918.294.146,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.224.569.596,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	140.760.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		140.760.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	229.584.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	239.752.500,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.252.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.252.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.780.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.780.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.224.500,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		69.392.500,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	19.010.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.010.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	116.318.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		116.318.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	114.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	130.650.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	114.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.650.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	47.877.300,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	47.877.300,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	47.877.300,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		47.877.300,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.270.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	51.770.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	48.270.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		48.270.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	0,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.500.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
170	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	26.945.000,00						-	33.160.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	13.766.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	13.816.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	13.766.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.816.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	13.179.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	19.344.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	13.179.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		19.344.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
171	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	246.000.000,00						-	246.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	246.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	246.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	246.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		246.000.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
172	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	10.212.000,00						-	17.160.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.212.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	17.160.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 Orang	10.212.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		17.160.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
173	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.472.000,00						-	16.350.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.472.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	16.350.000,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	8.472.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.350.000,00	KECAMATAN PRINGSEWU
						KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR						703.825.200,00							778.825.200,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						703.825.200,00							778.825.200,00	
	7	01				KECAMATAN						703.825.200,00							778.825.200,00	
174	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	703.825.200,00						-	778.825.200,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	703.825.200,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	778.825.200,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	503.825.200,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Timur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		528.825.200,00	KELURAHAN PRINGSEWU TIMUR
						KELURAHAN PRINGSEWU BARAT						811.894.700,00							886.894.700,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						811.894.700,00							886.894.700,00	
	7	01				KECAMATAN						811.894.700,00							886.894.700,00	
175	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	811.894.700,00						-	886.894.700,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	811.894.700,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	886.894.700,00	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	KELURAHAN PRINGSEWU BARAT
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	611.894.700,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		636.894.700,00	KELURAHAN PRINGSEWU BARAT
						KELURAHAN PRINGSEWU SELATAN						885.735.600,00							960.735.600,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
														Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
176	7				UNSUR KEWILAYAHAN						885.735.600,00											
	7	01			KECAMATAN						885.735.600,00							960.735.600,00				
	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	885.735.600,00					-		960.735.600,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	885.735.600,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	960.735.600,00				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	KELURAHAN PRINGSEWU SELATAN			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	685.735.600,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		710.735.600,00	KELURAHAN PRINGSEWU SELATAN			
					KELURAHAN PRINGSEWU UTARA						742.385.700,00							817.385.700,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						742.385.700,00							817.385.700,00				
7	01				KECAMATAN						742.385.700,00							817.385.700,00				
177	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	742.385.700,00					-		817.385.700,00				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	742.385.700,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	817.385.700,00				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	KELURAHAN PRINGSEWU UTARA			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	542.385.700,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Pringsewu Utara	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		567.385.700,00	KELURAHAN PRINGSEWU UTARA			
					KELURAHAN PAJARESUK						585.328.800,00							660.328.800,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						585.328.800,00							660.328.800,00				
7	01				KECAMATAN						585.328.800,00							660.328.800,00				
178	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	585.328.800,00					-		660.328.800,00				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	585.328.800,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	660.328.800,00				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		250.000.000,00	KELURAHAN PAJARESUK			
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	385.328.800,00	Kab. Pringsewu, Pringsewu, Fajaresuk	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		410.328.800,00	KELURAHAN PAJARESUK			
					KECAMATAN GADINGREJO						2.690.053.675,00							0,00				
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.690.053.675,00							0,00				
7	01				KECAMATAN						2.690.053.675,00							0,00				
179	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.389.243.175,00					-		0,00				
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.115.800,00			-	-	-	-	0,00				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.027.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO			
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.025.750,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO			
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.062.550,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.175.888.025,00			-	-	-	-	0,00				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.020.040.625,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO			
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	154.890.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO			
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
Nasional	Daerah																		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	956.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	111.484.350,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.455.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.800.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	68.369.750,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.440.700,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	15.120.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	10.298.900,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	32.150.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	16.150.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	16.000.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.605.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	44.270.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4.260.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	6.075.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO
380	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	23.095.000,00						-	0,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.640.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	-	-	0,00	
	7	01	02	2.01	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				23 Laporan	12.640.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	-	0,00	KECAMATAN GADINGREJO
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	10.455.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				23 Dokumen	5.227.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
7	01	02	2.04	0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	5.227.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
181	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	5.217.000,00						-	0,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	5.217.000,00			-	-	-	-	0,00			
7	01	03	2.01	0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.217.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
182	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	255.694.500,00						-	0,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	255.694.500,00			-	-	-	-	0,00			
7	01	04	2.01	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	255.694.500,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
183	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	8.794.000,00						-	0,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	8.794.000,00			-	-	-	-	0,00			
7	01	05	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	8.794.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
184	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.010.000,00						-	0,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-			-	8.010.000,00			-	-	-	-	0,00			
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
7	01	06	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				23 Dokumen	8.010.000,00	Kab. Pringsewu, Gading Rejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GADINGREJO		
						KECAMATAN PAGELARAN															0,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN															0,00	
7	01					KECAMATAN															0,00	
185	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.858.897.689,00						-	0,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.485.000,00			-		Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00		
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	1.485.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.669.490.189,00			-		Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00		
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.545.932.189,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN	
7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
																Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7.920.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.425.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
186	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	11.490.000,00			-		-	-	0,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	11.490.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				22 Laporan	11.490.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
187	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	0,00			-		-	-	0,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	0,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				22 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
188	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	213.000.000,00			-		-	-	0,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	213.000.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				22 Laporan	213.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
189	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	0,00			-		-	-	0,00			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00			
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				35 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
190	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	0,00			-		-	-	0,00			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	0,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				22 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN		
						KECAMATAN BANYUMAS															2.601.526.726,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN															2.601.526.726,00	
	7	01				KECAMATAN															2.601.526.726,00	
191	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.794.843.176,00			-		-	-	2.350.798.726,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
Nasional	Daerah																			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.857.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.203.500,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.892.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.353.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.965.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.850.500,00	KECAMATAN BANYUMAS
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.602.158.376,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	2.078.569.726,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.482.479.576,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.882.478.726,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	116.416.800,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	192.375.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	3.262.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.716.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	3.400.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.940.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3.400.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.940.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	90.059.800,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	118.626.500,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.310.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	4.159.500,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5.809.600,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.400.500,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	51.429.900,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.976.500,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6.390.300,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	7.350.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	8.970.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	9.080.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	13.150.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	29.660.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	14.989.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	47.195.000,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Baneunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	8.944.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.195.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6.045.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	22.949.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	25.169.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.409.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.409.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.540.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.760.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.430.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	65.095.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	48.530.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		54.470.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2.060.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.215.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	3.840.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.410.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
192	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.513.000,00					-		10.900.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10.513.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.900.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11 Laporan	10.513.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.900.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
193	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	7.629.000,00					-		16.100.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.629.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.100.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	7.629.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.100.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
194	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	142.437.000,00					-		159.570.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	142.437.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	159.570.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				160 Laporan	142.437.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		159.570.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	7.170.000,00						-	48.268.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	7.170.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	48.268.000,00	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					120 Orang	7.170.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		48.268.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
196	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	5.485.000,00						-	15.890.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	5.485.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	15.890.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					24 Dokumen	5.485.000,00	Kab. Pringsewu, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		15.890.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
						KECAMATAN SUKOHARJO						2.076.784.693,00							2.586.632.700,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.076.784.693,00							2.586.632.700,00	
7	01					KECAMATAN						2.076.784.693,00							2.586.632.700,00	
197	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.833.810.693,00						-	2.330.432.700,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	3.369.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	6.300.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	1.444.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.800.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	1.925.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.530.131.793,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.982.600.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	1.366.484.793,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.780.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					6 Dokumen	162.320.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		200.600.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4 Laporan	1.327.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	144.784.900,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	165.875.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penvediaan Komponen Instalasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.787.500,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						94.300.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						17.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						13.875.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.200.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	70.310.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	60.000.000,00		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						60.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.170.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	38.272.700,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						13.272.700,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						25.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.045.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	77.385.000,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						54.641.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						2.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						20.244.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
198	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	9.600.000,00						-	11.200.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
Nasional	Daerah																			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	9.600.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.200.000,00	
7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-			1 Laporan	9.600.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	11.200.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
199	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	7.716.000,00					-	-	12.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.716.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	12.000.000,00	
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-			2 Laporan	7.716.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
200	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	180.000.000,00					-	-	180.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	180.000.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	180.000.000,00	
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-			2 Laporan	180.000.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
201	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	41.134.000,00					-	-	47.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	41.134.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	47.500.000,00	
7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																				
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	-			50 Orang	41.134.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	47.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
202	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	4.524.000,00					-	-	5.500.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	4.524.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.500.000,00	
7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-			2 Dokumen	4.524.000,00	Kab. Pringsewu, Sukoharjo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN SUKOHARJO
						KECAMATAN ADILUWIH						2.365.167.481,00							2.483.425.855,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						207.687.000,00							218.071.350,00	
	7	01				KECAMATAN						207.687.000,00							218.071.350,00	
203	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	10.166.000,00					-	-	10.674.300,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.166.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	10.674.300,00	
7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelavanoan kepada Masvarakat di Wilayah Kecamatan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	10.166.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		10.674.300,00	KECAMATAN ADILUWIH
204	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-	11.604.000,00					-		12.184.200,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	11.604.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	12.184.200,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	11.604.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.184.200,00	KECAMATAN ADILUWIH
205	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		-	165.000.000,00					-		173.250.000,00	
	7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-		-	165.000.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	173.250.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	165.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		173.250.000,00	KECAMATAN ADILUWIH
206	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-		-	9.012.500,00					-		9.463.125,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-		-	9.012.500,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	9.463.125,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				21 Orang	9.012.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		9.463.125,00	KECAMATAN ADILUWIH
207	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-		-	11.904.500,00					-		12.499.725,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-		-	11.904.500,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	12.499.725,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				13 Dokumen	11.904.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		12.499.725,00	KECAMATAN ADILUWIH
	X						NON URUSAN					2.157.480.481,00							2.265.354.505,00	
	X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					2.157.480.481,00							2.265.354.505,00	
208	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	2.157.480.481,00					-		2.265.354.505,00	
	X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	3.610.500,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	3.791.025,00	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.848.000,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.940.400,00	KECAMATAN ADILUWIH
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1.762.500,00	Kab. Pringsewu, Adiluwih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.850.625,00	KE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.713.867.481,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.799.560.855,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	180.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		189.525.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1.559.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.636.950,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	170.814.200,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	184.237.410,00						
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.885.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.029.775,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.965.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	104.525.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		109.604.250,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.363.700,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.081.885,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		16.380.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				241 Laporan	24.940.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		26.176.500,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	11.750.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	7.455.000,00						
	X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	8.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.675.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3.750.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.780.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.999.300,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	15.749.265,00						
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	14.999.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.749.265,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	60.380.000,00			-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	63.399.000,00						
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	3.700.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.885.000,00	KECAMATAN ADILUWIH					
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	44.770.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		47.008.500,00	KECAMATAN ADILUWIH					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
															Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6.410.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		6.730.500,00	KECAMATAN ADILUWIH			
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	penguatan SDM yang unggul dan inovatif 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		5.775.000,00	KECAMATAN ADILUWIH			
						KECAMATAN PAGELARAN UTARA						1.646.663.440,00							2.234.697.432,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.646.663.440,00								2.234.697.432,00			
	7	01				KECAMATAN						1.646.663.440,00									2.234.697.432,00		
209	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.463.983.440,00						-	1.984.664.432,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	893.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.791.057,00				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	410.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.940.400,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	483.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.850.657,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.255.088.240,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.626.167.313,00				
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					154 Orang/bulan	1.136.445.240,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.391.306.148,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					7 Dokumen	117.840.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		234.861.165,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan	803.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	123.416.700,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	209.694.000,00				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.872.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.916.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA			
	7	01	01	2.06	0002	Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	44.770.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.311.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	3.900.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.900.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3.000.500,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.101.062,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
210	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	13.025.000,00					-	-	19.404.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.025.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	19.404.000,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					10 Laporan	13.025.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		19.404.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	15.300.000,00					-	-	16.300.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.300.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.300.000,00		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					10 Laporan	15.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.300.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
212	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	147.000.000,00					-	-	204.039.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	147.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	204.039.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10 Laporan	147.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		204.039.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA	
213	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	4.155.000,00					-	-	5.290.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	4.155.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.290.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	4.155.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.290.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
214	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	3.200.000,00					-	-	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3.200.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	5.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Pringsewu, Pagelaran Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan mendukung fungsi sosial dan ekonomi 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAGELARAN UTARA
						KECAMATAN AMBARAWA						1.954.928.506,00							2.006.928.506,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						250.810.000,00							266.810.000,00	
	7	01				KECAMATAN						250.810.000,00							266.810.000,00	
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	12.040.000,00					-	-	16.040.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	12.040.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	16.040.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	12.040.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.040.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	6.480.000,00					-	-	10.480.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.480.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.480.000,00	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	6.480.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.480.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
217	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	181.340.000,00					-	-	185.340.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	181.340.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	185.340.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	177.600.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		179.600.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	3.740.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.740.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
218	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	42.220.000,00					-	-	44.220.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	42.220.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	44.220.000,00	
7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	42.220.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.220.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
219	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	8.730.000,00						-	10.730.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	8.730.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	10.730.000,00	
7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																				
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	8.730.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.730.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	X					NON URUSAN						1.704.118.506,00							1.740.118.506,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.704.118.506,00							1.740.118.506,00	
220	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.704.118.506,00						-	1.740.118.506,00	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.426.863.506,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.430.863.506,00	
X XX 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.289.823.506,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.291.823.506,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	137.040.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		139.040.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	161.915.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	179.875.000,00	
X XX 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.390.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		9.350.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	16.290.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		20.290.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	78.703.500,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.703.500,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.121.500,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		21.121.500,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	14.160.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.160.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
X XX 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	26.250.000,00	Kab. Pringsewu, Ambarawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.250.000,00	KECAMATAN AMBARAWA
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	26.800.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	28.550.000,00	
X XX 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.226.250,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.260.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.951.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		61.700.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	37.201.600,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.123.200,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		67.657.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		24.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11.300.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		47.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	31.770.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	80.400.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan Laporan	15.800.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		36.200.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	15.970.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.200.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.570.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	109.340.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	41.070.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		82.140.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	13.500.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		27.200.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
222	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	24.540.000,00						-	35.150.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	24.540.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	35.150.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	24.540.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		35.150.000,00	KECAMATAN PARDASUKA
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	7.699.000,00						-	33.564.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	7.699.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	33.564.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Pekon Lembaga Kemasyarakatan	7.699.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.564.000,00	KECAMATAN PARDASUKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
224	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	222.000.000,00					-		444.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	222.000.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	444.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 bulan Laporan	222.000.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		444.000.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
225	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	22.125.000,00					-		44.250.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	22.125.000,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	44.250.000,00		
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	22.125.000,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		44.250.000,00	KECAMATAN PARDASUKA	
226	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	3.699.900,00					-		17.899.800,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3.699.900,00			-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	17.899.800,00		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Pekon Dokumen	3.699.900,00	Kab. Pringsewu, Pardasuka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.899.800,00	KECAMATAN PARDASUKA	
						Kesatuan Bangsa Dan Politik						7.921.122.358,00							9.890.290.763,00		
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						7.921.122.358,00							9.890.290.763,00		
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						7.921.122.358,00							9.890.290.763,00		
227	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.833.690.858,00					-		3.918.026.043,00		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	38.811.600,00			-		-	-	54.571.110,00		
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	17.382.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.996.250,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0	9.783.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.787.430,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	11.646.300,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.787.430,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.249.756.858,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	3.208.057.114,00		
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0				17/14 0	3.031.956.858,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.968.477.114,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	217.800.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		239.580.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	14.300.000,00		
	8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		14.300.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	30.800.000,00		
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	16.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.800.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	226.131.400,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	346.958.114,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	10.955.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.050.500,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	102.336.400,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		124.365.670,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	27.270.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		29.997.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	27.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		30.129.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	58.180.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.415.944,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	102.550.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	79.539.110,00	
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3.500.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		39.635.610,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	45.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		12.743.500,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		10.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.050.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		17.160.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.401.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	38.941.100,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	35.401.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		38.941.100,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	152.040.000,00			-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	144.859.495,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	86.540.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		95.194.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	49.950.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		33.363.495,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	15.550.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		16.302.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
228	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	549.099.000,00			-		-	-	1.501.312.960,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	549.099.000,00			-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	1.501.312.960,00	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				4 Dokumen	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		109.999.890,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				360 Orang	1.560.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		455.500.430,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				36 Orang	537.539.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		590.889.640,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				36 Orang	10.000.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		344.923.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
229	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	900.071.500,00			-		-		1.034.575.630,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	900.071.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	1.034.575.630,00	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				200 Orang	900.071.500,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		1.034.575.630,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
230	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-			-	2.050.301.000,00			-		-		2.300.406.350,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	2.050.301.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	2.300.406.350,00	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				160 Orang	2.050.301.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		2.300.406.350,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
231	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-			-	27.360.000,00			-		-		515.556.030,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	27.360.000,00			-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	515.556.030,00	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	0,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		60.055.600,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				350 Orang	27.360.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		455.500.430,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
232	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-			-	560.600.000,00					-	-	620.413.750,00		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	560.600.000,00			-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	620.413.750,00		
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				41 Orang	10.527.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		13.322.100,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	323.463.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	-		389.215.420,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	226.610.000,00	Kab. Pringsewu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguatan Daya Saing Daerah	-		217.876.230,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
											J U M L A H	1.395.554.542.632,00								1.347.323.796.329,00	